INDONESIA FOR SALE

Dandhy bukan wartawan tua yang sedang bernostalgia dengan kisah yang menggugah publik. Atau sok intelek menjahit opini dari kumpulan berita dan quotation book. Berangkat dari pengalaman pribadi, ia bercerita sekaligus mengajak berpikir agar masyarakat memahami realitas yang sedang berjalan, lalu punya alasan untuk bersikap dan bertindak. Seperti kata mendiang WS Rendra: "Kehidupan ini memang tidak beraturan, tapi kita harus tahu beratur."

— Hadi Rahman

DANDHY DWI LAKSONO

WATCH
DOC

INDONESIA FOR SALE

DANDHY DWI LAKSONO
EDITOR: HADI RAHMAN

pedati

Indonesia for Sale, Dandhy Dwi Laksono; editor: Hadi Rahman;
edisi ke-1. Surabaya: Penerbit Pedati 2009.

xvi + 316+; 14,5 x 21 cm
ISBN 979-9682-09-6

INDONESIA FOR SALE

Dandhy Dwi Laksono
Editor: Hadi Rahman

Copyright@2009

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Pedati

Edisi pertama: Oktober 2009
Desain & Layout: Mas Abadi
Ilustrasi: Imam Yunianto

Penerbit Pedati
Jalan Gayungan VII No. 20 Surabaya
Telp. 031-8275052 email: penerbitpedati@hotmail.com

untuk Istomo Adi (alm.),
Dini Arijati, dan Didhi Istunugroho

PENGANTAR PENERBIT

Nasionalisme dan kesejahteraan adalah dua picing mata yang saling berhubungan. Ketika salah satu terpejam, terkadang yang lain berkedip atau membelalak tajam. Kadang pula keduanya serempak berkedip atau terpejam. Dalam konteks Indonesia, keduanya lebih banyak berbenturan. Dalam pola kepemimpinan enam presiden di negeri ini, keseimbangan antara nasionalisme dan kesejahteraan mengalami pasang surut.

Di era Bung Karno, nasionalisme menjadi harga mati yang harus dijunjung tinggi, meski harus menanggung banyak korban, termasuk kesejahteraan. Era Soeharto menempatkan kesejahteraan sebagai prioritas pembangunan yang membabi buta. Makna nasionalisme terdistorsi sebagai simbol patriotisme semu demi melanggengkan tiran.

Pasca ambruknya rezim Orde Baru, komposisi keduanya malah tidak jelas. Gus Dur coba mendamaikan keduanya agar berimbang. Tapi, ia terlalu *nyleneh*. Nasionalisme dan kesejahteraan menjadi nampak personal, kalau tak disebut kontroversial, sehingga membingungkan banyak orang. Ia menjadi pemimpin yang terasing hingga intrik politik "memaksanya" turun di tengah jalan.

Megawati lain lagi. Berbekal semangat juang sang ayah sebagai nasionalis sejati, ia berupaya menghidupkan idealisme dan pikiran-pikiran besar Bung Karno. Melalui partai berlabel *wong cilik*, pekik nasionalisme digaungkan dengan penuh khidmat dan gegap gempita. Hasilnya? Ternyata nasionalisme ala Mega hanya terbatas pada teriak "merdeka!". Selebihnya, semasa ia berkuasa, banyak sumber kekayaan dan kebanggaan nasional justru dilego dan berpindah ke negeri orang. Semangat menyejahterakan *wong cilik* pun ibarat pepesan kosong. *Wong cilik* tetap kerdil secara ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Bagaimana dengan SBY? Sepanjang lima tahun pemerintahannya, Indonesia sebenarnya tak banyak berubah. Nasionalisme dan kesejahteraan masih berada dalam wilayah yang gamang. Bedanya, ia lihai memoles citra. Menarik hati 61,9 persen rakyat untuk bilang, lanjutkan! Sehingga mereka lupa hal-hal yang belum beres dalam nasionalisme dan kesejahteraan.

Nasionalisme dan kesejahteraan, atau tegasnya ekonomi, adalah senyawa dalam membangun sebuah bangsa sejati. Orang tak mungkin dipaksa mengerek bendera dengan perut lapar. Sebaliknya, sungguh nista menjual bendera bangsanya demi urusan perut belaka. Nasionalisme tak boleh dijadikan dalil sahih untuk menanggalkan semangat kebangsaan, apalagi sampai mengkomersialkannya. Amatlah tidak elok, jika demi perut kenyang, tanpa sadar kita melilitkan tali gantungan kepada anak cucu sendiri.

Sejarah telah mencatat bahwa kesejahteraan yang diciptakan Orde Baru sejatinya adalah semu. Kesejahteraan yang kita rasakan kala itu ternyata menjadi semacam opium yang membius kesadaran kita: saat tertidur kekenyangan, tanah ladang kita tiba-tiba telah tergadaikan. Saat terbuai mimpi indah, tak dinyana sumber-sumber penghidupan kita menjelma jadi surat utang. Saat kita terlelap mesra, tanah air yang dulu direbut kakek-nenek kita dengan darah tiba-tiba ditumbuhi tanaman belukar berwujud dolar.

Buku ini membuka mata dan pikiran kita bahwa nasionalisme dan kesejahteraan masih jadi persoalan serius bagi negeri yang merdeka sejak enam dasawarsa silam dan punya kekayaan alam melimpah. Dengan ketajaman analisis "jalanan" disertai kedalaman data, penulis berupaya menyadarkan kita betapa banyak warisan kekayaan alam dan aset-aset yang menjadi kebanggaan bangsa telah dijual dengan dalih stabilitas ekonomi negara.

Melalui seranai obrolan imajiner yang cerdas, kocak dan sedikit jahil, buku ini mencoba menyisir berbagai persoalan ekonomi yang paling riil dirasakan masyarakat kecil. Bermodal pengalaman dan reputasi sebagai wartawan andal, penulis mampu mendedah secara kritis beberapa mazhab ekonomi pemerintah melalui kalimat yang "enak dibaca dan perlu"—meminjam istilah *Tempo*.

Alhasil, ***Indonesia for Sale*** merupakan potret dekil dari wajah perekonomian dan kebangsaan Indonesia dari sudut yang paling tajam dan kasat mata.

Selamat membaca!

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-
SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

CATATAN EDITOR

INDONESIA FOR SALE

JAKARTA macet! Siapa pun tahu. Tapi, sejak masa populernya lagu Si Komo hingga *Jakarte* dipimpin "Si Kumis" yang konon ahli tata kota, soal kemacetan itu tak pernah tuntas. Bahkan belakangan, para pengguna jalan di Jakarta kian mudah mengumpat. Pangkal masalahnya apa lagi kalau bukan macet yang terasa kian mampet.

Setiap hari ribuan kendaraan baru keluar dari *showroom*. Sebuah lembaga nirlaba mencatat, setiap hari rata-rata Jakarta mengalami pertambahan 236 unit mobil dan 891 unit motor. Sementara ruas jalan di Jabodetabek relatif tetap. Itu pun tambal-sulam karena air hujan kerap menggerogoti badan jalan.

Angka kendaraan yang menyesaki Jakarta diperkirakan terus bertambah. Gejala yang sama agaknya juga mewabah di kota-kota besar lainnya. Tapi, siapa peduli? *Toh*, sah-sah saja orang beli mobil atau motor. Bahkan, demi menggairahkan industri otomotif atau menambah potensi pajak atawa meningkatkan konsumsi masyarakat, orang dirayu-rayu untuk beli kendaraan pribadi. Kalau bisa, belinya

pakai kredit supaya industri jasa keuangan dan asuransi makin *moncer*. Sehingga muncullah lelucon begini: Anda betul orang Indonesia jika barang Anda adalah hasil kreditan.

Seiring itu, berbagai transaksi derivatif digenjot. Angka perputaran modal pun naik. Negara dinilai mengalami pertumbuhan ekonomi karena bisnis-bisnis bergeliat—meski yang melaju bukan sektor riil. Sebagian orang lalu bersorak karena bisa menikmati belanja di mal-mal mewah—yang mungkin dibangun dengan menggusur banyak pedagang kecil. Sebagian juga takjub dengan gedung-gedung megah berlabel internasional yang berdiri di atas bekas bangunan bersejarah.

Kaum muda jadi kian *matre* dan kehilangan jati diri. Sebab, aneka hiburan lebih mudah dinikmati dan diakses ketimbang ilmu pengetahuan. Banyak remaja produktif yang waktunya habis di depan teve karena tak mampu melanjutkan pendidikan ataupun memasuki lapangan kerja. Atau, tangannya lebih terampil memencet-memencet tombol ponsel dan stik *playstation* ketimbang berkreasi seni dan ilmiah. Kalaupun ada kaum muda yang mengukir prestasi, mereka muncul sekejap lalu tenggelam karena kurang diperhatikan.

Semua lantas melengkapi lunturnya gotong-royong, tenggang-rasa, dan sikap sosial lain yang (dulu) pernah jadi *trade mark* bangsa bernama Indonesia. Menyempurnakan dominasi sinetron di panggung seni, seolah itulah satu-satunya tafsir budaya bangsa ini. Ketika sejumlah budaya asli dirogol oleh negeri tetangga, barulah ingatan sebagai sang empunya karsa terhenyak. Tapi kemudian tak gagah menyalak karena telanjur lupa (peduli) pada sejarah.

Rasa memiliki Tanah Air baru membuncah tatkala aset negara telanjur berpindah tangan atau diklaim pihak lain. Garuda baru terasa lepas dari dada ketika tim-tim olahraga kita *keok* di mana-

mana. Lalu kebhinnekaan kita serasa merontok seiring gelegar bom para teroris.

Sepanjang punya duit dan bisa belanja, kita biasanya lupa pada hal-hal wajib bagi warga negara. Dan para pengelola negara lupa cara meladeni rakyat karena repot dengan urusan gali lubang tutup lubang APBN. Sementara para rentenir berkedok lembaga dunia sukses mempengaruhi pola perekonomian negeri ini. Tak pelak, di era globalisasi dewasa ini, 230 juta penduduk Indonesia hanya jadi sekumpulan pasar. Sekelompok konsumen belaka. Bukan sinergi orang-orang produktif yang terlatih mengembangkan nilai tambah, gemar berproduksi, dan peduli warisan nenek moyang. Padahal orang-orang yang terjajah pasar biasanya lebih mudah rontok ketimbang pribadi yang mandiri.

Indonesia dikenal punya sumber daya alam melimpah. *Gemah ripah loh jinawi*, kata kakek-nenek di masa lampau. Dalam perbincangan para pebisnis, negeri ini punya potensi besar. Tapi, sebagian investor cuma tersenyum simpul karena harta terbesar Indonesia hanyalah potensinya bukan faktor produktifnya. Giliran ada pihak asing yang bisa mengakali potensi itu menjadi hal yang betul-betul produktif, rakyat Indonesia cuma kebagian sepahnya.

Semua ini akibat kebijakan pemerintah yang cenderung neolib. Sebagian kebijakan kelihatan populis tapi sesungguhnya bikin miris. Begitu, kata sejumlah kalangan yang mengaku peduli pada kemaslahatan bangsa. Sayangnya, suara-suara yang mengkritik kebijakan pro neoliberal itu tenggelam di antara hiruk-pikuk politik. Subtansi yang mereka kemukakan kalah pamor dengan sandiwara politik para tokoh yang kata kawula muda, "*Yah*, dia lagi dia lagi. *Capek deh!*"

Media massa memang sempat mencuatkan kata "neoliberal" ke ruang-ruang publik. Namun, tebaran kata bertanda kutip itu di

segala jenis media apa pun ternyata belum cukup dimengerti masyarakat kebanyakan. *Wong cilik* mendengar gaungnya, tapi tidak paham maksudnya. Para karyawan hingga mahasiswa pun tahu tapi tidak *ngeh*. Bahkan, ekonom sekalipun ada yang salah kaprah memaknai kata itu. Perdebatan tentang sistem ekonomi Indonesia lenyap sebelum mencapai klimaks.

Pemilu 2009, saat wacana neoliberal menggumpal, telah berlalu—dengan kesan amburadul. Tapi, orang-orang yang sudah terpilih sebagai wakil rakyat ataupun pemimpin negara, sekarang sedang berjalan di atas pusaran neoliberalisme. Seperti kita yang diam-diam juga mengamini neoliberalis. Sama halnya para tokoh agama yang luput mencerahkan umat dengan tinjauan halal-haramnya neolib.

Eit! Tunggu dulu. Salahkah neolib?

Itulah yang coba direnungkan penulis buku ini ketika menyusuri Jakarta, dimulai dari naik taksi. Dandhy Dwi Laksono, seorang wartawan muda tapi penuh pengalaman, mencoba mengurai benang kusut neoliberalisme di antara makna dan dampaknya. Daripada mengumpat kemacetan, ia memilih bersikap produktif. Meneropong jalan agar yakin apakah kita semua berada di jalur yang benar. Melihat apakah negeri ini dikelola dengan tepat. Memastikan apakah rakyat diurus tanpa dusta. Memperkirakan, negeri ini akan jaya ataukah malah celaka.

Bukan sok apa jika Dandhy bersikap demikian. Salah satu tugas jurnalis adalah memang menjadi *watchdog* terhadap penyelenggaraan negara. Ketika berada di balik ruang redaksi, ia terbatasi banyak hal. Sehingga tugas suci itu kadang terkalahkan oleh nafsu bisnis dan ambisi politik pemilik media. Karena itu, ia keluar dari belenggu rutinitas, dan berpikir sebagai orang merdeka. Di situlah ia berkontemplasi lalu sadar bahwa selama ini hiperealitas sungguh merajalela.

Hiperealitas adalah istilah yang digunakan sosiolog asal Prancis, Jean Baudrillard, untuk menjelaskan keadaan di mana realitas runtuh oleh rekayasa pencitraan, simulasi, dan halusinasi. Hasil rekayasa itu lalu dianggap lebih nyata dari realitas sebenarnya. Survei politik dijadikan panduan untuk mencontreng. Suap politik yang diambilkan dari duit utang dimaknai bantuan atau amal jariyah. Kegagalan sebuah rezim tertutupi oleh strategi kekuasaan dan pencitraan yang kuat. Hal majasi lebih dipercaya ketimbang ihwal hakiki.

Kontemplasi seringkali menghasilkan sesuatu yang dahsyat bagi pelakunya. Yakni, keberanian untuk bersikap apa adanya—yang bagi orang lain mungkin dianggap naif. Kepiawaian Dandhy menautkan serangkaian pemikiran dan kebijakan ekonomi dengan realitas yang dialami para "korban"nya adalah sesuatu yang dahsyat, mengingat dia bukanlah seorang ekonom. Keberanian sosok muda ini menelanjangi praktik jurnalisme dan media, entitas yang membesarkannya, juga terbilang edan. Para penganut sufisme mungkin akan menyebutnya "majdub" di taraf ini.

Dandhy bukan wartawan tua yang sedang bernostalgia dengan kisah yang menggugah publik. Atau sok intelek menjahit opini dari kumpulan berita dan *quotation book*. Berangkat dari pengalaman pribadi, ia bercerita sekaligus mengajak berpikir agar masyarakat memahami realitas yang sedang berjalan, lalu punya alasan untuk bersikap dan bertindak. Seperti kata mendiang WS Rendra: "Kehidupan ini memang tidak beraturan, tapi kita harus tahu bentuk."

Di sini ada ajakan bagi pembaca agar sepakat untuk bilang "tidak!" jika… ***Indonesia for Sale.***

***

DAFTAR ISI

Prolog
Satu Putaran — 1

Bagian Pertama
Orang Awam Menggugat

Rebutan Buron dengan Polisi — **20**
Mengapa BBM Naik Turun? — **31**
Barang Indonesia, Harga Luar Negeri — **41**
SPBU Asing — **52**
Bensin Murah Biang Pemborosan? — **57**
BLT = Bantuan Langsung Tandas — **63**
Bangsa Konsumen Belaka — **75**

Bagian Kedua
Komersialisasi sampai Mati

Priiit…Bayar! (Ini Bukan Polantas) — **86**
Air Swasta — **92**
Priiit…(Lagi) — **99**
Bayar atau Ngompol — **102**
Laut Milik Siapa? — **105**

Bagian Ketiga
Neoliberal yang Saya Kenal

Ambulan Zig-zag — **120**
Pak Boed yang Saya Kenal — **127**
Neoliberal yang Saya Kenal — **136**
Tak Berduit, Silakan Minggir! — **166**
Resep-resep Neolib — **176**

Bagian Keempat
Neoliberalisme Kegemaran Republik Indonesia

Elegi di Taman Monas — **188**
ATM Diisi, Lalu Dijual — **196**
Anak Miskin Dilarang Kuliah — **203**
Liberalnya Penanaman Modal — **217**
Adu Basket — **223**
Paradoks Neoliberal — **232**
Utang Luar Negeri itu — **238**
Besar Pasak daripada Tiang — **242**

Bagian Kelima
Neoliberalisme di Media

Pengamen *cum* Pemain Valas — **254**
Main Politik di Layar TV — **260**
Iklan Dicekal — **271**
Outsorcing bin Calo Buruh — **285**

Epilog
Aku Wartawan, Karena itu Neolib — 293

Penulis — 313
Editor — 315

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

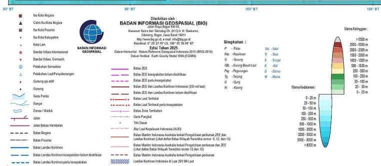

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Peta ini menggambarkan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di darat dan laut, baik berupa laut teritorial (laut wilayah), perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta hak berdaulat Indonesia di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen, yang penetapannya dilakukan atas dasar Peraturan Perundang-Undangan dan instrumen hukum lainnya tentang batas wilayah Indonesia, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Peta NKRI edisi 2025 ini menggunakan batas Negara yang telah disepakati tahun 2025 dan telah dilengkapi oleh beberapa pembaruan fitur di dalam wilayah NKRI.

KONTRIBUTOR

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut.

SUMBER DATA

1. Keputusan Kepala BIG Nomor 124 Tahun 2025 tentang Penetapan Data Geospasial Dasar dan Peta Rupabumi Indonesia Edisi Tahun 2025.
2. Keputusan Kepala BIG Nomor 235 Tahun 2025 tentang Penetapan Unsur Garis Pantai Untuk Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Edisi Tahun 2025.
3. Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) versi 2.0 dan ETOPO v1 versi 2.0.
4. Garis batas satuan wilayah administrasi daerah otonom mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
5. Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
6. Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) skala 1:300.000 dan 1:100.000, DISHIDROS TNI-AL, 2012.
7. Peta Zona Ekonomi Eksklusif Wilayah Kepulauan Indonesia skala 1: 1.000.000, DISHIDROS TNI-AL, 2015.
8. Peta Garis Pangkal Wilayah Negara Kepulauan Indonesia skala 1: 200.000, DISHIDROS TNI-AL, 2015.
9. Gazeter Republik Indonesia (GRI) tahun 2024.
   Catatan: Untuk penamaan pulau-pulau terluar Indonesia disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Beberapa Undang-Undang terkait Pembentukan Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) yang berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Tailan, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor-Leste.

I. WILAYAH DARAT NKRI

Wilayah darat NKRI terdiri atas daratan pada semua pulau yang berada di sebelah dalam garis pangkal Kepulauan Indonesia. Khusus di P. Kalimantan, P. Sebatik, P. Papua, dan P. Timor berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Batas negara dengan Malaysia di P. Kalimantan dan Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Hindia Belanda (Konvensi 1891, Traktat 1915, dan 1928); MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Nomor 32 dan Nomor 34 Tahun 2019 untuk area II (B-C) B2000 - B 2500 dan area III (C-D) C500 - C600; MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Nomor 33 Tahun 2025 untuk Area II (B-C) B2700 - B3100 dan Nomor 34 Tahun 2025 untuk area West Coast of Pulau Sebatik, New West Pillar - AA2.
2. Batas negara dengan Papua Nugini di P. Papua mengacu kepada Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973. Yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1973. Diperkuat dengan Deklarasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Hasil Pengukuran 52 Meridian Monumen (MMs) menggunakan World Geodetic System (WGS) 1984, tahun 2019.
3. Batas negara dengan Timor-Leste di P. Timor mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada Tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914, Persetujuan Sementara antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Perbatasan Darat pada tanggal 8 April 2005, serta Adendum No.1 Persetujuan Sementara antara Indonesia dan Timor-Leste pada tanggal 21 Juni 2013.

II. WILAYAH DAN ZONA PERAIRAN NKRI

Indonesia memiliki kedaulatan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial serta memiliki hak berdaulat di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Dasar Hukum terkait zona perairan NKRI adalah:

Umum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convension on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
7. Keputusan Presiden No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presideum Kabinet Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967, yang memutuskan bahwa semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Khusus

A. Batas Laut Wilayah (Teritorial)

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia - Papua New Guinea.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di bagian Timur Selat Singapura.

B. Batas Wilayah Yurisdiksi

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen tanggal 26 Juni 2003.
2. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-garis Landas Kontinen antara Kedua Negara.
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.
4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen Bagian Utara Selat Malaka.
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.
6. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura.
7. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara.
8. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Mengenai Operasi Nelayan Tradisional Indonesia di Area Memancing Ekslusif Australia dan Landas Kontinen Tanggal 7 November 1974.
9. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman.
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudera Hindia.
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman.
12. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Hasil Perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah yang Bersangkutan;
13. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Mengenai Implementasi Ketentuan Pengawasan Perikanan dan Pengaturan Pelaksanaan tanggal 29 Oktober 1981.
14. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas Laut Tertentu ditandatangani tanggal 14 Maret 1997.
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014.
16. Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in Regard to the Submission made by Indonesia in respect of the area North West of Sumatra on 16 June 2008 (Rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen tentang submisi yang disampaikan oleh Indonesia untuk area sebelah Barat Laut Sumatera tertanggal 16 Juni 2008). Rekomendasi tersebut disahkan pada tanggal 28 Maret 2011. Atas dasar hal tersebut luas wilayah yurisdiksi landas kontinen Indonesia bertambah seluas 4.209 km2.

PROLOG

Satu Putaran

Aku pernah *iseng* memajang bendera kecil Partai Komunis China (PKC) di meja, persis hari pertama masuk kerja di sebuah kantor media. Mulanya aman-aman saja. Tapi beberapa hari kemudian ada yang menurunkan, meski hanya dibiarkan tergeletak di meja. Kuanggap itu peringatan belaka. Namun karena kupasang lagi, tiga hari setelahnya bendera itu benar-benar hilang.

Beberapa waktu kemudian, yang aku pajang adalah bendera Amerika: *The Stars and Stripes*. Tak tanggung-tanggung, ukuran upacara! Hasilnya sungguh luar biasa. Tak ada yang (berani) menyentuh. Begitu juga dengan bendera Inggris: *Union Jack*.

Hanya, ada yang janggal: tiada perasaan khawatir dituding sebagai agen negara kapitalis yang menyusup ke kantor media saat memasang bendera kedua negara itu. Beda rasa *deg-degan*-nya ketika memajang bendera PKC. Saat itu ada sejumput was-was dianggap hantu komunis yang gemar melakukan agitasi lewat media televisi.

Lain kesempatan aku pasang tiga bendera sekaligus: Iran, Israel, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yang hilang hanya si Bintang Daud. Kali ini tanpa peringatan pencopotan lebih dulu. Sementara bendera Iran dan PBB duduk manis di tempatnya. Barangkali ada penggemar fanatik Israel.

Waktu rekan kerjaku, Putra Nababan, pergi ke Vietnam, aku *nitip* selembar bendera ukuran upacara: merah menyala dengan bintang kuning emas segi lima di bagian tengah. Dia bahkan memberi bonus poster kain bergambar Ho Chi Minh (1890-1969), sang proklamator kemerdekaan yang juga tokoh komunis. Tapi Putra bukan komunis. Dia termasuk jurnalis bermazhab "NKRI harga mati".

Dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga, oleh-oleh itu langsung aku pajang. Mau tahu siapa yang mempertanyakan? Rombongan Kapolres Jakarta Barat yang baru, yang kebetulan sedang jalan-jalan ke redaksi untuk berkenalan. Salah seorang ajudannya bertanya, ini ruangan siapa. Setelah diberi tahu, aku pun dipanggil dan ditanya itu bendera apa. Hebat juga, pikirku, ada tamu datang-datang "menginterogasi" tuan rumah.

"Itu bendera Vietnam. Ada masalah, Pak?"

Wajahnya bingung. Tak ada Tap MPRS yang melarang warga negara Indonesia memajang bendera Vietnam. Dia tak berkata-kata lagi, dan hanya bilang, "*Nggak papa*, tadi Pak Kapolres *nanya*."

Pulang liputan dari Pakistan, aku pajang benderanya yang seukuran upacara itu: hijau putih dengan lambang bintang bulan. Tak ada pertanyaan, tak ada yang menurunkan, apalagi *mengutil*-nya. Pokoknya aman. Pakistan saat itu dipimpin Pervez Musharaf yang dikenal pro-Amerika. Dia mendukung "perang melawan terorisme" dan meminta imbalan di antaranya berupa penjadwalan pembayaran utang luar negeri senilai 12,5 miliar

dolar atau sekitar Rp 112 triliun!

Kebiasaan membongkar pasang bendera itu berlanjut sampai tiga tahun karena kecanduan adrenalinnya. Juga karena kadang mendatangkan "hiburan" tersendiri, seperti pengalaman berikut ini:

Bekas tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Darwis Jeunib, suatu ketika memberi suvenir sehelai bendera Partai Aceh, partai lokal yang diakui Undang-Undang dan memenangi Pemilu 2009. Warnanya merah, bergaris hitam putih, tapi tanpa lambang bintang bulan. Lambang itu sudah berganti tulisan: "ACEH".

Benderanya indah karena semua ornamennya dibordir. Darwis yang melepasnya sendiri dari pataka di belakang meja kerjanya di Bireuen pada awal tahun 2008. Karena tempatnya semula di ruang kerja, maka aku pun memasangnya di ruang kerja.

Beberapa pekan kemudian, "bos besar" (bahkan terlalu besar untuk *ngurusi* sehelai bendera, sementara obligasinya *default* alias gagal bayar) menelepon bawahannya yang juga atasanku. Dia bertanya apa benar di ruanganku dipasang bendera GAM.

Begitulah orang hidup di alam simbol. Subkultur di luar arus utama seperti *komunisme* atau *separatisme* adalah ancaman terhadap kemapanan. Itu pun tak lebih dari stigmatisasi, bukan pemahaman komprehensif atas sebuah ideologi. Sementara *liberalisme* yang konon dianggap bertentangan dengan "adat ketimuran" bahkan "kerakyatan", nyatanya lebih bisa diterima (kecuali Anda berpikir bahwa bendera Amerika dan Inggris aman di tempatnya karena tak ada yang sudi menyimpannya).

Aku juga teringat suatu hari di bulan Mei 2001, saat mewawancarai Sekjen Aliansi Anti-Komunis, M Nofal Dunggio. Kelompok itu sedang gencar-gencarnya merazia buku-buku

yang dianggapnya berlabel "kiri". Di sebuah *talkshow* di radio *Ramako* Jakarta (sekarang *Lite* FM), aku bertanya, "Apakah Anda sudah membaca buku *Das Kapital*?"

Lalu spontan dijawab, "Buku seperti *Das Kapital* juga akan kami sikat. Buku itu mengajari orang-orang muda menjadi kapitalis." Kutipan wawancara itu lalu dimuat di majalah *Tempo* minggu depannya (21 Mei 2001). Yang mengerti bahwa *Das Kapital* adalah buku karangan Karl Marx (1867), tentu tertawa mules dibuatnya.

Tak heran bila sebuah ideologi lantas menjadi penuh penyesatan dan simplifikasi. Pangkal soalnya karena orang malas baca atau sengaja membodohi diri sendiri untuk kepentingan (proyek) politik. Sementara media kurang tertarik mengajak masyarakat awam membicarakan tema-tema besar itu dalam wujud pemberitaan tentang kebijakan-kebijakan publik sehari-hari. Ideologi terlalu mengawang-awang untuk diberitakan.

Tak heran bila kemudian *liberalisme* dipahami sebagai "gaya hidup kebarat-baratan yang mengagung-agungkan kebebasan". Lawan katanya adalah *komunisme*, yang ditafsirkan sebagai anti-Tuhan atau anti-agama. Di tangan tentara atau ulama, *komunisme* bahkan disamakan dengan PKI, yang sudah almarhum sejak peristiwa '65. Dus, di mata rakyat atau ulama kita, liberalisme mungkin "lebih dimaafkan" karena masih mengakui Tuhan, sementara komunisme tidak.

Selama lebih dari tiga dekade, pengertian semacam itu saja yang tertanam di benak orang ramai. Yang agak terdidik, mengenal istilah *kapitalisme* yang secara gampangan dimaknai sebagai paham yang "mata duitan". Pokoknya kalau ada mentalitas rakus, *matre*, atau serba komersial, sering *dikata-katai* "kapitalis".

Rakyat pun lantas tercecer dalam perdebatan tentang *neo-liberalisme* yang (kembali) muncul menjelang pemilihan presiden 2009. Istilah itu tiba-tiba saja populer di halaman-halaman koran di pinggir jalan. Muncul di televisi. Tapi penonton dan pembaca tidak mengerti, ketinggalan intelektual, juga terabaikan. Akhirnya banyak yang tak ambil pusing, apalagi peduli. Media sendiri agaknya telah gagal menjadi jembatan, sekaligus "penerjemah". Itu pun dengan asumsi para awak media sudah memahami "bahasanya".

Wartawan sendiri bukannya tak berusaha. Tapi di sisi lain, elit sepertinya ikut membiarkan jurang intelektual yang menganga ini. Ada ekonom terhormat yang membantah bahwa (calon) Wakil Presiden Boediono sebagai penganut neoliberal hanya karena hidupnya bersahaja dan orangnya sederhana. Seolah-olah neoliberalisme itu adalah gaya hidup, bukan serangkaian preskripsi dalam kebijakan ekonomi.

Sementara Boediono sendiri sering terlihat enggan meladeni pertanyaan wartawan tentang neoliberalisme. "Label-label besar itu apakah ada gunanya bagi rakyat?" katanya suatu ketika. "Menurut saya, yang penting mana yang memberikan manfaat dan kesejahteraan terbesar. Kalau kita terikat dengan ideologi-ideologi, ya repot. Tuntutan rakyat itu cuma dua hal: harga-harga kebutuhan yang stabil dan pendapatan yang bisa diandalkan. Itu artinya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi." (*Tempo*, 12 Desember 2005)

Itu pernyataan tiga tahun setengah sebelum menang pemilu. Pada kesempatan lain, di masa kampanye, Boediono juga berujar, "Neolib istilah *keren*, tapi label ini tidak pas apalagi dikenakan pada sistem ekonomi. Kalau kita pegang terus, bisa jadi debat yang tidak berujung." (*okezone.com*, 26 Mei 2009)

Boediono memang benar. Ujung dari semua (debat) ideologi adalah kesejahteraan. Ideologi yang tidak menjanjikan

kesejahteraan, adalah omong kosong intelektual. Onani gagasan.

Bekas jurubicara Presiden Gus Dur, Wimar Witoelar, lantas "menimpali" di halaman *facebook*-nya: "Mau 'neolib' atau 'kerakyatan' , yang bikin negara miskin adalah korupsi. Korupsi lebih jahat dari neolib yang orang *nggak* tahu artinya. Pembunuhan, penculikan jelas jahat, tapi ada orang yang *nggak* mau tahu, asal dengar istilah 'kerakyatan' *aja udah seneng*."

Wimar juga benar. Korupsi di relung-relung yang gelap atau terang, adalah hambatan menuju lorong di mana kesejahteraan menanti, apa pun ideologinya.

Ini persis prinsip pemimpin (komunis) China, Deng Xiao Ping (1904-1997) yang menyatakan: mau tikus hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Konteks pernyataan ini bukan urusan menangkap koruptor, melainkan mazhab ekonomi apa saja yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat China, layak didengar, meski negeri itu mengadopsi gagasan-gagasan komunisme ala Mao Zedong.

(Jadi kalau aku memasang bendera PKC, sebenarnya aku sealiran dengan Boediono dan Wimar. Juga tentang menjaga ingatan agar tidak melupakan para jenderal pelanggar HAM).

Kini soalnya adalah, apakah kesejahteraan itu? Dalam skala 0 untuk gelandangan dan 10 untuk konglomerat, di mana titik kesejahteraan yang ideal bagi rakyat sebuah bangsa? Apakah kesejahteraan sama dengan penghasilan besar, rumah nyaman, mobil terbaru, *blackberry*, dan masa depan anak-anak yang terjamin? Katakanlah di angka 8.

Atau yang disebut sejahtera cukup dua tingkat di bawah itu semua, tapi dengan jumlah penikmat yang lebih besar, dan unsur kemandirian?

Sebagian orang mengeluh saat Indonesia baru merdeka. Yang tadinya makan roti, jadi makan ubi. Kualitas pelayanan umum turun drastis dibanding masa *gubernmen* berkuasa. Yang semula serba ada, kini harus mengusahakan sendiri. Timor Timur juga begitu. Tahun-tahun awal setelah merdeka, kondisi perekonomiannya justru memburuk. Kerusuhan politik kerap terjadi. Banyak orang Indonesia mencibir makna kemerdekaan Timor Leste bila ujungnya harus sengsara. Persis orang-orang Belanda yang mencibir republik yang tak henti-hentinya dirundung kekacauan di masa-masa revolusi.

Bila Paman Ho di Vietnam mau nurut saja pada Paman Sam, barangkali nasibnya bisa seperti Korea Selatan, bukan Korea Utara. Dan bila Castro memilih jalan "kesejahteraan" bersama Washington, mungkin dia bisa menjadi negara bagian ke-52 seperti Hawaii. *Toh* hanya selemparan batu dari pantai Florida. Bahkan di kalangan kita sendiri, karena sudah kadung bermental jajahan, banyak yang ingin jadi koloni Inggris di mana sistem pendidikannya dianggap lebih baik dan memakmurkan, daripada dijajah Belanda yang ortodok, menghisap, dan membodohkan.

Tapi benarkah itu makna kesejahteraan yang kita inginkan? Asal kenyang dan tidur nyenyak? Kalau ingin politik yang stabil dan pertumbuhan ekonomi tinggi, mengapa kita repot-repot menurunkan Soeharto?

Sesungguhnya ada kebutuhan-kebutuhan asasi sebagai manusia yang tak bisa terjawab hanya dengan perut kenyang dan tidur nyenyak—selain kenyataan bahwa stabilitas dan kemakmuran yang diciptakan Orde Baru sejatinya semu. Karena itu, menjauhkan masyarakat dari perdebatan besar tentang pilihan kebijakan ekonomi (pokoknya tahu beres, tahunya sejahtera), seperti halnya menyuap atau menyogok mereka dengan kembang gula.

Ketika gagasan liberalisme muncul di Eropa di abad ke-18 (sebagai antitesa dari feodalisme), banyak orang bertanya-tanya, manakah sesungguhnya yang kita inginkan: kehendak raja yang bijak dan mensejahterakan—tapi dalam sistem monarki; *atau* pilihan rakyat yang ternyata buruk dan berujung bencana di alam demokrasi?

Sejarah membuktikan bahwa pilihan jatuh pada nomor dua, seiring dengan tergusurnya monarki dan aristokrasi. Bila Inggris kini masih bertahan dengan Istana Buckingham-nya, itu tak lebih untuk urusan pariwisata dan memorabilia para priyayi.

Jadi masyarakat juga perlu terlibat dalam obrolan besar tentang mazhab ekonomi, seberapa pun awamnya. Di sinilah peran media massa. Bahwa obrolan tentang sebuah sistem ekonomi tak lebih penting dari usaha memerangi korupsi (seperti kata Wimar), itu juga benar, meski agak menyesatkan. Sebab, korupsi, kolusi, atau nepotisme pada kenyataannya adalah definisi hukum (belaka). Bila sebuah kebijakan yang koruptif, kolutif, atau nepotis dilegalkan dengan payung hukum, maka selesailah persoalan.

Di masa Soeharto, betapa banyak undang-undang, inpres, atau keppres yang ujung-ujungnya adalah desain kejahatan ekonomi terhadap publik. Dus, secara hukum tak ada yang dilanggar. Rezim Soeharto sendiri bahkan tak bisa diadili hanya karena, "setiap lima tahun pertanggungjawabannya *toh* sudah diterima MPR."

Proyek mobil Timor, monopoli cengkeh, kolusi bisnis air PAM di Jakarta, listrik swasta, atau setoran laba BUMN untuk yayasan Cendana, semua ada payung hukumnya. Jadi Wimar Witoelar harus berhenti di sini. Sebab tak ada yang salah.

Bila ada kontrak-kontrak pertambangan yang menyebut bahwa bagian pemerintah hanya 1 persen, dan kontrak itu sah secara

hukum, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan. Wimar harus berhenti, sebab tak ada isu korupsi. Dan bila privatisasi atas sektor-sektor strategis dilakukan untuk menutup defisit anggaran, atau aset negara dijual murah begitu saja, tapi DPR sudah setuju, maka republik ini sesungguhnya baik-baik saja.

Bila hanya korupsi yang menjadi sumber kemelaratan rakyat, dalam perspektif Wimar (ini bukan nama acara televisi), maka menumpuk utang luar negeri bukanlah kejahatan. Yang jahat itu bila mengorupsi duit hasil utangannya. Sehingga bila ada perusahaan tambang asing yang menggaji tenaga kerja ekspatriat-nya jauh lebih tinggi dari insinyur lokal (padahal kemampuannya sebelas-duabelas), lalu biaya gaji itu dibebankan pada pemerintah dalam bentuk *cost recovery*, maka ini bukanlah kasus hukum. *Toh*, tak ada delik korupsi yang dilanggar. Yang jahat itu bila me-*mark up* angka gaji dari yang sebenarnya.

Menggelapkan pajak adalah pelanggaran serius, dan karenanya harus dihukum berat. Tapi ketentuan perpajakan yang justru menguntungkan kelompok ekonomi tertentu dan membebani potensi kelompok ekonomi yang lain, tak ada yang perlu dipersoalkan sebab tak ada kerugian negara.

Benarkah cara pandang seperti ini yang sedang kita anut?

Kerja keras media membantu pemberantasan korupsi adalah sumbangan signifikan bagi republik ini. Tak ternilai harganya bagi kepentingan rakyat. Namun kita tak akan berhenti di situ. Menjadi (sekadar) penjaga kebocoran dalam sistem, jelas berbeda dengan posisi kritis terhadap sistem itu sendiri. Menjadi pemadam kebakaran adalah pekerjaan mulia. Tapi terlibat dalam penciptaan sistem rancang bangun yang bisa mencegah terjadinya kebakaran, tentu lebih berguna.

Karena itu, dulu banyak LSM yang bertransformasi dari "sekadar" mengadvokasi kasus, menjadi kelompok penekan

untuk ikut mengubah arah kebijakan. LSM-LSM tua seperti YLBHI atau Walhi tak hanya mendampingi para korban-korban gusuran, tapi juga menyiapkan draf-draf akademik agar pemeritah mengubah kebijakan, sehingga jumlah korban ketidakadilan bisa ditekan.

Almarhum Munir tidak hanya memperjuangkan korban-korban penculikan dan tindak kekerasan negara, tetapi juga terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang TNI, Pertahanan Negara, dan bersuara lantang dalam RUU Intelijen, agar tercipta sistem yang bisa mencegah terulangnya sejarah hitam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga punya dua sayap utama: penindakan dan pencegahan. Yang satu penuh aksi laga, yang lain bekerja dalam sunyi. Yang satu dikerubungi media, yang lain menari sendiri.

Transformasi peran seperti ini jangan-jangan belum terjadi di media massa, meski kebebasan pers telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Barangkali mitologi anjing penjaga (*watchdog*), membuat media merasa peranannya hanya menggonggong saat muncul penjahat. Peran ini saja yang ditekuni dengan heroisme tinggi. Padahal bisa jadi tuannya sendiri adalah gembong penjahat (sebab Hitler pun gemar memelihara anjing herder).

Dalam konteks debat besar tentang kebijakan ekonomi, media massa mestinya tak berhenti pada kemampuannya membongkar korupsi, atau kepiawaiannya mengembangkan teknik investigasi, tapi juga membantu rakyat memahami pilihan-pilihan *policy*. Tak hanya menggeledah isu-isu korupsi di tubuh Pertamina, tapi juga menggali kejanggalan-kejanggalan dalam kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan kepentingan publik, meski itu legal.

Karena itu, wartawan juga pantas ikut berdebat tentang neoliberalisme. Dengan segala keawaman-nya dalam ilmu

ekonomi dan statistik, debat di kalangan wartawan bisa sama serunya dengan para politisi, ekonom, atau filsuf. Sama-sama penuh curiga, siapa membela siapa. Perdebatannya yang tak hanya soal substansi, tapi juga tuding-menuding afiliasi.

Bedanya, di antara kelompok-kelompok orang itu, kaum politisi terbilang paling cepat menyelesaikan debat (baca: cuma satu putaran). Debat para politisi tentang neoliberalisme selesai dengan terpilihnya *incumbent*. Bahkan, kalau mau blak-blakan, politisi sudah "ejakulasi dini" sejak Susilo Bambang Yudhoyono positif menggandeng Boediono sebagai pasangannya. Politisi gerbong Cikeas yang tadinya menolak Boediono, langsung *knock out* ketika SBY pasang muka *pede*.

Filsuf atau ekonomlah kelompok yang memulai perdebatan ini jauh sebelum politisi atau wartawan. Ada atau tak ada pemilu, entah Boediono atau Budi Anduk, satu putaran atau dua, mereka tetap (dan akan selalu) berdialektika.

Nenek moyang para ekonom seperti Adam Smith (determinasi pasar) atau JM Keynes (dominasi negara) sudah menyelesaikan satu putaran dialektikanya: tesis dan antitesis. Adam Smith membawa Eropa keluar dari kungkungan kaum merkantilis yang hanya menguntungkan para bangsawan dan aristokrat. Tapi dalam perkembangannya, ekonomi gelembung sebagai anak haram(?) liberalisme—yang dilahirkan di papan-papan perdagangan Wall Street pada 1929 dan memicu *malaise*—telah mencoreng reputasi mazhab Smith yang sempat bertahan selama 150 tahun. Meski sebenarnya, dunia tak perlu menunggu selama itu sejak kolonialisme "mengawini" liberalisme dan menimbulkan kesengsaraan berkepanjangan di negeri-negeri jajahan di Asia dan Afrika. Tapi bukankah sesuatu harus mengusik kepentingan kaum elit baru bisa dianggap persoalan?

Bom yang melukai rakyat jelata di pasar Tentena, Poso,

Sulawesi Tengah (Mei 2005) tak akan lebih diingat daripada bom yang melukai para eksekutif perusahaan papan atas di JW Mariott atau Ritz Carlton (Juli 2009).

Jadi, meski liberalisme yang membebaskan orang Eropa dari penindasan kaum bangsawan, telah memunculkan penindasan baru di negara-negara jajahan, koreksi intelektual dan kebijakan atas ideologi itu sendiri baru dilakukan setelah banyak orang kaya menjadi miskin mendadak akibat bangkrut di pasar saham Amerika.

Liberalisme lalu digugat cerai. Resep-resep Keynes yang meminta negara agar lebih berperan menjaga perekonomian—supaya tidak dimangsa rakusnya swasta—lalu diadopsi oleh Presiden Amerika Franklin D Roosevelt, dan terus bertahan hingga usai Perang Dunia II. Bank Dunia dan IMF juga mengikutinya untuk menyembuhkan luka-luka negara berkembang yang baru mentas dari kolonialisme.

Berbeda dengan umur liberalisme yang mencapai ratusan tahun, obat Pak Keynes ini hanya dianggap mujarab selama empat dekade saja, yakni hingga akhir 1960-an. Filsuf *cum* ekonom Friedrich August von Hayek dan Milton Friedman lalu memulai putaran debat baru dengan menawarkan neoliberalisme, setelah pengikut Keynes kedodoran menghadapi membengkaknya harga BBM dunia akibat embargo negara-negara di Timur Tengah era 1970-an.

Hasrat untuk terus memberikan subsidi pada publik (agenda-agenda sosial demokrat) terbentur dengan realitas membengkaknya belanja energi akibat perang enam hari antara Arab dan Israel (Yom Kipur, 1973). Belum lagi pemborosan akibat Perang Vietnam melawan pasukan Paman Ho.

Di sisi lain, determinasi negara telah menimbulkan distorsi yang serius dalam bentuk in-efisiensi birokasi dan maraknya korupsi.

Juga penyalahgunaan kekuasaan dan rente-rente di tubuh birokrasi. Karena itu Hayek mengajak dunia kembali ke ajaran Adam Smith dengan "modifikasi" liberalisasi di banyak aspek kehidupan, tak hanya ekonomi. Tesis putaran baru pun dimulai ketika Presiden Ronald Reagen di Amerika dan Perdana Menteri Margaret Tatcher di Inggris mengadopsi resep-resep neoliberal yang lumayan manjur untuk negaranya.

Karena itu, yang lain lalu mengikuti, dan obat neoliberal ikut diresepkan oleh Bank Dunia dan IMF untuk mengobati penyakit ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sialnya, lantas timbul keraguan: apakah obat ini sedang bekerja, atau sebenarnya dia tak berguna, dan bahkan mengundang penyakit baru. Sebab, perekonomian di negara-negara Amerika Latin yang menelan resep neoliberalisme tak kunjung membaik, bahkan terjadi ketidakpuasan yang melahirkan pemimpin-pemimpin berhaluan kiri seperti Hugo Chavez di Venezuela atau Evo Morales di Bolivia.

Di sisi lain, liberalisme baru ini tetap menampakkan wajahnya yang rakus. Amerika seperti mengulang sejarah *malaise*, ketika ekonominya rontok diterpa krisis keuangan dan skandal korporasi. Kasus Enron pada tahun 2001 membuktikan bahwa tak hanya birokrasi yang menjadi sumber kecurangan dalam ekonomi. Enron adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang energi, yang melebih-lebihkan labanya dan merekayasa laporan keuangannya sendiri. Aksi *kibul-mengibul* ini membuat harga sahamnya *kinclong* dan para pemegang saham atau eksekutifnya kaya raya.

Tapi bau busuk itu lalu tercium. Harga sahamnya pun terbanting jeblok dari 90 dolar per unit menjadi hanya 26 sen hanya dalam waktu beberapa bulan. Sejak itu, skandal-skandal sejenis secara beruntun terkuak: WorldCom, Xerox, Tyco, Merck, Kmart, atau Global Crossing.

Di Indonesia sendiri pernah ada kejadian skandal Busang yang melibatkan perusahaan Kanada, Bre-X pada tahun 1997. Bre-X mengarang cerita tentang kandungan emas di daerah Busang, Kalimantan Timur, agar harga sahamnya melonjak-lonjak. Jadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bukan monopoli birokrasi pemerintah. Bisa juga dilakukan oleh swasta dan asing yang selama ini kerap memanen pujian sebagai model bisnis modern dan profesional. Lagi pula, jangan lupa bahwa penjajahan di Indonesia dimulai oleh VOC yang *notabene* adalah organisasi kongsi dagang swasta pada abad ke-17.

Memasuki tahun 2008, Amerika diterjang krisis keuangan yang diawali dengan kasus kredit macet sektor perumahan (*subprime mortgage*). Hak tagih kredit perumahan diperjualbelikan dan menjadi sasaran investasi baru, hingga menciptakan gelembung ekonomi. Begitu macet, tak hanya bank, semua pemegang hak tagih langsung *lemes*.

Ini seperti mengulang tragedi Wall Street, 1929. Pasar uang tumbuh subur sementara sektor riil kering kerontang. Lembaga-lembaga keuangan raksasa kena batunya. Lehman Brothers, Fanny Mae, Freddie Mac, AIG, atau bahkan perusahaan otomotif General Motor, semua *klepek-klepek*. Di sisi lain, negara yang tidak menelan obat neoliberal seperti China, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, atau Malaysia justru sehat *wal afiat*.

Di saat yang sama, liberalisme yang telah meretas batas lingkup ekonomi—dan karenanya ditambahi embel-embel "neo"—dituding sebagai biang rusaknya planet bumi. Lingkungan hidup meriang-meriang karena peran pemerintah dilucuti atas nama rangsangan bagi investasi. Sumber polusi diperdagangkan (*carbon trading*), sehingga yang kaya tetap bisa memproduksi emisi dengan membayar "BLT" untuk negara pemilik hutan.

Bahan pangan dan sumber energi jadi sasaran spekulasi di bursa-bursa komoditas dunia, sehingga harga pangan

melambung dan rakyat di negara-negara berkembang kelaparan, sementara kantong para kapitalis semakin tebal. Jurang antara 500 orang terkaya dunia versi majalah *Forbes* dan rakyat jelata di Afrika, Amerika Latin, atau Asia semakin menganga. (Saya heran mengapa tak ada majalah yang menyurvei 500 orang termiskin di dunia).

Seperti halnya Keynes yang dihadapi oleh Hayek atau Friedman, kaum neoliberal pun dihadang oleh ekonom seperti Joseph E Stiglitz. Lucunya (itu pun kalau bisa disebut lucu), baik Hayek, Friedman, atau Stiglitz, sama-sama memperoleh hadiah nobel di bidang ekonomi. Begitu pula dengan Muhammad Yunus dari Bangladesh yang muncul dengan gagasan "pembangunan ekonomi dari bawah". Mereka telah memulai satu putaran debat baru di abad ini.

Lantas bagai mana dengan di Indonesia?

Beruntung ada Boediono. Kemunculannya di panggung politik (setelah "mentas" dari alam teknokrat) seperti membuka kotak pandora tentang apa itu neoliberalisme dan apakah mazhab itu sedang dianut di Indonesia. Pun iya, lantas apa bahaya atau manfaatnya.

Berbeda dengan Boediono yang menganggap debat besar tentang ideologi tak mendatangkan manfaat bagi rakyat, saya justru mengajak media massa ikut terlibat dalam putaran baru(?) perdebatan ini. Alih-alih meragukan manfaatnya bagi orang awam, media massa justru punya tanggung jawab untuk menunjukkan agar wajah neoliberalisme bisa dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu publik bisa memutuskan, apakah wajah ini cukup bersahabat atau tidak.

Supaya tidak terjebak dalam perang label dan stempel, media punya tugas intelektual dan profesional untuk menerjemahkan debat besar ini dalam berita-berita harian. Sehingga tanpa

harus menunggu pemilu berikutnya, bila ada kebijakan atau sistem ekonomi yang perlu dikoreksi, publik bisa menyuarakan, terlibat, dan bahkan ikut membenahi. Keterlibatan yang didasarkan pada pengetahuan, bukan buah dari pencitraan dan strategi iklan.

Dan sebab wartawan bukan politisi, maka menggeledah neoliberalisme atau mazhab kebijakan apa pun dalam ekonomi, tak boleh berhenti meski satu putaran sudah terjadi.

***

BAGIAN PERTAMA

Orang Awam Menggugat

Rebutan Buron dengan Polisi

"Bang, *macam mana kok* bisa harga bensin turun lagi? *Tumben* sekali pemerintah. Apa karena bensin *tak* laku sejak harganya naik?" tanya seorang sopir taksi pada suatu siang di bulan Januari 2009.

Aku gelagapan. Sedari awal menaruh pantat di kursi penumpang, aku sedang kehilangan selera bicara. Jujur saja, ada kalanya kita enggan mengobrol dengan sopir taksi. Ini bukan soal arogansi kelas sosial. Terkadang kita hanya ingin duduk tenang menikmati sejuk dan heningnya kabin. Alih-alih *ngobrolin* naik-turunnya bensin, ditanya lewat rute mana, tak jarang kita hanya menukas: "Terserah *deh*, Pak. Yang penting *gak* macet."

Kalimat "yang penting *gak* macet" itu kadang mengandung tuduhan bahwa sopir taksi suka menjerumuskan penumpangnya ke lembah kemacetan. Padahal, faktanya, sopir taksi pun dirugikan dengan kemacetan. Target setoran atau komisi terancam luput karena waktu mereka habis di jalanan. Sementara perolehan argo taksi akibat macet, tak seberapa dibanding hilangnya kesempatan mendapat penumpang lain dan borosnya bahan bakar. Walaupun harga bensin siang itu tak semahal biasanya.

Tapi, kalau tiba-tiba disergap dengan pertanyaan, mengapa bisa turun dan apakah karena selama ini bensin tidak laku, pastilah sopir taksi itu tidak sedang melempar teka-teki.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang baru saja menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tak tanggung-tanggung, turunnya hingga tiga kali selama Desember 2008 hingga Januari 2009. Meski, harga BBM di Malaysia sudah turun sejak pertengahan 2008.

Gara-garanya, harga minyak mentah dunia yang memang terjun bebas. Dari semula sempat menembus 140 dolar per barel, dalam waktu beberapa pekan saja, langsung terbanting di bawah 100 dolar, dan terus melorot dalam hitungan bulan ke harga di bawah 40 dolar per barel. Satu barel kira-kira sama dengan 159 liter.

Penurunan BBM di Indonesia sendiri baru dilakukan 1 Desember 2008. Premium yang semula Rp 6.000 per liter, diturunkan menjadi Rp 5.500. Lalu diturunkan lagi pada 15 Desember, dengan harga baru menjadi Rp 5.000 per liter.

Seiring dengan tren penurunan harga minyak dunia (dan mendekati pemilihan umum), pada Januari 2009, harga bensin lagi-lagi turun 500 *perak* hingga menjadi Rp 4.500 per liter. Dengan demikian, premium kembali pada tingkat harga sebelum kenaikannya pada Mei 2008—yang sempat menyulut unjuk rasa dan pembakaran mobil di dekat Semanggi, Jakarta.

Harga bensin sebelum Mei 2008 adalah Rp 4.500 per liter. Harga itu bertahan lebih dari dua tahun sejak Oktober 2005. Artinya, dalam kurun waktu hanya tiga tahun, seorang sopir taksi merasakan fluktuasi harga bensin yang cukup tajam. Dari semula Rp 2.400 per liter (Mei – Oktober 2005), melonjak menjadi Rp 4.500 per liter (Oktober 2005 – Mei 2008), dan kemudian mencapai Rp 6.000 per liter (Mei – Desember 2008).

Karena itu, ketika tingkat harga kembali ke Rp 4.500, dia pun heran. Sebab, baru pertama kali dalam sejarah, orang Indonesia mendengar pengumuman turunnya harga BBM.

"*Kok* bisa harga bensin turun. Apa karena *tak* laku?"

Waduh, dari mana harus mulai menjawabnya. Teori permintaan dan penawaran (*demand and supply*) jelas sudah ia kuasai. Bila harga tinggi, orang cenderung mengurangi konsumsi. Akhirnya,

terjadi titik keseimbangan baru di tingkat harga, alias harga turun.

Pak Sopir itu barangkali bukan sarjana ekonomi. Walaupun sejak krisis 1997-1998 banyak sarjana "terdampar" di belakang setir taksi. Lagi pula, tak perlu menjadi sarjana ekonomi untuk mengetahui hukum permintaan dan penawaran. Pedagang terong atau cabe di Pasar Ciputat, Banten, hafal betul kapan masa panen—sehingga barang berlimpah dan harga jadi rendah—serta kapan masa paceklik. Di awal musim, duku Palembang masih Rp 10-12 ribu per kilogram. Tapi di puncak musim bisa turun Rp 6-8 ribu per kilo. Naik lagi menjelang akhir musim.

Kalau bensin?

Taksi berbelok di depan Polda Metro Jaya, menuju arah Semanggi, untuk mengambil putaran balik ke Cawang. Sopir taksi itu meniti perlahan kemacetan yang populer dengan istilah "padat merayap". Bila macetnya *gak ketulungan*, sering pula muncul akronim "pamer paha" alias padat merayap tanpa harapan.

Di seberang Polda Metro Jaya, dekat Semanggi, ada kampus Universitas Atma Jaya, tempat sebuah mobil plat merah dibakar demonstran anti-kenaikan BBM pada suatu petang, 24 Juni 2008. Pemerintah SBY ketika itu menaikkan bensin dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar menyebut sebuah inisial nama yang ditudingnya sebagai dalang di balik aksi rusuh itu: "F-J". Kependekan dari Ferry Juliantono, Ketua Dewan Tani Indonesia (DTI) sekaligus Sekretaris Jenderal Komite Bangkit Indonesia (KBI). Organisasi yang terakhir disebut, diketuai oleh bekas menteri koordinator perekonomian di era Gus Dur, Rizal Ramli.

Nama Rizal Ramli juga diseret-seret dan sempat menjadi tersangka, meski belakangan tak terbukti jadi dalang. Tapi, yang membuatku selalu ingat peristiwa pembakaran mobil itu adalah perburuan polisi dan agen-agen BIN terhadap sosok Ferry yang saat itu dikabarkan sedang di luar negeri.

Media sempat geger. Maklum, sudah lama pemerintah tak menyebut nama orang sebagai dalang sebuah kerusuhan, sejak Orde Baru tumbang. Di zaman Soeharto, selalu ada saja orang atau kelompok yang namanya dicatut bila ada peristiwa berbau rusuh. Entah itu Sri Bintang Pamungkas, Mudrik Sangidoe, ataupun anggota OTB (Organisasi Tanpa Bentuk). Dulu Soeharto menyebut para aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) dengan julukan "Setan Gundul" terkait Peristiwa 27 Juli.

Ada juga *sih* yang "hobi" melempar tebak-tebakan, contohnya Gus Dur. Ia menyebut inisial jenderal "K" sebagai dalang konflik Ambon. Ketika dikejar, dengan enteng Gus Dur bilang, "Jenderal Kunyuk".

Nah, kini Kepala BIN menyebut inisial "FJ". Anggota DPR dan media kemudian bertanya dari mana sumber informasi soal nama itu. Uniknya, Syamsir mengaku pernah ketemu FJ, dan dalam pertemuan itu dia mendengar FJ akan membuat gerakan menolak kenaikan harga BBM.

Kontan saja keterangan ini memancing berbagai reaksi di forum *kongkow-kongkow* wartawan. Ada yang bilang, "*Lha*, kalau Kepala BIN sudah tahu akan ada rusuh, *kok ndak* bisa dia cegah?" Celetukan seperti ini persis terulang ketika Presiden SBY menunjukkan foto-foto orang berlatih menembak dengan sasaran wajahnya, setelah ledakan di Hotel JW Mariott dan Ritz Carlton, 17 Juli 2009.

Atau ada yang begini: "*Lo*, berarti Kepala BIN tahu tapi *ndak* melapor *dong* bahwa akan terjadi kerusuhan?"

Yang lebih *hot*, komentar seperti ini: "*Aha*! Jangan-jangan si FJ memang 'dilepas' oleh intelijen untuk memainkan sebuah skenario lapangan."

Aku yang waktu itu kepala seksi peliputan di *RCTI* berbicara dengan Ferry yang sedang berada di Guang Zhou, China.

"Dari China akan mampir ke mana?" pancingku ketika tersambung dengan Ferry. Semua televisi termasuk *RCTI* sudah mewawancarai Ferry *via* telepon. Tapi belum ada yang melakukan wawancara khusus tatap muka. Stok gambar akan sosoknya pun masih nihil.

"Belum tahu, *nih*. Mungkin Malaysia atau Singapura," jawabnya.

"Kalau mampir Malaysia, nanti biar ditemui reporter kita. Ada satu yang *nge-pos* di Kuala Lumpur. Nanti biar dijemput di *airport*," aku menawarkan. Urusan begini wartawan tak bisa dianggap ikut menyembunyikan buron. Ada hak tolak yang dijamin undang-undang untuk tidak memberitahu siapa pun, termasuk polisi, siapa dan di mana posisi narasumber kita.

"*Oke*, kasih aku nomor kontaknya. Nanti aku telepon dia setibanya di Malaysia," janji Ferry.

Benar saja. Dua hari kemudian, masih di bulan Juni 2008, reporter di Malaysia menghubungiku bahwa Ferry segera mendarat di bandara Kuala Lumpur. Aku pun memintanya bersiap di bandara tanpa perlu memberi tahu siapa pun, termasuk sesama wartawan. Biasa, ingin mendapat berita eksklusif. Ini soal persaingan bisnis.

Sang reporter *stand by* di dekat pintu kedatangan, menanti Ferry melintasi pintu imigrasi.

"Baru mendarat, Bung?" sapaku dari Jakarta melalui telepon.

"Iya, ini lagi mau ke imigrasi," katanya.

"Reporter kami sudah *stand by* di pintu kedatangan, ya. Nanti langsung ikut dia saja."

"*Oke*. Aku juga sudah kontak dia tadi."

"Tujuan ke mana?" tanyaku.

"Belum tahu ini. Aku ikut reportermu *aja*," tukasnya.

"*Oke*, gampang nanti kita atur," jawabku menutup pembicaraan.

Wah, agak gawat juga, pikirku. Seorang buronan polisi dan intelijen tak tahu mau ke mana, dan hanya mengandalkan akomodasi dari sebuah media. Aku mulai ragu-ragu dengan kekebalan hak tolak bila urusannya sudah seteknis ini.

Setelah telepon kututup, tak lama kemudian, kawan reporter di Kuala Lumpur menghubungi.

"Mas, gawat *nih*. Ada orang-orang BIN yang biasa *nge-pos* di KBRI di *airport*! Apa bocor ya?"

KBRI yang ia maksud adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Bukan rahasia bahwa ada intel negara yang dititipkan di setiap kantor kedutaan kita di negara-negara tertentu. Semua kedutaan juga begitu. Bahkan ada yang duta besarnya pun agen.

Di KBRI Islamabad, misalnya, aku pernah mengejar konfirmasi dari agen BIN, Budi Santoso, yang menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Munir. Budi Santoso ini adalah agen madya dengan nama samaran Wisnu Wardhana. Dia ditempatkan sebagai sekretaris politik di KBRI dan tak pernah bisa dipanggil pulang untuk bersaksi di pengadilan.

"*Waduh*, *gak* tahu aku. *Lu gak* kasih tahu siapa-siapa, *kan*?" tanya saya pada reporter yang masih menunggu di *airport*.

"*Enggak*, Mas. Temenku *aja gak* tahu aku ke mana."

"*Oke*, usahakan jangan ketemu muka dengan mereka. Nanti kalau kepergok dan ditanya, bilang *aja*, lagi mau jemput orang disuruh kantor dari Jakarta. Kalau ditanya siapa, bilang *nggak* tahu, biar *lu gak* dikira mau *ngumpetin* buronan. Kasih *aja* nomor teleponku kalau mereka *rese'*. Jangan-jangan mereka ada keperluan lain. *Lu aja* yang *ge-er*."

"Mudah-mudahan *sih* begitu."

"*Oke*, aku telepon Ferry di dalam."

"*Oke*, Mas."

Sejurus kemudian, aku sudah berbicara lagi dengan Ferry.

"Bung, bagaimana kondisi?"

"Aku dibawa ke kantor imigrasi *nih*."

"*Wah*, ada masalah apa katanya?"

"*Nggak* tahu, tapi kayaknya sebentar lagi sudah beres."

"*Oke*, mudah-mudahan *gak* ada apa-apa."

Aku lantas menghubungi reporter lagi.

"Dia *ketahan* di imigrasi tapi *bentar* lagi keluar. Kalau sampai orang-orang BIN itu ternyata *nangkap* dia, langsung rekam gambarnya."

"*Oke*, Mas."

"Tapi *kayaknya* mustahil, karena FJ sudah masuk wilayah hukum Malaysia. Yang *nangkap* harus polisi Malaysia atau interpolnya. Ada polisi Malaysia, *gak*?"

Karena itu, ketika tingkat harga kembali ke Rp 4.500, dia pun heran. Sebab, baru pertama kali dalam sejarah, orang Indonesia mendengar pengumuman turunnya harga BBM.

"*Gak* ada, Mas. Cuma mereka *aja*. Kayaknya mereka *udah* lihat aku, *nih*."

"*Belaga pilon aja*. *Stand by*. Aku kontak FJ lagi di dalam."

"*Oke*."

Sial. Nomor telepon Ferry sudah tak bisa dihubungi lagi. Berkali-kali kucoba, hasilnya nihil. Mungkin sedang diperiksa imigrasi dan diperintahkan mematikan telepon, pikirku. Tapi hingga satu-dua jam kemudian, telepon itu tetap tak tersambung. Saat itu sudah menjelang petang di Kuala Lumpur.

"Mas, ada beberapa mobil polisi, *nih,*" kata reporter menghubungiku beberapa waktu kemudian.

"*Waduh*! Ada pergerakan dari dalam?"

"*Nggak* ada, Mas. Tapi orang-orang BIN tadi sudah balik kanan. Mereka *nyapa* aku dan *nanya*, *ngapain*. Lalu kubilang, disuruh Jakarta jemput tamu."

"*Wah*! Terus?"

"Mereka *kayaknya gak* percaya dan agak-agak curiga. Tapi *gak nanya-nanya* lagi. Terus pergi begitu saja."

"Jadi sekarang polisi-polisi Malaysia itu *ngapain*?"

"*Gak* tahu, *nih*. FJ *gimana* di dalam?"

"Masih *gak* bisa dihubungi. Jangan-jangan *udah* dicokok di dalam. *Gini aja*. Kalau dalam sejam atau dua jam dia *gak* keluar-keluar juga, berarti memang ada apa-apa di dalam."

"*Kok*, bisa?"

"Ya berarti bocor. Karena yang tahu dia mau ke Kuala Lumpur *gak* cuma aku. Ada beberapa orang lain. Mungkin dia juga cerita ke orang lain lagi. Atau jangan-jangan telepon kita disadap. *Hahaha...*"

"*Hahaha....Oke*, aku *stand by* satu-dua jam lagi. Kalau *gak* ada apa-apa, aku *cabut*."

"*Sip, thanks*, Bos."

Malam tiba. Reporter sudah menunggu di bandara Kuala Lumpur sejak pagi hari. Telepon Ferry benar-benar tak bisa dihubungi lagi. Melalui kontak di kalangan Mabes Polri, aku mendengar kasak-kusuk bahwa FJ sudah dibawa ke Jakarta. Akhirnya, reporter balik kanan dengan tangan hampa. Aku tak habis pikir mengapa Ferry yang katanya tinggal selangkah lagi melalui pintu imigrasi, bisa gagal kami wawancarai dan malah diciduk polisi Indonesia. Kami kalah cepat. Benar-benar *apes*!

Beberapa minggu kemudian, baru ketemu jawabannya. Saat berbincang dengan sejumlah perwira menengah di Mabes Polri, seorang komisaris besar polisi yang baru kukenal, tiba-tiba *nyeletuk*, "Jadi kenapa bisa gagal wawancara FJ? *Hahaha....*"

"*Oooh*, *hehehe*.... FJ cerita apa?"

"*Ngapain* nunggu FJ cerita, *wong* di *handphone* dia, nomor dan SMS Anda semua yang keluar masuk."

"*Hahaha*... ketahuan *deh*."

"Waktu *you* telepon, saya sudah di samping dia. Aku bilang, '*matiin aja* teleponnya, atau aku yang bawa?' Dia lalu *matiin* telepon."

"Pantes dia *gak* keluar-keluar. Jadi Abang yang waktu itu *ngambil* dia?"

"Iya. Saya dan anggota tim. *Udah* kita *tungguin* dari pagi. Nama pesawat dan nomor bangkunya sudah ada di kita."

"*Busyet*! Kasihan reporterku *tuh*, *udah nunggu* dari pagi di luar."

"*Hehehe*... aku juga tahu itu. Tapi kita kan *gak goblok*. *Ngapain nunggu* dia keluar dari imigrasi. Repot lagi nanti urusan."

"Tapi dalam bandara pun bukan kewenangan polisi Indonesia, *kan*?" pancingku.

"Memang. Tapi sebelum imigrasi, itu masih wilayah internasional juga. Makanya istilahnya bukan penangkapan. Tapi kami 'ajak' FJ untuk langsung pulang ke Indonesia."

"Terus tahunya FJ akan ke Kuala Lumpur dari mana?"

"Ada *deh*..."

Kalau sudah dijawab begitu, antara wartawan dan polisi biasanya TST (tahu sama tahu) saja. Tapi aku senang, beberapa polisi sekarang sudah sadar hukum dan menghargai profesionalisme kerja jurnalistik wartawan yang hendak mewawancarai buron. Sebab, ada saja polisi yang memaksa-

maksa wartawan menunjukkan lokasi narasumber yang juga sedang mereka cari, hanya karena mereka tak terlalu cerdas menginvestigasi sendiri.

Beberapa bulan setelah itu, pada April 2009, tepat di bulan pemilu, Ferry Juliantono divonis satu tahun penjara dipotong sembilan bulan masa tahanan. Ia dianggap terbukti menghasut sehingga mengakibatkan kerusuhan. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang ingin mengganjarnya enam tahun penjara. Mungkin karena itu pula, alih-alih banding, Ferry justru mengucapkan terima kasih dan puas atas vonis hakim.

Setelah vonis itu, FJ tak lagi bergiat di KBI-nya Rizal Ramli. Hingga kemudian media massa ramai memberitakan keikutsertaan pria ini dalam tim sukses SBY untuk Pilpres 2009.

Jadi, setiap berpikir tentang harga bensin dan melintasi Semanggi, aku selalu teringat fragmen “rebutan” Ferry dengan polisi. Termasuk hari itu. Di sebuah siang di bulan Januari 2009.

***

Mengapa BBM Naik Turun?

Januari 2009, hujan di Jakarta sedang di puncak birahi. Sebentar saja turun, akan memicu kemacetan dan membengkakkan argo taksi. Hal yang dibenci para sopir maupun penumpangnya.

Kulirik papan reklame besar di seberang Polda Metro Jaya: sudah berganti. Sebelumnya terpasang wajah Rizal Mallarangeng alias Celli, yang tersenyum dengan kumis melintang, seperti abangnya: Andi Mallarangeng. Celli dan satu saudaranya lagi, Zulkarnain 'Choel' Mallarangeng, kini mengelola Fox Indonesia—perusahaan konsultan politik yang dikontrak SBY untuk mengelola citranya dalam Pilpres 2009.

Rizal Mallarangeng alias Celli yang pegiat Freedom Institute itu memang sempat memasang reklame dan gencar beriklan di televisi dengan motonya, "*if there is a will, there is a way*; bila ada kemauan, pasti ada jalan. Lalu ada kode RM 09. Bukan kode buntut, melainkan inisial namanya dan tahun pemilu 2009. Saat itu Celli mematut diri sebagai calon presiden alternatif dari kalangan muda. Tapi entah kenapa dia batalkan, dan belakangan mendukung SBY.

Namun, bukan itu yang membuatku melirik papan reklame dekat Semanggi dari dalam taksi siang itu. Melainkan teringat koran *Kompas* pada Februari 2005, di mana Celli dan Freedom Institute "mentraktir" 36 tokoh dengan memasang iklan besar mendukung kenaikan harga BBM. Saat itu harga bensin dinaikkan dari Rp 1.800 ke Rp 2.400 per liter.

Sejumlah ekonom, wartawan, atau bekas penyiar televisi, ramai-ramai mendukung kenaikan BBM di bawah judul iklan: "Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi". Karena aku wartawan, yang kuperhatikan adalah juga nama-nama seprofesi semisal: Goenawan Mohamad atau Fikri Jufri. Keduanya adalah bos *Tempo* yang legendaris.

Ada juga bekas orang-orang media atau yang bergiat di seputar media seperti Ichsan Loulembah (mantan pemandu *talkshow* Radio *Trijaya* yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah/DPD), Bimo Nugroho (aktivis Institut Studi Arus Informasi/ISAI yang menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia/KPI, dua periode), Agus Sudibyo (pemerhati media), atau Dana Iswara (mantan penyiar *RCTI*, istri ekonom Chatib Basri yang namanya juga tercantum dalam iklan itu).

"Kok bisa harga bensin turun. Apa karena tak laku?" tanya sopir taksi.

Anehnya, dari nama-nama tersebut, ada beberapa orang yang merasa tidak tahu menahu dengan pemasangan iklan, misal Agus Sudibyo dan Bimo Nugroho. Bimo bahkan menulis surat pembaca di *Kompas*, 5 Maret 2005, mengklarifikasi pencatutan namanya. Sedangkan Agus Sudibyo aku konfirmasi saat sedang menulis buku ini.

Nama-nama lain seperti Dino Patti Djalal, Andi Mallarengeng (keduanya juru bicara Presiden SBY) atau Todung Mulya Lubis dan Celli sendiri, tidak terlalu kuperhatikan. Barangkali karena mafhum belaka.

"*Kok* bisa harga bensin turun. Apa karena *tak* laku?" tanya sopir taksi.

"Itu karena bensin sudah jadi komoditas, Pak," jawabku tiba-tiba. *Hmm*, aku juga tak menyangka menjawab sekenanya seperti itu.

"Jadi komoditas politik ya, Bang? Karena mau pemilu?"

"Aduh, bukan," gumamku dalam hati.

Huh! Susah memang bicara dengan orang awam. Lebih susah lagi yang ditanya juga awam. Awam menjelaskan kepada

awam. *Kok* rasanya kurang pantas. Karena itu, kaum agamawan meminta agar segala urusan diserahkan saja pada ahlinya.

Tapi di mana sang ahli itu? Bukankah pertanyaan dan obrolan semacam ini *nongol* di warung-warung? Muncul di lokalisasi, di angkutan umum, halte bus, antrean ATM, antrean toilet, atau saat berdesakan di kereta komuter Jakarta-Bogor? Sedangkan para ahli ada di ruang-ruang seminar, kampus dan lembaga riset, gedung pemerintahan, perusahaan, atau kantor konsultan.

"Ekonomi terlalu penting untuk diserahkan urusannya hanya kepada mereka," sindir wartawan senior Farid Gaban, suatu ketika. Dengan keyakinan sepert ini, jurnalis semacam Farid Gaban mengajak siapa saja boleh ikut mendiskusikan dan memperdebatkan kebijakan-kebijakan ekonomi, tanpa perlu jadi sarjana ekonomi, atau sarjana apa saja.

Jangan naif! Mereka, para ekonom itu, juga berbicara di radio dan televisi. Menulis di koran, pasti. Bahkan, ada yang pasang iklan tentang ide mereka. Masyarakat dan Anda bisa belajar dari sana.

Koran?

Koran yang dibaca umumnya orang bukan *Bisnis Indonesia* atau *Kompas*. Oplah *Pos Kota* lebih tinggi dari koran nasional mana pun. Juga *TopSkor*. Sopir tetanggaku memang membaca *Kompas* bila senggang menunggu majikan. Koran *Kompas* itu pun langganan majikannya. Tapi yang dibuka si sopir adalah halaman Metropolitan, tempat aneka berita kriminal dan kecelakaan lalu-lintas ditampilkan.

Televisi?

Alah...siapa menonton acara apa? *Rating* dan *share* Silet atau

Dahsyat di *RCTI* barangkali tak akan pernah bisa dikejar Market Review *Metro TV* atau Liputan 6 *SCTV* yang legendaris. Apalagi Berita Pasar-nya *TV One*. Orang lebih senang menonton Tukul Arwana atau sinetron Mahonara yang langsung dibuat saat kasusnya masih hangat. Baru debat capres edisi "final" yang hari itu (2 Juli 2009) tercatat *rating* dan *share*-nya mengungguli acara apa pun yang ditayangkan *RCTI*, termasuk sinetron dan *infotainment*. Atau bila ada bom meledak, barulah orang pindah ke saluran *TV One* dan *Metro TV*. Di hari-hari biasa, semua kembali ke *maqam*-nya.

Lalu bagaimana dengan radio?

Di Jakarta orang mendengarkan *Gen FM* untuk lagu-lagu atau *Elshinta* untuk laporan lalu lintas dan banjir. Ada *Suara Surabaya* yang legendaris di Jawa Timur. Atau dulu ada *Radio Mara* di Bandung dan *Geronimo* di Yogyakarta, juga *Prapanca* di Medan. Tapi kalau sudah *talkshow* yang "berat-berat", pendengar akan minggir satu per satu. Sewaktu aku membicarakan ekonomi dalam memandu *talkshow* di Radio Trijaya bersama Oland Fatah, yang mengirim SMS tak akan sebanyak topik-topik politik atau isu pelayanan umum.

Pada suatu siaran di Jakarta First Channel *Trijaya* FM, aku kisahkan perjumpaanku dengan sopir taksi tadi kepada Oland. "Bung Oland, apa jawaban Anda kalau ditanya orang umum, mengapa harga bensin bisa turun. *Kok tumben-tumbennya*? Yang nanya *man on the street*."

Man on the street adalah istilah yang kerap dipakai oleh para ilmuwan sosial untuk menyebut orang awam. Artinya, ya orang di jalanan. Entah mengapa para cerdik pandai itu menyebut "orang di jalanan" untuk kata ganti awam. Mengapa bukan, misalnya, "orang di kantoran": *man on the office*.

"Ya, karena harga minyak dunia turun?" jawab Olan setengah menebak.

"*Kok* bisa turun jauh? Apa minyak *nggak* laku, maka harganya turun?" kejarku lagi.

Oland, agak lama berpikir. Sunyi di udara.

"Sulit, kan?" tanyaku.

"Iya, *sih*..."

Syukurlah. Jadi ternyata bukan saya saja yang kebingungan menerangkan kepada *man on the street*. Meskipun untuk urusan-urusan ekonomi yang *njlimet*, kami para wartawan ini juga bisa disebut *man on the street*. Malah *man on the gang*. Maksudnya benar-benar di dalam "gang", bukan lagi di "jalanan".

Radio-radio seperti *PAS* atau *Smart FM* memang mengulas ekonomi dan bisnis, tapi untuk segmen pendengarnya yang disebut sebagai "pelaku pasar". Tentu saja bukan pasar Kebayoran Lama atau pasar Tanah Abang. Atau pasar *on the street*. Tapi pasar uang, pasar saham, pasar *Wall Street* dan (ini dia) bursa komoditas.

"Komoditas politik ya, Bang?"

"Bukan, Pak. Maksudnya bensin jadi komoditas spekulasi. Di luar negeri sana ada namanya bursa komoditas. Harga bensin sudah tidak murni, tapi jadi bahan spekulasi seperti dolar atau saham. Kalau harga wajarnya Rp 4.500 per liter, karena jadi bahan spekulasi, bisa tiba-tiba naik, bisa juga tiba-tiba turun," jawabku harap-harap cemas. Berharap dia mengerti, dan cemas pada diri sendiri bila nanti ditanya lebih rumit lagi.

"*Wah*, *tak pahamlah* aku ini. Urusan orang *gedean*-lah itu. Tapi

mungkin karena mau pemilu. Sering-sering *aja* pemilu ya, Bang. Biar bensin murah terus."

Aku *nyengir* sambil memandang kaca spion tengah, mencari-cari mata si sopir. Aku sendiri tak tertarik mengomentari pemilu. Karena sudah kadung bingung menerangkan, aku teruskan saja.

"Bensin itu seperti beras, Pak. Berapa pun harganya pasti dicari orang. Kalau sekarang harganya turun, bukan karena kemarin *nggak* laku. Bapak sendiri tetap harus *ngisi* bensin kan? Atau karena harganya mumpung murah, terus Bapak bawa-bawa jerigen berisi bensin ke mana-mana. Tapi ya itu tadi, para spekulan itu *nggak* mau pegang bensin lagi sebagai komoditas. Tadinya mereka spekulasi uang dan saham, tapi karena lagi *jeblok*, akhirnya main minyak sawit dan bensin. Jadilah bensin naik, minyak goreng juga naik."

Hening. Taksi merayap di kemacetan Jakarta. Papan reklame bekas *Save Our Nation*-nya Celli sudah tak terlihat lagi. Sopir taksi itu tak memperpanjang diskusi. Dia memacu taksinya ke timur, ke arah Cawang. Kami mengambil jalan tol di depan Hotel Crown.

Nah, akhirnya aku bisa menikmati duduk tenang di kabin yang sejuk. Sekarang baru terasa, betapa secuil saja superioritas intelektual bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kenikmatan dan ketenangan hidup. Modalnya hanya dua: teori elastisitas harga dan sedikit pengetahuan tentang bursa komoditas. Sudah cukup untuk membungkam mulut sopir taksi itu. Tak perlu susah-susah menerangkan fluktuasi harga minyak mentah jenis *light sweet* atau *brent north sea* di bursa-bursa komoditas dunia seperti New York Mercantile Exchange (NYMEX). Apalagi aku juga tidak paham-paham amat bagaimana seluk-beluk perdagangan BBM dunia itu.

Yang kutahu, minyak mentah (*crude*) jenis tertentu

diperdagangkan dengan harga yang disebut *international market price* atau harga pasar internasional. Bagaimana harga itu sendiri terbentuk, tidak sepenuhnya tunduk pada hukum permintaan dan penawaran. Ada faktor lain yang namanya spekulasi dan politik energi.

Ooo... kalau pemerintah semata mengikuti harga pasar, berarti pemerintah itu neolib? Wah, berarti waktu pemerintah menaikkan harga BBM tiga kali sejak Maret 2005 hingga Oktober 2008, pemerintah memilih jalan neolib?

Menjelang pemilihan presiden putaran pertama, Juli 2009, misalnya, harga minyak dunia menanjak menembus 70 dolar Amerika per barel. Padahal saat pemerintahan SBY menurunkan BBM, harganya masih di bawah 40 dolar per barel, meski Amerika dan Eropa sedang di puncak musim dingin. Karena harga minyak mentah yang rendah itulah, maka pemerintah bisa *tralala-trilili* menurunkan harga bensin. Apalagi menjelang pemilu.

Kemudian menjelang hari pemilihan presiden di pertengahan tahun 2009, harganya merangkak-rangkak naik. Meski begitu, pemerintah buru-buru menyatakan tak akan menaikkan harga BBM. Sebab, walau di pertengahan tahun harganya 70 dolar per barel, namun bila dihitung rata-rata, harga minyak mentah sepanjang tahun 2009 masih seharga 50 dolar. Dengan demikian, aman untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), aman untuk subsidi, aman pula secara politik. Begitulah harga BBM terbentuk. Tidak murni urusan pasar.

Dalam sebuah wawancara dengan majalah *Tempo* edisi pertengahan Juni 2009, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pilihan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM—meski harga minyak mentah naik—menunjukkan bahwa "pemerintah Indonesia tak pernah bisa menjadi neolib".

Aku tak mau menceritakan ini ke sopir taksi yang sedang mengemudi di jalan tol. Bukan karena khawatir merusak konsentrasinya, tapi dia pasti tidak mengerti dan makin pusing dengan urusan neolib-neoliban.

"Kalau neolib, itu berarti biarkan harga mengikuti pasar dan biarkan masyarakat berdarah-darah," kata Menkeu kepada majalah *Tempo*. Padahal sebelumnya justru harga pasarlah yang jadi basis argumen pemerintah, mengapa harga BBM harus naik dan subsidi harus dikurangi. Aku khawatir, kalau menceritakan ke sopir taksi itu, nanti dia malah bilang begini:

Ooo... kalau pemerintah semata mengikuti harga pasar, berarti pemerintah itu neolib? *Wah*, berarti waktu pemerintah menaikkan harga BBM tiga kali sejak Maret 2005 hingga Oktober 2008, pemerintah memilih jalan neolib? Soalnya, alasan kenaikan waktu itu adalah mengikuti harga pasar. Berarti lagi, ketika 36 tokoh memasang iklan di *Kompas*—atas traktiran Freedom Institute—untuk mendukung kenaikan BBM, mereka juga mendukung neolib?

Sungguh ngeri membayangkan silogisme begitu. Inilah yang membuatku tak mau bercerita kepada sopir taksi soal argumen Bu Menkeu. Aku tak mau meremehkan sopir berlogat Batak ini bisa merangkai silogisme. Sebab, kalau nanti dia mengejar pertanyaan, yang repot ya aku sendiri. Apalagi kalau sampai dia bertanya: "Bang, *emang* neolib itu apa pula?"

Weleh-weleh! Pening, kan?

Bisa-bisa kujawab seperti argumen Bu Menteri: "...neolib itu berarti biarkan harga mengikuti pasar dan biarkan masyarakat berdarah-darah."

Padahal siapa pun mafhum, keputusan pemerintah untuk tidak mengikuti harga pasar, tentu berkaitan dengan hari pemilihan

presiden putaran pertama (Juli 2009). Tak percaya? Lihat saja bagaimana turunnya harga bensin dibawa-bawa dalam iklan SBY menjelang pemilu. Tapi kubolak-balik majalah *Tempo* edisi itu, tak ada satu pun kalimat atau premis yang mengajak orang berpikir ke arah sana. Tidak juga pertanyaan *challenge* untuk Sri Mulyani. Tentu aku tak tahu bagaimana jalannya wawancara. Tapi wartawan mana pun bila mendapat jawaban seperti itu, pasti akan mengejar dengan pertanyaan susulan: "Karena peduli pada rakyat, atau karena mau pencontrengan?"

Biasanya *Tempo* lumayan jahil dan nakal untuk urusan beginian. Barangkali sudah ada pertanyaan itu dari wartawannya. Tapi di majalah yang aku beli, dalam dua halaman wawancara khusus itu, tak ada pertanyaan yang mengaitkan kebijakan Bu Menkeu dengan pilpres.

Ah, sudahlah. Mungkin karena pertanyaan tadi sudah jadi pengetahuan umum belaka. Sebagai media dewasa yang tahu kelas pembacanya, *Tempo* tak perlu bergenit-genit ria mengaitkan keputusan pemerintah tak menaikkan harga bensin dengan pilpres. Itu namanya mengajari angsa terbang. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Agaknya memang lebih baik aku tidak cerita soal itu ke sopir taksi. *Toh*, belum tentu ia membeli *Tempo*.

Tapi alasan sebenarnya adalah ini: perjumpaanku dengan sopir taksi tadi terjadi pada Januari 2009 (ingat dia heran harga bensin bisa turun). Sedangkan *Tempo* yang aku bicarakan di sini adalah edisi Juni. Anda harus jeli melihat sekuen waktu agar tidak mudah dikecoh oleh penulis buku yang mencari royalti dari penerbit, seperti aku ini... Sebab, mencari yang halal saja bisa *tricky*, apalagi mendulang rente.

***

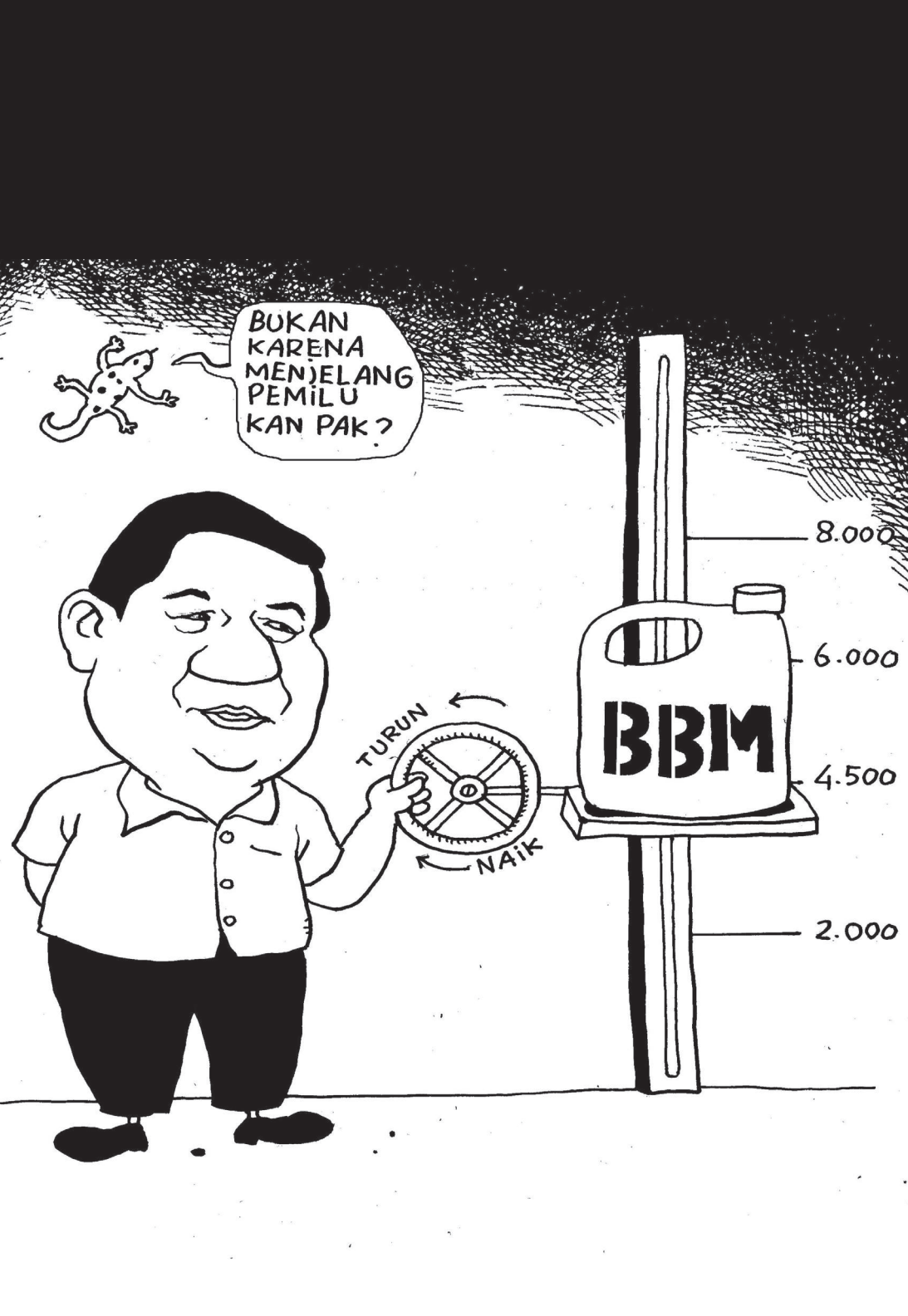
BUKAN KARENA MENJELANG PEMILU KAN PAK?
8.000
6.000
4.500
2.000
BBM
TURUN
NAIK

Barang Indonesia, Harga Luar Negeri

Kembali ke soal harga minyak dunia. Harga minyak mentah terus merambat naik di akhir semester pertama tahun 2009. Padahal musim dingin sudah lewat. Wajar bila para pengamat menengarai kenaikan harga minyak bukan lantaran faktor fundamental alias bukan karena permintaan dan penawaran, tapi karena faktor spekulasi. Memang, musim panas juga membuat konsumsi bensin di Amerika meningkat, karena musimnya orang menggunakan kendaraan (pribadi) alias *driving season*. Tapi peningkatan permintaannya hanya 150 ribu barel per hari.

Namun di bursa komoditas, yang disebut harga bukanlah semata-mata nilai barangnya, tetapi harga atas harga (*hedge*) atau harga di masa depan (*future*). Dan Anda tidak harus punya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau menjadi penjual bensin eceran, untuk bisa membeli BBM di pasar dunia.

Misalnya, seseorang bernama Mr Smith membeli 10 liter bensin dengan harga Rp 5.000 per liter untuk pengiriman bulan Juli. Bensin itu bukan berarti secara fisik akan diantar ke rumah Mr Smith pada bulan Juli. Sebab, Mr Smith bukan penjual bensin. Dia hanya membeli hak kepemilikan atas 10 liter bensin itu untuk pengiriman bulan tersebut.

Mengapa hanya Juli? Kenapa tidak Agustus atau Januari?

Sebab, untuk pengiriman bulan-bulan lain, harganya sudah lain lagi. Berbeda bulan, beda pula harganya.

Orang-orang seperti Mr Smith tahu, menjelang bulan Juli permintaan pasti akan meningkat dan harganya pasti naik karena *driving season* tadi. Maka, sesuai hukum permintaan dan penawaran, harga bensin Mr Smith berpeluang naik. Dia pun lalu menjual 10 liter bensinnya dengan harga Rp 5.500 per

liter. Untung Rp 500 per liter. Setelah itu, Mr Smith memutar modalnya kembali guna membeli bensin untuk pengiriman bulan Januari.

Mr Smith tahu betul bahwa bulan Januari, negara-negara Utara mengalami puncak musim dingin, dan orang membutuhkan lebih banyak energi untuk berbagai keperluan. Enteng kata, Mr Smith membeli bensin bukan untuk memenuhi kebutuhannya saat itu, tapi sebagai barang dagangan yang akan dijual kembali kepada siapa saja yang membutuhkan di masa yang akan datang. Itulah maknanya bensin sebagai komoditas. *Future trading,* kata para pialang.

Dia tidak perlu khawatir risiko rumahnya kebakaran akibat menyimpan BBM. Karena barang itu tersimpan dengan aman di kilang-kilang dunia. Atau bahkan masih di dalam perut bumi, belum diangkat ke *rig*. Kira-kira mirip sistem ijon yang menurut para kiai salaf hukumnya haram.

Di Indonesia, bila hal ini dilakukan oleh seorang pemilik kios bensin eceran seperti Pak Bejo, selain menghadapi risiko rumahnya kebakaran, ia bisa dituding melakukan penimbunan. Saat bensin langka, Pak Bejo bisa-bisa berurusan dengan polisi. Menimbun BBM menjelang kenaikan harga atau saat barangnya langka adalah tindakan spekulasi. Bila tertangkap polisi, pelakunya bisa masuk program kriminal di televisi dengan wajah yang tak akan disamarkan oleh para produser berita.

Di pasar dunia orang-orang seperti Mr Smith mendapat kedudukan sungguh terhormat. Meski disebut spekulan, tapi ia bukanlah seorang kriminal dan tidak melanggar hukum negara mana pun. Meski mobilnya hanya butuh 10 liter bensin per hari, Mr Smith boleh membeli bensin jutaan liter kapan pun. Juga tidak harus punya SPBU atau kios bensin eceran seperti Pak Bejo. Untuk menjadi spekulan bensin, Mr Smith juga tak perlu ahli membedakan oktan dalam bensin. Dia bahkan bisa saja

tidak tahu bedanya bensin dengan solar.

Sistem di mana kita hidup sekarang ini memang memungkinkan orang-orang seperti Mr Smith mengambil untung dari transaksi seperti itu. Tapi ingat, keuntungan yang diambil Mr Smith bukan hal terburuk dari sistem ini. Hal lebih buruk adalah dampaknya. Sebab, perubahan harga per liter minyak mentah itulah yang jadi patokan harga bensin di seluruh dunia, termasuk bensin eceran yang dijual Pak Bejo. Mempengaruhi hitungan kalkulator Ibu Sri Mulyani, sang Menteri Keuangan. Pantas saja, ketika menaikkan harga bensin, kalkulator pemerintah lancar *banget*. Giliran menurunkan harga, kalkulatornya seolah macet.

Alasan lain, dalam skala yang riil, jumlah yang dibeli orang-orang seperti Mr Smith bukan 10 liter, tapi ratusan ribu barel. Padahal satu barel kira-kira sama dengan 159 liter. Repotnya, pemain seperti Mr Smith tidak hanya satu dua orang.

Sekali orang-orang seperti Mr Smith mengambil untung Rp 500 per liter, saat itu pula harga minyak dunia naik. Dan pemerintah Indonesia langsung tergopoh-gopoh menyesuaikan diri dengan menambah dana subsidi BBM. Jika volume spekulasi di pasar dunia semakin meningkat, dan kenaikan harga tak sanggup lagi dipikul APBN, maka pemerintah akan mengumumkan kenaikan BBM.

Tak pelak, sopir taksi atau Pak Bejo terkena imbas. Harga-harga barang naik. Semua orang susah. Demonstrasi di mana-mana. Mobil dibakar. Aktivis jadi buronan. Wartawan berebut dengan polisi. Tarif angkutan umum yang memakai bensin, ongkos menambal jalan yang memakai aspal, hingga tarif pesawat terbang yang memakai avtur, semuanya naik. Tukang ojek tentu tak mau ketinggalan.

Bayangkan, semua ini terjadi karena harga bensin didikte oleh

mereka yang bahkan bukan penghasil dan konsumen riil bensin. Anehnya, pemerintah Indonesia yang punya sumur minyak (produsen) sekaligus menjadi konsumen besar BBM (Rp 1 triliun per hari belanja Pertamina untuk pengadaan BBM), malah tak kuasa menentukan harga secara otonom. Dengan penduduk 230 juta orang dan konsumsi BBM yang mencapai 1,6 juta barel per hari (kira-kira 254 juta liter), mestinya harga BBM bisa terbentuk di dalam negeri.

Dipikir-pikir, sungguh celaka negeri ini. Tak cuma urusan bensin yang membuat kita jadi korban penentu harga. Kopi, kakao atau biji coklat, serta minyak mentah sawit (*Crude Palm Oil*/CPO) juga bikin kita seolah tolol.

Bayangkan, Indonesia adalah produsen kopi robusta terbesar kedua di dunia setelah Vietnam. Tapi harga tidak ditentukan di sini, melainkan di bursa komoditas di London, namanya LIFFE (London International Financial Futures Exchange). Kita juga penghasil biji coklat atau kakao terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Ghana di Afrika. Tapi para petani coklat di Indonesia tak kuasa menentukan harga, kecuali menanti nasib dari para tuan di bursa komoditas New York Board of Trade.

Minyak mentah sawit juga sama saja. Baru pada 22 Juni 2009 harga CPO ikut ditentukan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Sebelumnya, selama puluhan tahun, harga CPO ditentukan di papan-papan perdagangan di Rotterdam atau Kuala Lumpur.

Bukan sulap, bukan sihir. Meski Indonesia produsen aneka hasil bumi, tapi masyarakat dan pemerintahnya tak pernah bisa menentukan harga. Bahkan malah jadi korban harga. Padahal di pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur saja, kalau kita hendak memborong daging atau sayur untuk keperluan pesta, kita bisa ikut "mengatur harga". Setidaknya lebih *pe-de* menawar atau mendapatkan diskon. Bukan semata-mata didikte pedagang. Apalagi Indonesia termasuk negara penghasil minyak, meski

konsumsinya sudah lebih besar dari produksinya (*net importir*).

Di bursa komoditas, bulan atau tanggal pengiriman barang memang menjadi faktor pembentuk harga. Tujuannya semula barangkali efisiensi. Sebab, daripada mengeluarkan ongkos menyewa gudang, menghadapi risiko kebakaran, atau barang jadi rusak, orang lebih baik membeli komoditas mendekati saat ia benar-benar akan membutuhkannya. Juga daripada harga barang naik turun tak tentu di masa depan, lebih baik membelinya hari ini saat tingkat harga sedang bersahabat.

Namun, pembeli di bursa komoditas bukan hanya konsumen langsung BBM, gandum, atau minyak sawit, melainkan juga para calo, tengkulak, atau broker. Sehingga bisa dibayangkan, mata rantai kepentingan menjadi lebih panjang, dan pada gilirannya faktor penentu harga semakin bertambah. Sehingga harga tak hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tapi juga faktor "penimbunan", aksi ambil untung (*profit taking*), jual rugi (*cut loss*), atau aksi memborong untuk spekulasi.

Lalu, siapa orang-orang seperti Mr Smith, yang isi tanki mobilnya hanya 40 liter, tidak punya pabrik, tetapi belanja energinya mencapai ribuan barel per hari?

Orang-orang seperti Mr Smith adalah pemegang dana jutaan dolar atau euro yang sedang bingung menempatkan uangnya. Biasanya orang mendepositokan uang di bank atau membeli saham, atau surat berharga lainnya. Tapi karena bunga dolar sedang jeblok, maka mereka enggan menempatkan dananya di pasar uang atau surat berharga. Mereka lebih tertarik mengincar pasar komoditas.

Sumber-sumber dana investasi "menganggur" seperti dana pensiun atau asuransi selalu haus keuntungan bunga. Dana itu tidak boleh diam, atau hanya puas dengan keuntungan suku bunga kecil. Dana itu harus terus berputar. Sebab, seperti

halnya kendaraan, uang yang diparkir pun ditarik ongkos. Bila pasar uang, pasar saham, atau obligasi sedang meriang, maka dana-dana investasi ini akan mengalir deras ke bursa komoditas. Dari New York Stock Exchange (NYSE) ke New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Inilah logika bunga. Inilah ideologi bunga. "Riba!" kata Nabi Muhammad s.a.w. di Abad ke-13. Orang-orang kaya menitipkan dananya di lembaga-lembaga investasi agar diputar dan mendapat keuntungan. Karena bersaing mendapatkan pelanggan, lembaga-lembaga investasi itu juga berlomba-lomba mengiming-imingi *return* tinggi bagi para nasabahnya. Bila mereka hanya memberi keuntungan bunga ala kadarnya, nasabah bisa lari dan mencari lembaga investasi baru.

Karena itu, uang titipan itu tidak boleh berbunga rendah, apalagi menganggur, sebab nasabah akan menagih keuntungan. Di saat ada instrumen investasi yang sedang lemah, maka secara "alamiah" uang itu akan mengalir ke instrumen investasi lain yang sedang gurih dan renyah. Datanglah mereka ke bursa komoditas. Datanglah ke tempat-tempat seperti NYMEX, LIFFE, atau NYBT tadi. Akibatnya, terjadi perdagangan dan kompetisi antar-pemilik uang, antar-tengkulak, bukan antara perdagangan dan konsumen riil komoditas. Karena banyak peminat, maka komoditas-komoditas seperti minyak mentah itu tentu harganya melonjak-lonjak.

Tak hanya BBM, gandum, kedelai, atau CPO juga menjadi sasaran spekulasi. Disebut spekulasi, karena para pembeli itu memborong kedelai atau gandum bukan untuk dimakan, tapi untuk dijual lagi dengan harga lebih tinggi kepada konsumen yang sebenarnya.

Lembaga-lembaga investasi dunia telah ikut menentukan harga energi dan bahan pangan. Sebuah kondisi yang membuat miris karena barang yang mereka perdagangkan adalah kebutuhan

vital seluruh penduduk planet bumi. Nasib ratusan juta orang tergantung pada angka-angka di papan perdagangan bursa komoditas.

Aku yang bukan sarjana ekonomi sampai sekarang tak pernah paham dengan logika atas semua ini. Barangkali memang aku yang goblok.

Harga pangan orang sejagad ditentukan bukan oleh mereka yang berkeringat memegang cangkul, tetapi oleh para tengkulak internasional. Negara-negara miskin di Afrika menghadapi krisis pangan karena harganya melambung. Bangladesh di Asia Selatan pun demikian.

Dipikir-pikir, sungguh celaka negeri ini. Tak cuma urusan bensin yang membuat kita jadi korban penentu harga. Kopi, kakao atau biji coklat, serta minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) juga bikin kita seolah tolol.

Padahal, mestinya ini tak boleh terjadi. *Wong* untuk menghindari dolar dan rupiah jadi bahan spekulasi saja ada aturan *underlaying transaction, kok*. Di saat krisis, aturan ini mensyaratkan siapa pun yang memborong dolar, harus menunjukkan kontrak transaksi yang menjadi alasan ia membeli mata uang itu. Sebab, bila orang memborong dolar hanya untuk spekulasi, dan bukan untuk berdagang atau membayar utang, maka nilai rupiah bisa makin tergencet.

Lha, ini jelas-jelas di depan mata ada bensin, gandum, kedelai, atau minyak goreng dijadikan bahan spekulasi, tak ada satu pun pemerintahan di dunia yang mempersoalkan. Bahan pangan dan energi diperdagangkan antar-*fund manager* dan dijual lagi dengan keuntungan berlipat kepada konsumen aslinya. Tak ada yang menggugat sistem ini. Tak ada aturan *underlaying transaction* sepertinya.

Mestinya pembeli kedelai harus menunjukkan bukti bahwa

kedelai itu memang untuk dikonsumsi, bukan ditimbun. Demikian juga dengan minyak bumi dan minyak sawit. Karena itu, jangan heran bila ada negara yang tidak punya ladang gandum, justru bisa menentukan harga gandum. Atau negara yang tidak punya sumur minyak, tapi namanya menjadi patokan harga minyak, seperti Singapura.

Harga BBM di Indonesia memakai patokan harga MOPS, singkatan dari Mean of Platts Singapore, atau lebih populer disebut Mid Oil Platts Singapore. Ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2005. Alasan memakai patokan harga Singapura, karena patokan harga di dalam negeri belum terbentuk.

Aku atau sopir taksi tadi pastilah heran, bagaimana mungkin sebuah negara yang jumlah produksi dan konsumsi BBM-nya jauh lebih besar daripada Singapura, tidak punya patokan harga sendiri. Memang ada yang namanya *Indonesian Crude Price* (ICP). Tapi ICP ini juga tetap mengacu ke MOPS, dan pada gilirannya mengacu juga ke harga pasar dunia.

Setiap hari di negara ini hampir 1 juta barel minyak mentah yang diangkat dari perut bumi (*lifting* minyak). Tepatnya kira-kira 950.000 barel. Jumlah itu setara dengan 159 juta liter. Itu artinya, negara kita adalah produsen. Di samping produsen, negara kita juga konsumen yang menyedot 254 juta liter BBM per hari.

Anak-anak SD saja tahu bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bertemunya produsen dan konsumen, permintaan dan penawaran. Mengapa jumlah permintaan dan penawaran yang sudah sedemikian nyata itu, tidak bisa menciptakan mekanisme harga pasar sendiri? Mengapa harus mengacu pada patokan harga pasar Singapura yang penduduknya hanya sedikit lebih banyak dari penduduk Aceh?

Dengan sistem patokan harga seperti ini, maka Pak Bejo di Temanggung, Jawa Tengah, harus bersaing membeli bensin dengan tingkat harga yang sama dengan Pak Lee Kuan Yew yang hidup di Singapura. Padahal, pendapatan per kapita keduanya jelas jauh berbeda.

Jadi, maunya apa? Harga BBM di Indonesia harus lebih murah dari Singapura?

Tentu saja. Apakah tidak boleh berpikir demikian? Harga mobil di Indonesia lebih mahal dari harga mobil di negara produsennya, seperti di Eropa atau Amerika. Tanya kenapa?!

Harga susu dan daging Australia dan New Zeland lebih mahal di Jakarta dibanding di Sydney atau Auckland, wajar tidak? Kalau Anda jalan-jalan ke Walmart di Amerika, harga segalon susu lebih murah dari segalon air olahan bermerk Deer Park. Atau kalau contoh itu terlalu jauh, silakan membayangkan harga durian di Sumatera dengan di Jakarta. Bolehkah orang Sumatera menikmati harga durian lebih murah dari orang Jakarta?

Nah, sekarang pertanyaan awamnya adalah: dengan sumur-sumur minyak yang kita miliki, wajar atau tidak bila orang Indonesia membeli BBM lebih murah dari orang Singapura yang tak punya sumur minyak?

Tapi tahukah bahwa itu memicu penyelundupan BBM dari Indonesia ke negara lain seperti Singapura? Bila itu terjadi, bukankah justru Pak Bejo yang memberi subsidi kepada Pak Lee Kuan Yew?

Kini tugas orang-orang seperti Pak Bejo, aku, dan sopir taksi bertambah, yaitu memikirkan solusi penyelundupan. Ketidakmampuan aparat hukum memberantas penyelundupan—karena sebagian di antaranya justru ikut bermain—harus ditanggung 230 juta penduduk Indonesia yang

mestinya bisa menikmati BBM lebih murah, karena memang pendapatannya lebih rendah.

Bulan Juli tahun 2000, kawanku Rommy Fibri yang saat itu masih bekerja di majalah *Tempo*, pernah melakukan investigasi penyelundupan BBM di perairan Serang, Banten. Dia mendapati dan mengintai sebuah tanker yang sedang "kencing". Malangnya, Rommy kepergok. Ia pun dikejar-kejar preman di tengah laut. Untung, sesampainya di darat ia berhasil *ngumpet* di perkampungan nelayan. Anehnya, beberapa oknum polisi yang mestinya mengamankan Rommy, justru ikut-ikutan menjadi negosiator agar cerita kapal tanker kencing itu tidak dimuat *Tempo*.

Ada lagi. Masih ingat kasus Lawe-lawe?

Pada September 2005, terungkaplah kasus pencurian BBM *gila-gilaan* yang melibatkan 18 pejabat Pertamina. Kejadiannya di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur, tepatnya di pelabuhan terapung (Single Buoy Mooring/SBM) Lawe-lawe. Total jumlah tersangkanya 58 orang, dan jumlah kapal tanker yang terlibat hingga 17 biji.

Modusnya, jaringan ini membelokkan BBM melalui pipa bawah laut berdiameter 1,5 meter yang panjangnya 7 kilometer, langsung ke lambung-lambung tanker. Para kapten kapal tanker itu, menurut Kapolri Jenderal Sutanto waktu itu, adalah mantan kapten tanker Pertamina.

Presiden SBY marah-marah dengan kejadian ini. Menurut catatannya, kerugian negara akibat penyelundupan BBM rata-rata mencapai Rp 8,8 triliun per tahun (*Bisnis Indonesia*, 9 September 2005, bertepatan dengan ulang tahun SBY ke-56). Terbongkarnya kasus Lawe-lawe ini sendiri telah menyelamatkan Rp 52 miliar uang negara.

Hal-hal seperti ini tentu mesti ditangani Pak Kapolri atau Panglima TNI. Sudah benar tindakan pemerintah menggulung sindikat itu, juga sindikat lain yang mungkin masih beroperasi. Jadi, bukan dibebankan pada Pak Bejo yang urusan hidupnya sehari-hari sudah cukup rumit.

Kembali ke harga minyak. Dengan patokan harga internasional, maka penduduk-penduduk negara kaya yang tidak punya sumur minyak, bisa ikut menikmati harga minyak yang sama dengan mereka yang di halaman rumahnya menyemburkan minyak tapi pendapatannya jauh lebih rendah. Efeknya bisa bermacam-macam. Dengan harga BBM yang sama, tapi dengan daya saing yang berbeda, industri negara maju akan semakin lebih unggul. Bila industrinya semakin unggul, maka mata uangnya semakin kuat. Dengan mata uang semakin kuat, dia bisa berbelanja lebih banyak dari negara-negara miskin, dan tidak terjadi yang sebaliknya. Situasi ini adalah gambaran (terlalu) sederhana dari jebakan-jebakan struktural yang menciptakan kemiskinan tak berkesudahan.

***

SPBU Asing

Di sepanjang jalan dari Semanggi hingga Cawang saja (sisi kiri Jalan MT Haryono), siang itu dari dalam taksi, aku melihat sudah ada tiga SPBU milik asing seperti Shell (Belanda) dan Total asal Perancis. Sementara SPBU Pertamina di jalan yang sama justru disegel karena mengoplos BBM. *Duh*!

Pernah ada sopir taksi lain yang bertanya, mengapa SPBU milik perusahaan asing itu tidak menjual bensin atau solar seperti SPBU Pertamina. Mereka hanya menjual BBM beroktan tinggi sekualitas Pertamax atau Pertamax Plus. Aku jawab sebisanya, karena premium atau solar itu disubsidi. Dan yang boleh menjual bensin subsidi hanya SPBU Pertamina. "Masa kita mensubsidi SPBU asing," tukasku.

Lalu sopir taksi itu bercerita, "Waktu harga bensin Rp 6.000 dan selisihnya cuma sedikit dengan harga Pertamax, SPBU luar negeri ini ramai, Mas. Sekarang mereka sepi lagi setelah harga bensin turun Rp 4.500."

"Mereka ini tidak mencari untung sekarang," jawabku.

"*Ah*, masa ada usaha *ndak nyari* untung?" sambarnya heran. "Apalagi lokasi mereka rata-rata di tengah kota. Kan mahal lahannya."

"Tentu *nyari* untung, tapi *ndak* sekarang. Nanti, kalau harga bensin di SPBU Pertamina sudah sama dengan harga bensin yang mereka jual. Orang mau *ndak* mau pasti memilih SPBU yang lebih bersih dan bagus."

"Memangnya, nanti mereka akan jual bensin bersubsidi?" tanya sopir taksi heran.

"Bukan jualan bensin subsidi, tapi yang namanya bensin subsidi

itu sendiri sudah tidak ada lagi. Subsidi dicabut. *Nah*, kalau bensin sudah tidak disubsidi, maka harga bensin Pertamina, Shell, Total, atau Petronas kan jadi relatif sama."

"*Lha*, kalau harganya sama, terus bedanya apa? *Oh*, konsumen akan milih tempat yang lebih bagus ya?"

"Itu satu hal. Hal lain, harganya belum tentu sama persis. Sebab, kalau tak ada subsidi, nanti harga bensin akan ikut harga pasar internasional. *Nah*, perusahaan yang lebih efisien bisa menjual bensinnya lebih murah dari perusahaan lain. Dan dijamin, Pertamina pasti kalah dengan perusahaan-perusahaan asing itu. Bayangkan kalau SPBU Pertamina nanti tak pernah bisa menjual lebih murah dari mereka. Tempatnya jorok, dan meterannya *ndak* pas, arealnya sempit karena mereka membajak areal jalur hijau..."

"*Hahaha*... benar, Mas. *Wong* SPBU Petronas dari Malaysia saja sudah ada di Indonesia. Coba, apa SPBU Pertamina ada di Malaysia? *Gak* usah jauh-jauh *deh*, taksi ini saja pakai Proton bikinan Malaysia. Memang ada *bau-bau* Mitsubishi, tapi rakitan-rakitannya Malaysia punya. Coba kita, ada *gak* mobil kita yang dipakai taksi di Malaysia?"

Aku tak bisa mengiyakan atau membantah. Sebab, faktanya aku memang tak tahu atau setidaknya belum pernah mendengar, apakah Pertamina punya SPBU di Malaysia atau ada mobil produksi Indonesia yang dipakai taksi di Malaysia. Tapi logika yang dipakai sopir taksi itu benar belaka: secara kasat mata, Pertamina pasti akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan minyak asing.

Akarnya barangkali adalah UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas, di mana investor asing dibolehkan masuk ke sektor hilir industri migas nasional. Sektor hilir ini di antaranya adalah jual

BBM jadi. Kalau sektor hulu itu pengangkatan minyak mentah dari perut bumi.

Nah, bisnis SPBU ini adalah sektor hilir. Dengan dibolehkannya pemain asing di sektor hilir, maka bisnis bensin diliberalisasi. Logika yang dipakai barangkali, Pertamina tak akan maju-maju bila dibiarkan tanpa pesaing. Mekanisme pasar atau kompetisi harga akan membangunkan Pertamina dari tidur panjangnya. Ingat doktrin kaum liberalis, bahwa ekonomi akan sempurna bila di pasar dibiarkan ada persaingan secara bebas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro sendiri mengakui bahwa liberalisasi industri migas ini berkaitan dengan rencana sistematis pengurangan subsidi dan dilakukan untuk merangsang masuknya investasi asing. "Liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena subsidi, pemain asing enggan masuk" (*Kompas*, 14 Mei 2003).

Setahun setelah pernyataan Pak Menteri ini, terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka SPBU (Majalah *Trust*, November 2004). Perusahaan itu antara lain British/Beyond Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Chevron-Texaco (Amerika) dan Petronas (Malaysia). Dan dua tahun setelah itu, 22 Januari 2007, Presiden Direktur Total dari Perancis, Thierry Desmarest sudah ketemu Presiden SBY selama 30 menit, dan menyatakan akan membuka enam SPBU di Jakarta (*tempointeraktif.com*).

Efeknya bisa jadi positif bagi SPBU-SPBU Pertamina. Mereka kini berbenah. Dengan standar baru, SPBU Pertamina pada tahun 2009 menyabet penghargaan International Lighting Design Award Program (IALD). Baca baik-baik nama penghargaannya. Ya, ini adalah penghargaan untuk urusan tata cahaya di pom

bensin. Jangan ditertawakan, *dong*. Selain urusan lampu, mutu pelayanan mereka juga lebih baik. Semua pegawainya dilatih dengan kalimat standar: "Mulai dari nol ya, Pak/Bu..."

Zaman dulu *boro-boro* ada kalimat seperti itu. Bukti pembelian pun bisa minta kuitansi kosong. Orang kantoran sering memakai ini untuk mengakali SPJ atau SPD (Surat Perintah Jalan atau Surat Perintah Dinas). Sekarang sudah *print-out* otomatis dari mesin.

Penganjur liberalisme akan menjadikan fenomena ini sebagai contoh, bahwa setelah diberi kompetitor, Pertamina bisa bangkit. Bayangkan kondisi mereka puluhan tahun tanpa pesaing. Singkat kata, persaingan pasar adalah jalan terbaik, sebab mau tak mau Pertamina harus bertahan. Dan liberalisasi adalah daya paksa yang paling ampuh agar mereka berubah. Jadi, dalam satu koin, selalu ada dua sisi. *Nah*, selain SPBU Pertamina yang berbenah dan konsumen yang diuntungkan, sisi koin yang lain dari kebijakan cabut subsidi BBM ini adalah kebijakan yang sangat mengembirakan bagi para perusahaan minyak dunia, karena dengan 230 juta penduduk yang haus bensin, Indonesia adalah pasar BBM yang empuk, kenyal, dan *nyam-nyam*.

Tapi pertanyaan awamnya: bila soalnya adalah pelayanan di SPBU, bisa *gak* SPBU Pertamina dibenahi tanpa harus mencabut subsidi rakyat atas BBM? Jadi pengurangan subsidi BBM ini sebenarnya untuk menyehatkan anggaran, memberi pelajaran

"*Wong* SPBU Petronas dari Malaysia saja sudah ada di Indonesia. Coba, apa SPBU Pertamina ada di Malaysia? Gak usah jauh-jauh deh, taksi ini saja pakai Proton bikinan Malaysia. Memang ada bau-bau Mitsubishi, tapi rakitan-rakitannya Malaysia punya. Coba kita, ada gak mobil kita yang dipakai taksi di Malaysia?"

pada Pertamina, atau melempangkan jalan masuk perusahaan asing ke sektor hilir?

Jawabannya pasti tiga-tiganya. Dan jawaban pasti lainnya adalah SPBU Pertamina kini jauh lebih nyaman, tapi beban hidup rakyat makin berat. Silakan ditimbang-timbang manfaat dan mudaratnya bagi orang ramai.

❊❊❊

Bensin Murah Biang Pemborosan?

Taksiku siang itu masih melaju di jalan tol, mengarah ke timur Jakarta. Gara-gara diajak *ngobrol* tentang harga bensin, aku jadi memperhatikan mobil-mobil dan membayangkan 1,9 juta karburator di Jakarta itu harus diberi minum setiap hari. Itu baru karburator roda empat. Yang roda dua jumlahnya 6,3 juta unit! Bila ditambah dengan angkutan umum dan angkutan barang, dalam satu hari saja, di tahun 2008, ada 9,1 juta kendaraan yang harus diisi bensin. Termasuk taksi yang aku tumpangi ini.

Itu baru di Jakarta.

Sejak sekolah dan mengenal apa itu minyak bumi, aku selalu membayangkan apa jadinya bila bahan bakar fosil itu habis dari perut bumi. Dikemanakan mobil-mobil ini? Apa kita akan kembali naik kuda? Belakangan, bayangan naik kuda mulai sirna setelah ditemukan bio energi: bio diesel, bio premium, atau bio etanol. Orang mulai mencampur bensin dan solar dengan minyak sawit atau minyak biji jarak (*Jatropha Curcas Ln*). Bensin dihemat, tapi hutan Sumatera dan Kalimantan jadi gundul karena semua lantas berlomba-lomba menanam sawit. Di Jawa Barat, orang ramai-ramai beralih dari tanaman pangan seperti jagung ke jarak.

Karena itu bensin harus dikonsumsi secara bijak. Tak boleh boros. Dengan harga yang murah, orang cenderung boros. Harga yang mahal, membuat orang tidak boros. Maka perlu cabut subsidi BBM.

Aha.... hukum permintaan dan penawaran lagi.

Padahal, bensin adalah jenis barang yang in-elastis. “Seperti beras,” kataku pada sopir taksi, “Harga semahal apa pun akan diburu orang, karena memang vital.”

Buktinya, mau harga bensin Rp 2.400 per liter (Mei–Oktober 2005), Rp 4.500 per liter (Oktober 2005 – Mei 2008), atau Rp 6.000 per liter (Mei – Desember 2008), konsumsi BBM nasional tidak berubah signifkan *tuh*. Pernah tidak mendengar melalui media, pemerintah mengumumkan turunnya konsumsi gara-gara harga naik? Atau mengumumkan naiknya konsumsi karena harga turun?

Komisaris Utama Pertamina, Martiono Hadianto dalam wawancara dengan *Investor Daily* (Juli 2005) justru mengeluh naiknya konsumsi BBM meskipun harga minyak mentah sudah tembus US$ 60 per barel pada Juli 2005. Itu berarti, setelah kenaikan bensin dari Rp 1.800 ke Rp 2.400, konsumsinya justru meningkat.

Tahun 2008, giliran Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno yang mengeluh. Katanya, konsumsi BBM bersubsidi hingga akhir April 2008 masih tinggi, di atas kuota sebesar 35,5 juta kilo liter (*mediaindo.co.id*, 4 Mei 2008). Artinya, setelah enam bulan "diteror" harga bensin yang naik nyaris 100 persen, (dari Rp 2.400 ke Rp 4.500 per liter), masyarakat tetap "militan" mengonsumsi BBM.

Bila dibaca terbalik, berarti bila harga BBM murah pun, tidak lantas memicu orang mengonsumsi BBM di luar batas kewajaran. Sama dengan harga beras. Bila harga beras murah, apakah lantas kita menjadi makan sehari lima kali?

Hayo, siapa yang berani membawa-bawa bensin dalam jerigen dan menyimpannya di bagasi mobil, hanya karena harganya sedang murah?

Murahnya harga BBM barangkali secara psikologis membuat orang cenderung boros. Yang tadinya *gak pengen* jalan-jalan, jadi keliling-keliling kota (tanpa tujuan?). Tapi secara riil, bila melihat Jakarta dan kota-kota besar (di mana sebagian besar

kendaraan berada), borosnya BBM bukan akibat harganya yang murah, tapi karena sistem transportasi massal yang buruk. Orang terpaksa membeli motor atau mobil karena pemeritah gagal menyediakan transportasi umum yang nyaman dan hemat waktu.

Naiknya harga BBM tidak akan menghentikan niat orang (kaya) membeli mobil. Data berikut ini juga meluncur dari *curhat*-nya Dirut Pertamina, Ari Soemarno: hingga triwulan I tahun 2008, mobil bertambah 136.000 unit. Penambahan itu sebesar 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bayangkan, harga bensin sudah naik 100 persen, tapi orang terus membeli mobil.

Kota-kota besar dunia yang pernah aku singgahi seperti Singapura, London, New York, Seoul, atau Guang Zhou, memiliki sistem transportasi massal yang baik, sehingga tak terlalu banyak kendaraan pribadi yang berkeliaran tidak perlu. Bangkok yang dulu dikenal lebih macet dari Jakarta, sekarang sudah lebih bersahabat sejak ada *subway* dan *skytrain*.

Di Jakarta, satu keluarga kaya bisa memiliki 3-5 mobil sekaligus di garasinya: untuk ayah, ibu, anak, cucu, dan menantu. Satu mobil berisi satu atau dua orang saja, termasuk sopir. Larangan *three in one* bukan persoalan karena ada joki yang siap menjual jasa di pinggir jalan. Keluarga seperti ini pastinya memiliki tingkat konsumsi BBM yang tinggi. Dan berapa pun harga bensin, tidak akan menghentikan mereka untuk "tamasya keliling-keliling kota".

Strategi penghematan BBM
dengan *gebyah uyah* atau pukul rata
tidak saja membuat target sasarannya tidak tercapai, tapi justru menimbulkan jatuhnya korban yang tidak perlu. Sementara orang-orang kaya yang secara ekonomi tidak sensitif pada harga BBM, akan terus memenuhi jalanan dengan mobil-mobil mereka.

Wajarlah bila konsumsi BBM di Indonesia mencapai 39 persen dari pengeluaran per kapita. Artinya, bila pengeluaran kita Rp 1 juta per bulan, Rp 390.000 di antaranya untuk beli bensin atau solar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 ini bisa juga dibaca sebagai refleksi dari buruknya sistem transportasi umum.

Di sisi lain, pemerintah juga tahu bahwa pemilik mobil bukan kalangan sosial yang terlalu sensitif dengan harga BBM. Mahal atau murah, mobil sudah menjadi kebutuhan atau gaya hidup. Maka mengendalikan pola konsumsi BBM mereka dengan instrumen harga, tidak akan banyak berpengaruh. Tingkat konsumsi energi mereka akan berkurang jika transportasi massal disediakan dan tata kota dibenahi. Sebab, orang kaya bisa saja membeli bensin, tapi mereka tak akan pernah bisa membeli waktu. Bila sistem angkutan umum nyaman dan lancar, orang-orang kaya lebih memilih untuk tidak membuang waktu mereka dua jam di jalanan yang macet. Atau empat jam pulang pergi dalam sehari. Sehingga hidup hanya tersisa 20 jam saja. Dipotong tidur tujuh jam, maka tinggal 13 jam. Bila jam kerja normal delapan jam (09.00-17.00), maka waktu hidup mereka hanya tersisa lima jam.

Orang kaya tidak suka ini. Waktu adalah kreativitas, produktivitas, dan uang. Ini sudah dibuktikan orang-orang kaya di negara lain.

Dengan pembenahan tata kota, seorang anak yang tinggal di Jakarta Selatan tidak perlu membuang bensin untuk sekolah di Jakarta Pusat. London misalnya, menerapkan zona untuk pendidikan. Karena mutu pendidikan sudah standar, maka seorang anak hanya bisa sekolah di zona atau rayon yang sama dengan kode pos rumahnya. Dengan begitu, anak sekolah tak perlu berangkat subuh-subuh hanya karena alasan mengurangi kemacetan. Dan konsumsi BBM untuk mengantar anak sekolah bisa ditekan, karena 20 persen perjalanan di Jakarta adalah

urusan antar-jemput anak sekolah dan orang berangkat kerja.

Amerika adalah contoh negara yang buruk sistem transportasi umumnya (terutama antar-kota), sehingga konsumsi BBM-nya sangat tinggi. Infrastruktur jalan yang memadai (*interstate highway*), yang semuanya seperti jalan tol tapi gratis, membuat orang Amerika lebih suka berkendara daripada naik angkutan umum. Situasi ini diperburuk dengan karakter mobil-mobil Amerika yang terkenal boros BBM. Terutama di musim liburan *summer* alias *driving season* di bulan Juni-Agustus.

Harga BBM yang tahun 2008 lalu melambung tinggi, memang terbukti bisa sedikit mengontrol kebiasaan orang Amerika mengkonsumsi BBM, dan banyak produsen-produsen mobil mereka mulai merancang mobil-mobil irit bensin.

Tapi apakah instrumen harga bisa diberlakukan untuk mengontrol orang Indonesia mengkonsumsi BBM? Aku khawatir ini hanya jalan pintas atas ketidakmampuan kita mencari terobosan penghematan BBM dari pengaturan sistem transportasi dan tata kota.

Di sisi lain, dampak pencabutan subsidi lebih nyata bagi nelayan yang tak bisa melaut dan bagi orang-orang kecil yang konsumsi BBM-nya justru tidak signifikan. Pak Bejo hanya memiliki sepeda motor dan sebuah mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil bumi. Mahal atau murahnya BBM tidak akan membuat Pak Bejo menggunakan mobil *pick up*-nya melebihi kebutuhan yang semestinya.

Tapi dengan sistem transportasi umum yang ditata ulang, juga pajak progresif untuk pembeli kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya (atas alamat STNK yang sama), maka konsumsi BBM bisa ditekan.

Strategi penghematan BBM dengan *gebyah uyah* atau pukul rata

tidak saja membuat target sasarannya tidak tercapai, tapi justru menimbulkan jatuhnya korban yang tidak perlu. Sementara orang-orang kaya yang secara ekonomi tidak sensitif pada harga BBM, akan terus memenuhi jalanan dengan mobil-mobil mereka.

Bila sistem transportasi massal sudah dibenahi, dan budaya orang berkendaraan pribadi telah berubah, barulah kita bisa melakukan penghematan energi secara signifikan.

***

BLT: Bantuan Langsung Tandas

Taksi sudah mulai keluar tol dan kini memasuki jalan umum. Aku melirik argo sambil mengira-ngira apakah uangku cukup sampai di rumah. Tak sengaja mataku bersiborok dengan koran *TopSkor* yang digeletakkan di jok depan. *Aha*, ini dia bacaan rakyat yang sebenar-benarnya. Jadi perdebatan tentang isu-isu ekonomi sesungguhnya bukan konsumsi rakyat.

Ketika pertamakali diluncurkan pada 6 Januari 2005, koran *TopSkor* beroplah 53 ribu eksemplar. Kurang dari setahun, oplahnya meloncat 400 persen menembus 150 ribu eksemplar. Bandingkan dengan tabloid *Bola* milik raksasa Kompas-Gramedia yang diklaim bertiras 400 ribu eksemplar, tapi sudah terbit sejak 1984. Atau tabloid *GO* milik Grup Bakrie yang kalah pamor.

Inilah yang dibaca rakyat. Seperti halnya *Pos Kota*. Pantas saja bila calon Wakil Presiden Boediono mengelak meladeni pertanyaan wartawan tentang neoliberalisme dengan berujar, "Label-label besar itu apakah ada gunanya bagi rakyat?" Aku membatin saja, mestinya Celli memasang iklan mendukung kenaikan BBM di koran-koran seperti ini, cukup seperempat halaman. Tak perlu satu halaman di *Kompas*.

Kini aku melirik jarum indikator bensin di depan Pak Sopir. Masih setengah. Taksi yang aku tumpangi ini jelas disubsidi. Bila harga minyak dunia 120 dolar per barel seperti tahun 2008 kemarin, subsidinya bisa membengkak hingga Rp 200 triliun. Padahal yang dialokasikan di APBN 2008 hanya Rp 135 triliun.

Apalagi, konon subsidi BBM itu salah sasaran. Ada 40 persen rumah tangga kaya justru menikmati 70 persen subsidi, sedangkan 40 persen keluarga miskin hanya menikmati 15 persen dari angka subsidi itu. Dengan argumen ini, maka subsidi layak dicabut.

Menurut Ibu Sri Mulyani di majalah *Tempo* (15-21 Juni 2009), kalau semua orang mendapat subsidi BBM murah, rakyat miskin hanya akan menikmati subsidi dari naik *busway* atau angkot. Sebaliknya, kelas menengah atas menikmati subsidi lebih banyak. Termasuk untuk aku, sopir taksi, dan pengusaha taksi. Makanya aku menggerutu soal pencabutan subsidi.

"Mereka punya pendingin udara, kulkas, motor, atau mobil," kata Mbak Ani.

Tapi kalau yang disebut-sebut motor, aku jadi ingat tukang ojek, tukang sayur, atau tukang jual bubur ayam keliling. Juga loper koran. Juga buruh kurir surat, satpam, atau penjaja roti di komplek-komplek perumahan. Apa mereka termasuk golongan yang tidak berhak menikmati subsidi?

Mereka ini adalah batang piramida sosial yang paling sial, letaknya di tengah. Jaminan sosial tidak dapat, BLT juga tidak, tapi gajinya pas dengan upah minimum (UMR). Mereka ini kadang lebih menderita dari warga miskin yang masih bisa berobat gratis ke rumah sakit lewat Jamkesmas dan mendapat jatah raskin (beras untuk orang miskin).

Sedikit di atas pemilik motor itu adalah keluarga yang "terpaksa" membeli mobil tua bekas yang sering mogok, karena anaknya tiga (yang tak mungkin lagi tertampung di jok motor). Dan harga bensin yang harus mereka beli sama dengan harga untuk Bu Sri Mulyani, Bung Celli, Mas Goenawan Muhamad, atau Pak Fikri Jufri.

Sepintas memang masuk akal. Subsidi memang salah sasaran. Tapi masalahnya, untuk menjadikan subsidi tepat sasaran juga tidak mudah, bukan? Ada ide pemberian kupon, penjatahan bensin, dan lain-lain, yang kita semua skeptis akan pelaksanaannya di lapangan. Maka yang bisa dilakukan pemerintah barangkali bukan membabi-buta mencabut

subsidi BBM dari masyarakat miskin (dan lalu memberikannya kembali dalam bentuk BLT). Sebab, pencabutan subsidi yang pukul rata akan menimbulkan efek domino seperti inflasi dan kenaikan harga di tingkat bawah, yang pada gilirannya akan memperburuk daya beli mereka.

Bu Menteri benar, rakyat kecil itu barangkali hanya menikmati subsidi waktu naik angkutan umum. Tapi subsidi BBM bukan *an sich* harga BBM-nya, melainkan efek ekonomi atas tingkat harga itu. Sebab, antara orang miskin dan orang kaya tercampur secara sosial di masyarakat. Mereka tidak hidup dalam sistem yang dipenuhi tembok pemisah.

Dengan mencabut subsidi pukul rata, ini seperti mengincar ikan besar dengan mengebom terumbu karang. Ikan-ikan terkapar, ekosistem *modar*, laut pun tercemar. Nelayan adalah contoh paling gamblang bagaimana solar yang tidak terbeli membuat mereka tak bisa melaut, meski di saat yang sama, pemilik mobil solar tidak lagi menerima subsidi. *Ah*, Bu Menteri pasti tahu ini.

Karena target subsidi di masyarakat tak mudah dipisahkan, maka logika mencabut subsidi dari masyarakat miskin jelas tidak tepat. Sebaiknya justru pemerintah menarik kembali uang subsidi yang diberikan kepada orang kaya.

Caranya?

Pemberlakuan pajak progresif. Entah pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan, dan lain sebagainya. Orang kaya boleh saja menikmati subsidi BBM, tapi pemerintah akan mengambilnya lagi dari sektor yang tidak membuat orang miskin turut menjadi korban. Jadi tidak dengan cara meledakkan terumbu karang, tetapi memisahkan ikan besar dan ikan kecil dengan memberikan umpan-umpan yang juga besar, agar yang besar berkumpul dan bisa dijaring. Umpan besar itu memang mahal.

Karena target subsidi di masyarakat tak mudah dipisahkan, maka logika mencabut subsidi dari masyarakat miskin jelas tidak tepat. Sebaiknya justru pemerintah menarik kembali uang subsidi yang diberikan kepada orang kaya.

Mencabut subsidi dari orang miskin dan mengembalikannya dalam bentuk BLT adalah cara yang meragukan. Efek domino dan korbannya sudah pasti, tapi BLT-nya belum tentu bisa menutup inflasi dan efek berantai naiknnya harga sembako.

Ambil contoh, kenaikan BBM tahun 2005 (dari Rp 1.800 ke Rp 2.400 per liter bensin) telah memicu inflasi *year on year* rata-rata delapan persen. Itu berarti, pada saat itu, nilai uang kita telah tergerus delapan persen akibat kenaikan harga barang. Makan di warung Tegal yang tadinya Rp 5.000 menjadi Rp 5.400. Naik ojek yang tadinya Rp 3.000 jadi Rp 4.000. Angkot pasti naik antara Rp 500 hingga Rp 1.000. Begitu juga dengan harga-harga sembako. *Nah*, kalau sudah begini, uang BLT untuk warga miskin akan sontak lenyap seketika dimakan inflasi.

Di sisi lain, orang kaya yang kehilangan subsidi BBM, tidak akan terlalu terpengaruh, karena mobil-mobil mereka tetap harus berjalan. Sebaliknya, dengan sistem yang mereka kuasai, orang-orang kaya akan menaikkan aneka tarif barang dan jasa untuk menutup pengeluaran akibat kenaikan harga. Sementara orang miskin tak punya daya tawar seperti itu. Mereka yang sebagian besar adalah buruh, adalah korban harga, bukan penentu.

Sekali lagi, mengapa tidak kita balik saja: membiarkan subsidi untuk semua orang, lalu mencabutnya lagi dari orang-orang kaya dalam bentuk pajak?

Lagian, subsidi BBM yang dianggap tidak tepat sasaran itu, jelas bukan salah rakyat. Tapi struktur ekonomi yang timpanglah yang jadi biang keladinya. Jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan kurang dari 2 dolar per hari jumlahnya 60

persen dari penduduk. Belakangan, isu ini jadi bahan kampanye calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa ada 100 juta penduduk Indonesia yang penghasilan per harinya hanya Rp 20 ribu.

Simak juga data yang dilansir oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang profil pemilik-pemilik rekening di bank. Pada Maret 2009, ada dana sebesar Rp 824 triliun yang tidak masuk dalam program penjaminan. Dana yang jumlahnya nyaris sebesar APBN itu, ternyata hanya dimiliki oleh 79.957 rekening saja. Itulah rekening yang tidak dijamin pemerintah karena jumlahnya di atas Rp 2 miliar.

Sementara di sisi lain, ada uang Rp 937 triliun yang dijamin pemerintah, yang dimiliki justru oleh 82,4 juta pemegang rekening. Ini sama dengan 98 persen dari total pemilik rekening bank. Artinya, dalam hal tabungan saja, ada kesenjangan yang serius antara mereka yang buku tabungannya di bawah Rp 2 miliar dan yang lebih dari Rp 2 miliar. Konon lagi kita bicara penduduk dengan pendapatan Rp 20 ribu per hari yang bahkan tak pernah mengenal bank seumur hidupnya.

Kesenjangan sosial inilah yang membuat subsidi akan selalu terlihat salah sasaran. Siapa pun presidennya. Padahal, justru si kayalah yang paling boros mengonsumsi energi. Karena itu, subsidi energi, mau tak mau, pasti akan mereka nikmati. Namun di antara mereka, juga hidup jutaan orang yang akan terimbas bila subsidi dicabut.

Maka, sekali lagi, cara paling jitu mengatasi subsidi salah sasaran adalah bukan dengan mencabut subsidi BBM, tapi mengambilnya kembali dari orang-orang kaya. Kecuali, bila program BLT itu memang semula diniatkan untuk kampanye politik. Menjadi gula-gula kekuasaan.

Program BLT digenjot menjelang pemilu, lalu “lemah syahwat”

setelahnya. Bila ini yang terjadi, maka tak heran bila daerah-daerah tujuan BLT bisa "disulap" (dengan huruf "L") menjadi lumbung-lumbung suara dukungan untuk pemerintah yang berkuasa. Bahkan kekuatan politik yang semula anti-BLT pun, tiba-tiba mengklaim ikut memperjuangkan BLT menjelang hari pemilihan. Ini artinya, BLT memang (hanya) mujarab secara politik. Tidak bisa lebih.

BLBI

Lagi pula, yang layak disebut subsidi salah sasaran itu sebenarnya bukan subsidi BBM, melainkan subsidi perbankan. Setiap tahun rata-rata APBN mengalokasikan Rp 50-an triliun untuk membayar bunga obligasi rekapitulasi perbankan. Sejumlah kalangan percaya bahwa inilah subsidi salah sasaran yang sesungguhnya, namun tak pernah dianggap sebagai beban ekonomi oleh pemerintah. Juga tak pernah dipersoalkan—bahkan dianjurkan—oleh IMF (International Monetary Fund) atau Bank Dunia.

Sejumlah bank tetap menerima kucuran bunga obligasi, meski bank-bank tersebut telah berpindah tangan ke pihak asing. Pembayaran bunga obligasi rekap ini adalah buntut dari kebijakan pemerintah menyelamatkan perbankan nasional akibat krisis (termasuk kucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/BLBI), tapi tak pernah berhasil mengusut secara tuntas mal-praktik di dunia perbankan yang dilakukan para konglomerat dan bankir.

Presiden yang mengaku pro-rakyat seperti Megawati Soekarnoputri di masa pemerintahannya bahkan mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada para obligor yang dianggap telah melunasi kewajibannya (Inpres No. 8/2002). Kebijakan ini dinamakan *release and discharge*. Padahal, pernah ada Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan

(TBH KKSK) yang dibentuk pemerintah, yang menyatakan bahwa, “Tidak ada satu pun pemegang saham yang memenuhi kewajibannya...”

Salah satu anggota TBH KKSK adalah pengacara kondang, Todung Mulya Lubis. Tapi tak lama berselang, Todung (namanya masuk di iklan mendukung harga BBM naik) justru menjadi pengacara Anthony Salim, bekas pemilik BCA yang dihadiahi SKL oleh pemerintah.

Kebijakan membebaskan bankir dan konglomerat ini dilanjutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian memicu hak interpelasi di DPR mengenai penyelesaian BLBI (Februari 2008). Tapi interpelasi itu kandas, dan Jaksa Agung bahkan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) untuk para obligor dengan alasan tim Jaksa 35 tak menemukan adanya pelanggaran hukum.

Satu bulan setelah itu, Maret 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekuk Jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima upeti sekitar Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani, karena telah meloloskan bekas pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dari kasus BLBI. Transaksi suap menyuap itu dilakukan di rumah Sjamsul Nursalim di Jakarta (Sjamsul sendiri sudah lama bermukim di Singapura sejak pamit berobat ke Kejaksaan Agung di masa Marzuki ‘Kiki’ Darusman).

Kasus upeti antara Urip dan Artalyta ini berhenti begitu saja setelah keduanya divonis 20 tahun dan 5 tahun penjara. Kasus ini tak dikembangkan lebih jauh, pada pengusutan kasus BLBI-nya. Bila Anda bekerja sebagai wartawan yang mengikuti setiap detil rangkaian sejarah kasus BLBI, otak kita seperti diperkosa untuk menerima realitas demi realitas yang ganjil, bodoh, dan tak masuk akal.

Karena itu, di kabin taksi siang itu, aku tidak tertarik membicarakan subsidi BBM yang katanya salah sasaran, dibandingkan BLBI. Ini semua gara-gara Pak Sopir taksi yang terlanjur mengaduk-aduk otakku dengan urusan bensin. Belum lagi terpancing berpikir soal BLT.

Kalau sampai Pak Sopir itu tahu bahwa uang BLT yang dibagi-bagikan ke tetangganya disebut-sebut sebagai hasil utang luar negeri, aku makin kerepotan menjelaskannya. Yang mengungkap ini adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution di gedung DPR, 9 Juni 2009.

Menurut Anwar, bantuan langsung tunai tergolong kelompok pertama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang dananya berasal dari Bank Dunia. Dahsyatnya lagi, skema utang itu termasuk utang komersial karena bunganya mencapai 12-13 persen. Bukan pinjaman lunak yang rata-rata bunganya hanya sekitar 4-6 persen.

Tentu saja sinyalemen ini dibantah Menkeu Sri Mulyani dan para ekonom pendukung pemerintah. Menurut mereka, dana BLT untuk 19,1 juta kepala keluarga itu adalah dana alokasi dari subsidi BBM.

“Dalam pinjaman yang bentuknya program, pemerintah bisa pinjam, namanya pinjaman program,” tegasnya.

Sebenarnya pemerintah tak usah kebakaran jenggot. Orang-orang kecil juga tahu, kalau uang sudah tercampur di kantong memang tak penting lagi sumbernya dari mana, yang penting alokasinya ada dan jumlahnya sama. Yang penting pembukuannya, kata pedagang di pasar.

Tapi kalau duit utang itu berbunga? *Nah*, inilah yang perlu penjelasan. Siapa yang akan menanggung bunganya? Apakah “dana asli” BLT dari subsidi BBM yang masih parkir entah di

mana itu juga berbunga? Apakah nilai bunganya sama?

Apakah DPR tahu bahwa duit BLT yang dibagi-bagikan sekitar Rp 5-6 triliun per tahun itu "ditalangi" dari duit utang yang berbunga? Dan bukankah utang berbunga itu biasanya untuk kegiatan produksi yang menghasilkan laba?

Bukankah para ekonom itu tahu, bahwa mengambil utang berbunga rendah sekalipun, untuk semata-mata keperluan konsumsi, adalah tindakan bodoh dalam ekonomi?

Program BLT digenjot menjelang pemilu, lalu "lemah syahwat" setelahnya. Bila ini yang terjadi, maka tak heran bila daerah-daerah tujuan BLT bisa "disulap" (dengan huruf "L") menjadi lumbung-lumbung suara dukungan untuk pemerintah yang berkuasa. Bahkan kekuatan politik yang semula anti-BLT pun, tiba-tiba mengklaim ikut memperjuangkan BLT menjelang hari pemilihan. Ini artinya, BLT memang (hanya) mujarab secara politik.

Kedaulatan atas Sumur Minyak

Duh, urusan BLT memang bikin ruwet pikiran. Padahal BLT ini hanyalah "remah-remah" dari persoalan besar politik perminyakan di republik ini. Ada hal-hal yang lebih fundamental. Ada persoalan serius dengan kedaulatan kita atas sumur-sumur minyak kita sendiri.

Indonesia punya sumur minyak, baik yang di darat (*on shore*) maupun di lepas pantai (*off shore*). Sebagai negara yang baru merdeka dan masih berkembang, pencarian dan pengangkatan minyak dari dalam perut bumi membutuhkan dana yang besar dan teknologi, yang barangkali republik ini belum mampu mengusahakannya. Sementara di negara lain, saat itu sudah ada perusahaan-perusahaan penambang minyak yang

berpengalaman seperti Caltex, Shell, Conoco, Unocal, Exxon, Mobil Oil, atau British Petroleum, yang juga selalu berburu sumber-sumber minyak baru (belakangan nama-nama ini berubah karena proses merger atau ganti merek).

Dus, permintaan dan penawaran bertemu. Lalu dibuatlah kontrak kerja sama antara pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan tersebut. Dikenal dengan sebutan Production Sharing Contract (PSC) atau Kontraktor *Production Sharing* (KPS).

Isi kontraknya bervariasi. Tapi garis besarnya, selain akan mendapat keuntungan, pemerintah Indonesia juga ikut menanggung biaya produksi yang timbul. Jadi biaya mengeluarkan minyak dari perut bumi juga ditanggung pemerintah. Biaya ini disebut *cost recovery*.

Jadi, bila ongkos mengeluarkan minyak dari perut bumi itu Rp 1.000, ongkos itulah yang ditanggung pemerintah. Lalu bila minyaknya bisa dijual dengan harga Rp 2.000, maka keuntungan Rp 1.000 dibagi antara pemerintah dengan perusahaan tambang minyak.

Lantas, siapa yang menentukan biaya produksi alias *cost recovery*? Tentu saja perusahaan-perusahaan minyak itu. Sehingga tak jarang muncul tudingan telah terjadi penggelembungan biaya produksi (*mark up*), seperti temuan BPK beberapa waktu lalu. Dengan *cost recovery* yang tinggi, maka hasil penjualan minyak pemerintah menjadi semu.

Itu baru satu hal.

Hal lain, kontrak-kontrak pertambangan yang usianya sudah puluhan tahun itu juga membuat pemerintah tidak berdaulat atas minyak mentah yang diambil dari perut bumi sendiri. Perusahaan-perusahaan minyak itu belum tentu menjual minyak

mentahnya kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri. Mereka terikat dengan pembeli di negara lain.

Sehingga tak heran bila pemerintah Indonesia tetap harus mengimpor BBM. Yang diimpor bukan hanya minyak mentah, melainkan BBM jadi. Setiap hari, pemerintah membelanjakan sekitar Rp 1 triliun untuk impor BBM. Dari jumlah tersebut, separonya untuk membeli minyak mentah, dan separonya lagi untuk membeli BBM jadi. Mestinya, jumlah minyak mentah atau BBM jadi yang diimpor, sama dengan jumlah kekurangan kebutuhan. Dengan demikian, kita bisa menghemat devisa.

Kepalaku yang awam ini selalu dipenuhi pertanyaan, daripada setengah triliun dibelanjakan setiap hari untuk membeli minyak mentah, mengapa kita tidak membeli minyak mentah produksi sumur sendiri dari para KPS itu? Jangan-jangan harganya lebih hemat karena tidak perlu biaya tambahan pengiriman tanker lintas benua dan lain sebagainya. Cukup diangkut dari Samarinda ke Balikpapan, misalnya. Atau dari Bojonegoro ke Cilacap. Atau jangan-jangan lebih murah minyak impor? *Wah*, pasti ada yang salah bila minyak dari luar lebih murah dibanding dari dalam, yang *notabene* tak butuh biaya transportasi.

Tapi bila harganya sama-sama berpatokan pada harga internasional, mengapa pula pemerintah seolah tak berdaya mendiktekan ketentuan dalam kontrak KPS agar semua produksi minyak mentah mereka, dijual saja pada kilang di dalam negeri untuk diolah menjadi BBM jadi?

Memang ada ketentuan untuk menjual minyak dan gas bagi kebutuhan domestik "paling banyak" 25 persen (Peraturan Pemerintah/PP No. 35/2004). Entah, mengapa pemerintah lebih senang menggunakan frase "paling banyak" dibanding "paling sedikit" atau "sekurang-kurangnya". Bunyi peraturan

pemerintah yang seperti itu, di otakku yang *ngeres* ini, lebih terdengar seperti bunyi draf yang disusun oleh kontraktor minyak asing, dan pemerintah tinggal teken.

Mengapa minyak mentah di depan mata justru diimpor ke luar negeri, dan pemerintah malah membeli minyak mentah dari Timur Tengah? Ini terlalu rumit bagi nalarku.

Demikian halnya dengan BBM jadi. Daripada setiap hari berbelanja Rp 500 miliar untuk BBM jadi, mengapa kita tidak menyuling sendiri BBM-BBM itu? Apakah Indonesia tidak mampu membuat BBM sendiri?

Tentu saja mampu. Kita punya kilang Cilacap, Balongan, Balikpapan, atau Pangkalan Berandan. Tapi tetap saja kita (dibuat?) tidak mampu. Kapasitas produksi kilang-kilang kita belum mencukupi kebutuhan BBM secara nasional. Padahal bila mau, investasi membangun kilang mestinya menjadi prioritas agar devisa bisa dihemat dan barangkali rakyat bisa menikmati harga BBM lebih bersahabat.

Ahli minyak akan punya seribu satu penjelasan tentang jenis *crude* dan spesifikasi kilang-kilang kita yang barangkali tidak cocok untuk penyulingan. Lalu mengapa tidak dibangun yang cocok-cocok saja?

Ah, memang lebih enak jadi orang awam. Asal *nyeletuk*. Asal *njeplak*.

***

Bangsa Konsumen Belaka

Taksi mulai memasuki areal perumahan. Rutenya berputar-putar karena jalanan di komplek banyak diportal. Sopir taksi sering kerepotan karena bisa masuk komplek tapi selalu kesulitan mencari jalan keluar. Aku sendiri termasuk yang dirugikan tentang portal. Argo taksi jadi bertambah karena rute jadi memutar, terutama di atas jam 10-11 malam.

Memang banyak hal yang menganggu akal, bila tak boleh dilewati, lalu untuk apa jalan dibangun?

Konon untuk menghindari gangguan keamanan. Padahal bila ada orang yang benar-benar berniat jahat, portal-portal semacam itu bukanlah halangan. Orang-orang mapan ini sekadar tak ingin di depan rumahnya ribut dilewati kendaraan orang lain. Enggan mendengar denting sendok beradu piring para penjual ketoprak yang bertubi-tubi, atau bunyi klakson penjual roti.

Keamanan komplek diserahkan pada satpam bayaran yang jumlahnya tak seberapa, dan tak ada lagi budaya gotong-royong jaga malam bergiliran. Karena itu satpam pun senang dengan ide pemasangan portal, karena lingkup pintu keluar-masuk komplek yang harus mereka jaga semakin sedikit, dan itu berarti pekerjaan lebih ringan dan tak perlu selalu berpatroli.

Pemprov DKI Jakarta pun geram dengan portal-portal yang mulai mengganggu jalan umum itu. Semula pagar atau portal ini dibangun secara swadaya saat terjadi aksi-aksi penjarahan di masa reformasi 1998. Namun penggunaannya terus berlanjut dan melingkupi wilayah-wilayah perumahan biasa, yang tak ada sangkut-pautnya dengan titik rawan penjarahan.

Dalam catatan pemerintah Jakarta Barat saja, ada 1.070 portal, 129 pagar, dan 2.066 polisi tidur yang dibangun

melintang di jalanan umum. Pemerintah Jakarta Selatan punya masalah dengan 1.124 buah portal. Perintah bongkar pun lalu disampaikan Pemprov DKI sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Menurut aturan itu, setiap pemasangan portal di jalan umum harus seizin Gubernur DKI Jakarta. Bagi yang melanggar, hukumannya 90 hari kurungan atau denda Rp 500 ribu hingga Rp 30 juta.

Karuan saja saat penertiban portal digalakkan sekitar Mei 2009, orang-orang kaya di sejumlah komplek perumahan seperti Pondok Indah atau Kepala Gading berteriak protes. Mereka juga protes saat lingkungannya dilalui jalur busway, dan tiba-tiba menjadi aktivis lingkungan dadakan dengan alasan melindungi pohon-pohon palem.

Tapi di sisi lain, pemerintah juga menerapkan standar ganda. Jalanan umum seperti Jalan Mohammad Yamin di Jakarta bahkan sekarang mati total karena diportal Kedutaan Besar Inggris. Ada pintu-pintu besi berlapis yang membuat jalan itu kini sama sekali tak bisa digunakan masyarakat, kecuali yang hendak bertamu ke kedutaan.

Mereka barangkali takut bom. Takut nasibnya seperti Kedutaan Australia di Jalan Rasuna Said yang diledakkan dengan bom mobil pada September 2004 atau rumah Duta Besar Filipina di Jalan Diponegoro yang luluh lantak pada Agustus 2000. Bila alasan ini dituruti, mestinya semua orang juga punya hak memortal jalan dengan alasan keamanan. *Toh*, jalan di depan Keduataan Besar Amerika dan rumah dubesnya tidak ditutup. Karena itu tak heran bila Kedutaan Besar Inggris jadi sasaran demonstrasi yang menuntut perlakuan adil pemerintah untuk urusan portal.

Sebenarnya sikap pemerintah dalam urusan portal memang mencerminkan bagaimana mereka memperlakukan “rakyat asing” dan “rakyat sendiri”. Tak heran bila minyak mentah atau

gas lebih diutamakan untuk ekspor daripada untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Minyak mentah Indonesia memang penuh ironi. Tapi, komoditas lain seperti minyak sawit, kakao atau coklat, dan timah, juga begitu.

Dalam sebuah seminar di Jakarta, ekonom Hendri Saparini "menyihir" orang-orang sepertiku dengan statistik yang mencengangkan. Betapa tidak, Indonesia adalah produsen minyak mentah sawit (CPO) terbesar di dunia dengan kontribusi 44 persen. Malaysia sudah kita pecundangi di peringkat kedua dengan produksi 43 persen dari kebutuhan dunia.

Ironisnya, Indonesia hanya puas sebagai produsen bahan baku, dan warga negaranya hidup dengan lonjakan harga minyak goreng yang luar biasa. Minyak goreng curah yang dulu Rp 4.000 per kilogram tiba-tiba melambung menembus Rp 10.000 awal tahun 2008 lalu. Selain—lagi-lagi—karena CPO dijadikan komoditas spekulasi di pasar dunia, kondisi ini juga akibat lebih banyak pihak yang menjual CPO ke luar negeri daripada untuk memenuhi pasar dalam negeri. Persis dengan minyak bumi tadi.

Bayangkan saja, republik ini memproduksi 19,2 juta ton CPO per tahun, dan hanya 5 juta ton saja yang diserap pasar domestik (*Kompas*, 7 Juli 2009). Sisanya diekspor.

Ditambah produksi Malaysia, kedua negara ini memasok 80 persen kebutuhan CPO dunia. Tapi harga justru ditentukan di pasar CPO Rotterdam. Ini sama sekali tak masuk akal orang awam, karena perdagangan CPO di Eropa hanya 2,5 juta ton per tahun. Bagaimana mungkin volume pasar yang kecil mendikte produsen raksasa seperti Indonesia atau Malaysia.

Karena harga yang tinggi di Rotterdam, maka orang beramai-ramai melakukan ekspor. Akibatnya, pasokan CPO berkurang

dan produsen minyak goreng lokal membeli harga CPO dengan "standar internasional" yang mahal dan sudah mengandung unsur spekulasi dari para tengkulak. Ini menyedihkan. Kita yang telanjur kehilangan hutan karena konversi lahan menjadi sawit, dan orang-orang Sumatera yang di pekarangan rumahnya bisa tumbuh sawit, harus membayar harga CPO yang sama dengan keluarga Mr & Mrs Smith yang sebagian pekarangan rumahnya adalah kolam renang.

Di sisi lain, Indonesia hanya memanfaatkan CPO untuk keperluan minyak goreng (itu pun gagal menjadikan minyak goreng sebagai komoditas yang murah). Padahal produk turunan CPO bermacam-macam, mulai dari bahan margarin, sabun, sampo, kosmetik, hingga es krim. Betul, kita mengimpor semua itu. Sehingga nilai tambah CPO bukan kembali ke Indonesia, melainkan *nyangkut* di negara lain.

Timah pun demikian. Kita adalah produsen timah terbesar kedua di dunia (22 persen) setelah China (45 persen). Volume ekspor timah kita meningkat terus sejak tahun 2003 hingga puncaknya di tahun 2008 yang mencapai 1 miliar dolar atau sekitar Rp 9 triliun, berdasarkan data BPS.

Ekonom penyokong pemerintah akan mengatakan Indonesia sukses meningkatkan produksi timah. Tapi bagi ekonom oposisi seperti Hendri Saparini, cara membacanya jadi lain: berarti Indonesia gagal memanfaatkan nilai lebih timah menjadi produk jadi, dan hanya puas sebagai eksportir bahan mentah.

Adapun negara lain yang tidak punya timah, mengembangkan teknologi pengolahan dan mengirimnya kembali ke Indonesia dalam bentuk barang jadi dengan nilai ekspor mencapai 169 juta dolar (2007), dan harga yang jauh lebih mahal. Itulah arti hilangnya nilai tambah.

Orang-orang sepertiku yang pernah bekerja di radio dan

televisi, termasuk generasi konsumen timah dalam bentuk alat-alat *broadcast*. Harganya? Jangan ditanya. Dibandingkan dengan harga timah aslinya yang ditambang di Bangka-Belitung, jaraknya bak bumi dan langit.

Sebenarnya sikap pemerintah dalam urusan portal memang mencerminkan bagaimana mereka memperlakukan "rakyat asing" dan "rakyat sendiri". Tak heran bila minyak mentah atau gas lebih diutamakan untuk ekspor daripada untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Biji kakao atau coklat, nasibnya lebih tragis. Setelah Pantai Gading dan Ghana di Afrika, Indonesia adalah penghasil biji coklat terbesar di dunia (610 ribu ton pada tahun 2008). Tapi sebagian besar diekspor begitu saja dengan harga rendah karena tanpa diolah. Yang menentukan harganya pun New York Board of Trade.

Sedangkan anak-anak dan pacar-pacar kita menyantap coklat batangan dari Swiss atau Belgia yang *yummy* dan mahal. *Hmm*... andai mereka tahu bahwa di negeri itu tak ada sebatang pun pohon kakao yang tumbuh.

Lantas mengapa sistem ekonomi kita hanya piawai mengambil dari alam dan gagal mengolahnya dengan nilai tambah yang dahsyat untuk kemaslahatan rakyat?

Di seminar itu, Hendri Saparini terus merangsek. Kalau hasil bumi selalu meningkat, tidak demikian halnya dengan industri manufaktur. Di dua layar raksasa, dia memaparkan grafik kemerosotan industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki.

Mengutip data BPS, sejak 2003 hingga 2008, pertumbuhan industri ini terus melorot dari semula 6,2 persen menjadi minus 3,6 persen. Sekali lagi, minus. Sebaliknya, impor produk tekstil justru meningkat tajam dari rata-rata hanya 250 ribu ton pada tahun 2005-2007, menjadi 561 ribu ton pada 2008.

Ini makin membuktikan bahwa Indonesia hanya puas menjadi penikmat hasil alam. Selain itu, kemerosotan industri tekstil disebabkan masuknya barang-barang impor. Leluasanya barang impor tersebut akibat liberalisasi perdagangan. Tahun 2008, Departemen Perdagangan mengeluarkan aturan yang memudahkan impor tekstil (Permendag No 15/2008). Tak heran, di tahun yang sama grafik impor langsung melonjak dan bersamaan dengannya, industri tekstil dalam negeri terbujur kaku.

Teori ekonomi konvensional memang selalu mengajarkan, bila ada barang lain, maka akan terjadi persaingan, dan industri dalam negeri dirangsang untuk efisien. Aku yang bukan sarjana ekonomi ingin membantah dengan rumus umum orang hidup: bila bisa untung hanya dari berdagang, untuk apa susah-susah membikin? Bila jadi importir sudah kaya, *ngapain* susah-susah bikin pabrik tekstil yang sering didemo buruh-buruhnya?

Bila hanya dengan jadi tengkulak pundi-pundi sudah bengkak, untuk apa pula pabrik diperbanyak?

Intinya, 230 juta penduduk Indonesia akan disulap jadi sekumpulan pasar belaka. Kumpulan konsumen saja. Bukan kumpulan orang-orang produktif yang terlatih mengembangkan nilai tambah dan gemar berproduksi. Bangsa konsumen, bukan bangsa produsen. Ini akibat serangkaian kebijakan yang kurang merangsang dan memberi insentif pada kegiatan-kegiatan

Ekonom penyokong pemerintah,semisal Chatib Basri, akan mengatakan Indonesia sukses meningkatkan produksi timah. Tapi bagi ekonom oposisi seperti Hendri Saparini, cara membacanya jadi lain: berarti Indonesia gagal memanfaatkan nilai lebih timah menjadi produk jadi, dan hanya puas sebagai eksportir bahan mentah.

produksi, dibandingkan konsumsi. Bunga bank dikerek terus untuk kosmetik politik agar wajah inflasi tak tinggi, tapi akibatnya para produsen tak berani mengambil kredit untuk usaha.

Di sisi lain, kredit konsumsi digenjot habis-habisan. Bayangkan saja, sekarang lebih mudah membeli motor atau mobil dengan cara kredit daripada kontan. Ini sudah di luar nalar kita. Mereka yang punya uang kontan, justru tak bisa membeli barang. Jadi kita dipaksa berutang dan membayar bunga untuk menghidupi perusahaan-perusahaan penyedia jasa keuangan.

Aku yang wartawan beruntung mendapat pencerahan seperti ini dari mendatangi seminar-seminar. Bagaimana dengan sopir taksi di depanku yang bisanya hanya mengantar orang ke seminar?

Ah, justru itu tugas Anda. Menuangkan hasil seminar ke koran dan televisi, agar orang-orang seperti sopir taksi ini membaca dan menontonnya.

Tapi berita-berita kebijakan ekonomi di koran selalu kalah dengan cerita kriminal. Di televisi kalah dengan si cantik Manohara atau kisah Ryan, jagal dari Jombang. Katanya, berita sawit dan tekstil *rating*-nya rendah. Bila begini terus, oplah koran umum juga akan jatuh dan tak akan bisa mengejar oplah *TopSkor*. Begitulah kesimpulan dari lembaga survei dan riset pasar AGB Nielsen. Katanya, itu sudah mencerminkan permintaan pasar: penonton memang lebih suka Manohara dan Ryan daripada CPO dan biji kakao.

Ingat Manohara, jadi ingat selorohan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa saat ditanya wartawan soal respon pemerintah yang dinilai diskriminatif. Pemerintah sigap merespon kasus prahara rumah tangga Manohara ketimbang kasus Prita Mulyasari—pasien Rumah Sakit Omni yang dipenjara karena

mengeluh *via* email. "Itulah bedanya rakyat jelita dengan rakyat jelata," katanya enteng sembari mencolek rujak buah.

Jangan menyerah. Mari kita bikin kemasan berita-berita kebijakan ekonomi yang menarik agar bisa mengalahkan Manohara dan Ryan. Para wartawan *sih* tidak menyerah. Yang mudah menyerah biasanya pemilik televisi, pemilik koran, dan pemasang iklan.

"Pagar putih depan, *stop* ya, Pak..."

Taksi berhenti. Argonya Rp 67.500.

"Bensin sudah turun tiga kali, *kok* argo *sampean* belum turun-turun?"

"Jaga-jaga lah, Bang. Takut nanti naik lagi pula. *Hehehe*..." jawab sopir taksi.

Kali ini giliran dia yang menjawab sekenanya. Sampai pelantikan presiden 20 Oktober 2009, mana ada yang berani menaikkan harga bensin, biarpun harga minyak mentah dunia menyundul langit. Argumennya karena pro-rakyat dan bukan pemerintahan neoliberal. Tapi setelah pelantikan, argumen mengikuti harga pasar biasanya akan kembali dikemukakan untuk melucuti subsidi. Mumpung baru terpilih, mandatnya masih kuat dan sedang berbulan madu dengan rakyat. Inilah saat yang tepat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populis, seperti menaikkan harga BBM atau mencabut subsidi.

Argumen seperti ini dulu sering kudengar dari pengamat ekonomi Sri Mulyani. Sebelum beliau menjadi pejabat negeri.

"Nanti keluar kompleknya lewat mana, Bang? Sudah lupa saya, karena banyak kali belok-beloknya tadi..."

Jawabannya sudah kuhafal di luar kepala, saking seringnya menghadapi pertanyaan serupa.

***

BAGIAN KEDUA

Komersialisasi Sampai Mati

Priiiiit... Bayar! (Ini Bukan Polantas)

Pertama kali datang ke Jakarta banyak orang heran dengan konsep "serba membayar parkir". Masuk toko bayar parkir, masuk kantor bayar parkir, mampir ke ATM juga kena parkir. Taksi masuk hanya untuk *drop off* penumpang sekalipun tetap harus bayar parkir.

Pendek kata, setiap melewati portal sebuah bangunan, harus bayar uang parkir. Mungkin lebih tepat disebut uang masuk. Sebab, di beberapa lokasi, ada yang tidak memberikan toleransi satu menit pun: lewat portal berarti bayar. Contohnya, di kantor pusat BNI, bank plat merah, di Jalan Sudirman, Jakarta. Di Hotel Sultan (dulu namanya Hotel Hilton), konsep parkirnya bahkan berubah menjadi "jalan tol" untuk para pengendara yang enggan berjalan jauh memutar di Senayan.

Yang lebih tak masuk akal, karyawan harus membayar atau berlangganan parkir di halaman kantornya sendiri! Aku punya kawan wartawan yang lebih memilih memarkir kendaraannya di gedung YTKI Jalan Gatot Subroto, daripada kena tarif parkir di kantornya, di belakang Menara Jamsostek. Kasihan. Wartawan yang biasanya galak mengkritisi kebijakan ini dan itu tak kuasa melawan rezim parkir di kantornya sendiri.

Di kota kecil seperti Lumajang, Jawa Timur, bukannya tak ada tukang parkir. Aku ingat di masa kecil, mereka berseragam biru laut dan selalu membawa karcis kuning. Operasinya hanya di dua ruas jalan protokol dan pusat pertokoan atau tempat wisata.

Tahun 1980-an, sepeda angin ditarif parkir Rp 100 di pinggir jalan (parkir *on street*). Sementara parkir dalam gedung (*off street*) hanya ada di bioskop atau tempat wisata. Tarifnya juga sama. Tarif parkir untuk motor Rp 200 dan mobil Rp 500. Tak ada pembatasan waktu.

Kalau hanya mampir sebentar, kita bahkan cukup bilang, "Sebentar saja *kok*, Pak", dan petugas pun tak jadi menyobek karcis atau menyelipkan karcis di jok sepeda motor atau kaca mobil. Mereka juga tak menarik parkir bila sang pemilik menunggui sendiri kendaraannya. Misalnya, suami yang tetap duduk di motor atau dalam mobil, sementara istrinya masuk toko. Sebab, konsep parkir di masa itu adalah "memberikan jasa pengamanan kendaraan". *Lha*, kalau kendaraannya sudah ada yang menjaga, apanya lagi yang mau ditarik bayaran.

Dulu, masuk kantor-kantor pemerintahan parkirnya gratis. Parkir di halaman Bank Rakyat Indonesia (BRI) gratis. Sekadar membuka romantisme, BRI adalah bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Nama produknya Tabanas: Tabungan Pembangunan Nasional. Warna buku tabungan coklat muda bergambar *celengan*.

Begitu juga di kantor-kantor BUMN lain di Lumajang. Membayar listrik di kantor PLN, mengirim telegram di kantor Telkom, atau membeli perangko di kantor pos, semua bebas bea parkir. Ada satpam yang digaji untuk menjaga keamanan kendaraan tetamu yang datang. Ada juga yang baik hati memberi uang tips. Tapi tak memberi pun, peluit mereka tetap berbunyi, melayani.

"*Priiiiit*..."

Bunyi yang membuat tenang di hati.

Karena itu, ketika mulai menetap di Jakarta di era 1990-an, aku terkaget-kaget dengan urusan parkir. Apalagi tarifnya ugal-ugalan untuk ukuran daerah. Tarif parkir untuk mobil Rp 2.000 untuk satu jam pertama. Tiap jam berikutnya Rp 1.000. Bila Anda parkir selama satu jam, dua detik, maka sudah masuk jam kedua, dan akan kena Rp 3.000. Itu pun masih diusulkan kenaikan 100 persen oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta. Gubernur Fauzi Bowo ingin angka yang lebih tinggi. Para

pengusaha parkir bahkan mengusulkan tarif parkir Rp 7.500 untuk dua jam pertama. Alasannya, tarif Rp 2.000 tak menutupi biaya operasional. Entah biaya operasional mana yang dimaksud. Karena setahuku, perusahaan parkir bermodal portal dan gardu jaga, seperangkat komputer, gaji karyawan dan seragam. Lahan tinggal pakai, dan tak ada fasilitas tambahan lain seperti atap peneduh untuk kendaraan.

Lagi pula bukankah parkir di halaman toko atau pusat perbelanjaan adalah fasilitas yang harus disediakan toko itu kepada pembelinya? Bukankah itu adalah konsekuensi logis membuka usaha toko? Lantas mengapa pembeli masih harus membayar?

Yang lebih tak masuk akal adalah kantor pemerintahan atau swasta. Tidakkah orang-orang yang datang ke kantor itu adalah tamu-tamu mereka? Bukankah kehadiran tamu-tamu itu penting bagi kelangsungan usaha atau organisasi mereka? Bukankah ini sama dengan menarik uang parkir bagi tamu yang datang ke rumah kita?

Memang *sih*, tidak semua toko atau pusat perbelanjaan mengkomersialkan lahan parkirnya. Pusat perbelanjaan Hypermart di Puri, Jakarta Barat, misalnya, menyediakan lahan parkir yang sangat luas dan gratis untuk para pelanggan. Demikian pula dengan toko-toko Fuji Film di pojokan Jalan Matraman dekat perempatan Pramuka, Jakarta Timur atau di pojokan Jalan Menteng Raya. Di temboknya ditulis besar-besar: Parkir Gratis. Beberapa toko kelontong swalayan juga menyediakan parkir gratis dan mengumumkannya. Juga laboratorium Pramita di Warung Buncit.

Tapi di tempat lain, rata-rata harus membayar. Apalagi konsep parkir saat ini bukan lagi membayar jasa keamanan, tetapi menyewakan lahan. Jadi jangan heran, meski kendaraan kita jaga sendiri, tetap harus bayar parkir.

Lantas apa konsep dan hakikat parkir?

Tentu ada 1001 argumen untuk membenarkan logika parkir harus bayar. Bagi pemerintah daerah, parkir adalah instrumen pendapatan. Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, tahun 2008 lalu menargetkan pendapatan parkir Rp 25 miliar, meski yang terealisasi hanya Rp 19 miliar. Gara-gara hanya dapat *segitu*, tahun 2009 targetnya diturunkan menjadi Rp 20 miliar saja. Sebuah target yang membingungkan, di saat jumlah kendaraan di Jakarta justru meningkat.

Pemerintah konon juga menggunakan instrumen tarif parkir untuk mengendalikan kepadatan lalu lintas. Dengan tarif yang mahal, orang diharapkan tidak membawa mobil dan naik angkutan umum. Sekarang siapa yang naif: *lha wong* harga bensin naik saja tidak mempengaruhi kebiasan orang membawa mobil, apalagi hanya urusan tarif parkir. Kalau mau mengurangi kemacetan, kuncinya pada sistem transportasi umum dan tata kota. Bukan harga bensin, apalagi tarif parkir.

Three in one hanya memindahkan titik kemacetan, bukan mengatasinya. Kecuali tujuannya hanya untuk pemerataan rezeki bagi para joki, sopir taksi, dan menyuburkan praktik suap untuk polantas.

Itu alasan-alasan pemerintah daerah menarik retribusi parkir.

Sementara bagi toko, pusat perbelanjaan, atau perkantoran, penarikan bea parkir dilakukan untuk memastikan agar lahan mereka tidak dipenuhi kendaraan-kendaraan yang tidak ada kepentingannya dengan tempat itu. Misalnya, banyak orang parkir di gedung A (yang gratis) untuk menghindari parkir di gedung B yang berbayar. Atau parkir di gedung C yang kosong, karena areal di gedung D sudah penuh.

Alasan lain, banyak orang mengira, komersialisasi parkir ini

gara-gara perusahaan-perusahaan parkir yang bermodal portal *doang*, lalu menarik uang dari masyarakat. Padahal tidak hanya mereka. "Ideologi parkir" adalah ideologinya pemilik lahan, yaitu toko, pusat perbelanjaan, juga kantor-kantor. Sebab, perusahaan seperti Secure Parking atau Sun Parking hanya kebagian 5-10 persen. Selebihnya untuk pemilik areal tersebut. Aku sendiri belum pernah jalan-jalan ke kantor Secure atau Sun Parking, apakah karyawan mereka juga harus membayar parkir di kantor sendiri. Pasti liputannya akan seru, bila ternyata, di kantor pusat Secure atau Sun Parking, karyawannya justru digratiskan dari biaya parkir.

Jadi, bagi pemilik lahan itu, selama masih bisa dikomersialkan, mengapa pula harus digratiskan. Pemerintah daerah pun untung karena bisa menarik pajak 20 persen dari bisnis parkir *off-street* ini.

Sekarang di kota-kota kecil seperti Lumajang pun sudah *ketularan*. Kalau mampir di ATM BCA, meski mereka punya halaman sendiri, tetap kena parkir. Ruas jalan yang ditunggui tukang parkir semakin bertambah. Pokoknya setiap ada deretan toko, ada tukang parkir berseragam. Padahal bukan jalan protokol. Mestinya pemerintah membuat aturan agar usaha dengan luas sekian meter, harus menyediakan sekian persen untuk lahan parkir, agar tidak memenuhi jalanan dan bikin macet.

Kalau di kota sekecil Lumajang saja parkir sudah mewabah, apalagi kota-kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya,

Bagi pemerintah daerah, parkir adalah instrumen pendapatan. Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, tahun 2008 lalu menargetkan pendapatan parkir Rp 25 miliar, meski yang terealisasi hanya Rp 19 miliar. Gara-gara hanya dapat *segitu*, tahun 2009 targetnya diturunkan menjadi Rp 20 miliar saja.

Yogyakarta, Makassar, ataupun Banda Aceh. Tarifnya pun seolah universal: mobil Rp 2.000, motor Rp 1.000. Pihak yang menarik parkir juga sama saja dengan Jakarta: kantor pemerintah, perkantoran swasta, pusat perbelanjaan dan toko-toko ritel.

"*Priiiit*..."

Bunyi itu kini tak menenangkan lagi. Bahkan menggelisahkan. Sama gelisahnya dengan mendengar bunyi itu ditiup oleh Pak Polantas.

Curhat soal parkir ini bukan tentang angkanya, tapi filosofinya. Semua kalangan sudah mengkomersialkan sesuatu yang mestinya menjadi bagian dari pelayanan. Ada yang sudah bergeser dari cara pandang kita sebagai makhluk ekonomi. Cara pandang seperti ini menggejala hampir di semua lapisan masyarakat dan segala sendi kehidupan. Cara pandang "kalau bisa mendatangkan *duit*, kenapa harus gratis" membuat kita tak lagi menghargai nilai-nilai pelayanan kepada masyarakat.

Kalau kita membeli beras di toko Makmur, maka tempat parkir toko itu sebenarnya bukan barang substitusi. Dia tak tergantikan, karena areal parkir itu melekat pada toko Makmur. Bagaimana bila kita kehabisan uang setelah berbelanja dan tak mampu membayar parkirnya?

***

Air Swasta

Nah, bila untuk barang-barang "non-substitusi" seperti tempat parkir saja sudah dikomersialisasi, apalagi barang non-substitusi lain yang lebih penting seperti air. Begitu terlahir sebagai manusia, ada dua barang yang akan selalu kita butuhkan untuk bertahan hidup: udara dan air. Tanpa keduanya, orang mati seketika. Kedua barang ini tak bisa tergantikan dan harus melekat pada sistem kehidupan.

BBM masih bisa diganti energi matahari. Udara dan air, tidak. Lantas apa jadinya bila semuanya dikomersialkan?

Tapi *kan* untuk mendapatkan air tidak mudah? Butuh biaya. Jadi wajar *dong*, bila ada yang mengeluarkan modal untuk mendatangkan air dan berharap keuntungan?

Nah, ini seperti cara berpikir tentang parkir tadi. Karena ada potensi kemalingan, maka ada jasa parkir. Jadi wajar bila jasa itu ada harganya. Tapi ternyata, begitu ada kendaraan yang hilang *beneran*, pengelola parkir tak mau bertanggung jawab dengan alasan tarif parkir tak sebanding dengan risiko. Kalau mau ada penggantian, maka harus membayar premi asuransi. Lalu konsep parkir pun diganti bukan sebagai jasa keamanan, tapi sewa lahan. Padahal, lahan itu logikanya melekat pada tempat usaha. Non-susbstitusi. Lalu lahan mana yang kita sewa bila kita memang ingin berbelanja di toko atau bertamu ke perkantoran tersebut?

Begitu juga dengan air. Karena sekarang mendatangkan air tidak mudah, dan butuh investasi, bukan berarti bisa dikomersialisasi seenak hati. Justru di situlah letak tanggung jawab pemerintah untuk memastikan agar air menjadi mudah dan terakses oleh semua orang. Untuk keperluan inilah mestinya pembelanjaan uang pajak rakyat diprioritaskan.

Jadi, logikanya jangan dibolak-balik, *dong*! Karena perlu biaya tinggi dan menyangkut barang kebutuhan vital, maka tugas pemerintah menjadi terang benderang. *Toh*, sekali lagi, ini bukan duit dari kantong pejabat, tapi uang pajak masyarakat. Sebab, bila dengan alasan perlu investasi lantas diswastanisasi, urusannya bisa panjang. Harga yang terbentuk bukan sekadar untuk mengganti biaya produksi, tetapi sudah masuk unsur laba dan modal pengembangan usaha alias ekspansi.

Kita lihat bagaimana air diliberalisasi di Jakarta.

Suatu hari pada tanggal 12 Juni 1994, Soeharto mengeluarkan instruksi presiden dan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum, Radinal Mochtar untuk mengalihkan pengelolaan usaha air minum di Jakarta kepada swasta. Maklum, saat itu kondisi perusahaan air minum PAM Jaya, amburadul. Tingkat kebocorannya 20 persen dan kerugiannya mencapai Rp 166 miliar hanya dalam kurun tiga tahun saja (*Tempo*, April 1999).

Kalau urusan sebuah Badan Usaha Milik Darah (BUMD) sudah ditangani langsung oleh presiden sekaliber Soeharto, berarti pasti ada yang gawat. Perintah Soeharto itu sebenarnya adalah juga kehendak Bank Dunia yang dalam rekomendasinya meminta agar PAM Jaya diswastakan saja, karena hanya menjadi beban birokrasi. Bank Dunia lalu mengucurkan pinjaman Rp 2,4 triliun untuk pengembangan infrastruktur Jakarta, termasuk untuk biaya pengelolaan air minum.

Tapi belakangan, birahi melakukan swastanisasi air di Jakarta ini bukan karena rekomendasi Bank Dunia semata, melainkan karena ada peluang bisnis bagi keluarga dan kroni Cendana. Anak-anak Soeharto seperti Sigit Harjojudanto dan Bambang Trihatmojo pun ikut "bermain air". Melalui PT Kekarpola Airindo, mereka menggandeng perusahaan air dari Inggris, Thames Water International (TWI). Sementara Anthony Salim masuk dengan bendera PT Garuda Dipta Semesta yang

berpasangan dengan perusahaan air asal Perancis, Lyonnaise des Eaux (LDE). Perusahaan ini memang sudah menjadi mitra PAM Jaya sejak tahun 1953.

Padahal, selain menabrak konstitusi, swastanisasi air ini juga melanggar UU Nomor 1 Tahun 1961 yang masih melarang swasta masuk ke bisnis air minum. Akrobat bisnis ini bahkan melabrak aturan Soeharto sendiri yang pernah mengeluarkan Surat Edaran Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990, yang jelas-jelas menyebut bahwa penunjukan mitra kerja sama swasta harus dilakukan lewat lelang terbuka (tender).

Setelah rezim Soeharto tumbang, pengelolaan air akhirnya diambil alih oleh Pemda Jakarta lewat instruksi Gubernur Sutiyoso pada Mei 1998. Tapi dua perusahaan asing itu semakin dikukuhkan sebagai pengelola (*icrp-online.org*, 8 Agustus 2006). Mereka berganti nama menjadi PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (TPJ).

Meski demikian, di bendera perusahaan baru itu, Pemda DKI hanya kebagian saham 10 persen, sementara Thames dan Lyonnaise mengantongi 90 persen kepemilikan. Mereka juga mendapatkan hak eksklusif untuk mengelola seluruh aset PAM Jaya selama 25 tahun, tanpa perlu membangun jaringan infrastruktur dan pelanggan.

Dengan begitu, di atas kertas keuntungan bisa langsung diambil dari 2,3 juta pelanggan air minum di Jakarta. Tarif yang ditetapkan pun ganjil. Pada semester I tahun 1999, misalnya, PT TPJ menetapkan harga Rp 2.400 per meter kubik, sementara Palyja Rp 2.900 per meter kubik. Padahal harga jual air PAM Jaya

> "Kontrak bisnis itu suci dan harus dihormati," kata ekonom Rizal Ramli, "tapi bila menyalahi dan menabrak konsitusi atau sarat nepotisme, maka harus direvisi."

ke konsumen cuma Rp 2.130 per meter kubik. Alih-alih untung, Pemprov DKI malah *nombok*.

Tak heran bila sampai Oktober 2000, defisit yang harus ditanggung pemerintah adalah Rp 86,4 miliar dengan beban utang Rp 394,6 miliar. Jadi, sebenarnya pemerintah mensubsidi rakyat atau mensubsidi perusahaan asing?

Ini mirip kisah listrik swasta di Paiton, Jawa Timur. Kroni Cendana membangun pembangkit dan menjual listrik ke PLN dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dipungut PLN dari masyarakat. Artinya, PLN disuruh *nombokin*. Apalagi, PLN bisa memproduksi listrik sendiri dengan harga yang lebih rendah.

Proses swastaniasi air minum di Jakarta ini tentu menjadi model bagi daerah-daerah lain. Karena itu, ketika pemerintah Indonesia dan DPR mengesahkan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang memungkinkan privatisasi dan liberalisasi atas air, ramai orang memprotesnya. Konsesi atas sumber-sumber air diberikan kepada pihak swasta dan menyulitkan akses warga setempat. Air baku dikonsesikan bak barang tambang seperti timah atau emas.

Kali Ciliwung sebagai salah satu sumber air minum dikelola swasta asing bermitra dengan perusahaan daerah, sehingga harga air baku sudah tercampur unsur mengembalikan investasi dan laba korporasi. Kalau meluncurkan satelit Palapa saja bisa, mestinya republik ini juga menguasai teknologi per-air-an. Bila PAM Jaya jadi sarang korupsi, ya korupsilah yang harus diberantas, dan manajemennya dibenahi.

Kalau mem-*bail out* para bankir Rp 600 triliun melalui BLBI dan rekapitalisasi perbankan saja bisa, mestinya berinvestasi sendiri untuk membangun pipa-pipa penyaluran air ke rumah-rumah penduduk, pemerintah juga mampu. Dengan kemandirian ini,

pelayanan air bagi publik bisa lebih murah, tanpa terbebani pengembalian modal atau laba korporasi. Kalau ada pegawai pemerintah yang korupsi atau tidak efisien, jebloskan saja mereka ke bui. Korupsi dan inefisiensi tak boleh jadi alasan swastanisasi sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Sebab, selain di swasta juga tak steril dari korupsi, serba privatisasi adalah jalan pintas yang tak pernah menyelesaikan persoalan.

Tapi, melalui UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemerintah memberikan hak guna pakai air dan hak guna usaha air kepada swasta. Dengan demikian, maka air diperlakukan sebagai barang ekonomis yang bisa jadi komoditas dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan (*income*) negara.

Di tangan swasta yang berlogika komersial, untuk menarik sebatang pipa saja maka akan dihitung untung ruginya. Bila daerah tertentu dihuni masyarakat berpendapatan rendah atau yang terpencil secara topografi, maka membangun pipa air ke lokasi itu adalah keputusan bisnis yang bodoh.

Padahal para pendiri negara kita merumuskan pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (ayat 3). Sementara di ayat 2 jelas-jelas berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Pengertian "dikuasai" memang tidak harus berarti dimiliki. Pemerintah bisa saja tak memiliki saham di perusahaan-perusahaan strategis (doktrin privatisasi), tetapi pemerintah jelas harus "berkuasa" atas cabang-cabang produksi itu. Dan yang harus "dikuasai" itu tidak hanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara seperti industri senjata di Pindad yang "*macho*", tapi juga yang "feminin" seperti air. Yang gawat

adalah kalau tidak "dimiliki" tapi juga tidak "dikuasai".

Bila air sangat "penting dan menguasai hajat hidup orang banyak", maka distribusi air ditentukan oleh pemerintah berdasarkan amanat konstitusi yang tidak membebani konsumen, meski kepemilikan perusahaannya bisa saja oleh swasta. Penetapan tarif pelayanan air dikontrol pemerintah secara substansial, dan bukan sebatas formalitas, yang dalam praktiknya, komponen tarif terkandung kepentingan-kepentingan bisnis komersial mitra swasta asing, bukan misi sosial.

Seperti halnya air, minyak bumi jelas memenuhi kriteria "penting dan menguasai hajat hidup orang banyak". Pemerintah tidak perlu "memiliki" semua *rig-rig* di lepas pantai yang menambang minyak dari perut bumi. Tetapi pemerintah harus "berkuasa" atas minyak tersebut. Kontrak-kontrak yang merugikan kepentingan "hajat hidup orang banyak" harus direvisi atas nama konstitusi. Bila kebutuhan minyak mentah di dalam negeri belum terpenuhi, maka tak masuk akal bila pemerintah manut saja ketika minyak-minyak itu justru diekspor ke luar.

"Kontrak bisnis itu suci dan harus dihormati," kata ekonom Rizal Ramli, "tapi bila menyalahi dan menabrak konsitusi atau sarat nepotisme, maka harus direvisi."

Celakanya, dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah Indonesia sudah dikunci untuk urusan kontrak bisnis dengan swasta asing. Di pasal 7, misalnya, pemerintah tak boleh melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan. Nasionalisasi berarti harus membeli dengan harga pasar. Dan bila ada sengketa dengan pemodal (asing), maka penyelesaiannya harus di lembaga arbitrase internasional yang ada di London atau New York. Ketentuan tentang arbitrase ini muncul di sektor-sektor vital yang justru berkaitan dengan

“hajat hidup orang banyak” seperti peraturan pertambangan dan kehutanan. Inilah produk hukum yang—tak bisa tidak—merupakan legalisasi atas paham-paham liberalisme.

Ekonom peraih hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, suatu hari datang ke Indonesia. Dia berjumpa dengan sejumlah ahli ekonomi dan menceritakan hasil penelitiannya tentang nasib negara-negara berkembang yang bersengketa dengan kepentingan ekonomi negara maju di lembaga arbitrase internasional. Inilah kesimpulan Stiglitz: 90 persen kasus yang diputus lembaga arbitrase, selalu memenangkan negara maju!

Priiit... (Lagi)

Kembali ke urusan parkir.

Entah negara mana yang ditiru Indonesia, komersialisasi parkir sendiri bukannya tak ada di negara lain. Di jalanan Amerika atau Inggris misalnya, ada *parking meter*, dengan konsep pra-bayar. Pengendara memasukkan uang koin dan membeli waktu parkir. Misalnya, dua dolar untuk satu jam, tergantung lokasi. Makin strategis dan makin ramai, makin mahal pula tarifnya. Bila parkir lebih dari satu jam, maka pengendara harus kembali lagi dan memasukkan koin baru. Bisa saja ia curang, tapi bila kedapatan petugas parkir keliling, dendanya lumayan bikin kapok.

Namun, itu hanya untuk parkir *on street*. Parkir *off street*-nya menggunakan konsep *parking lot*, yaitu areal yang memang dikhususkan untuk parkir. Pengelolanya adalah swasta. Tarifnya bervariasi, mulai dari jam-jaman hingga *overnight*. Dari *parking lot* inilah, orang berjalan kaki ke pusat perbelanjaan atau perkantoran (bila ia bertamu).

Adapun di kantor-kantor swasta atau pemerintahan, parkir tetap gratis. Bila penuh, *ya* terpaksa harus mencari *parking lot* atau berurusan dengan *parking meter* di *on street*. Pusat perbelanjaan seperti Walmart tidak pernah *ngurusi* parkir, dan fokus pada bisnis ritel atau eceran. Halaman parkirnya luas dan gratis. Aku belum pernah parkir di Carrefour, Perancis. Bila di negara asalnya parkir gratis, tapi di Indonesia malah membayar, berarti manajemen Carrefour sini sudah ketularan—jika tak disebut *keblinger*.

Ada ketentuan izin dari pemerintah bahwa *super-store* itu harus di pinggiran kota atau jauh dari pusat permukiman. Selain karena harus menyediakan lahan yang luas, juga agar tidak mematikan ritel-ritel kecil. Tapi di Indonesia, Carrefour, Giant,

atau Hypermart bertebaran di jantung kota atau permukiman. Dan mereka *happy-happy* saja soal lokasi dan urusan parkir yang mengikuti "standar Indonesia". Bahkan Carrefour berkali-kali membuat pelanggannya pingsan karena sulit bernapas di *basement*. Ini terjadi akibat memilih lokasi yang tak punya areal parkir terbuka, seperti di Ratu Plaza, Jakarta.

Ini persis sindrom orang-orang Belanda atau Eropa yang datang ke Hindia Belanda (Indonesia) di masa penjajahan. Di negara asalnya, mereka konon adalah individu-individu yang mandiri dan anti-feodalisme. Begitu merasakan enaknya berjalan dipayungi atau murahnya memiliki babu, lantas menjadi sama feodalnya dengan para *ambtenaar*, demang, atau pembesar pribumi.

Begitu juga dengan urusan parkir. Betapa banyak kantor-kantor cabang perusahaan asing yang di negara asalnya menggratiskan parkir, begitu sampai di Indonesia, tiba-tiba ikut-ikutan bisnis parkir.

Sudahlah. Hentikan membanding-bandingkan Indonesia dengan negara lain. Dengan penduduk 230 juta dan jumlah penganggur 9,26 juta orang (versi BPS, Februari 2009), urusan parkir bisa menambah lapangan kerja. Orang-orang kaya pemilik mobil tidak usah *cengeng* dengan urusan parkir. Perusahaan seperti *Secure Parking* bisa merekrut 7.000 karyawan. Tak terhitung lagi jumlah tukang parkir partikelir atau berseragam yang bisa hidup dari bisnis ini. Hidup di negara padat penduduk dan banyak pengangguran seperti Indonesia ini, harus kreatif. Ini eranya ekonomi kreatif.

Apakah konsep parkir gratis bisa membantu mengurangi angka pengangguran? Apakah penghematan uang masyarakat dari dana parkir bisa menjadi stimulasi baru untuk menggerakkan roda ekonomi? Bagaimana dengan retribusi parkir yang membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidakkah ini bisa untuk membiayai Puskesmas?

Barangkali inilah satu-satunya alasan yang bisa membenarkan konsep komersialisasi parkir. Alasan ini (terpaksa) lebih masuk akal daripada, misalnya, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan membatasi jumlah kendaraan.

Tentu saja tak ada yang bermimpi hidup di negara yang parkirnya serba gratis. Ada lokasi-lokasi tertentu yang wajar menarik retribusi atau tarif parkir. Hanya, komersialisasi parkir yang tak pandang bulu telah menjadi beban tersendiri bagi sebagian masyarakat. Contohnya, ya para karyawan yang harus membayar parkir di halaman kantornya sendiri itu.

Ah, itu kan hanya karyawan bermobil.

Bila filosofi parkir dipahami sebagai bagian integral dari pelayanan para tamu sebuah tempat usaha atau perkantoran, maka pengangguran juga bisa sedikit diatasi, karena *toh* mereka tetap harus merekrut tenaga-tenaga pengatur parkir atau satpam. Pasti sedikit ada biaya ekstra, tetapi dampaknya positif untuk konsumen. Bila konsumen senang, usaha lancar, bisnis berkembang, karyawan pun bertambah, pengangguran berkurang.

Ah, terlalu jauh. Mari kita dukung saja kenaikan tarif parkir. 300 persen kalau perlu.

***

Ini persis sindrom orang-orang Belanda atau Eropa yang datang ke Hindia Belanda (Indonesia) di masa penjajahan. Di negara asalnya, mereka konon adalah individu-individu yang mandiri dan anti-feodalisme. Begitu merasakan enaknya berjalan dipayungi atau murahnya memiliki babu, lantas menjadi sama feodalnya dengan para *ambtenaar*, demang, atau pembesar pribumi.

Bayar atau Ngompol

Tak hanya parkir yang bisa bikin orang *merepet* dan *ngomel-ngomel*. Urusan toilet juga begitu.

Eit, tunggu dulu. Di Amerika atau Inggris juga sama. Beberapa kali aku singgah di stasiun kereta di Maryland, Amerika Serikat, toiletnya selalu terkunci. Harus minta izin ke penjaga stasiun, baru diberi kunci. Setelah selesai hajat, kunci dikembalikan lagi.

Stasiun-stasiun *underground* (kereta bawah tanah) di London, toiletnya juga tidak mudah diakses para penumpang. Padahal termasuk kota tujuan wisata. Di beberapa stasiun bahkan tidak tersedia kakus. Di Tavistock Square, sebuah taman kota, toilet harus bayar dengan memasukkan koin.

Di Washington DC, aku bahkan pernah menjumpai toilet di restoran cepat saji McDonald's, yang pintunya hanya bisa dibuka bila Anda memasukkan koin 25 sen dolar (*quarter*). Jadi bila Anda sudah memesan makanan, tapi uang di kantong habis, lalu kebelet *pipis* atau buang air besar, *hmm*...rasakan sendiri akibatnya.

Setelah aku amati, keganjilan-keganjilan ini adalah upaya untuk "memerangi" para gelandangan. Toilet di tempat-tempat umum adalah magnet bagi para tunawisma (*homeless*). Petugas salah satu stasiun di Maryland mengatakan, bila toilet bebas diakses, maka stasiun itu akan menjadi pusat penginapan para gelandangan.

Demikian pula dengan restoran McD di Washington DC yang di sekitarnya banyak gelandangan. Pemilik restoran barangkali takut pelanggannya kabur, karena setiap lima menit sekali jangan-jangan para *homeless* numpang *pipis*.

Selebihnya, toilet gratis. Di tempat-tempat yang "steril" dari gelandangan seperti museum, bandara, atau mal, tidak kita

temukan kotak di depan toilet bertuliskan: buang air kecil Rp 500, buang air besar Rp 1.000, seperti di Indonesia. (Kadang aku ingin jahil dengan menambah tulisan: buang air besar-besar Rp 2.000).

Karena itu aku tidak terlalu menggerutu ketika pipis di toilet Taman Monas harus bayar Rp 1.000. Meski taman seluas 80 hektar itu merupakan fasilitas ruang terbuka untuk publik, jangan harap semuanya serba gratis. Satu-satunya yang gratis adalah bernapas. Parkir bayar, *pipis* bayar.

Tapi bagaimana bila pengunjung Taman Monas sedang tak punya uang *cash* dan *kebelet pipis*? Dia bukan gelandangan. Di dompetnya ada tiga jenis kartu kredit dan dua kartu ATM. Dengan konsep toilet berbayar, maka jangan salahkan bila ada pengunjung yang memilih kencing di bawah pohon rindang. Itu baru *pipis*. Bagaimana kalau hajat besar?

Apakah ini yang diinginkan Dinas Pertamanan DKI?

Begitu pula dengan Terminal Pulo Gadung atau Stasiun Gambir. Di pusat perbelanjaan seperti Glodok pun, masuk toilet harus bayar. Padahal kalau sampai para penumpang dan pengunjung itu kencing di sembarang tempat (karena sedang tak punya atau tak ada uang), yang rugi ya para pengelola tempat itu sendiri.

Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng barangkali termasuk yang menggratiskan toilet. Maklum, PT Angkasa Pura sudah menarik pajak bandara Rp 30.000 per kepala. Per Maret 2009, tarifnya bahkan sudah dinaikkan lagi menjadi Rp 40.000. Kalau toilet saja masih bayar, ya sungguh terlalu!

Sama keterlaluannya dengan Terminal 3. Terminal baru untuk maskapai Mandala dan Air Asia ini menarik uang masuk bagi kendaraan pengantar sebesar Rp 4.000 (Mei 2009). Ini bukan uang parkir. Berbeda dengan Terminal 1 dan 2, jalur parkir dan jalur naik turun penumpang di Terminal 3 tidak dibedakan.

Alhasil, setiap masuk Terminal 3, semua kendaraan dianggap parkir. Padahal lebih banyak yang menjemput (*pick up*) atau *drop off* penumpang. Tentu saja bila Anda benar-benar parkir, masih terkena tarif jam-jaman.

Ini sama dengan bandara seperti Juanda di Sidoarjo atau Polonia di Medan yang katanya sudah bertaraf internasional. Kedua bandara ini memasang portal di depan pintu masuk bandara. Tak peduli Anda hanya mengantar atau parkir, semua harus bayar. Di dalam, masih ada lagi *airport tax* yang tarifnya sudah sok menyamai Jakarta. Aku heran bukan kepalang, bagaimana mungkin kendaraan-kendaraan pengantar atau penjemput ini ditarik bayaran.

Bukankah memang tugas pengelola bandara seperti PT Angkasa Pura menyediakan jalan untuk para calon penumpang agar bisa naik pesawat? Bukannya malah memportal lalu menarik bayaran.

Di bandara Incheon (Korea Selatan), JF Kennedy (Washington D.C), atau Heatrow (Inggris), masuknya gratis, *tis*! Biaya hanya dikenakan bila Anda parkir.

Ah, itu contoh negara maju.

Begini saja, gimana kalau contohnya bandara Islamabad di Pakistan, Swarnabhumi di Thailand, atau Ninoy Aquino di Filipina. Inilah enaknya jadi wartawan. Sering menyinggahi bandara-bandara di dunia. Yang lebih sering lagi, ya pejabat-pejabat Angkasa Pura. Bedanya, wartawan hanya bisa menulis perbandingan pelayanan bandara, sementara mereka punya kuasa untuk menerapkannya.

Kalau ternyata tak dilakukan, entah mengapa. Kurasa ya karena sudah menganut ideologi komersialisasi tadi: kalau bisa mendatangkan duit, mengapa harus digratiskan.

Laut Milik Siapa?

Aku hampir-hampir bisa mendengar para tukang parkir dan penjaga toilet berteriak protes: "Mas, Mas, sebenarnya *sampean* ini mau *ngomong* apa, *sih*?"

"Aku ini mau *ngomong* tentang komersialisasi pantai seperti Ancol atau Anyer..."

"*Halah*, apa lagi itu? *Sampean kok ngalor-ngidul gak* jelas. Yang parkirlah, yang toiletlah, sekarang mau *ngomongin* pantai."

"Begini, ada seorang bernama Andre Vitchek yang baru beberapa kali datang ke Jakarta. Bulan Juli tahun 2007 lalu dia menulis sebuah artikel di *worldpress.org*. Isi artikelnya adalah *curhat* soal kondisi Jakarta yang penduduknya harus serba membayar, dan menjadikannya salah satu kota dengan biaya hidup yang mahal."

"Lalu apa hubungannya dengan Ancol dan Anyer. Juga parkir, toilet, dan air tadi?"

"Sabar... sabar. Satu-satu dulu. Karena semua serba membayar, maka penduduk miskin tidak mudah mengakses pantai."

"Maksudnya?"

"*Sampean ngerti nggak* kalau laut itu milik umum. Seperti halnya langit. Tanah boleh dimiliki, tapi laut dan langit milik semua orang. Sebab, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mengeluarkan sertifikat tanah. Coba, apakah *sampean* pernah dengar ada sertifikat laut atau sertifikat langit?"

"*Lha*, ini baru menarik. Terus... terus..."

"Makanya namanya Badan Pertanahan, bukan Badan Kelautan

atau Badan Perlangitan, iya kan?"

"Ya-ya-ya, kali ini *sampean bener*"

Nah, Andre Vitchek ini heran mengapa orang Jakarta bila ingin melihat laut di Ancol saja harus membayar. Harganya pun mahal. Satu keluarga bisa menghabiskan Rp 40.000. Itu untuk masuk dan melihat laut saja. Apalagi di Anyer, laut dikapling-kapling menjadi milik hotel atau resor. Orang umum tak boleh sembarangan masuk. Nelayan harus minggir di tempat tersendiri. Bagi Andre, pantai yang tak boleh untuk umum itu, ya baru ia temui di Indonesia.

Andre lalu mengutip hasil survei Mercer Human Resource Consulting tahun 2006. Disebutkan, Jakarta menduduki peringkat 48 kota termahal di dunia untuk ekspatriat, jauh di atas Berlin (peringkat 72), Melbourne (74) dan Washington DC (83).

"*Nah*, kalau untuk ekspatriat saja mahal, apalagi buat penduduk lokal yang pendapatan per kapita di bawah 1.000 dolar?" gugat Andre.

Sebagai orang yang sering bertualang ke negara-negara lain, Andre juga heran dengan sedikitnya ruang publik di Jakarta. Kota kapitalis seperti New York City saja punya Central Park yang luasnya....

"Mas, sudah, jangan sebut-sebut lagi negara maju. Capek *dengernya*. Ada contoh negara yang sama-sama miskin, *gak*?" gugat tukang parkir dan penjaga toilet rekaanku itu.

Sori-sori, New York memang contoh dariku biar terdengar agak *keren*. Andre sebenarnya mencontohkan Port Moresby, ibukota Papua Nugini, yang miskin, tapi terkenal dengan taman bermain

yang besar, pantai dan jalan setapak di pinggir laut yang indah. Semua gratis.

Di kota-kota di Indonesia, susah sekali mencari ruang terbuka hijau untuk publik. Warga masyarakat kesulitan mencari tempat bersantai, duduk-duduk di kursi taman sembari menenangkan pikiran. Tak heran bila penduduknya tensi tinggi alias temperamental. Hanya ada Taman Monas (yang *pipis*-nya bayar), Taman Suropati (yang *gak* boleh foto-foto karena dianggap *nginteli* rumah Duta Besar Amerika), atau Taman Lawang (yang dihindari para keluarga karena identik dengan prostitusi trans-seksual).

Jadi warga Jakarta yang ingin benar-benar rekreasi harus membayar ke Kebun Binatang Ragunan atau Ancol. Atau ke mal. Dan semua itu harus keluar duit. Sebab, jangankan taman terbuka, jalur hijau pun sudah disulap menjadi pompa bensin alias SPBU. Pada tahun 1985, ruang terbuka hijau di Jakarta masih 28,7 persen dari total luas wilayah. Tapi tahun 1999, sudah menyusut drastis tinggal 9,6 persen. Bayangkan, hilangnya ruang terbuka hijau *dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja*.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pernah menuding pemerintah DKI Jakarta melakukan pemutihan aturan lama dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang 2010, yang intinya merevisi target perluasan ruang terbuka hijau. Dalam peraturan yang baru, target luas ruang terbuka hijau untuk tahun 2010 tidak lagi 31,5 persen, tetapi hanya 13,96 persen. Ini tak lain adalah buah dari kebijakan yang agresif mengonversi lahan dari ruang terbuka menjadi areal-areal peruntukan komersial, seperti Kelapa Gading, Tegal Alur, Senayan, Cilandak, Lebakbulus, atau Cibubur. Baik untuk permukiman, pusat perbelanjaan maupun perkantoran.

"Sampean ngerti nggak kalau laut itu milik umum. Seperti halnya langit. Tanah boleh dimiliki, tapi laut dan langit milik semua orang. Sebab, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mengeluarkan sertifikat tanah. Coba, apakah *sampean* pernah dengar ada sertifikat laut atau sertifikat langit?"

"*Nah*, saat banjir datang, yang disalahkan ya *sampean-sampean* ini, karena membuang sampah di kali Ciliwung..." kataku dalam dialog imajiner ini.

"*Ah*, Mas.. Kalau soal buang sampah *emang bener sih*. Kami-kami ini juga ada andil. Jadi *sampean* jangan *sok-sok bela wong cilik*-lah. Jangan provokasi orang susah. Yang salah ya *tetep* salah. Penggerusan ruang terbuka hijau salah, buang sampah di Ciliwung juga salah. Bikin vila di Puncak tanpa IMB juga sama-sama salah," sergah tukang parkir.

"Dan *sampean* belum jawab pertanyaan kami, apa maksud *sampean* dengan semua paparan tentang komersialisasi di segala bidang ini?" timpal penjaga toilet.

"Aku mau cerita soal neoliberalisme."

"*Waduh*, apa lagi itu? *Sampean* ini *kok kayak* orang kesurupan. *Ngomong* tidak jelas *juntrungan*nya. Dari satu topik ke topik lain pindah seenak *dengkul*. Jangan provokasi *lho* ya. Jangan berbudi..."

"Berbudi atau *bebudi*?" tanyaku.

"Yang mana terserah *deh*. Pokoknya, yang kata orang Palembang, artinya *ngibul*."

"Tapi sebelum itu, aku mau melanjutkan cerita sedikit soal tulisan Andre tadi. Di banyak negara, orang bisa minum air gratis di tempat-tempat umum. Ada pancuran isinya air bersih

yang siap minum. Semua disediakan oleh pemerintah kota. Kalau ada gelandangan, setidaknya tetap bisa minum dan tidak mati kehausan...”

“Sudahlah, Mas. Cukup ceritanya soal yang gratis-gratis. Nanti aku suruh *ngasih* kerjaan ke penjual minuman asongan, *sampean* pusing sendiri. Mereka itu sudah pusing menghadapi trantib atau tibum, sekarang *sampean* ancaman mata pencahariannya dengan fasilitas air minum gratis.”

“*Ah*, *sampean* ini meskipun *wong cilik*, tapi kan belum *ngerasain* rasanya jadi gelandangan, *toh*? Coba jadi gelandangan, baru tahu rasa: kencing harus bayar, minum air putih *aja* harus beli.”

Kusergap seperti itu, mereka berdua saling adu pandang. Kesempatan ini kumanfaatkan dengan melancarkan jurus selanjutnya.

“Di depan rumah nenekku di kampung, disediakan kendi untuk minum orang yang lewat. Dikasih gelas juga. Di halaman rumah dipasang kran, sekadar agar orang bisa *nyuci* tangan atau membasuh muka. ‘Buat akhirat, *Le*’ katanya. Sekarang kita semua pelit. Semua harus *mbayar*. Sudah *pada* tumpul jiwa sosial kita. *Sampean-sampean* ini contohnya, parkir harus *mbayar*, kencing *mbayar*, air harus beli, ada mobil mogok *gak* dibantu dorong kalau *gak* dikasih uang. Baru jadi orang kecil sudah neolib...”

“*Masya Allah*. Apa itu? *Serem banget*. Ayo, terangkan dulu apa itu neolib. Apa *kayak* PKI, Mas?”

“Pokoknya lebih kejam dari PKI,” jawabku masih jengkel.

“*Waduh*, *emang* ada yang lebih kejam dari PKI? Yang lebih mahal banyak. *Hahaha*...”

"Iya, *bener*. Memang lebih mahal. Sebab mati saja harus keluar duit. Kalau sekarang *sampean* mati, apa *nggak mbayar* tanah pekuburan ke Dinas Pemakaman DKI. Kalau *sampean nggak* punya uang, apa *sampean* mau dibuang di kali Sunter atau Bantar Gebang? Di Cikarang bahkan ada pemakaman yang satu lubangnya seharga miliaran rupiah. *Sampean* kerja keras sampai *modar* pun belum tentu bisa beli."

"Apa itu yang namanya neolib? Aku pernah baca di koran dan nonton soal neolib di televisi, Mas. Tapi *nggak ngerti*. Mending baca iklan *Pos Kota* atau berita perkosaan di *Lampu Merah*. *Eh*, sekarang sudah jadi *Lampu Hijau*. Berarti *bentar* lagi kapak merah juga ganti nama. *Hihihi*..."

Tukang parkir dan penjaga toilet itu bicaranya memang *ceplas-ceplos*, tak peduli aku masih dongkol dengan celetukan mereka yang "asal". *Masak* ada orang *ngoceh* soal hak atas air, mereka benturkan dengan rezeki pedagang air minum keliling. Mempertanyakan filosofi dan hakikat parkir, mereka hadang dengan rezeki tukang parkir.

Aku jadi serba salah dan bingung. Para ekonom mungkin tidak dan selalu punya penjelasan atas segala sesuatu. Apalagi gara-gara tukang parkir dan penjaga toilet itu, aku jadi terpancing bicara, "Pokoknya lebih kejam dari PKI". Padahal kalau yang dimaksud peristiwa Lubang Buaya, 1 Oktober dini hari 1965, aku sendiri memiliki dokumen hasil *visum et repertum* tujuh pahwalan revolusi yang membuktikan bahwa tidak ada penyiletan, pemotongan kemaluan, atau pencongkelan mata para jenderal.

Semua itu karangan *Harian Angkatan Bersenjata* atau *Berita Yudha*. Korannya Angkatan Darat. Gara-gara berita itu orang makin marah dengan PKI dan membunuhi saudara atau tetangga mereka sendiri yang dianggap simpatisan.

"Matanya dicungkil," tulis *Angkatan Bersendjata*, 6 Oktober 1965.

"Ada yang dipotong tanda kelaminnya," timpal *Berita Yudha*, empat hari kemudian.

RCTI, tempat aku pernah bekerja, pada Oktober 2007 menyiarkan laporan hasil visum itu, beserta wawancara dokter yang melakukan otopsi. Namanya Lim Joe Thay alias Arief. Usianya sudah 81 tahun saat aku wawancarai. Bicaranya sudah tidak terlalu jelas, tapi terharu saat bisa memiliki salinan dokumen visum yang tak pernah dimilikinya selama Orde Baru itu. Dokumen visum dan keterangan dokter Arief menegaskan bahwa mutilasi dan potong memotong itu tak pernah terjadi.

"Tak ada pesta Gerwani seperti diberitakan," sejarawan Asvi Warman Adam menambahkan.

Tapi gara-gara separo umur dipaksa menonton film Pengkhianatan G-30/S PKI oleh rezim Orde Baru, maka urusan yang kejam-kejam dan sadis-sadis menjadi monopoli PKI. Termasuk alam sadarku yang tadi spontan bilang "lebih kejam dari PKI".

Padahal tadinya aku mau menyinggung-nyinggung soal mahalnya ongkos transportasi di kota-kota besar seperti Jakarta, akibat buruknya tata kota dan sistem angkutan umum. Ongkos transportasi membuat pendapatan kecil orang-orang kecil semakin kecil.

Tapi aku takut dibenturkan lagi dengan soal lapangan kerja dan penghasilan para sopir Metro Mini atau Kopaja. Juga pendapatan sopir angkot dan tukang ojek. Keburukan sistem tata kota dan tranportasi umum, betapapun, memunculkan berkah. Entah berkah untuk mereka yang jadi buruh angkutan, atau berkah untuk juragan angkutannya.

Ini sama dilematisnya dengan urusan harga beras. Kalau harga gabah murah, petani gundah, tapi konsumennya *sumringah*. Namun bila harga gabah tinggi, petani *happy*, konsumennya yang sedih. Tugas pemerintah menjaga keseimbangan harga agar *every body happy*. Makanya ada tata niaga beras oleh Bulog. Tapi di saat yang sama ada juga kontroversi beras impor demi komisi.

Demikian pula dengan urusan angkutan umum. Buruh atau karyawan *outsourcing* yang bergaji pas UMR DKI (sekitar Rp 970.000 per bulan, tahun 2008), harus mengeluarkan ongkos angkutan di atas Rp 10.000 per hari, pulang-pergi ke tempat kerja. Itu belum termasuk makan.

Bila dalam satu bulan ia bekerja 25 hari, maka upahnya sudah berkurang Rp 250.000. Sebagian beruntung bisa tinggal di dekat tempat kerja, tapi sebagian (besar) lainnya adalah komuter. Mereka tinggal di pinggiran karena tak bisa menjangkau cicilan rumah atau kontrakan di tengah kota atau dekat pabrik.

Hasil suvei JICA (Japan International Cooperation Agency) pada akhir tahun 2008 menunjukkan, 47 persen penduduk Jabodetabek mengeluarkan 10-20 persen pendapatannya untuk ongkos transport. Bahkan 16 persen yang lain terpaksa membelanjakan 20-30 persen penghasilannya di jalanan. Padahal menurut studi Bank Dunia, masyarakat negara berkembang mestinya tak boleh mengeluarkan belanja transportasi lebih dari 10 persen. Supaya keperluan lain seperti bahan pangan, pendidikan, atau kesehatan bisa terpenuhi.

Inilah salah satu pangkal terjadinya lingkaran setan kemiskinan. Karena miskin, mereka tinggal di pinggiran. Karena tinggal di pinggir, maka harus keluar uang ekstra untuk angkutan. Karena keluar uang ekstra, maka mustahil bisa menabung. Karena tak pernah menabung, maka hidupnya subsisten: apa yang ada hari

ini, ya habis hari ini. Alih-alih sanggup mencicil rumah atau *ngontrak* di dekat tempat kerja.

Lingkaran kemiskinan masih bertambah: karena waktu habis di jalan untuk naik-turun dan menunggu angkutan, maka tak ada waktu yang tersisa untuk istirahat. Karena tak beristirahat, maka tak ada lagi energi untuk mencari pendapatan sampingan. Karena tak ada waktu mencari pendapatan tambahan, maka dia hanya bergantung pada pendapatan yang ada.

Situasi ini tak pernah berkesudahan. Inilah yang disebut lingkaran setan kemiskinan. Padahal itu hanya satu lingkaran yang dipicu oleh buruknya tata kota dan sistem transportasi umum saja. Belum oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan atau kesehatan.

Pemerintah lalu mencanangkan program 1.000 menara rumah susun atau apartemen bersubsidi. Tujuannya agar orang-orang bisa tinggal di tempat-tempat yang strategis dan tidak menghabiskan gajinya yang tidak seberapa, untuk ongkos transportasi. Semoga saja program ini tepat sasaran.

Sebab, perspektif pembangunan yang serba komersial dan bernilai ekonomi, membuat—jangankan air—transportasi massal pun dianggap beban anggaran negara. Akibatnya, pemerintah enggan berinvestasi untuk membangun infrastruktur dan sistem transportasi massal, dan lebih banyak menghabiskan dana publik untuk anggaran rutin birokrasi.

Lo, kalau bisa ditangani swasta, mengapa harus diurus negara? Negara mengurus hal lain yang lebih penting saja.

Seperti apa? Seperti mengurus minyak bumi? Atau tambang emas di Papua? Atau jalan tol dan telekomunikasi seperti Telkom, Telkomsel, atau Indosat? Bukankah semua juga sudah diswastakan?

Karena semua urusan diserahkan pada swasta (karena harus bersifat komersial), lama-lama yang disebut "urusan lain yang lebih penting" itu tidak ada lagi. Sehingga tinggallah aparat pemerintah mengurusi seremoni, protokoler, dan tetek-bengek rutinitas birokrasi. Tapi dengan jumlah pegawai dan gaji yang sama.

Komersialisasi sendiri tidak selalu sama dengan *mata duitan*. Meski bisa juga disebut demikian. Ini soal alam berpikir. Khazanah otak dan hati yang menggerus nilai-nilai sosial kita sebagai manusia. Yang menumpulkan solidaritas dan menihilkan pelayanan umum. Yang menjadikan kita bak makhluk haus uang, karena tanpa uang maka hidup tak bermutu. Inilah alam berpikir neoliberalistis. Dan di kota-kota yang kita tinggali sekarang ini, wajah neoliberal itu muncul dalam berbagai aspek kehidupan. Hampir tak ada lagi yang bisa dilakukan dengan gratis, kecuali bernapas.

Orang-orang usia lanjut di perkotaan kini rajin ikut iuran kematian yang dikelola sebuah yayasan. Yayasan itulah nanti yang akan mengurus segala sesuatu, mulai dari kain kafan, memandikan jenazah, ambulan, bahkan menyiapkan keranda. Mereka mafhum belaka bahwa solidaritas sosial antar-tetangga sudah mulai rapuh. Orang sibuk dengan urusan masing-masing, hingga kematian tetangganya harus diurus sebuah yayasan meski sebenarnya nilai iurannya sangat murah dan cukup membantu.

Sialnya, wajah ideologi serba komersial ini telah menyandera kepentingan orang-orang kecil sehingga tak ada yang bisa mengubahnya, tanpa menimbulkan korban di kalangan mereka. Orang-orang kecil ini bahkan akan berada di garda terdepan menentang parkir gratis, toilet gratis, air gratis, atau angkutan massal murah.

Memang kalau agendanya pembenahan yang kecil-kecil bisa

bersentuhan dengan sesama kecil. Tapi kalau yang didobrak adalah politik perminyakan dan pertambangan, kebijakan perbankan, sistem pendidikan (gratis), atau pelayanan kesehatan (gratis), barangkali mereka akan mendukung.

"Jadi, apa *sampean* maunya semua diurus negara, Mas? Terus *gimana* kami yang bukan pegawai negeri ini? Sembarangan saja *sampean* ini," gugat tukang parkir.

"Tidak, kata Bung Karno dan Bung Hatta. Hanya 'cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak' saja," jawabku enteng. "Jadi swasta silahkan jalan terus. Tapi kalau sudah menyangkut kepentingan umum yang sangat luas, maka negara harus turun tangan."

"*Wah*, kalau Bung Karno yang *ngomong*, aku ikut saja, Mas. Kata bapakku, *pejah gesang nderek* Bung Karno. Hidup mati ikut BK!" sahut penjaga toilet.

Baru jadi orang kecil sudah neolib. *Hahaha*... aku senang *meledek* mereka dengan sebutan itu. Wajah mereka langsung kaget. Meski aku sendiri sekarang yang *kelimpungan*, harus menerangkan apa itu neoliberalisme. Apalagi bukan ekonom.

"Ekonomi terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada ekonom," kata Farid Gaban memberiku semangat.
Tapi kata Wakil Presiden Boediono: "Label-label besar itu apakah ada gunanya bagi rakyat? Menurut saya, yang penting

Komersialisasi sendiri tidak selalu sama dengan *mata duitan.* Meski bisa juga disebut demikian. Ini soal alam berpikir. Khazanah otak dan hati yang menggerus nilai-nilai sosial kita sebagai manusia. Yang menumpulkan solidaritas dan menihilkan pelayanan umum. Yang menjadikan kita bak makhluk haus uang, karena tanpa uang maka hidup tak bermutu. Inilah alam berpikir neoliberalistis.

mana yang memberikan manfaat dan kesejahteraan terbesar. Kalau kita terikat dengan ideologi-ideologi, ya repot."

Akhirnya kujawab, "Tidak ada ruginya memperbincangkan neoliberalisme di antara sesama rakyat. Sesama awam. Lagi pula, Pak Boed jangan *ge-er*. Siapa bilang neoliberalisme ini urusan ilmu ekonomi..."

Apalagi yang kuajak *ngobrol* adalah tokoh-tokoh fiktif dan imajiner. Bukan tokoh nyata seperti Pak Boed. *Toh*, daripada *bengong*, sambil menemani mereka *menunggui* parkiran dan toilet umum: buang air kecil Rp 500, buang air besar Rp 1.000, buang air besar-besar Rp 2.000.

***

P
SEKARANG BANYAK TUKANG PARKIR GELAP, HASILNYA DIKEMANAKAN?

BAGIAN KETIGA

Neoliberal yang Saya Kenal

Ambulan Zig-zag

Aku kenalkan saja nama tukang parkir rekaan ini: Samin, dan penjaga toiletnya, Dul. Keduanya masih menuntut penjelasan tentang neoliberalisme karena khawatir stempel neolib yang kujadikan bahan *guyonan* itu mirip PKI (Partai Komunis Indonesia). Kita belajar dari sejarah untuk hati-hati menggunakan stempel.

Tukang stempel neolib kadang terjebak pada jargon politik dan bukan gagasan-gagasan substantif. Hanya ada satu dua orang ekonom atau elit politik yang—sembari mengkritik neoliberalisme—bisa menunjukkan kebijakan-kebijakan ekonomi alternatif. Selebihnya, hanya memanfaatkan stempel-stempel neolib untuk kampanye politik.

Maka, wajarlah saat masih jadi calon wakil presiden, Boediono mengatakan, "Perdebatan seperti itu, apa gunanya buat rakyat..."

Meski aku duga Samin dan Dul agak dongkol soal parkir gratis dan toilet gratis, mereka senang dengan ide akses pantai Ancol dan Anyer untuk umum. Perkara masuk Dufan dan Sea World-nya tetap bayar, tidaklah masalah. Terpenting, pantainya yang ciptaan Tuhan itu bisa dinikmati semua penghuni kolong langit: manusia, ikan, tumbuhan, maupun jin Tomang.

Pertengahan tahun 2008 aku jadi saksi pernikahan seorang kawan kamerawan televisi dari Amerika. Namanya David Smith. Mempelai wanitanya juga kawanku, orang Indonesia. Mereka melakukan akad nikah dan resepsi di Pantai Jimbaran. Persis pinggir laut. Turis, nelayan, orang lewat, boleh nonton acara itu. Sebab, pantai milik Tuhan. Kalau *gak pengen* terganggu orang mondar-mandir, ya jangan kawin di pantai.

Pantai Kuta yang *go international* saja *gak* dikapling-kapling.

Hotel dibangun di seberang jalan, bukan mengangkangi wilayah pantainya. Orang umum boleh datang ke Kuta kapan saja, gratis! Di Jimbaran memang ada restoran-restoran, tapi siapa pun boleh datang ke pantainya. Yang bayar itu kalau makan *seafood*.

Perkara air galonan dijual mahal, sepanjang laku, *no problem* (sebab memang dibutuhkan tenaga dan modal untuk menggaloni air). Asalkan sumber airnya tidak boleh dimonopoli. Pokoknya yang ciptaan-ciptaan manusia silakan saja kalau mau dikomersialkan. Tapi yang langsung dari Tuhan, bisa kualat.

Frekuensi televisi dan radio itu adalah gelombang elektromagnetik ciptaan Tuhan. Manusia cuma bikin antena pemancar, gedung redaksi televisi, dan alat-alat kerjanya. Itulah yang dibeli dengan modal. Tanpa gelombang frekuensi, stasiun-stasiun televisi itu hanya akan menjadi *production house* terbesar di Indonesia. Dus, kalau ada pemilik televisi mengangkangi layar sendiri untuk kepentingan politik partisan atau bisnisnya semata, maka (semoga) dia kualat.

Ada yang sedang terjaring kasus surat berharga, menggunakan layarnya sendiri untuk *talkshow* satu versi. Ada yang kebelet jadi politisi, teve-nya dipakai menyiarkan pidato-pidato politik sendiri. Lalu ada juga yang kelompok usahanya sedang dirundung masalah lumpur, pemberitaan di layarnya maju-mundur.

Selain tak boleh dimanipulasi seenak *udel*, frekuensi juga tak boleh dikomersialkan membabi buta dalam industri radio atau televisi. Itu hak publik. Karena urusannya dengan publik, maka isi siaran televisi harus memihak kepada publik, bukan mementingkan urusan pemiliknya sendiri, atau melulu mencari uang dari iklan.

Samin dan Dul juga sumringah mendengar ide menyekolahkan

anak-anaknya dengan biaya terjangkau dan sistem jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu. Termasuk menikmati sistem transportasi umum yang murah dan tidak menguras kantung.

“Neoliberalisme itu apa, Mas?” desak Dul, penjaga toilet.

“Pernah dengar cerita pasien terlantar di rumah sakit karena *nggak* punya biaya berobat? Pernah ditulis di koran-koran, kan?” aku mencoba mengulur waktu sambil pikir-pikir.

“*Halah*, itu *mah nggak* usah baca koran, sejak zaman Iwan Fals *pan* ada di lagu *Ambulan Zig-zag*. *Gimane* lagunya, Min?” tanya Dul pada Samin, si tukang parkir.

“Yang mana, Dul?”

“Itu, yang ada bapak-bapak berkain sarung *modar* karena pangkalan bensin ecerannya meledak, *kagak* ditolong-tolong *ama* suster...”

“*Oh*, iya-iya, aku *inget*. Yang disuruh membayar dulu, padahal orangnya *udah* sekarat. Sementara kalau nyonya kaya langsung dilayani dengan sigap,” jawan Samin yakin.

Kami bertiga pun menyanyi:

Suster cantik ngotot/
lalu melotot, dan berkata/
‘silakan Bapak tunggu di muka’

Hai modar aku, hai modar aku/
jerit si pasien merasa kesakitan

Hai modar aku, hai modar aku/
kata si pasien merasa diremehkan

"Itu lagu tahun berapa ya, Bang?" tanyaku.

"*Wah, udah* lama *banget*, Mas. Angkatannya *Sarjana Muda*," kata Samin yang terlihat lebih OI daripada Dul.

OI, Orang Indonesia, nama *fans club*-nya Iwan Fals. *Sarjana Muda* yang dimaksud adalah lagu tentang jebolan diploma yang menganggur tak dapat kerja, meski sudah keluar masuk kantor dan pabrik.

"Kalau *Sarjana Muda* aku tahu. Itu album tahun 1981," sahut Dul.

"*Sok* tahu, *lu*!" tukas Samin.

"*Lha*, *gue inget* itu *pas* lahiran adik *gue*. Duit emak *bakal* lahiran, *gue embat dikit* buat beli kasetnya Iwan," kata turunan Jawa yang lahir di Betawi ini.

"Berarti tahun 1981 orang sudah susah berurusan dengan rumah sakit ya, Bang?" tanyaku yang tahun itu belum lagi masuk SD.

"*Lha*, kalau Iwan bikin lagunya *aja* tahun *lapan* satu, berarti kan kejadiannya udah lama sebelum tahun itu, Mas..." kata Samin dengan mimik serius.

"*Ooo*... jadi komersialisasi rumah sakit seperti di lagunya Iwan Fals itu juga neoliberalisme ya, Mas? *Pantesan* dari tadi sampean *ngomong-ngomong* komersialisasi di segala bidang," Dul *sok-sok* menyimpulkan.

"Apa jadinya lirik *Ambulan Zig-zag* kalau waktu itu sudah ada kasus Prita Mulyasari dan Rumah Sakit Omni Internasional-nya itu ya?" aku bergumam.

Prita Mulyasari adalah seorang ibu beranak dua yang ditahan gara-gara *curhat* via email tentang pelayanan RS Omni International di Tangerang, Banten. Pihak dokter dan rumah sakit tak terima, lalu menggugat Prita secara perdata dan pidana. Kasusnya gempar karena semua politisi, baik *incumbent* maupun penantang, ikut turun gunung. Maklum, sedang musim kampanye. Prita akhirnya bebas.

Sekitar Februari 2009, aku *ngobrol* dengan Iwan Fals di rumahnya di Bogor, Jawa Barat, untuk pembuatan film dokumenter tentang Munir—aktivis hak asasi manusia yang tewas diracun. Aku masih membayangkan masa-masa kecil mendengarkan *Umar Bakri* ketika berbicara dengan legenda hidup di hadapanku itu.

Pria yang kini sarat uban itu seolah tak henti memancarkan energi-energi baru. Menginspirasi banyak orang. Termasuk aku, teman bicara yang usianya terpaut 20 tahun. Tak heran bila majalah *Time* Asia pada edisi April 2002, menobatkannya sebagai pahlawan.

Bayangkan saja, jauh sebelum orang menggerutu tentang kelakuan anggota DPR, Iwan sudah melantunkan "Wakil Rakyat". Saat bicara, urat lehernya terlihat mengular, seperti sedang menyanyi. Omongannya lantang namun tidak besar. Tidak muluk. Bahkan cenderung naif, tapi mendobrak.

Pikiran naif itu bisa juga berarti kemurnian. Kenaifan bisa datang sebagai wujud ketidakmengertian pada laku sistem yang kompleks. Tapi di sisi lain, berpikir naif bisa menuntun kita pada hakikat, pada orisinalitas. Pada sesuatu yang nir-kepentingan. Sesuatu yang murni. Sesuatu yang sederhana dan tidak rumit atau dirumitkan oleh sistem.

Itulah barangkali daya magis lagu-lagu Iwan Fals atau Ebiet G Ade: polos, lugas, murni, awam, naif. Tapi menghentak nalar.

"Tidak usah membesar-besarkan daya mati," kata Iwan di tengah obrolan, "lebih baik kita membesar-besarkan daya hidup. Saya ini juga anak tentara. Saya mengajar mereka karate, tapi saya tidak punya kebencian apa-apa. Tapi senjata, bom, itu semua mubazir. Sudahlah, kematian itu tidak usah diundang-undang. Dia akan datang sendiri. *Mending* duitnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Saya tulis di lagu *Pesawat Tempur*, daripada duit untuk membeli senjata atau bom, mending buat *gue deh*, buat pacaran."

"Orang mungkin bilang itu pandangan naif," pancingku.

"Iya *nggak* apa-apa kalau aku dibilang naif," tandasnya sembari terkekeh.

Memang banyak hal dibuat rumit agar yang naif merasa malu dan rendah diri, lalu yang awam terpesona dan memberi harga yang tinggi. Karena itu, pakar kerumitan dan keruwetan didaulat menjadi raja, dan mereka lalu memetik keuntungan dari situ.

"Ekonomi terlalu penting untuk diserahkan hanya pada ekonom," kata Farid Gaban.

Cerita tentang Iwan Fals membuat Samin dan Dul merasa satu blok denganku. Padahal Iwan adalah tokoh nyata, sementara mereka berdua tokoh fiksi. Perjumpaanku dengan Iwan adalah kejadian sesungguhnya, sementara dengan mereka imajiner belaka.

Karena membawa-bawa Iwan, mereka mulai tenang dan tidak mencurigai aku sedang berkampanye untuk kandidat tertentu. Sebab mereka tahu, Iwan tak akan pernah bisa diseret-seret ke panggung politik. Apalagi menjadi caleg artis. Muncul di iklan sepeda motor TVS saja, banyak yang kaget, saking *gak pernahnya* jadi bintang iklan. Iwan adalah seni, tidak semata

komersial. Meski di *infotainment* ia berjuluk artis dengan bayaran paling mahal.

Barangkali bagi Iwan, seperti halnya kematian, duit pun tak usah diundang-undang. Dia pasti datang sendiri bila kita sungguh-sungguh mengabdi pada kehidupan.

***

Pak Boed yang Saya Kenal

Entah siapa yang memulai, tiba-tiba media latah menyebut-nyebut Boediono sebagai pengusung mazhab neoliberal. Sayangnya, di awal-awal gosip itu muncul, nyaris tak ada yang memberikan penerangan yang gamblang kepada publik, apa itu neoliberalisme. Koran dan majalah dibatasi ruang, televisi dan radio dibatasi waktu. Media internet lebih leluasa, tapi siapa yang betah duduk berlama-lama membaca dari layar yang memancarkan cahaya. Bisa-bisa rusak mata.

Telunjuk bisa saja diarahkan pada wartawan, redaktur, atau produser berita yang barangkali cuma latah ikut-ikutan tren menyebut-nyebut neoliberalisme, tanpa pernah membaca selembar pun artikel mengenainya. Termasuk aku.

Sampai kemudian muncul artikel ekonom Faisal Basri yang sangat personal tentang sosok Boediono. Faisal mengagumi kebersahajaan Boediono, baik sebagai ekonom, sebagai dosen, maupun sebagai pejabat negara. Karena ini testimoni pribadi tentang pribadi orang lain, maka mustahil siapa pun membantah, konon lagi mendiskusikan. Sama dengan aku yang secara subyektif menyukai Iwan Fals atau Chairil Anwar.

Maka, ketika Faisal menyebut Boediono sebagai sosok yang santun, kalem, sederhana—dan karenanya tak mungkin beraliran neoliberal—makinlah orang ramai rancu seolah-olah neoliberal itu adalah gaya hidup dan tata perilaku, bukan serangkaian preskripsi dalam ilmu ekonomi.

Aku membayangkan andaikata Bondan '*Maknyus*' Winarno menulis tentang Boediono, jangan-jangan orang menganggap neoliberal itu resep kuliner.

Seolah-olah yang kaya adalah neoliberal, dan yang hidup sederhana, murah senyum, atau jarang bicara tak pantas

disebut neoliberal. Padahal, aku sendiri meledek orang-orang seperti Samin dan Dul sebagai agen neoliberal karena mengkomersialkan parkir dan toilet umum.

Maka, ketika Faisal menyebut Boediono sebagai sosok yang santun, kalem, sederhana—dan karenanya tak mungkin beraliran neoliberal—makinlah orang ramai rancu seolah-olah neoliberal itu adalah gaya hidup dan tata perilaku, bukan serangkaian preskripsi dalam ilmu ekonomi.

"Kalau mau tahu rumah pribadi Pak Boed di Jakarta, datang saja ke kawasan Mampang Prapatan, dekat Hotel Citra II. Kebetulan kantor kami, Pergerakan Indonesia, persis berbelakangan dengan rumah Pak Boed. Rumah itu tergolong sederhana. Bung Ikhsan pernah bercerita pada aku, ia menyaksikan sendiri kursi di rumah itu sudah banyak yang bolong dan lusuh. Bagaimana sosok seperti itu dituduh sebagai antek-antek IMF, simbol neoliberalisme yang bakal merugikan bangsa, dan segala tuduhan miring lainnya," tulis Faisal Basri.

Pihak lain lantas mengingatkan Faisal. Setelah tak lagi jadi pejabat di Bank Indonesia maupun Bappenas, katanya, Pak Boed masih menempati rumah dinas dan masih menggunakan fasilitas negara selama kurun waktu 2000-2001. Kawan-kawanku sesama wartawan asal Jawa Timur bercanda, Pak Boed berlagak *sumaker*: *sugih macak kere* (si kaya yang menyaru miskin).

Buktinya, saat pencalonannya sebagai wakil presiden, harta yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp 22,06 miliar. Kenapa *nggak* tinggal di rumah yang lebih layak? Sedangkan SBY saja yang kekayaannya "cuma" Rp 7,1 miliar bisa punya rumah besar nan luas di Cikeas.

"Pelit...*eh*, hemat, Mas," Samin *nyeletuk*.

"*Ah, nggak kok*," timpal Dul. "Aku nonton di *RCTI* ada liputan tentang Boediono sedang makan bareng keluarganya di bangunan megah bergaya Romawi. Terus ada kolam renangnya segala. Busnya pun khusus. Jadi sederhana *gimana*? Sederhana itu ya Bung Hatta."

"Sudahlah. Buktinya, menang satu putaran. Berarti rakyat mencintai. Suara rakyat suara Tuhan," kataku.

Tulisan Faisal Basri berjudul "Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal" ini lalu memancing tulisan-tulisan lain. Bahkan ada kawan wartawan, Rusdi Mathari namanya, menulis artikel dengan judul: "Pak Boed yang Tidak Saya Kenal".

Ada juga Mohammad Samsul Arifin, kawanku dari *SCTV* yang menulis artikel di *facebook* berjudul "Sisi Lain Adam Smith". Kali ini tanpa anak kalimat "yang Tidak Saya Kenal". Sebab Samsul tak mungkin membuat judul: "Adam Smith yang Saya Kenal", seperti yang dimaksud Faisal mengenal Boediono. Samsul orang Jember, Adam Smith orang Skotlandia. Samsul makan tempe, Adam Smith makan *hagish* atau *fish and chips*. Dan hidup keduanya terpaut 300-an tahun.

Sedangkan ekonom lain seperti Revrisond Baswir, terang-terangan menuding Boediono neoliberal dalam artikelnya, "Jalan Neoliberal Pak Boed", tanpa anak kalimat, "yang Saya Kenal". Revrisond adalah murid Boediono di Universitas Gadjah Mada. Jadi tak mungkin pakai anak kalimat, "yang Tidak Saya Kenal".

Kecuali dia menambahkan kata "Lagi".

Tak penting siapa kenal siapa. Yang jelas kita mengenal Faisal Basri. Ekonom kritis nan cemerlang yang mengawal masa

reformasi dan sempat bergabung di Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Sekretaris Jenderal. Mustahil ia menyederhanakan persoalan seperti itu. Bila ada yang menantang berdiskusi atau berpolemik apakah Boediono neoliberal atau bukan, secara lebih akademis dan argumentataif, dia pasti akan melayani dengan tangguh dan getas.

"Lain kesempatan kita bahas tentang sikap dan falsafah ekonomi Pak Boed. Kali ini saya hanya sanggup bercerita sisi lain dari sosok Pak Boed yang kian terasa langka di negeri ini," tulis Faisal menutup artikelnya.

Gara-gara artikel itu, orang-orang yang anti-Boediono tapi pengagum Faisal, kecewa berat. Orang-orang yang mengagumi keduanya, senang bukan kepalang. Orang-orang yang membenci keduanya, entah *ngapain*. Aku *nggak* tertarik *ngurusi* orang yang hidupnya penuh dengan kebencian. Masa dua-duanya dibenci.

Di sebuah pelatihan wartawan tentang membaca anggaran publik dan laporan keuangan korporat, sekitar bulan Februari 2009, aku berjumpa dengan Faisal Basri. Aku menjadi salah satu *trainer* untuk membantu kawan-kawan jurnalis televisi, dan Faisal menjadi pembicara dengan topik analisis anggaran negara.

Pandangan-pandangannya kritis pada kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pajak. Salah satu yang aku ingat, menurut Faisal, pemerintah dianggap memanjakan perusahaan yang berpendapatan tinggi dengan tidak menerapkan pajak progresif. Akibatnya, pajak yang harus dibayar perusahaan kaya, sama dengan beban pajak yang dibayar perusahaan-perusahaan berpendapatan menengah dan rendah. Kebijakan itu dibuat bersama DPR dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang baru disahkan.

Aturan PPh Badan yang tadinya tarifnya berlapis (UU 17/2000), menjadi bertarif tunggal. Dalam ketentuan lama, ada tiga kategori penghasilan: (1) penghasilan di bawah 50 juta kena pajak 10 persen; (2) penghasilan antara Rp 50-100 juta tarif pajaknya 15 persen; dan (3) penghasilan di atas Rp 100 juta tarifnya 30 persen.

Nah, dengan maksud untuk menyederhanakan, undang-undang yang baru memberlakukan tarif rata 28 persen. Tarif ini masih akan diturunkan lagi pada tahun 2010 menjadi 25 persen.

Itu berarti, menurut Faisal, pengusaha yang tadinya membayar pajak dengan tarif 10 persen, kini harus membayar lebih mahal 15-18 persen. Sementara yang berpenghasilan tinggi justru didiskon 2-5 persen. Aku manggut-manggut tercerahkan menerima paparan seperti itu. Gara-gara paparan Faisal itu pula, aku berimajinasi tentang instrumen pajak sebagai pengganti BLT, dalam kaitannya dengan subsidi BBM.

Pajak mestinya bisa menjadi instrumen untuk mengambil kembali subsidi yang dinikmati orang kaya dari BBM. Dengan tarif pajak progresif, orang kaya yang telanjur ikut-ikutan menikmati subsidi bensin harus mengembalikannya. Artinya, untuk mengatasi subsidi yang tidak tepat sasaran bukanlah dengan mencabut subsidi BBM dari rakyat miskin (dan mengembalikannya melalui pembagian BLT).

Di sisi lain media juga tidak mendesak para politisi yang menolak Boediono, apa sesungguhnya argumentasi dasar mereka selain soal kekecewaan tak diajak berembug oleh SBY. Jangan-jangan memang tidak ada argumen itu dan *it's all about the power*, makanya media pun maklum belaka.

Sebab, bila menarik subsidi dari BBM secara pukul rata, yang terjadi adalah ini:

(1) yang miskin sudah pasti kena imbas karena kenaikan harga,
(2) duit BLT yang dibagikan belum tentu berguna akibat naiknya harga barang,
(3) yang kaya tak akan terlalu terpengaruh karena bensin adalah barang in-elastis dan mobil-mobil mereka tetap harus berjalan.

Di forum pelatihan wartawan itu, kami belum mendiskusikan neoliberalisme dengan Faisal Basri. Wacana itu belum ramai. Pemilu legislatif masih dua bulan lagi, dan pilpres masih jauh. Andai saja sudah, pasti akan menarik dan kesempatan itu tak akan disia-siakan oleh para wartawan.

Kami pasti bertanya apakah kebijakan pajak yang seperti itu mencerminkan neoliberalisme? Apa itu neoliberalisme dan apakah di Indonesia mazhab itu sedang dianut? Benarkah ada ekonom yang beraliran neoliberal dan mengambil kebijakan berdasarkan preskripsi-preskripsi mazhab ekonomi itu?

Dan yang lebih penting barangkali—pun ada neoliberalisme itu—apakah itu sebuah dosa?

Bagaimana sikap "Pak Boed yang saya kenal" itu terhadap ketentuan pajak tadi?

Sayang, ingar-bingar tentang neoliberalisme baru muncul setelah pemilu legislatif. Tepatnya, saat Susilo Bambang Yudhoyono sedang sibuk menimang-nimang calon pendampingnya, dan nama Boediono santer disebut.

Tapi diskusi tentang neoliberalisme langsung surut begitu saja ketika SBY akhirnya mengumumkan Boediono sebagai calon

pasangannya di Bandung, dengan *setting* acara mirip konvensi Partai Demokrat-nya Barrack Obama. Tudingan Boediono agen neoliberal, terutama dari kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PAN, langsung mereda.

Wartawan kawakan seperti Goenawan Mohamad mengantarkan Boediono ke Bandung, naik kereta api khusus carteran. Goenawan dan beberapa tokoh lainnya lalu ikut melepas "calon mempelai" SBY itu dari gedung Indonesia Menggugat, dekat Viaduk. Gedung ini dulu namanya Pengadilan Landraad, tempat Soekarno diadili pada 1930 dan membacakan pledoinya yang termashur: Indonesia Menggugat.

"Untuk Boediono: Sebuah Titipan dari Sebuah Gedung Bersejarah," begitu Mas Goen memberi judul artikelnya. Artikel itu ditutup dengan sebuah dukungan politik: "Saudara Boediono, kami percaya, Anda tak akan menyia-nyiakan amanat itu. Dari ruang ini, pada hari ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat bertugas. Bandung, 15 Mei 2009."

Yang ingat bahwa Mas Goen pernah ditraktir iklan kenaikan BBM oleh Rizal Mallarangeng, bersikap mafhum belaka. Sebab, Rizal adalah jurubicara dan jurupoles Boediono selama masa kampanye.

Bedanya, kali ini dukungan Mas Goen tidak dalam bentuk iklan besar-besaran di *Kompas*, melainkan "cukup" di halaman Catatan Pinggir di majalah *Tempo*-nya sendiri. Majalah *Tempo* yang sampulnya bergambar pas foto Boediono berlatar biru cerah (edisi Mei 2009). Di edisi itu pula, *Tempo* menurunkan wawancara panjang dengan Boediono, berjudul: Saya Tidak Bercita-cita Menjadi Kaya.

Kawanku yang tukang *iseng, nyeletuk* mengomentari judul: "*Ya, iya lah... Wong* hartanya sudah Rp 22 miliar lebih."

Usai acara deklarasi, Boediono pun diwawancarai secara eksklusif oleh *TV One*. Tadinya aku berharap presenter *TV One,* Tina Talisa, tidak berhenti pada pertanyaan, "Bapak dituding sebagai seorang neoliberal, apa komentarnya?", tetapi juga sedikit merangsek, "apakah Bapak setuju privatisasi, pencabutan subsidi, dan liberalisasi?"

Cuma, mustahil berharap ada diskusi semacam itu di tengah hiruk-pikuk panggung politik yang memang bukan waktunya untuk memberi ruang pada logika dan penalaran. Itu pikiran positifku tentang kualitas presenter televisi. Jadi ini semata-mata soal durasi dan situasi forumnya yang tidak memungkinkan. Bukan karena sebab lain.

Di sisi lain media juga tidak mendesak para politisi yang menolak Boediono, apa sesungguhnya argumentasi dasar mereka selain soal kekecewaan tak diajak berembug oleh SBY. Jangan-jangan memang tidak ada argumen itu dan *it's all about the power*, makanya media pun maklum belaka.

Aku sendiri merindukan di koran-koran nasional ada debat berhari-hari tentang neoliberalisme dan bagaimana hal itu bekerja di Indonesia. Faisal Basri (UI), Revrisond Baswir (UGM), atau Dradjad Wibowo (IPB) saling mengasah pena berkontribusi pada pencerdasan publik. Entah mereka yang belum punya waktu, atau redaktur halaman opini koran yang tak tertarik.

Masa-masa romantisme koran tempo dulu yang memuat polemik sosial selama berhari-hari bahkan bilangan bulan, sepertinya tak akan kembali. Aku merasa apes lahir di era yang tak sempat mengikuti debat budaya antara Pramoedya Ananta Toer dan Goenawan Mohamad di masanya. Antara Lekra dan Manikebu. Antara Lekra dan Lesbumi. Antara Manikebu dan Lesbumi.

Tapi aku keliru. Beberapa waktu kemudian, halaman opini

Kompas menampilkan debat intelektual tentang neoliberalisme selama beberapa hari dengan menurunkan artikel-artikel bermutu. Jadi untuk konteks ini, salah bila ada orang yang menganggap media massa kita dangkal dan tidak peduli dengan eksplorasi penalaran. Apalagi cuma mementingkan iklan.

Dari beberapa artikel, yang aku kliping hanya satu dan justru bukan tulisan ekonom. Melainkan tulisan seorang dosen, B Herry Priyono. Dia mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Dimuat di *Kompas* edisi Kamis, 28 Mei 2009, dengan judul, "Sesat Neoliberalisme".

***

Neoliberal yang Saya Kenal

Menurut Herry, neoliberalisme itu bukan perkara ilmu ekonomi, tetapi filsafat politik. Karena itu, membatasi perdebatan neoliberal hanya pada persoalan ekonomi adalah salah kaprah. Sesat pikir. Neoliberal itu adalah cara berpikir yang menganggap bahwa mekanisme pasar (dan bukan intervensi negara) adalah pilihan terbaik untuk menata semua sendi kehidupan sosial.

Jadi, aku pikir stempel neolib—bila pun harus main stempel—tak harus untuk ekonom seperti Boediono. Bahkan bisa untuk para politisi *cum* pedagang seperti Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, atau bekas jenderal seperti SBY, Wiranto, dan Prabowo. Watak neoliberal juga bisa melekat pada para gubernur, bupati, walikota, pengusaha, wartawan sepertiku, bahkan tukang parkir dan penjaga toilet seperti Samin dan Dul.

Jadi penampakan neoliberal itu tak hanya menghantui kebijakan-kebijakan ekonomi makro seperti privatisasi BUMN, pengurangan subsidi, kebijakan pro-impor, atau membagi-bagikan kuasa pertambangan pada investor asing. Tapi juga dalam kebijakan-kebijakan sosial lainnya seperti swastanisasi lembaga pendidikan, liberalisasi sektor kesehatan, kebijakan transportasi umum, air swasta, penggunaan frekuensi oleh juragan televisi, hingga urusan-urusan sepele seperti parkir dan toilet umum.

Pendek kata, watak neoliberal bisa masuk hingga ke tulang sumsum dan sendi-sendi kehidupan sosial kita, bahkan dalam cara berpikir kita sebagai individu.

Dalam artikelnya, menurut Herry, istilah neoliberal itu dipakai untuk menyebut watak rezim Augusto Pinochet yang berkuasa di Chile pada tahun 1973-1990. Rezim itu punya dua karakter:

kebijakan politik yang otoriter dan pilihan ekonomi pasar bebas.

Ketika membaca paragraf ini aku lalu membayangkan Soeharto. Kira-kira setali tiga uang. Konsesi pertambangan diumbar kepada pihak asing, dan tentara digunakan untuk mengintimidasi penduduk lokal yang protes.

Perdagangan di-liberalisasi, perbankan di-deregulasi, tapi kehidupan politik dibatasi. Aktivis diculik dan kantor partai pesaing Golkar diserbu hancur dalam peristiwa 27 Juli 1996 (meski belakangan, ketika berkuasa, partai tersebut—yang tak lain adalah PDI Perjuangan—kebijakan-kebijakannya juga berbau ajaran neoliberal). Wiranto, SBY, atau Prabowo masih menjadi tentara aktif di masa-masa itu.

Jadi ekonominya liberal, politiknya otoriter. Maunya yang bebas hanya urusan *nyari* uang. Dipikirnya manusia ini makhluk rakus yang hanya butuh sandang, pangan, papan, tanpa perlu ekspresi-ekspresi sosial seperti berpendapat, berorganisasi, berkumpul, *ngegosip* atau *ngerasani* pemerintah.

Politik otoriter itulah yang digunakan untuk menjamin agar ekonomi tetap liberal. Kombinasi "maut" itulah yang disebut neoliberalisme oleh orang-orang di Amerika Latin di era 1970-an. Sebab, pemikiran liberalisme asli (yang belum ada neo-nya), tidak menyebut-nyebut soal harus jadi otoriter. Justru liberalisme di Eropa hadir karena mendobrak aristokrasi dan monarki, yang menempatkan manusia sebagai hamba sahaya bagi manusia lainnya. Itulah liberalisme yang digagas di abad ke-18 oleh Adam Smith, dan merebak di daratan Eropa pada abad ke-19.

Rezim Pinochet sendiri konon dikelilingi ekonom yang berkiblat ke Universitas Chicago, Amerika, di mana embrio neoliberalisme dikembangkan. Di kampus itu ada seorang filsuf

bernama Friedrich August von Hayek. Pak Hayek ini berumur panjang, 92 tahun. Dia lahir 1899 dan baru meninggal tahun 1992.

Dia meraih Nobel untuk ekonomi pada tahun 1974. Mirip Joseph E Stiglitz yang juga mendapat Nobel tahun 2001 dan pernah menyebut Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia sebagai aturan hukum paling liberal yang pernah ditemuinya. Dua Nobel untuk dua pemikir ekonomi yang pandangannya bertolak belakang 181 derajat!

Filsafat Hayek menyebut bahwa dalam membangun sebuah tatanan sosial yang baik, tidak diperlukan otoritas terpusat seperti pemerintah. Kehadiran otoritas yang serba terpusat selalu mengundang risiko pembatasan kebebasan dan bahkan perbudakan.

Dalam sejarah peradaban manusia, premis Pak Hayek ini memang bukan barang baru. Setiap kekuasaan yang serba dominan nyaris selalu berujung pada penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Aku sisipkan kata “nyaris” agar ada ruang untuk para nabi-nabi “langitan” yang juga berkuasa di masanya—tapi mana berani aku menuding mereka menindas.

Kisah raja-raja di seluruh penjuru dunia mulai dari Firaun di Mesir, kaisar Nero di Romawi, hingga Gengis Khan di Mongolia, menunjukkan hal tersebut. (*Nah*, justru Nabi Musa menentang Firaun, kan?).

Dalam satu masa, institusi gereja yang berkuasa juga memerangi para ilmuwan yang mengembangkan teori baru yang menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa bumi bulat dan bukan pusat tata surya. Gelileo Gelilei (1564-1642) diminta menghentikan penyebarluasan tesisnya yang baru bahwa matahari adalah pusat tata surya (heliosentrisme).

Pada satu masa pula, oknum-oknum gereja juga menerbitkan saham penebus dosa (yang tentu saja hanya bisa dibeli orang-orang kaya) dan lalu menimbulkan gerakan "reformasi keagamaan".

Politik otoriter itulah yang digunakan untuk menjamin agar ekonomi tetap liberal. Kombinasi "maut" itulah yang disebut neo-liberalisme oleh orang-orang di Amerika Latin di era 1970-an.

Jadi, entah di organisasi sekuler atau agama, setiap kekuasaan cenderung menindas. Hayek percaya itu. Aku juga percaya (setidaknya agar terkesan sejajar dengan seorang filsuf).

Pendukung Syeh Siti Jenar pun menuding Wali Songo, yang merupakan representasi politik keagamaan kerajaan Islam Demak, sebagai ulama-ulama arus utama yang menindas. Tuanku Imam Bonjol belakangan juga disebut menggunakan cara-cara kekerasan dalam penyebaran agama di Padri, Sumatera Barat.

Tahun 1887, Lord Acton menulis sebuah tesis yang termashur sebagai kutipan sepanjang zaman: *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan. Acton tidak membuat catatan kaki, apakah penyalahgunaan itu dilakukan oleh institusi sekuler atau religius. Pokoknya di mana ada kekuasan, di situ ada potensi penyalahgunaan.

Jadi, sekali lagi, tak ada yang terlalu hebat dalam preposisi Hayek yang hidup di abad ke-20, yang percaya dampak buruk terpusatnya sebuah kekuasaan, termasuk pemerintah. Tapi kemudian Hayek menyodorkan teori alternatif yang sangat ekstrem. Yakni, tatanan sosial itu harus terbentuk tanpa campur tangan otoritas apa pun.

Menurut artikel dosen Herry yang dimuat di *Kompas* itu, sebuah tatanan harus dibiarkan terbentuk secara alamiah sebagai hasil perimbangan (ekuilibrium) tindakan bebas setiap orang dalam mengejar kepentingan dirinya. Bila orang-orang dibiarkan bebas bertindak mengejar kepentingannya, maka dengan sendirinya akan tercipta sebuah tatanan yang muncul dari interaksi antar-individu bebas itu.

(Tugas wartawan menerjemahkan yang rumit-rumit menjadi mudah dipahami pembaca atau penonton televisi. Akhirnya, meski agak terbata-bata, biarlah aku menyederhanakan teori Pak Hayek ini di terminal angkutan umum).

Siapa bilang terminal "Kampung Melayu" di Jakarta ditata dengan sengaja? Melihat lokasinya di bawah jembatan layang dan tanpa fasilitas apa pun, aku malah ragu bahwa terminal itu memang didesain khusus oleh pemerintah daerah. Jangan-jangan, awalnya cuma terminal bayangan. Yang terminal betulan barangkali terminal Kampung Rambutan, Pulo Gadung, Lebak Bulus, atau Kalideres. Yang mungkin mulanya juga terminal partikelir.

Secara alamiah, Kampung Melayu memiliki posisi yang srategis: menghubungkan Jakarta Timur dari arah Cawang dan Jakarta Pusat dari Matraman. Syahdan, di titik itu, dahulu dijadikan titik berkumpul orang yang sedang melakukan perjalanan, untuk berpindah jurusan. Karena banyak calon penumpang, maka angkutan umum pun berdatangan.

Setiap calon penumpang atau sopir angkutan masing-masing punya kepentingan yang harus mereka kejar. Penumpang ingin sampai di tujuan, sopir angkutan butuh setoran. Bahkan di antara sopir angkutan, mereka saling mengejar kepentingan masing-masing, berlomba mencari penumpang. Di antara penumpang ada saingan untuk mendapatkan angkot duluan.

Tentu saja semua itu tidak ada yang mengatur. Perebutan penumpang tak jarang menimbulkan konflik di antara para sopir. Kendaraan saling serobot atau memotong antrean. Adu jotos barangkali mewarnai kerasnya suasana di lokasi itu, tempo dulu. Ada sopir dari Batak, Jawa, Sunda, atau orang Betawi yang merasa jadi tuan rumah. Karena sering bentrok dan malah tak bisa mencari rezeki, lalu sopir sepakat membentuk tatanan: siapa yang datang dahulu, berhak diisi penumpang sampai penuh, lalu tancap!

Penumpang pun akhirnya maklum dengan aturan main baru ini. Mobil yang ada di barisan paling depan akan berangkat dahulu, tak peduli itu mobil rongsokan. Aturan tak tertulis di berbagai aspek per-*angkotan* inilah yang kemudian menciptakan tatanan sosial. Kemudian, tanpa ada yang mengatur-atur, secara alamiah, terbentuklah terminal "Kampung Melayu".

Rekonstruksi ini hanya rekaanku saja. Tak ada riset literatur sejarah Jakarta yang aku tekuni untuk memberi analogi pada teori Friedrich von Hayek (tentang kehendak bebas individu akan dengan sendirinya menciptakan tatanan) itu.

Yang jelas, selain praktik empirik—bagaimana orang-orang itu mengatur diri—juga ada proses belajar secara deduktif dari pola-pola hubungan sosial yang sudah ada. Terminal bayangan "Kampung Melayu" itu barangkali belajar dari sistem terminal lain yang sudah ada.

Intinya, demi mengejar kepentingan individu dan kelangsungannya, manusia akan tergerak secara alamiah mengatur sistem dan tatanan. Tak usah disuruh-suruh, tak usah diperintah-perintah, tak usah pula diatur-atur. Semakin dibatasi, semakin tidak maksimal sebuah tatanan bergerak dan pada akhirnya menghambat upaya manusia mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

Ini memang filsafat. Filsafat bagi orang awam seperti aku selalu abstrak. Membacanya butuh pelan-pelan sambil merenung-renung. Apalagi menuliskannya.

Bagi Hayek, para sopir, penumpang, dan calo angkutan itu berkumpul tidak dengan maksud membuat terminal, tapi sekadar menjalankan peran masing-masing yang berakibat terbentuknya terminal "Kampung Melayu".

Bayangkan bila terminal itu dari semula diadakan oleh pemerintah. Jangan-jangan malah diproyekkan. Tendernya sarat KKN, pemborongnya melakukan *mark up*, pejabatnya minta komisi atau *kick back*, dan angkot yang boleh beroperasi hanya milik juragan-juragan tertentu. Jadinya malah terminal yang tidak sehat. Polisi lalu-lintasnya justru membisniskan rambu larangan berhenti (*ngetem*).

Enteng kata, daripada semua itu terjadi, sebaiknya biarkan saja individu bebas bergerak mencari kepentingannya masing-masing, dan dengan demikian akan terbentuk tatanan.

Lantas, apa bedanya dengan paham liberalisme yang selama ini dipahami? Bukankah doktrin liberalisme juga menekankan hal tersebut? Lalu di mana letak "neo"-nya?

Sebelum meneruskan premis-premis Hayek tentang neo-liberalismenya, ada baiknya kita jalan-jalan sebentar ke *old version*-nya.

Merkantilisme dan Liberalisme

Liberalisme dalam ekonomi digagas seorang Skotlandia bernama Adam Smith pada 1776 melalui bukunya yang legendaris: *The Wealth of Nations*, satu abad sebelum Karl Marx menulis *Das Kapital* yang monumental. Smith dan para

pendukungnya menentang campur tangan negara dalam urusan-urusan ekonomi.

Ketika ikut kursus jurnalisme televisi di Inggris, Oktober 2008, aku menghabiskan jatah uang jajan untuk *keluyuran* ke Skotlandia, negeri kaum *highlander*. Tujuannya bukan untuk mengenal lebih dekat Adam Smith, melainkan tokoh heroik pahlawan kebanggaan rakyat Skotland, William Wallace (yang diperankan Mel Gibson dalam film *Brave Heart,* 1995). Karena bukan sarjana ekonomi, aku tak terlalu tertarik menelusuri jejak kehidupan Adam Smith.

Padahal, Adam Smith lebih menentukan jalannya sejarah dunia, dibandingkan Wallace yang mungkin hanya penting bagi orang-orang Skotlandia dan Inggris. Coba kalau aku tetirah ke tempat-tempat Adam Smith, kan bisa gaya-gaya-an menulis artikel: "Sisi Lain Adam Smith yang Saya Kenal".

Tapi kemunculan pemikir besar seperti Adam Smith sejatinya berkaitan dengan apa yang terjadi 400 tahun sebelumnya, yakni di masa William Wallace masih hidup (1272-1305). Inggris dan Eropa di masa itu adalah negeri dengan sistem negara kerajaan (monarki). Selain raja besar seperti Edward I yang berkuasa di Inggris, ada raja-raja yang memerintah negeri yang lebih kecil seperti Robert de Bruce di Skotlandia.

Di bawah kerajaan, hiduplah para bangsawan (*noble*) yang memiliki tanah luas dan pasukan keamanan sendiri. Meski di film *Brave Heart* William Wallace digambarkan sebagai rakyat jelata, namun kenyataannya dia adalah bangsawan besar. Saat mampir ke sebuah bar di kota kecil Aviemore di pedalaman Skotlandia, kami sempat mendiskusikan ihwal ini dengan penduduk lokal.

Seorang pemadam kebakaran berbadan kekar tak henti-hentinya "mengutuk" film Hollywood yang dianggapnya

memelintir sejarah Skotlandia itu. Betapa tidak, dalam film karya Mel Gibson itu, William Wallace dan raja Skotlandia, Robert de Bruce, dipertemukan di zaman yang sama. Padahal, menurut orang-orang di bar itu, mereka hidup di zaman yang terpisah.

Film *Brave Heart* juga menyuguhkan adegan peperangan kolosal, yang disebut-sebut sebagai titik kemenangan Wallace. Namanya pertempuran Stirling (*The Battle of Stirling*), yang terjadi pada 11 September 1297. Di film produksi Paramount Picture itu pertempuran Stirling digambarkan terjadi di lapangan terbuka yang luas. Padahal, faktanya, pertempuran itu terjadi di sebuah jembatan di kota kecil Stirling.

Aku yang penasaran, mendatangi kota Stirling, yang jaraknya hanya beberapa kilometer saja dari Glasgow. Jembatan batu itu masih utuh berdiri. Di titik sempit itulah, 700 tahun silam, pasukan William Wallace menghabisi pasukan Inggris yang lebih besar tapi tak berkutik. Strategi perang seperti ini mirip adegan perang di film *300*, di mana pasukan Sparta yang jumlahnya hanya 300 orang, digambarkan menghabisi tentara Persia yang berjumlah puluhan ribu. Pasukan yang besar, tak ada gunanya di tempat sempit bak leher botol seperti itu.

"Spartaaaan!!!"

"*Hu-ha-hu*!!!"

Karena strategi perang seperti itulah Wallace menang. Dan orang-orang di bar yang mentraktirku dengan segelas *coke* itu tak henti-hentinya mencemooh film Gibson. Aku sendiri heran, apa iya film berbiaya 72 juta dolar Amerika dan menyabet piala Oscar itu tidak didukung riset sejarah yang memadai.

Kembali ke soal kaum bangsawan di Eropa. Sistem politik, di mana raja dan bangsawan berkuasa, berimplikasi pada

sistem ekonomi dan kegiatan produksi. Yang disebut rakyat tak lain adalah orang-orang yang tinggal di tanah-tanah atau perkebunan milik kerajaan atau bangsawan. Kira-kira nyaris sama dengan rakyat sebagai karyawan BUMN.

Raja, bangsawan, dan agamawan merupakan elit sosial yang biasa disebut kaum aristokrat, sementara rakyat adalah kelas pekerja atau kaum profesional. Sistem yang berlaku pun sangat feodal utuk ukuran nilai-nilai masa kini. Bayangkan saja, kaum bangsawan misalnya, punya hak istimewa bernama *prima noctes*.

Prima noctes yaitu hak bangsawan untuk memerawani setiap pengantin yang tinggal di tanah mereka, sebelum pasangan mempelai itu berbulan madu. Hak ini konon diberikan oleh Raja Edward (Inggris) agar kaum bangsawan Skotlandia senang dan tidak memberontak melawan kerajaan. Sebagai bangsawan, William Wallace termasuk yang mengantongi hak ini. Namun belakangan Wallace memberontak karena menolak penerapan pajak yang terlalu tinggi untuk disetor ke London.

Setelah menjalani pertempuran demi pertempuran, Wallace akhirnya bisa ditaklukkan oleh kerajaan Inggris. Dia dijatuhi jenis hukuman yang namanya terdengar *keren*, yakni *hung, drawn, and quartered*.

Diapain, tuh?

Digantung, dan sebelum benar-benar mati, isi perutnya dibongkar, lalu tubuhnya dicabik menjadi empat bagian untuk dibuang di tempat terpisah sebagai peringatan. Kepala Wallace konon ditanam di Tower of London yang termashur itu.

Begitulah gambaran kultur feodal di Eropa utara abad ke-14. Rakyat adalah petani penggarap lahan di tanah para bangsawan. Mereka harus membayar pajak tanah dan bekerja memenuhi kebutuhan kerajaan atau kastil-kastil milik para aristokrat.

Kegiatan produksi dipusatkan dalam sistem gilda, di mana produksi dan distribusi diatur sedemikian rupa. Setiap kastil atau kerajaan berlomba-lomba memperkaya pundi-pundi mereka melalui pajak atau ekspor barang yang menjadi unggulan. Mereka punya tentara masing-masing yang kerap bertempur untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi.

Sistem ekonomi di masa itu disebut merkantilisme.

Dan karena maju mundurnya sebuah kerajaan atau kastil sangat tergantung dari pundi-pundi mereka—termasuk untuk membayar tentara—maka merkantilisme menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang kurang lebih sebagai berikut:

1. Setiap jengkal tanah harus digunakan untuk pertanian, pertambangan, dan manufaktur.
2. Bahan-bahan baku harus digunakan untuk sektor manufaktur domestik, karena nilai barang akan lebih tinggi daripada nilai bahan bakunya.
3. Diperlukan populasi tenaga kerja yang tinggi.
4. Ekspor emas dan perak ke kerajaan lain dilarang, dan uang domestik harus dipelihara dalam sirkulasi.
5. Menekan impor barang agar tak menghabiskan devisa kerajaan. Barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, tak boleh ada saingan barang impornya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi pelayaran, kerajaan-kerajaan dan kaum bangsawan Eropa mulai melakukan perjalanan dalam rangka kolonialisasi ke benua-benua lain. Mereka mencari sumber-sumber daya alam baru. Maka lahirlah kelas sosial baru yang memperoleh kekayaan dari perkembangan zaman.

Mereka barangkali tak punya hak kebangsawanan, tapi memiliki modal dan menjalankan kegiatan ekonomi sendiri.

Mereka kini membutuhkan buruh, setidaknya anak buah kapal untuk membantu berlayar ke negeri-negeri asing. Terjadilah persaingan memperebutkan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja kini tak dimonopoli oleh kaum bangsawan atau tuan tanah. Para petani ingin berlayar dan menjajal peruntungan dengan tuan-tuan baru yang tak mengenal *prima noctes*.

Ekonomi merkantilis tak mampu lagi menyesuaikan diri dengan perkembangan ini. Di sisi lain, kelompok intelektual mulai berseteru dengan elit gereja yang mempertahankan dogma. Gereja dianggap menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan dan membatasi manusia mencapai taraf peradaban yang lebih tinggi. Pengaruh politik tak lagi ditentukan oleh keturunan dan kesalehan religius, tetapi oleh penguasaan pada teknologi.

Nah, gerakan kelompok intelektual yang menentang aristokrasi ini bertemu dengan golongan Orang Kaya Baru (OKB) yang menginginkan akses pada sumber-sumber ekonomi dan aturan perdagangan yang lebih bebas.

Inilah momentum kelahiran liberalisme atau paham kebebasan. Aturan ortodok dan hak-hak istimewa kaum bangsawan digugat. Manusia unggul bukan karena keturunan raja atau ditunjuk Tuhan, tapi karena kapasitas intelektual atau jaringan bisnisnya. Maka lahirlah revolusi industri di Inggris dan negara-negara Eropa di abad ke-18 hingga abad ke-19.

Di titik sejarah inilah ajaran-ajaran Adam Smith muncul dan mengejawantah dalam praktik-praktik ekonomi.

Bagi Smith, tak perlu ada pembatasan produksi, tak boleh ada kebijakan yang menghalang-halangi perdagangan, juga tak ada tarif atau bea masuk ekspor-impor. Perdagangan bebas adalah cara terbaik untuk pembangunan ekonomi. Sebab, secara asasi, manusia adalah makhluk ekonomi yang cenderung mencari keuntungan dan menyejahterakan dirinya. Bila ini

dibiarkan tanpa ada hambatan, maka niscaya semua orang akan mengusahakan kesejahteraannya.

Gilda-gilda berubah menjadi pabrik-pabrik. Rakyat dan petani beralih profesi sebagai buruh di pabrik-pabrik baru. Pendapatan didistribusikan melalui upah kerja, bukan lagi penjatahan hasil bumi—setelah dipotong pajak kaum bangsawan.

Pendek kata, liberalisme di Eropa mula-mulanya bukan semata gerakan ekonomi, melainkan pandangan-pandangan politik.

Dalam buku yang ditulis para wartawan majalah—tempatku dulu pernah bekerja—*Warta Ekonomi*: "Membongkar Neolib di Indonesia", prinsip-prinsip ajaran liberalisme disarikan sebagai berikut:

1. Demokrasi adalah bentuk sistem politik yang lebih baik (daripada aristokrasi atau monarki)
2. Masyarakat memiliki kebebasan intelektual, termasuk kebebasan berbicara, beragama, atau berorganisasi.
3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Rakyat harus belajar mengambil keputusan sendiri. Meski keputusan rakyat belum tentu sebaik keputusan seorang raja yang bijak, tapi itulah pilihan hidup mereka.
4. Kekuasaan seseorang pada orang yang lain, adalah hal yang buruk. Sebab, kekuasaan selalu disalahgunakan dan cenderung menindas. Perbudakan, aristokrasi, dan feodalisme dengan demikian adalah sistem sosial yang buruk.

Jadi liberalisme ini pada mulanya bukanlah gagasan yang datang dari neraka dan menakutkan, sebagaimana dipahami oleh kaum konservatif di belahan dunia lain hari ini. Ini adalah proses dialektika peradaban yang terjadi di Eropa di masa itu. Anti-

tesis terhadap feodalisme dan perlawanan pada penindasan kelompok aristokrasi.

Menurut liberalisme, modal harus dibiarkan bebas bergerak mencari ceruk-ceruk keuntungan yang tak dibatasi tembok kerajaan atau kastil. Ketika ia membesar, tak boleh dihambat karena dia akan bekerja seperti sel: membelah diri dan melipatgandakan keuntungan. Ketika modal awal melahirkan modal baru, dia akan menciptakan lapangan kerja baru, memacu pertumbuhan, dan akhirnya kesejahteraan. Inilah prinsip dasar kapitalisme.

Orang awam dengan gampang menuding aliran ekonomi ini sebagai "mengajari orang untuk serakah".

Tapi kawanku, Mohamad Samsul Arifin dari *SCTV* di *facebook*-nya tidak terima bila Adam Smith hanya dikutip separuh. Menurut dia, selain sebagai makhluk ekonomi, manusia juga makhluk moral. Dia protes saat orang hanya mengutip buku *The Wealth of Nations*, dan bukan yang terbit sebelumnya, *The Theory of Moral Sentiment* (1759).

Mengutip ekonom UGM, almarhum Mubyarto, Samsul mengatakan, ajaran moral Adam Smith jarang disebut-sebut orang. Padahal simpati antarmanusia akan membatasi pengejaran kepentingan pribadi yang berlebihan atau serakah. Dengan mengendalikan egoisme, pengejaran kepentingan pribadi pastilah tak akan dibiarkan melampaui batas.

Aku lantas iseng mengomentari artikel Samsul di *facebook*. Menurutku, kalau prinsip-prinsip ekonomi yang "bermoral" ditulis tahun 1759 dan yang "serakah" ditulis tahun 1776, berarti ada dua kemungkinan: yang satu melengkapi, atau yang tahun terbitan muda merevisi yang terbitan lama. Seperti Karl Marx muda dan Karl Marx tua. Jadi kira-kira, pesan moralnya, kapitalisme itu tidak jelek-jelek amat, sebab manusia

diasumsikan sebagai makhluk yang juga toleran, di samping punya sifat serakah. Manusia bisa kejam, tapi juga bisa iba. Bisa rakus, tapi juga dermawan. Tak ada monopoli kebenaran, juga kejahatan.

Namun belakangan makna kebebasan dalam liberalisme menjadi kebebasan dalam fungsi uang (belaka). Artinya sistem kebebasan ekonomi yang diciptakan liberalisme, semua berbasis pada kepemilikan uang. Sederhananya, bila kita punya uang, maka kita bebas melakukan apa saja. Bebas memilih sekolah yang baik, bebas berobat ke rumah sakit berstandar internasional atau bahkan berobat ke Singapura, bebas memilih moda transportasi, atau bebas memilih pantai yang cocok untuk liburan.

Sebaliknya, bagi yang tidak memiliki uang, maka kebebasan itu langsung terenggut. Orang miskin tidak bebas memilih sekolah, rumah sakit, angkutan umum, atau tak memiliki akses pada tempat-tempat liburan (yang sudah dikapling dan dipagari seperti pantai di Anyer atau Ancol).

Sisi Lain Liberalisme (yang Kukenal)

Jadi kalau resepsi pernikahanku tiba-tiba di-interupsi oleh kaum bangsawan yang meminta jatah *prima noctes*, aku pasti jadi pendukung liberalisme. Atau bila—setelah berlayar berbulan-bulan—aku mengatakan bahwa bumi bulat dan tidak datar, lalu dicambuk oleh agamawan karena dianggap kafir, aku pasti jadi pendukung Adam Smith.

Terutama bila guruku bisa menemukan teleskop dan mengatakan bahwa bumi bukan pusat tata surya, melainkan matahari, lantas ia dikenai tahanan rumah, tentu aku akan memberontak melawan gereja, masjid, atau institusi agama apa pun yang melakukannya.

Liberalisme di Eropa adalah abad pencerahan. Meski dalam perkembangannya kemudian, banyak hal terjadi di luar kehendak alam pikiran para ekonom liberalisme. Liberalisme dan kapitalisme bergulir lebih kompleks dari rancangan pemikiran siapa pun.

Namun belakangan makna kebebasan dalam liberalisme menjadi kebebasan dalam fungsi uang (belaka). Artinya sistem kebebasan ekonomi yang diciptakan liberalisme, semua berbasis pada kepemilikan uang. Sederhananya, bila kita punya uang, maka kita bebas melakukan apa saja.

Karena modal bisa melahirkan modal baru, maka modal adalah juga komoditas yang bisa diperdagangkan. Meminjam modal seperti pada bank, ada imbalannya. Modal juga bisa diperdagangkan seperti di bursa saham dan ada harganya.

Ratusan tahun sebelum Adam Smith, konsep perdagangan modal seperti ini sudah ditentang Nabi Muhammad s.a.w. dengan gagasan anti-riba-nya. “Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, memberikan, dan orang yang menjadi saksi,” demikian sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah.

Bila modal bisa diperdagangkan, maka akan banyak orang yang tidak memanfaatkan modal untuk kerja, tapi menggunakan modal untuk mencari modal dan seterusnya. Akibatnya ekonomi menjadi semu, penuh transaksi derivatif, dan menciptakan segelintir orang kaya yang menguasai permodalan tanpa menimbulkan efek sosial apa-apa.

Orang kaya menyimpan uangnya di bank untuk mengharap bunga. Dia lantas hidup dari bunga. Di titik ini, modal malah menumpulkan kreatifitas. Alih-alih memutar uangnya untuk sektor produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja, uang itu dibiarkan menganggur di bank tapi berbuah.

Bank memang bisa memutarnya sebagai modal kerja. Dan bunga yang diterima deposan adalah "bagi hasil" tanpa akad antara pihak bank dan pemilik rekening (*mudarabah*). Tapi uang itu juga bisa diparkir bank begitu saja di Bank Indonesia karena mengharap suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia).

Lalu siapa yang bayar bunga SBI?

Rakyat.

Jadi rakyat membayari bunga para pemilik deposito.

Ada lagi hadis lain dari An-Nasa'i: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) makan riba. Barangsiapa tidak memakannya, ia akan terkena debunya."

Untuk apa memutar modal guna berjualan bakso dan menciptakan lapangan kerja, bila menjadi rentenir saja sudah kaya. Untuk apa memutar uang dengan membeli ternak, bila bermain saham saja sudah cukup. Untuk apa capek-capek berdagang kain, bila keuntungan bermain di pasar uang lebih menjanjikan. Jika memborong CPO di bursa komoditas lebih menguntungkan dan tidak bikin penat, lantas *ngapain* pula harus menanam pohon sawitnya.

Nabi Muhammad s.a.w. mengaitkan riba dengan konsep dosa. Dan dosa berarti masuk neraka. Bila sistem ekonomi berdosa, maka nerakalah yang terjadi. Bagi sebagian orang, neraka itu tidak menunggu kiamat, tetapi sudah terjadi saat ini.

Hadis-hadis tadi tidak aku cari dari referensi klasik *Riyadus Shalihin* ataupun kitab kuning yang lebih tebal, *Al-Umm*. Melainkan aku kutip dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa riba hukumnya haram. Bunga bank haram, bagi mereka yang di daerahnya ada bank syariah. Tapi bagi mereka yang sulit mencari bank

syariah, maka berhubungan dengan bank konvensional masih diperbolehkan, dengan alasan darurat.

Mungkin, perlu diaudit apakah para anggota MUI punya rekening di bank konvensional.

Fatwa MUI tidak menyebut-nyebut tentang pasar modal. Tapi ulama kondang, Aa Gym pada tanggal 3 Januari 2003 datang ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk membuka perdagangan hari pertama tahun baru. Harinya Jumat pula, sebelum sembahyang.

Dengan logika transaksi atas modal, maka nilai uang melambung-lambung tanpa disokong basis produksi yang riil dan hanya didasarkan sentimen di antara para pemodal. Maka, jangan heran pula bila mata uang dipatok dengan mata uang lain, dan bukan ditentukan secara otonom berdasarkan basis produksi di negara di mana mata uang itu dikeluarkan.

Sehingga Pak dan Bu Bejo yang bekerja 12 jam sehari, tetap akan selalu miskin dibanding Mr and Mrs Smith yang bekerja hanya lima jam, *plus* libur akhir tahun dan libur musim panas selama dua bulan. Semua itu hanya gara-gara Pak Bejo lahir di waktu dan tempat yang salah, di sebuah negara yang mata uangnya rupiah.

Ahli ekonomi barangkali akan menertawakan simplifikasi yang aku buat. Sebab nilai mata uang sebuah negara juga ditentukan oleh basis produksi yang dimilikinya, cadangan devisa,

> Bila modal bisa diperdagangkan, maka akan banyak orang yang tidak memanfaatkan modal untuk kerja, tapi menggunakan modal untuk mencari modal dan seterusnya. Akibatnya ekonomi menjadi semu, penuh transaksi derivatif, dan menciptakan segelintir orang kaya yang menguasai permodalan tanpa menimbulkan efek sosial apa-apa.

cadangan emas, dan lain-lain yang *njlimet*. Selama kita masih menghargai *handphone* lebih mahal dari setandan buah sawit, maka selama itu pula mata uang negara yang memproduksi *handphone* akan lebih kuat.

Tapi aku tidak puas dengan realitas itu. Yang aku tahu, orang-orang seperti Pak Bejo yang memproduksi padi bisa tiba-tiba kaya atau jatuh miskin, hanya karena harga pupuk dan berasnya dipengaruhi naik turunnya mata uang yang *notabene* tak ada sangkut paut dengan dirinya.

Tujuh belas kilometer dari pusat kota Bireuen, Aceh, ada kebun sawit milik PT SSS. Aku pernah membuat dokumenter tentang serangan gajah atas lahan-lahan sawit. Karena harga sawit sedang bagus, maka manajemen PT SSS bisa mendatangkan gajah terlatih dari Pusat Pelatihan Gajah di Sare, Aceh Besar, untuk mengusir kawanan gajah liar.

Mendatangkan gajah terlatih dan para krunya, ongkosnya mahal. Untuk pakan tiga ekor gajah pengusir saja, biayanya Rp 600 ribu per hari. Jumlah pawang dan kru ada 10 orang. Obat bius per botol harganya Rp 5 juta. Ini barang vital. Bukan saja untuk membius gajah liar, tetapi juga untuk berjaga-jaga bila gajah pengusir tiba-tiba ketularan liar.

Total jenderal, PT SSS harus merogoh kocek hingga Rp 200 juta untuk satu minggu menyewa rombongan gajah BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Tapi begitu harga CPO anjlok, pemilik lahan sawit sudah pasrah. Gajah liar menggerayangi areal perkebunan yang memang awalnya merupakan rute habitat mereka. Padahal anjloknya harga minyak mentah sawit itu tak ada sangkut pautnya dengan kinerja PT SSS. Tapi semata-mata karena perdagangan komoditas internasional di Rotterdam.

Seperti nasib perkebunan besar, naik turunnya nilai mata uang

di tangan Pak Bejo ditentukan di papan-papan perdagangan di kantor-kantor mewah ber-AC, dan bukan berdasarkan kualitas padi yang dihasilkannya. Meskipun ia banting tulang meningkatkan kualitas padinya dengan rajin mengikuti penyuluhan, semua itu tak lebih berpengaruh daripada suratan takdir harga pupuk yang dipengaruhi oleh nilai kurs.

Barangkali inilah efek yang diperkirakan oleh Nabi Muhammad, ketika ia juga menentang praktik memotong jalur distribusi. Saat itu ada kebiasaan para tengkulak mencegat orang-orang desa yang hendak membawa hasil buminya ke kota. Mereka melakukan transaksi sebelum para petani itu tiba di pasar. Tujuannya apa lagi kalau bukan mencari keuntungan.

Praktik macam itu dilarang Sang Nabi karena akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Konsumen asli akan terbebani dengan harga baru dari tangan tengkulak.

"Tidak boleh orang kota menjadi perantara niaga bagi orang desa. Biarkanlah orang memperoleh rezeki Allah satu dari yang lainnya," demikian hadis riwayat Muslim dari Jabir.

Maka, bila hari ini harga komoditas ditentukan bukan di kebun-kebun sawit, atau sawah-sawah, melainkan di New York Mercantile Exchange (NYME), ini sama saja dengan mencegat petani di luar pasar, lalu menjualnya kembali di dalam pasar dengan harga lebih tinggi.

Bila komoditas saja tak boleh ditengkulakkan, apalagi modal. Modal harus dibedakan dengan komoditas. Ketika modal sudah menjadi komoditas itu sendiri, maka ekonomi akan semu. Dan karena ekonomi adalah *zero sum*, maka ketika ada orang yang mengambil untung dari modal, ketika itu pula ada yang rugi.

Tingginya harga saham perusahaan rokok belum tentu diikuti dengan naiknya upah buruh linting. Buruh di pabrik rokok

mungkin perlu bekerja 8 jam sehari untuk upah Rp 1 juta per bulan. Sedangkan pedagang saham rokok hanya butuh 8 menit bertelepon dengan brokernya untuk mendapatkan keuntungan puluhan atau ratusan juta rupiah di lantai bursa.

Ini seperti dua dunia yang terpisah sama sekali. Satu dengan yang lain tak berhubungan. Yang satu nyata, yang lain maya. Yang satu lugu, yang lain semu. Di luar mereka, ada yang dungu ada pula yang menipu.

Makanya, agak mengherankan bila ada aktivis Islam yang merazia buku-buku sosialisme atau komunisme dibanding *text book*-nya kapitalisme. Aku pun heran bila ada ulama yang ikut-ikutan tentara membenci komunis tapi gagap menghadapi kapitalisme atau liberalisme.

Dalam pemahaman mereka, liberalisme itu adalah gaya hidup mabuk-mabukan, maksiat, dan membuka aurat, yang dikategorikan dosa terhadap Tuhan—tapi masih bisa diharapkan tobatnya. Adapun komunisme, dalam anggapan mereka, tak bertuhan sama sekali. Dan itu lebih parah.

Hanya karena Karl Marx mengatakan agama adalah candu—yang sebenarnya ia kaitkan dengan konsep etos kerja dan tak ada kaitan dengan teologi—para agamawan menganggapnya dosa besar. Tentu saja agamawan tak pernah punya masalah dengan agama dan penghasilan, karena basis penghasilan

> Barangkali inilah efek yang diperkirakan oleh Nabi Muhammad, ketika ia juga menentang praktik memotong jalur distribusi. Saat itu ada kebiasaan para tengkulak mencegat orang-orang desa yang hendak membawa hasil buminya ke kota. Mereka melakukan transaksi sebelum para petani itu tiba di pasar. Tujuannya apa lagi kalau bukan mencari keuntungan.

mereka umumnya dari honor berceramah atau berkhotbah, menulis buku tentang agama, sumbangan jemaat, atau "*profit sharing*" dari mengelola institusi agama. Kalaupun berbisnis, biasanya lancar-lancar saja karena pasar konsumen yang dipilih tak lain adalah umatnya sendiri.

Karena itu, kaum agamawan selalu berjarak dari basis kehidupan ekonomi riil. Memang ada satu dua pesantren yang hidupnya dari mengolah sawah. Ajaran agama di tempat ini soal etos kerja dan ekonomi, barangkali berbeda dengan lembaga-lembaga agama yang hidupnya dari dana politik. Entah itu namanya Yayasan Raudhatul Jannah atau majelis dzikir yang doanya hanya untuk satu calon presiden.

Orang-orang muslim intelektual barangkali mengharap para politisi PKS, PAN, atau Partai Kebangikitan Bangsa (PKB) menyinggung-nyinggung soal ideologi ini ketika menolak Boediono yang dituding neoliberal, sepuritan apa pun argumennya. Tak ada salahnya sekali-kali "fundamentalisme" agama menggugat "fundamentalisme" pasar. Itu pun bila benar alasan mereka menolak Boediono karena stempel neoliberal.

Tapi sudahlah. Kita kembali membicarakan konsep liberalisme dan neoliberalisme.

Bagi kaum liberal, satu-satunya peraturan yang bisa dibuat pemerintah adalah peraturan untuk memastikan agar semua itu bisa terwujud. Pemerintah tak usah mengurusi perdagangan beras dan melakukan tata niaga atasnya, apalagi sampai membuat BUMN segala. Serahkan saja pada swasta, maka semua akan beres. Gara-gara membuat Bulog, berapa banyak pejabat Bulog yang masuk bui atau bermasalah.

Sejak zaman Budiadji, Bulog sudah identik dengan sarang korupsi. Budiadji ini adalah Kepala Dolog (Depot Logistik) Kalimantan Timur pada tahun 1977. Selama tiga tahun, Budiadji

mengorupsi dana Bulog (pusat) hingga Rp 7,6 miliar. Jumlah yang sangat fantastis di masanya. Bandingkan dengan APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun itu yang hanya Rp 7 miliar.

Budiadji memang divonis seumur hidup. Tetapi lantas Soeharto memberikan grasi dan memerintahkan Jaksa Agung Ali Said agar tidak mengobok-obok pejabat Bulog di Jakarta yang diduga terlibat. Termasuk anak buahnya sendiri: Bustanil Arifin (Kabulog). Sebab, Ali Said mengantongi daftar nama pejabat Bulog yang kecipratan.

Aku mengikuti kisah itu dari otobiografi Panda Nababan. Mantan wartawan *Sinar Harapan* yang sekarang menjadi politisi PDI Perjuangan dan menjadi anggota DPR. Dan setelah itu, kasus demi kasus menggerayangi Bulog. Ada kasus Buloggate I (tahun 2000) yang menyeret-nyeret Sapuan, Suwondo (tukang pijit Gus Dur) dan Gus Dur sendiri. Ada juga kasus Buloggate II (2002) yang membawa-bawa nama Akbar Tanjung, Rahardi Ramelan, dan yayasan berbau surga: Raudhatul Jannah.

Nah, karena institusi yang *mengatur-ngatur* pasar tak pernah beres, maka sebaiknya pasar dibiarkan bebas bergerak. Tapi liberalisme kena batunya. Perkembangan bebas modal ternyata tak menciptakan kesejahteraan, dan di Amerika justru mendatangkan resesi dan depresi ekonomi di tahun 1930-an.

Pasar modal Amerika di Wall Street dipenuhi transaksi-transaksi yang irasional alias penuh spekulasi. Pasar saham tidak lagi efektif sebagai instrumen menaikkan kapital dan standar hidup orang, tapi sudah mirip arena kasino oleh para spekulan. *Maisir,*

> Makanya, agak mengherankan bila ada aktivis Islam yang merazia buku-buku sosialisme atau komunisme dibanding *text book*-nya kapitalisme. Aku pun heran bila ada ulama yang ikut-ikutan tentara membenci komunis tapi gagap menghadapi kapitalisme atau liberalisme.

menurut Nabi Muhammad s.a.w. Di sini artinya, judi!

Adam Smith barangkali tak membayangkan hal-hal seperti ini ketika menggulirkan liberalisme kapital. Tapi apa yang terjadi adalah konsekuensi logis dan "alamiah" dari premis-premis kebebasan.

Krisis Amerika 1929-1932 berhubungan dengan aksi-aksi irasional yang terjadi di Wall Street. Transaksi tanpa fundamental. Murni teknikal atau bahkan *gambling*. Tatanan ekonomi rontok hanya dalam hitungan hari. Gara-garanya, antara tanggal 24-29 Oktober 1929 harga saham di bursa Wall Street *ancur-ancuran*. Banyak orang kaya (semu) tiba-tiba jadi gelandangan di jalan-jalan. Tadinya *man on the office*, jadi *man on the street*.

Saat itulah muncul John Maynard Keynes (1883-1946) yang mengkritik habis liberalisme.

Keynesian

Ekonom Universitas Cambridge (Inggris) ini tidak percaya kepada kepentingan individual, yang bisa tidak sejalan dengan kepentingan umum. Katanya, kepentingan orang paling pintar dan bijak sekalipun tidak selalu sesuai dengan kepentingan umum.

Keynes lalu menawarkan konsep *walfare state* (negara kesejahteraan): intervensi negara ke dalam kehidupan ekonomi sangat diperlukan. Pasar harus diatur, tak boleh dibiarkan bebas dan liar. Terminal Kampung Melayu itu harus ada yang mengatur agar preman dan juragan angkot tidak merajalela dan menindas orang-orang kecil.

Menurut Keynes, kebijakan ekonomi haruslah mengikis

pengangguran sehingga tercipta tenaga kerja penuh (*full employment*) serta ada pemerataan yang lebih besar. Dan itu hanya bisa dipastikan oleh pemerintah, tanpa menunggu proses alamiah pasar.

Gara-gara bukunya *The End of Laissez-Faire* (1926), Keynes dianggap berjasa dalam memecahkan masalah depresi besar di Amerika. Terutama setelah diadopsi oleh Presiden Roosevelt dengan program *New-Deal* maupun *Marshall Plan* untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia II.

Keynesianisme pun resmi menjadi resep utama masalah-masalah ekonomi. Bahkan Bank Dunia dan IMF mempraktikkan semua resep Keynes sampai tahun 1970-an.

Tak ada gagasan atau sistem yang sempurna. Karena pemerintah terlalu dominan, maka terjadilah korupsi dan inefisiensi dalam tubuh birokrasi.

Bila ajaran Adam Smith bangkrut karena kegagalan pasar (*market failure*), maka ajaran Keynes diserang akibat kegagalan pemerintah (*government failure*). Seperti halnya Adam Smith tak mengajarkan spekulasi di lantai bursa yang menyebabkan gelembung ekonomi semu, Keynes juga tidak mengajarkan korupsi. Tapi begitu kekuasaan pasar dipegang struktur pemerintah, maka ajaran lama Lord Acton lagi-lagi terbukti: *power tends to corrupt*.

Namun, pemicu "kebangkrutan" Keynesianisme ini tak melulu soal korupsi dan inefisiensi. Melainkan melonjaknya harga minyak dunia akibat perang Yom Kippur antara negara-negara Arab pimpinan Mesir dan Suriah, melawan musuh bebuyutan mereka, Israel. Perang yang terjadi selama 20 hari di bulan Oktober 1973 itu, membuat negara-negara Arab yang *notabene* penghasil minyak, memainkan minyak bumi sebagai instrumen politik.

Mereka menghentikan kiriman minyak bumi ke sekutu utama Israel, yaitu Amerika dan mengembargonya. Akibatnya, harga bensin di Amerika melambung tinggi dan anggaran pemerintah mengalami pendarahan hebat. Saat itulah, para elit di Washington mengambil kebijakan mengurangi beban-beban subsidi yang biasanya dibelanjakan negara untuk rakyatnya. Ide-ide liberalisme kemudian kembali mengemuka setelah tidur selama empat dekade.

Neoliberalisme

Di sinilah kemudian ekonom seperti Freidrich von Hayek ingin mengembalikan liberalisme yang sempat "terinterupsi" oleh pemikiran Keynes. Dia ingin liberalisme lahir kembali, dan karenanya disebut liberalisme baru, alias neo-liberalisme.

Bersama muridnya, Milton Friedman, Hayek menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad ke-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah.

Mekanisme pasar dapat menjadi alat untuk memecahkan masalah sosial. "Hikayat" terbentuknya terminal Kampung Melayu tadi misalnya.

Rumah sakit pemerintah busuk. Maka bangunlah rumah sakit swasta agar mereka bangkit bersaing. SPBU Pertamina tak terurus, maka liberalisasilah sektor hilir perminyakan agar ada SPBU-SPBU tandingan yang menjadi kompetitor. Kampus negeri tidak maju-maju karena dimanja subsidi, maka cabut subsidinya, jadikan badan hukum, dan niscaya akan berkembang. Meski banyak dokter sakti lahir dari kampus negeri. Banyak ekonom hebat dicetak dari kampus yang dibiayai rakyat. Termasuk

ekonom yang mengusulkan swastanisasi.

Begitulah istilah neo-liberalisme muncul. Yang "baru" tidak saja kemunculannya kembali. Menurut dosen Herry, yang bangkit kembali adalah juga gagasannya tentang kedaulatan pasar yang tidak hanya berhenti pada masalah-masalah ekonomi, tetapi juga pasar sebagai ideologi untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan hukum. Pendidikan, kesehatan, dan air. Jadi "neo"-nya ini adalah soal kebaruan dan soal penambahan unsur yang diliberalkan.

Sebenarnya secara filosofis dan historis, neo-nya ini juga tak baru-baru amat, kalau ditilik dari kemunculan liberalisme di Eropa yang juga diawali dari gerakan intelektual, sosial, dan politik. Jadi liberalisme klasik pun mulanya bukan gerakan ekonomi.

Namun, bila liberalisme klasik ala Adam Smith hanya *ngurusi* pabrik dan perusahaan dagang, ekonom Hayek menuntut pengaturan ulang keputusan-keputusan politik, produk hukum, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Semua harus dibiarkan bebas ditentukan oleh mekanisme pasar.

Itulah mengapa, menurut dosen Herry, agenda neoliberal menuntut agar bidang-bidang seperti pendidikan atau kesehatan publik sebaiknya diprivatisasi atau diswastakan saja. Bila lembaga-lembaga ini dikelola oleh swasta, maka pasti lebih efisien dan terjadi persaingan yang sehat, sehingga konsumen pendidikan dan konsumen kesehatan akan diuntungkan. Kompetisilah yang membuat manusia hidup, berkembang, dan dinamis. Bukan subsidi.

Dalam agenda neoliberal, privatisasi bukan hanya sebagai strategi agar sebuah organisasi efisien, melainkan sudah menjadi tujuan itu sendiri. Memang tidak semua privatisasi,

swastanisasi, liberalisasi, atau deregulasi berwajah neoliberalisme.

"Tetapi neoliberalisme memang punya tujuan agar berbagai bidang kegiatan dalam masyarakat digerakkan oleh motif pengejaran kepentingan diri privat. Itulah mengapa etos publik, solidaritas sosial, tindakan afirmatif terhadap kelompok miskin dan tersingkir adalah omong kosong besar bagi agenda neoliberal," tulis Herry Priyono di *Kompas* yang kukliping.

Aku lantas teringat dengan argumen-argumen bahwa rakyat harus "di-didik" untuk membeli bensin dengan harga internasional, dan rakyat harus tahu bahwa bensin memang barang langka dan mahal. Rakyat tidak boleh dibiasakan hidup dengan harga bensin yang semu, yang tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena ada unsur subsidi. Karena itu, harga bensin harus dibiarkan ditentukan oleh mekanisme pasar, dan anggaran negara tak boleh mengintervensinya.

Selama air bisa dikelola oleh swasta dan mendatangkan iklim kompetisi yang sehat, maka biarlah orang mengusahakan air sebagai komoditas. Dengan persaingan mengelola air oleh pasar, maka konsumen akan diuntungkan. Investasi berkembang. Infrastruktur akan terbentuk.

Begitu juga dengan pendidikan dan kesehatan. Rumah sakit yang dikelola swasta, terbukti lebih bagus pelayanannya dari rumah-rumah sakit pemerintah atau RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah). Ini menunjukkan bahwa motivasi orang-orang yang bekerja di rumah sakit swasta lebih kuat daripada mereka yang digaji bulanan dan terima pensiun dengan status PNS (Pegawai Negeri Sipil) di rumah sakit berplat merah.

Karena itu, sungguh penting untuk mengkomersialkan segala layanan publik, termasuk transportasi dan parkir, karena komersialisasi itu berarti persaingan. Bukan proteksi

pemerintah. Dan persaingan adalah kemajuan. Tugas pemerintah hanya memastikan agar persaingan itu benar-benar terjadi.

Inilah kira-kira gagasan neoliberalisme.

Dengan argumen-argumen seperti itu, maka rontok sudah kalimat sakti dalam Pasal 33 UUD 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Atau rontok sudah, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Atau, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan."

Bandingkan gagasan-gagasan neoliberal dengan pesan para pendiri bangsa kita. Tak usah jauh-jauh membenturkannya dengan marxisme, komunisme, sosialisme, atau ekonomi Islam alias syariah.

Toh, yang dibatasi hanya cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang. Yang dikuasai negara adalah bumi, air, dan kekayaan alam. Tak ada kekayaan intelektual. Tak ada kreatifitas yang akan mati hanya karena negara mengurus hal-hal strategis untuk melindungi si miskin atau si lemah. Selebihnya, swasta lokal atau asing dipersilakan *nyari* uang *seenak udel* asal tidak melanggar hukum.

China yang kontrol negaranya ketat, *toh* terbukti bisa menghasilkan ribuan produk yang membanjiri pasar-pasar internasional.

Pesan Soekarno, Hatta, Syahrir, dan para *founding fathers* lain itu bukan tanpa pertimbangan matang. Sebagian mereka telah mengenyam pendidikan luar negeri. Di Eropa tepatnya. Tempat pergulatan pemikiran ekonomi terjadi di kampus-kampus besar.

Mereka tahu betul plus-minus segala pemikiran ekonomi yang ada berikut implikasinya bagi negara seperti Indonesia. Latar belakang mereka beragam sehingga perdebatan sudah pasti terjadi. Dari situlah mereka lalu sepakat menjabarkan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Wajah perekonomian yang mereka tampilkan dalam konstitusi adalah amanat yang harus diemban para pengelola negeri ini selanjutnya.

Kecuali kita semua sepakat mengamandemen pasal 33 itu secara total (gerakan amandemen menghapus pasal 33 ini pernah dilakukan oleh kelompok tertentu). Jadi, kalau mau jadi kapitalis, tak usah malu-malu. Termasuk para tokoh-tokoh agama atau elit partai Islam itu.

***

Tak Berduit, Silakan Minggir!

Lalu di mana peran pemerintah dalam neoliberalisme?

Di sinilah uniknya neolib. Agar semua agenda-agenda itu terlaksana, pemerintah bertugas memastikannya melalui produk hukum dan keputusan-keputusan politik. Dalam konsep neoliberalisme, pemerintah justru sangat penting.

Di Chile, rezim Pinochet menghancurkan serikat-serikat buruh dan di Inggris, Margaret Thatcher (1979) juga melakukan hal yang sama. Karena semua harus diserahkan pada mekanisme pasar, maka penentuan upah minimum tidak relevan. Biarlah upah terbentuk dari hukum penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja. Tak usah diatur-atur. Karena itu, untuk apa lagi ada serikat buruh?

Lewat tangan besi pemerintah, neoliberalisme dipastikan kehidupannya.

Resep-resep neoliberal memang *cespleng* di Amerika Serikat dan Inggris pada era Presiden Ronald Reagan (1981-1989) dan Perdana Menteri Thatcher. Keduanya menerapkan kebijakan privatisasi, deregulasi, serta pengurangan pajak dan subsidi. Hasilnya, inflasi turun dan pengangguran berkurang.

Negara lain lalu mengikuti seperti Australia, Selandia Baru, atau Afrika Selatan. Resep-resep neoliberal di negara ini lumayan ampuh memperbaiki ekonomi. Pemerintah Australia melakukan privatisasi BUMN Telstra, menganut rezim nilai tukar mengambang, dan mengurangi hambatan perdagangan. Sementara di Selandia Baru, Perdana Menteri Roger Douglas (1984) mulai mengurangi subsidi untuk pertanian, liberalisasi aturan impor, menganut nilai tukar mengambang bebas, membebaskan pergerakan suku bunga dan upah buruh, serta mengurangi pajak.

Hasilnya? Inflasi berhasil ditekan lebih dari 18 persen pada tahun 1987. Tingkat pengangguran turun, meski agak lambat, menjadi sekitar empat persen ("Membongkar Neolib di Indonesia", *Warta Ekonomi*, Juni 2009).

Karena itu tak heran bila rezim Soeharto mulai ikut mengadopsi resep-resep neoliberal sejak era 1983 melalui berbagai paket deregulasi perbankan atau amanemen Undang-Undang Penanaman Modal. Intinya, pemerintah sedikit demi sedikit (namun sistematis) harus mundur teratur dari urusan-urusan atau kebijakan ekonomi yang mestinya bisa diserahkan pada swasta atau mekanisme pasar. Jadi pemerintah harus "pensiun".

Sebenarnya ada beberapa negara yang menempuh kemakmuran tanpa melalui jalan neoliberalisme. Jerman dan Jepang adalah misal. Meski pemerintah Jepang sempat menjual saham Japan Post—salah satu BUMN terbesar—kepada swasta, namun porsinya tidaklah besar. Itu pun dilakukan dengan perencanaan strategis yang matang. Jadi menjual untuk menguatkan, bukan untuk mendapat "uang receh" dalam APBN yang habis untuk membayar belanja birokrasi.

Dalam buku "The Origin of Nonliberal Capitalism: Germany and Japan in Comparison" (*Cornell University*, 2001), disebut-sebut bahwa Jepang memang tidak menganut liberalisme model *anglo saxon* (Inggris, Amerika, dan sebagian Eropa Barat). Bersama Jerman, kedua negara ini mengadopsi kapitalisme yang berbasis pada angkatan kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi. Ekonomi mereka ditopang tidak secara dominan oleh para pemodal, melainkan oleh *high-skill labour* yang profesional dan (karenanya) berpendapatan besar. Karena itu tak heran bila kedua negara ini punya bentuk yang "unik" dalam sistem politik dan ekonominya: demokratis, pemilu bebas, pasar bebas, dan serikat buruh yang kuat.

Sejumlah regulasi di kedua negara memang sangat protektif

terhadap kaum pekerja (baca: konsumen potensial untuk menggerakkan roda perekonomian). Investasi perusahaan-perusahaan swasta harus memastikan adanya porsi untuk pelatihan guna meningkatkan keterampilan mereka. Bukan semata-mata untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, melainkan juga untuk memupuk daya inovasi. Dengan kemampuan pekerja yang tinggi, pendapatan mereka pun menjadi lebih besar. Dengan begitu, daya beli juga meningkat dan ekonomi bergerak. Kesenjangan pendapatan antara kelompok pemodal dan pekerja profesional tidak mencolok, sebab *skill* dan keterampilan juga dihargai sebagai modal (selain uang). Tak heran bila orang Jepang dan Jerman sangat inovatif dan perkembangan teknologinya mengagumkan.

Dengan pendapatan yang besar, setiap individu punya kemampuan untuk mengakumulasi modal (kapital) atau meningkatkan nilai tabungan yang pada gilirannya bisa digunakan untuk investasi. Jadi status sebagai buruh atau karyawan bukanlah takdir seumur hidup. Bila kelak tabungan sudah mencukupi, maka kelas-kelas pekerja ini bisa memiliki cukup modal untuk memulai usaha.

Di sisi lain, pajak juga diberlakukan tinggi untuk menopang agenda-agenda pelayanan publik. Sehingga kesenjangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok ekonomi lemah bisa dijembatani dengan kuatnya pelayanan sosial yang diberikan pemerintah. Orang boleh berpendapatan rendah, tapi dia tak akan terlalu menderita karena berbagai layanan umum bisa dinikmati dengan gratis atau harga murah (hasil subsidi). Sementara bagi mereka yang gajinya dipotong pajak, semua akan kembali dalam bentuk layanan publik seperti transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan dengan harga yang bersahabat.

Di sini juga bisa terlihat bahwa konsep subsidi tidak sama dengan pemborosan. Subsidi itu bukan distorsi ekonomi.

Subsidi publik sejatinya adalah investasi bagi perekonomian nasional secara makro. Dengan subsidi, masyarakat bisa mengalokasikan pendapatannya ke hal-hal lain yang ujung-ujungnya akan menggerakkan roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Bayangkan efek daya beli seperti apa yang bisa diciptakan 230 juta rakyat Indonesia, bila layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa diperoleh dengan "harga miring" atau bahkan gratis.

Apalagi subsidi pendidikan dan kesehatan jelas tak bisa disebut buang-buang anggaran. Itu adalah investasi sumber daya manusia. Kita tentu tak ingin melihat generasi 25 tahun lagi adalah angkatan kerja yang melulu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya karena tak mampu bayar kuliah di ITB, IPB, atau ITS. Subsidi pendidikan hari ini adalah ongkos yang kita keluarkan untuk masa depan. Bukan hura-hura ekonomi di sektor yang tidak produktif.

Begitu juga dengan kesehatan. Subsidi di sektor ini jangan dibaca sebagai pemborosan untuk mendanai mereka yang sakit-sakitan, atau untuk menyantuni orang miskin belaka. Tapi harus dilihat sebagai cara kita merawat kualitas hidup sumber daya manusia Indonesia. Cara kita melindungi angkatan-angkatan kerja dan pelaku ekonomi di berbagai level sosial agar bisa tetap produktif. Bila seorang tukang becak tak mampu membiayai kesehatannya sendiri, maka jangan harap dia akan

Sebenarnya ada beberapa negara yang menempuh kemakmuran tanpa melalui jalan neoliberalisme. Jerman dan Jepang adalah misal. Meski pemerintah Jepang sempat menjual saham Japan Post—salah satu BUMN terbesar—kepada swasta, namun porsinya tidaklah besar. Itu pun dilakukan dengan perencanaan strategis yang matang. Jadi menjual untuk menguatkan, bukan untuk mendapat "uang receh" dalam APBN yang habis untuk membayar belanja birokrasi.

kuat bekerja dan mandiri secara ekonomi. Begitu juga dengan penjual bakso, buruh pabrik, karyawan bank, pegawai negeri, tentara, polisi, hingga pasukan pengawal presiden.

Ini semua tentang cara berpikir. Ihwal alam pikiran kita. Soal *mind-set*.

Bandingkan dengan penerapan pajak rendah yang seolah-olah adalah kebijakan "baik hati", namun di sisi lain berarti: tak ada sejengkal pun tanah yang bisa diinjak tanpa perlu mengeluarkan uang. Subsidi dihilangkan karena dianggap sumber pemborosan di sektor yang tidak produktif dan konsumtif (pendidikan dan kesehatan dianggap konsumsi). Di negara seperti ini, pendapatan masyarakatnya boleh saja tinggi, pajaknya bahkan rendah, tapi sekolah, rumah sakit, angkutan umum, bahkan layanan birokrasi dasar seperti KTP, akte lahir, atau surat kematian, semua harus membayar.

Meski neoliberalisme menganjurkan absennya pemerintah dalam kehidupan sosial-ekonomi (salah satunya dengan cabut subsidi), tapi bila ada kebijakan pemerintah yang muncul, tak berarti itu bukan agenda neoliberal. Bisa saja sebuah kebijakan melibatkan pemerintah, tetapi isinya adalah neoliberalisme. Jadi neolib itu bukan aktor, tapi substansi.

Padahal mestinya pemerintah tak haram mengelola bisnis atas nama kesejahteraan umum. Bila tak mampu menghasilkan uang, setidaknya BUMN itu bisa mengurangi pengeluaran rakyat dengan *service* setengah kerja sosial yang diberikannya. Bila tak mampu menyetor deviden, perusahaan kereta api setidaknya bisa menolong rakyat menghemat uang transpornya dengan naik kereta api murah, dan lalu uang itu dibelanjakan untuk hal lain. Asal, di tubuh BUMN itu tak ada korupsi dan menjadi sapi perah para politisi.

Dengan sekolah dan puskesmas negeri, bila negara tak

Dengan subsidi, masyarakat bisa mengalokasikan pendapatannya ke hal-hal lain yang ujung-ujungnya akan menggerakkan roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Bayangkan efek daya beli seperti apa yang bisa diciptakan 230 juta rakyat Indonesia, bila layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa diperoleh dengan "harga miring" atau bahkan gratis.

untung, itu tak apa-apa, asal rakyat yang pendapatannya pas-pasan tidak makin habis terkuras untuk membayar sekolah dan puskesmas, sehingga uangnya bisa untuk meningkatkan daya beli dan merangsang produksi.

Konsekuensi dari pilihan ini, harus ada subsidi. Subsidi bisa berarti pemerintah mengeluarkan uang. Bisa juga berarti pemerintah rela "tidak menerima uang" dari bisnisnya yang memang bermisi sosial. Ujung dari semua ini adalah meningkatnya daya beli rakyat sehingga muncul lapangan kerja (*full employment*). Bila Pak Bejo yang berpenghasilan Rp 1 juta per bulan, dan semua habis untuk membayar sekolah, puskesmas, dan naik kereta api, maka siapa yang membeli produk sabun, sandal jepit, dan kaos lampu, sehingga pabriknya terancam tutup, dan banyak pengangguran?

Kaum sosialis-demokrat di negara-negara Eropa tengah atau Skandinavia menerapkan pajak tinggi untuk "memaksa" pemerataan pendapatan dalam bentuk layanan sosial. Rakyat dipangkas gajinya dan tak perlu punya pendapatan tinggi karena sekolah, kesehatan, dan transportasi bisa gratis. Sehingga pendapatannya bisa dialokasikan untuk konsumsi yang lain. Agar bisa gratis, maka diterapkan pajak tinggi yang progresif bagi kalangan *the have*. Jadi yang kaya mensbusidi yang miskin.

Kalangan berpenghasilan tinggi ada yang mengeluh dan

ada yang santai-santai saja. Yang tidak mengeluh barangkali merasakan jasa balik dari pajak tinggi yang dibayarnya. Untuk apa berpendapatan tinggi, bila sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum tetap harus membayar. *Toh,* sama saja, membayar di muka atau di belakang. Pra-bayar atau pasca-bayar.

Pajak penghasilan di Indonesia tak tinggi tapi semua harus bayar. Akhirnya gaji habis untuk membayar sesuatu yang mestinya menjadi tanggungan publik. Apa bedanya?

Kebijakan pajak yang rendah sepintas adalah kebijakan yang populis. Pro rakyat. Tapi bila dipikir-pikir, kebijakan ini tak ada sangkut-pautnya dengan rakyat miskin, karena yang berpenghasilan di bawah Rp 15 juta misalnya, *toh* tidak akan kena pajak. Jadi, pajak murah ini bukan untuk rakyat jelata, melainkan mereka yang berduit. Bila tak berduit, apanya yang mau dipajaki?

Eit! Benarkah pajak kita sudah rendah? Para pengusaha beromset kecil banyak yang teriak karena mereka terjaring pajak. Apalagi dengan ketentuan Pph Badan yang baru (UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008), di mana persentase pajak mereka diperbesar seperti paparan Faisal Basri tadi.

Jadi keuntungan mereka sulit dijadikan modal pengembangan usaha karena telanjur habis dipakai bayar pajak. Kalaupun mau menghindari pajak, percuma saja. Karena instansi pemerintah maupun bank-bank akan mempersulit urusan mereka. Sementara perusahaan besar bisa dengan mudah menghindari pajak, mulai cara primitif bermain mata dengan petugas pajak, hingga membuat perusahaan yang berakte di Cayman Island, Virgin Island, atau negara pulau yang khusus melayani para penghindar pajak.

Di sisi lain, kebijakan pajak murah berarti semakin lemahnya

kemampuan pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi. Bila penghasilan dari pajaknya kecil, anggaran pemerintah juga semakin kecil. Secara politik, orang yang kantongnya tipis, tak memiliki posisi tawar yang lebih baik. Maka semakin terbatas pula kemampuan pemerintah dalam melakukan pilihan kebijakan. Saat itulah, kekuatan modal swasta dan pasar akan lebih berdaulat dalam segala hal.

Itulah neoliberalisme yang aku pahami.

Fundamentalisme pasar dalam neolib ini barangkali dalam agama Islam disebut *kaffah* alias total. Jadi agama bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Begitu juga dengan neoliberalisme. Mekanisme pasar tak hanya untuk urusan dagang, tapi juga pendidikan, kesehatan, transportasi umum, sumber daya alam, air, pantai, parkir, hingga toilet umum.

Bedanya, yang satu karena doktrin agama untuk mengejar "akhirat", yang lain dengan dalil kesejahteraan manusia untuk mengejar "dunia".

Di Indonesia, gagasan-gagasan neoliberal yang laku keras adalah swastanisasi. Sebab, di negara-negara di mana pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi (*government expenditure*), korupsi menjadi persoalan krusial. Proyek dibagi-bagi di antara kroni dan patron politik, sehingga pertumbuhan

Fundamentalisme pasar dalam neolib ini barangkali dalam agama Islam disebut kaffah alias total. Jadi agama bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Begitu juga dengan neoliberalisme. Mekanisme pasar tak hanya untuk urusan dagang, tapi juga pendidikan, kesehatan, transportasi umum, sumber daya alam, air, pantai, parkir, hingga toilet umum.

hanya terjadi di lingkungan terbatas dan terjadi persaingan usaha tidak sehat berdasarkan kedekatan politik.

Ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo (ayah Prabowo Subianto) memang sudah bilang APBN bocor 30 persen. Bagi aku yang saat itu masih mahasiswa, ini sebuah pernyataan luar biasa dari seorang ekonom arsitek Orde Baru yang juga besan Soeharto. Belakangan aku berpikir, jangan-jangan ketika itu sedang ada usaha melempangkan jalan agar neoliberal masuk.

"Sudah habiskah orang pintar bangsa ini sehingga hotel yang penuh sejarah itu harus digandengkan dengan Kempinski? Inikah Indonesia yang harus dibanggakan, saat situs sejarah pun harus dikontrol dan dikelola asing? Tampaknya kita belum sepenuhnya merdeka!" tulisnya.

Sebab, dalam kondisi darurat-korupsi dan in-efisiensi seperti itulah, gagasan *back to swasta* mengemuka. Tempat wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), rata-rata *memble*. Tapi begitu di-kerjasamaoperasi-kan (KSO) dengan swasta, jadi *kinclong* dan mendatangkan keuntungan.

Dengan status BUMN, Hotel Indonesia yang bersejarah, menjadi bangunan tua dan ditinggalkan tamu. Namun begitu "dipinjamkan" ke grup Djarum, direnovasi dan disulap menjadi Hotel Indonesia Kempinski, barang itu berkilau dan naik kelas. Kata "pinjam" sengaja aku beri tanda petik karena menurut Forum Masyarakat Peduli Aset Negara, perjanjian Hotel Indonesia yang semula hanya BOT (*built, operate, transfer*) telah berubah menjadi pengalihan hak.

Sekeras apa pun protes masyarakat, pemerintah tutup kuping. Puisi Presiden SBY berjudul "Andai Aku Bukan Seorang Indonesia" bahkan dikutip sebagai materi iklan hotel ini selebar satu halaman di *Kompas*. Puisi itu merupakan bagian dari pidato SBY dalam *grand opening* Hotel Indonesia Kempinski.

....Tapi, aku adalah seorang Indonesia yang pada hari ini bergetar hatinya saat melihat kebanggaan Hotel Indonesia Kempinski sebagai bagian dari Grand Indonesia Shopping Town, selesai dipugar dan dibuka kembali untuk mengumandangkan kejayaan Indonesia Raya...

Heriyadi, seorang blogger, menyikapi sinis bait terakhir puisi tersebut. "Sudah habiskah orang pintar bangsa ini sehingga hotel yang penuh sejarah itu harus digandengkan dengan Kempinski? Inikah Indonesia yang harus dibanggakan, saat situs sejarah pun harus dikontrol dan dikelola asing? Tampaknya kita belum sepenuhnya merdeka!" tulisnya.

Heriyadi kesal karena alih manajemen (kepemilikan?) seperti itu bisa menyebabkan area publik berubah menjadi seolah milik pribadi. Para blogger yang biasa nongkrong di sekitar Bundaran HI pernah diusir aparat Plaza Indonesia. Daripada pusing sendiri, ia iseng mengusulkan agar Bundaran HI diganti namanya dengan Bundaran HIK (Hotel Indonesia Kempinski).

Aku tak percaya begitu saja Heriyadi, sampai kemudian aku menyaksikan sendiri, teras-teras di depan Plaza Indonesia dipasang besi tajam agar orang tak bisa duduk-duduk menikmati indahnya air mancur di patung Selamat Datang. Kalau Anda mau menikmatinya, silakan duduk di kafe-kafe di dalam Plaza Indonesia, atau jadi tamu hotel Mandarin, Grand Hyatt, atau Hotel Indonesia Kempinski.

Siapa pun yang tak punya duit, silakan minggir!

Begitulah. Gara-gara korupsi, in-efisiensi dan inkompetensi para birokrat dan pegawai pemerintah, gagasan-gagasan neoliberal (terutama swastanisasi) menjadi begitu populer.

***

Resep-resep Neolib

Orang sakit butuh obat. Negara sekarat juga butuh obat. Ketika dihajar krisis 1997-98 silam, perekonomian Indonesia limbung. Perlu obat yang mujarab agar cepat pulih.

Obat berlabel neolib yang diresepkan IMF, lalu dipilih. Tapi khasiatnya ternyata tak seindah iklannya. Itulah sebabnya, ekonom Kwik Kian Gie mengatakan Indonesia tak akan beranjak maju selama kebijakan pemerintah masih bersifat neolib. Kritikan ini ditanggapi ekonom pro pemerintah M Chatib Bisri dengan sindiran, "Mungkin (Kwik) pusing sehingga tidak bisa membedakan (obat) Neozep dan neolib."

Baiklah, kita tinggalkan dua ekonom yang saling serang. Supaya tidak *taklid* buta, kita geledah saja isi neolib. Secara ringkas, neoliberalisme menganjurkan berbagai resep agar negara bisa sejahtera:

1. Kedaulatan pasar
Pasar harus dibiarkan bebas tanpa intervensi pemerintah, baik pasar uang, jasa, atau barang. Bebas juga bermakna tanpa batas politik atau negara. Pemerintah tak boleh membatasi pasar berdasarkan geo-politik, sehingga perdagangan bebas seperti WTO (World Trade Organization) harus didukung. Tak boleh ada kontrol atas harga dengan penerapan bea masuk (ingat Permendag No 15/2008 yang memudahkan impor tekstil sehingga industri tekstil dalam negeri terpuruk).

2. Deregulasi
Pemerintah tak perlu membuat dirinya sendiri repot. Urusan-urusan yang bisa dikerjakan swasta, biarlah dikerjakan swasta. Deregulasi juga berisi gagasan bahwa eksistensi suatu negeri tak boleh lagi hanya bergantung pada pemerintah. Jadi, urusan ekonomi, budaya, atau pendidikan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif pemerintah. Membikin bank harus

dipermudah, mendirikan rumah sakit dan sekolah juga (ingat UU Badan Hukum Pendidikan yang dianggap identik dengan liberalisasi sektor pendidikan).

Di sisi lain, pemerintah juga tak boleh membuat aturan-aturan yang bisa membebani ongkos perusahaan dan mengurangi keuntungan, temasuk aturan-aturan standar lingkungan dan keselamatan kerja. Sebab perusahaan pasti memiliki mekanisme untuk menjaga kelangsungan bisnisnya sendiri, dan tak mungkin bunuh diri dengan merusak lingkungan atau mencelakai buruhnya.

3. Pangkas pajak dan hemat belanja sosial
Untuk menciptakan lapangan kerja, pemerintah tak perlu menarik pajak tinggi guna meningkatkan belanjanya, tapi justru harus memotong pajak agar pengusaha bisa menggunakan uangnya untuk menciptakan lapangan kerja (ingat soal perubahan UU Pajak Penghasilan Badan yang tarifnya diturunkan).

Karena pajak tak perlu tinggi, maka pemerintah juga tak perlu repot-repot membelanjakan uangnya untuk urusan-urusan yang bisa ditangani swasta seperti infrastruktur air, pendidikan, fasilitas transportasi umum dan lain-lain. Pemerintah, misalnya, cukup *ngurusi* pertahanan keamanan dan belanja militer.

4. Privatisasi
BUMN tidak efisien karena sarat korupsi. Karena itu perlu diserahkan saja kepada swasta dan pemerintah tak usah menghabiskan energinya untuk *ngurusi* bisnis. Swasta akan lebih lincah dan kompetitif dibanding gaya manajemen pemerintah yang lamban, korup, dan *old-fashion*. Karena itu, BUMN perlu dijual, temasuk kepada asing, agar keuntungannya berlipat ganda, dan pemerintah bisa memperoleh pendapatan dari pajak bila perusahaannya sehat. Fungsi sosial BUMN adalah sumber in-efisiensi dan pintu masuk korupsi.

Inilah resep menyejahterakan bangsa. Negara-negara yang mengalami krisis, biasanya harus minum obat yang diresepkan IMF atau Bank Dunia ini. Negara-negara Amerika Latin seperti Chile menjalani "terapi" ini setelah Amerika mendongkel rezim Allende pada 1973 dan naiknya diktator Pinochet.

Yang lain lalu menyusul seperti Mexico.

Menurut catatan *National Network for Immigrant and Refugee Rights*, setahun pertama setelah Mexico bergabung dengan zona perdagangan bebas Amerika (NAFTA), penurunan pendapatan masyarakat anjlok hingga 50 persen. Biaya hidup naik 80 persen, dan lebih dari 1.000 BUMN diprivatisasi dan 20.000 UKM bangkrut.

Konsensus Washington

Mustahil membicarkan neoliberalisme tanpa menyebut-nyebut Konsensus Washington. Walaupun tiga negara Amerika Latin seperti Mexico, Brazil, dan Argentina bangkrut di pertengahan 1980-an, masih saja Amerika tampil sebagai pemberi resep neolib. Bersama IMF dan Bank Dunia lalu diraciklah obat yang bernama Konsensus Washington.

Nama "apoteker"-nya adalah John Williamson. Racikan obat yang ia bikin berisi tiga unsur pokok:

1. Disiplin anggaran pemerintah
2. Liberalisasi pasar (keuangan, industri, dan perdagangan)
3. Privatisasi aset dan BUMN

Dari ketiga unsur itu, di sejumlah literatur diurai menjadi 10 elemen:

1. Disiplin fiskal. Pemerintah harus menjaga agar anggaranya selalu surplus.

2. Memprioritaskan belanja sektor publik, terutama pendidikan dan kesehatan sebagai upaya memperbaiki distribusi pendapatan.
3. Memperluas basis pemungutan pajak
4. Liberalisasi finansial: suku bunga harus lebih tinggi dari inflasi.
5. Kurs mata uang harus diusahakan kompetitif (tidak kuat, tapi tidak lemah)
6. Liberalisasi perdagangan dengan menghapus tarif, kuota dll.
7. Memberikan perilaku sama antara investor asing dan investor domestik, untuk menarik masuk modal-modal asing (tak boleh ada diskriminasi).
8. Agar BUMN berkinerja baik, privatisasi atau swastanisasi perlu dilakukan.
9. Pasar harus didorong agar kompetitif melalui kebijakan deregulasi dan menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru.
10. Perlindungan pada hak cipta, baik sektor formal atau informal.

Konsensus Washington banyak disebut sebagai preskripsi-preskripsi neoliberal. Meski, neoliberalisme tidak sama dengan Konsensus Washington. Karena itu, beberapa poin dalam Konsensus Washington masih terlihat "bersahabat" bagi rakyat seperti belanja publik untuk pendidikan dan kesehatan agar rakyat punya daya beli. Dengan kata lain, bila sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia justru diliberalisasi, pemerintah berarti "lebih radikal" dari Konsensus Washington.

Namun, munculnya klausul "belanja sektor publik" itu disebut-sebut sebagai preskripsi yang muncul belakangan, setelah Konsensus Washington dikritik habis-habisan. Sebab, isinya memang disinyalir sarat kepentingan negara maju. Poin pertama saja misalnya, disiplin anggaran pemerintah agar surplus, tak lain agar negara-negara berkembang taat membayar utang (berikut bunganya). Bila anggaran defisit,

maka yang dirugikan bukan publik, melainkan negara-negara kreditur. Jadi bila ada resep menghapus subsidi, itu sama dengan meminta pemerintah berhemat untuk rakyatnya, demi membayar utang kepada pihak lain.

Obat untuk Amerika Latin inilah yang juga diresepkan IMF dan Bank Dunia saat Indonesia dilanda krisis (1997-1998). Namanya *Letter of Intent* (LoI) yang di dalamnya tidak hanya berisi resep-resep meghadapi krisis, tetapi juga titipan-titipan dari agenda liberalisasi global yang sama sekali tidak relevan dengan urusan penanganan krisis di tanah air. Agenda-agenda neoliberalisme, kata orang.

Untuk menghemat anggaran, misalnya, yang diusulkan bukan penghematan biaya birokrasi, tetapi langsung menaikkan harga BBM. Menaikkan harga energi di saat rakyat sedang kembang kempis demi menghemat anggaran negara, tentu menimbulkan efek yang lebih pahit. Apalagi, dalam LoI disebut bahwa subsidi energi adalah distorsi ekonomi. Dan distorsi berarti buruk dalam kacamata neoliberalisme. Itu menandakan ada kekuatan lain di luar pasar, yakni intervensi dalam bentuk subsidi tadi.

Wartawan yang pernah bekerja di majalah *SWA*, Ishak Rafick, punya catatan menarik tentang butir-butir LoI ini. Dalam bukunya, "Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia", Rafick melihat ada resep-resep yang tidak relevan seperti pemerintah harus membebaskan bank asing membuka cabangnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga harus menghentikan proyek Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang dianggap pemborosan.

Jadi, sembari memberi utangan yang sebenarnya tak gampang dicairkan, IMF dan Bank Dunia malah *ngurusi* masuknya bank asing dan menutup industri strategis. Padahal, apa salahnya Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan membutuhkan banyak penerbangan perintis, merintis industri pesawat terbangnya sendiri?

Sementara di sisi lain, 27 proyek listrik swasta yang sarat KKN boleh jalan terus, hanya karena berpatungan dengan perusahaan-perusahaan asing. Sementara yang KKN dan tidak menggandeng mitra asing seperti proyek mobil nasional (Timor) atau Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC) harus dibubarkan.

Ada lagi syarat dalam LoI yang meminta pemerintah agar membolehkan modal asing masuk ke perkebunan sawit. Kalau dipikir-pikir dengan akal sedikit waras, apa hubungannya krisis moneter dengan pemilikan lahan sawit? Tak ada lain jawabannya, selain bisnis CPO memang gurih, segurih minyak goreng. Dan bisnis yang gurih, tak boleh hanya dikuasai pribumi, tetapi asing juga perlu mencicipinya.

Memang tak semua isi LoI buruk. Ada juga yang baik dan positif, seperti ketentuan menghapus semua dana non-budgeter di departemen-departemen dan instansi pemerintah. Ini baru jitu untuk menghemat anggaran dan menata kekayaan negara. Gara-gara resep ini, sumber korupsi di lembaga pemerintah sedikit berkurang.

Langkah Departemen Keuangan menertibkan rekening-rekening liar di tubuh birokrasi pemerintah, terus berjalan hingga kini dan patut diacungi jempol. Depkeu terus menginventarisasi 32.570 rekening liar dengan nilai mencapai Rp 36,7 triliun dan 685 juta dolar Amerika (*Kompas*, 7 Juli 2009).

Tapi sialnya, pemerintah tak bisa memilih-milih obat. Semua ketentuan itu harus ditelan, baik yang manis atau yang pahit.

Obat berlabel neolib yang diresepkan IMF, lalu dipilih. Tapi khasiatnya ternyata tak seindah iklannya. Itulah sebabnya, ekonom Kwik Kian Gie mengatakan Indonesia tak akan beranjak maju selama kebijakan pemerintah masih bersifat neolib.

Yang rasanya manis belum tentu menyembuhkan, yang rasanya pahit bukan berarti tidak berguna. Yang sial adalah, *udah* rasanya pahit, malah tambah bikin sakit.

Dalam sebuah seminar di Jakarta, ekonom Kwik Kian Gie bercerita tentang repotnya jadi pejabat vital di negara yang telanjur menenggak obat dari IMF dan Bank Dunia. Sebagai Menko Ekuin di bawah pemerintahan Gus Dur, ia bertekad memuntahkan sedikit demi sedikit obat berbau neolib. Kwik bersama Memperindag Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo merancang rencana agar perekonomian Indonesia bebas dari intervensi asing.

Tapi tiap kali rapat ekonomi, Kwik mengaku selalu direcoki Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Emil Salim dan beranggotakan Sri Mulyani Indrawati, Boediono dan lain-lain. Kwik menuding dewan ini sebagai kepanjangan tangan Mafia Barkeley yang pro-neolib.

“Dewan inilah yang selalu mengingatkan agar saya tetap tunduk pada ketentuan IMF,” ungkap Kwik.

Stempel Neolib

Menstempeli pemikiran orang adalah kebiasaan Orde Baru. Mereka rajin mengkomuniskan atau mem-PKI-kan orang hanya karena berseberangan pandangan.

Saya teringat suatu hari di bulan Mei tahun 2001, saat mewawancarai Sekjen Aliansi Anti-Komunis, M Nofal Dunggio. Kelompok itu sedang gencar-gencarnya merazia buku-buku yang dianggapnya berlabel “kiri”. Di sebuah *talkshow* di radio *Ramako* (sekarang *Lite* FM), saya bertanya, “Apakah Anda sudah membaca buku *Das Kapital*?”

Lalu sponton dijawab, “Buku seperti *Das Kapital* juga akan kami

sikat. Buku itu mengajari orang-orang muda menjadi kapitalis."

Kutipan dari wawancara itu lalu dimuat di majalah *Tempo* minggu depannya (21 Mei 2001). Yang mengerti bahwa *Das Kapital* adalah buku karangan Karl Marx (1867), tentu terpingkal-pingkal dibuatnya.

Jadi, bila hari ini ada orang menstempeli orang lain dengan label neoliberal, barangkali hanya ada tiga kemungkinan: (1) dia punya kepentingan politik-praktis; (2) dia tak paham neolib dan hanya latah-latahan belaka—mungkin aku masuk kategori ini; atau (3) orang yang distempel memang benar-benar neolib, dan dia punya solusi alternatifnya.

Bedanya dengan PKI, meski yang PKI kakek atau bapaknya, anaknya masih dicap anak PKI. KTP-nya dibeda-bedakan. Bahkan ada kode ET: eks Tapol. Tentu kita tidak mungkin ikut-ikutan bodoh seperti Orde Baru dengan mencap anak-neolib. Apalagi menandai KTP-nya dengan AN: Antek Neolib.

Astaga!

Samin dan Dul rupanya tertidur mendengar aku *ngoceh* tentang neoliberalisme.

"Perdebatan (tentang neoliberalisme) seperti itu, apa gunanya buat rakyat," kata Boediono.

Huh!

***

LA PIZZA
TAXI
INI JAL
PASAR, AT
TERMIN
MAH..
CEWEK CEWEK GANJEN!
B 3617 U

BOEDOET
KAMPUNG MELAYU
WARTEG BAHARI
DUREN NYA MANIS ENGGAK, BANG..?
DIJAMIN

BAGIAN KEEMPAT

Neoliberal Kegemaran Republik Indonesia

Elegi di Taman Monas

"*Semprul* kalian, *ngajak ngobrol* soal neoliberalisme malah tidur," aku menggerutu.

Samin dan Dul *nyengir*. Aku ingatkan lagi bahwa kedua orang ini adalah tokoh fiksi. Dan dialog-dialog ini adalah imajiner. Aku belum berani membuat dialog imajiner dengan orang-orang besar, seperti penulis lain. Misalnya, dialog imajiner dengan Bung Karno, Pak Harto, Pak SBY, atau Pak Boediono. Kalau dialog imajiner dengan Samin dan Dul, kan aku bisa kelihatan paling pintar.

"Lagian *situ*, *masa ngomongin* neoliberal sambil buka-buka buku. Kelihatan *banget nggak* menguasai. Matanya baca tulisan. Jadinya *nggak* tahu kan, kalau kami ketiduran sejak pertama?" kata Samin.

"*Hah*?! Sejak pertama?!" kupasang muka masam.

"*Nggak kok*, Mas. Meski mata *merem*, tapi kuping kami mendengar," sahut Dul menurunkan pitamku.

"Mendengar *lho* ya, Mas... Urusan *ngarti mah* nomor *selawe* (dua puluh lima)," tukas Samin *nyengir*.

"*Hahaha*..." Dul *ngakak*, "*Kayak* bocah kecil ya Mas, *dibacain* dongeng lalu ketiduran."

"Neoliberalisme memang seperti dongeng," aku *cletak-cletuk* saja mengikuti mereka.

"Makanya kami itu tadi *nggak* tidur, Mas. Lagian mana mungkin sedang *dibacain* cerita horor malah ketiduran," sahut Dul.

"*Alaaa... sok* bilang horor. *Emang lu ngarti*, Dul?" serang Samin.

"*Ngerti* semua sih *enggak*. Pusing *mah iya*. Tapi soal terminal-terminal itu aku tahulah," sahut Dul.

"Makanya sekolah jangan *mabal aja*. Gimana *nggak ngerti* urusan terminal, *udah* sekolah cuma sampai SMP, nongkrongnya di terminal melulu," Samin menyambar.

"Pantas *sampean ngata-ngatain* kami neolib, gara-gara aku dan Samin *narik* uang parkir dari halaman toko dan toilet umum."

"*Ha-ha-ha-ha*..." aku tertawa lepas seperti mendiang Mbah Surip.

"Jadi yang neolib itu bukan Boediono, tapi Dul-*ono*," Samin *nyeplos*.

"*Hush*! Aku juga *nggak* bilang Boediono neolib, *lho*," kataku buru-buru.

"*Ah, sampean* ini banci, Mas. Kalau sudah menerangkan apa itu neoliberal, lalu bagaimana urusan neoliberal-neoliberal-an di Indonesia itu diamalkan, *ya* jangan ragu-ragu lagi menunjuk hidung orang yang bertanggung jawab," Samin menetar telunjuknya.

"Masalahnya tanggung jawab itu kan *nggak* di Boediono saja, Min," potong Dul. "*Emang* pengamalan neoliberal itu zamannya Boediono *tok*? Apa *lu* tadi *nggak* dengar zamannya Pak Harto juga sudah? Rakyat disuruh hafal Pancasila, penguasanya neolib, *sial*..."

"Berarti semua pejabat tinggi kita, mulai Pak Harto sampai sekarang ini neolib semua *dong*, Mas?" Samin penasaran.

"Bisa jadi. Karena neoliberal itu kan bukan orang, tapi isi pikiran. Termasuk aku dan sampean jangan-jangan. Bedanya,

karena kita-kita *nggak* pegang kekuasaan, jadi kalaupun isi kepala kita neolib, dampaknya terbatas. Paling korban *sampean* ya aku ini, yang kencing *aja* harus bayar. Parkir di halaman toko, *sampean* tarik seribu. Tapi kalau *sampean* presiden, menteri, kepala Bappenas, atau gubernur bank sentral?"

"*Nggak* adil! Bikin contoh neolib *kok* cuma untuk kami orang kecil. Apa contohnya dampak buruk kalau *sampean* yang wartawan itu isi kepalanya neoliberal?" sambar Dul.

"Iya, ayo Mas. *Situ* harus jujur. Jangan *bela-belain* sesama wartawan. Aku kan sudah *ente* semprot gara-gara *belain* tukang jual air minum asongan. Padahal itu bukan kawanku," sambung Samin.

"*Hehehehe*... kalau wartawan isi kepalanya neoliberal, ya dia bikin berita yang mendukung kebijakan neoliberal. Bukan berarti jadi kaki-tangan, *lo*... Sekadar dia tidak bisa kritis, karena memang tidak mengerti. Tidak menyuguhkan alternatif kebijakan, karena kurang bacaan. Ketemu narasumbernya itu-itu saja. Mewawancarai pejabat tanpa mengejar jawabannya dengan ide lain. Pidato pejabatnya ditayangkan begitu saja karena dianggap memiliki nilai berita. Sementara pidato orang lain dianggap *nggak* penting, oposisi, orang sakit hati."

Aku melanjutkan:

"Akibatnya, pembaca seperti *sampean nggak ngerti* alternatif kebijakan ekonomi lain. Tahunya ya itu: BLT dianggap rezeki atas kemurah-hatian pemerintah. Semua orang dikondisikan serba *nrimo*. Sekolah katanya gratis sampai SMP, tapi biaya lain seperti pungutan, buku, seragam, ongkos transport dan jajanan, serba mahal. Lalu tetap *nggak* bisa kuliah karena masuk universitas mahalnya minta ampun. Kalau sakit tabungan bisa habis dan jatuh miskin."

Syukurlah, mereka terlihat agak serius mendengarkan. Jadi kusambung terus:

"Ada wartawan yang tak merasa cukup dengan menulis berita di media, akhirnya pasang iklan segala. Padahal dia wartawan. Masa tidak *pe-de* dengan publikasinya sendiri, sampai-sampai harus ikut-ikutan pasang iklan mendukung pencabutan subsidi. Ada juga wartawan yang melaporkan narasumbernya ke polisi karena dituduh mencemarkan nama baik perusahaan medianya, gara-gara *talkshow* soal kenaikan harga BBM."

"*Wah*, berarti kalau wartawan seperti *ente* isi kepalanya neoliberal lebih berbahaya dari tukang parkir seperti aku *dong*, Mas?" cecar Samin

"*Hahaha*..." Dul *ngakak*, "Tahu rasa *sampean*, Mas! *Mbayar* toilet Rp 1.000 *aja* mengeluh, sementara teman-temannya sendiri neoliberal. Jangan-jangan *sampean* sendiri juga neoliberal. Musang berbulu kambing! *Wekekek*..."

"Tapi mereka itu kan belum tentu jahat. Sekadar awam dan *nggak ngerti*. Yang gawat itu kalau mereka *ngerti* dan sengaja membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang neoliberalistik untuk kepentingan tertentu."

"*Lha*, kalau wartawan saja awam, apalagi kami. Jadi kita *mending* tetap *nggak ngerti* neoliberal *aja*, Mas. Biar *gak* kebebanan. Biar *nggak* dosa. *Hahaha*..."

Aku mulai kewalahan menghadapi tukang parkir partikelir dan penjaga toilet umum komersial ini. Puncak Monas aku pandangi. Rerimbun pohon ditiup angin mengirim suara damai dan mendatangkan sejuk. Inilah satu-satu tempat terbuka hijau yang masih luas, meski tak seluas dan serindang Central Park di New York (*ah*, otakku ini kenapa tak pernah bisa berhenti membanding-bandingkan dengan luar negeri terus. Amerika

pula. Kini aku bisa mengerti bila ada konsultan politik yang memoles klien dengan segala gaya ala Amerika).

Andai parkir dan toiletnya gratis, Taman Monas pasti jadi tempat yang sempurna.

Orang tak boleh menikmati Taman Monas sambil parkir di depan pintu silang Monas. Pasti langsung diusir. Pengendara motor tak boleh duduk di atas joknya di depan gerbang, entah pintu selatan, utara, barat, atau timur. Kalau mau menikmati Monas, semua harus masuk ke Taman Monas dan memarkir kendaraannya di sana. Tentu saja dipungut biaya. Padahal ini adalah fasilitas umum.

Seorang ibu dengan termos air panas dan aneka minuman saset, mendekat. Aku memesan segelas kopi hitam dan menawari yang lain. Kami bertiga minum. Tangan perempuan itu mengaduk, tapi matanya nyalang melihat kiri-kanan.

"*Gak papa, Teh. Nuju ka kidul*..." kata Dul. (Tidak ada apa-apa, *Mbak*. Mereka tadi pergi ke arah selatan).

Yang dimaksud Dul adalah satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Kawanku yang *nyinyir* pernah menjulukinya "polisi buah-buahan". Polisi yang bertugas merazia pedagang buah. Dandanannya militer habis: sepatu lars, baret, emblem kesatuan, tameng, pentungan, celana kargo, kemeja dengan lengan digulung, dan ritual hormat menghormat antara atasan dan bawahan. Baris berbaris setiap pagi.

Itulah instrumen pemerintah untuk menindak warganya yang dianggap melanggar ketertiban. Jelang pilpres, Mei 2009, di Surabaya, seorang bocah empat tahun bernama Siti Khoiyaroh tewas tersiram kuah bakso panas gara-gara gerobak ibunya dikejar-kejar trantib. Kulitnya matang melepuh. Luka bakarnya 60 persen. Gara-garanya sang ibu, Sumariyah, panik

dan terbirit-birit kerepotan: antara membawa anaknya, serta menyeret satu-satunya alat produksi, tempatnya bergantung mencari rezeki.

Di *facebook*, saat kupasang informasi ini menjadi status, ada saja kelas menengah yang *nyeletuk*, "Siapa suruh lebih mementingkan menyelamatkan rombong bakso daripada anaknya sendiri. Orang tua *apaan tuh*?"

Wuih...

Aku lantas menanggapi: "Bung, kalau belum pernah *ngerasain* sumber rezekimu dirampas orang, apa pun alasannya, Anda *gak* akan pernah bisa berempati dengan posisi ibu itu."

Berjualan kopi asongan juga dilarang di Taman Monas. Sebab, sudah ada warung-warung tenda yang dipungut retribusi dan membeli lapak. Tapi tak ada tempat buat yang modal dengkul. Kalau tertangkap, alat kerja disita dan disuruh menebus. Entah uangnya masuk kas daerah atau tidak. Yang jelas, setelah ditebus, karena tak ada alternatif pekerjaan lain, perempuan-perempuan ini berjualan lagi.

Sebab, mereka juga hafal bahwa razia ada musim-musimnya. Yang penting pandai menghindar. Apalagi razia juga proyek, yang tak akan berjalan bila tak ada anggaran. Anggaran Satpol PP DKI tahun 2007, misalnya, mencapai Rp 303,2 miliar. Angka ini—di luar jangkauan akal sehatku—jauh lebih besar dari anggaran untuk pendidikan dasar yang hanya Rp 188 miliar dan bahkan puskesmas yang cuma Rp 200 miliar (*kompas.com*, 1 Juni 2009).

Karena itu, penertiban akan selalu ada. Sebab, bila tak ada proyek penertiban, maka tak ada anggaran. Supaya proyek penertiban selalu ada, maka ketidaktertiban dan pelanggaran juga harus selalu tersedia. Jadinya, banyak pelanggar ketertiban

dibiarkan bahkan "dipelihara", hingga tiba musimnya proyek penertiban. Persoalan diatasi secara *ad-hoc* agar tidak hilang secara permanen. Bila ketidaktertiban lenyap secara permanen, maka proyek penertiban dan anggaran akan ikut lenyap. Begitu seterusnya.

"Kalian *teh* pada *ngomongin* apa? *Kok* kelihatannya seru *banget*," perempuan itu *nimbrung*.

"Mending *ngomong* seru *timbang ngomong saru* .." kata Dul mancing-mancing. Saru artinya jorok, *nyerempet-nyerempet* porno. Kami berempat bicara memang sudah campur-campur, Sunda, Jawa, Betawi. Khas orang pendatang yang sudah lebih dari 10 tahun jadi kaum urban.

"Pemerintah jangan digunjing melulu. Pemerintah sudah baik menyediakan sekolah gratis, BLT, raskin, jamkesmas, *kok* masih *diomongin keneh*. Pemerintah itu sudah tobat. Buktinya harga BBM diturunkan. Coba, presiden mana yang menurunkan harga BBM? Di zaman Mbak Mega yang katanya peduli *wong cilik* saja, harga BBM *nggak* turun. Malah naik bareng tarif listrik dan telepon. *Rasain* kalah, Pak SBY-Boediono yang menang..."

"*Wah,* kamu baca koran, *Teh*?" Samin ikut menggoda.

"Ya, *nggak*. Duit dari mana beli koran eceran? Ikut denger *aja* sopir bos-bos itu kalau lagi *ngobrol* sambil minum kopi susuku."

"Susunya siapa?" Dul main sambar begitu melihat celah.

"Kopi susu! Otakmu itu! Dasar *jurig*..."

"Terus apa lagi kata sopir-sopir itu, Bu?" aku penasaran. Sebab sopir pribadi orang *gedean* itu memang gudang informasi. Semua wartawan tahu itu. Tapi wartawan lebih senang *ngobrol* dengan sekretaris pribadi mereka, daripada sopir pribadinya.

Aku bilang wartawan. Bukan wartawati.

“Mereka juga sering dengar bos-bosnya *ngobrol* di telepon *ngomongin* politik dan ekonomi. Jadi mereka pada *pinter-pinter*. *Lha*, *abdi mah* cuma kecipratan pintarnya mereka.”

“Jangan jorok, *Teh*. Kecipratan-kecipratan segala. Emang kecipratan apanya sopir?” Dul tak menyerah.

“Dengkul *siah*. Tak ciprati air panas baru tahu rasa *kowe*.”

Kami tertawa.

***

ATM Diisi, Lalu Dijual

"Zaman Mbak Mega itu ya," perempuan penjual kopi asongan melanjutkan, "konglomerat-konglomerat pada diberi surat lunas. Padahal utangnya masih banyak dan jaminannya *nggak* cukup nutup *eta'* utang. Malah ada yang berobat ke luar negeri tapi *nggak* pernah pulang, juga diberi surat lunas dan *nggak* jadi tersangka lagi. Itu kantor Indosat katanya *teh* dijual ke luar negeri..."

"Bukan cuma kantornya, Bu, tapi perusahaannya," aku memotong.

"Iya, pabrik semen katanya juga dijual ke Meksiko. *Kok* ya *nggak* takut ketularan flu babi Mbak Mega itu. ATM-ATM BCA juga pada dijual murah, padahal pemerintah baru setor duit ke situ..."

"Bukan ATM-nya, Bu, tapi perusahaannya. Bukan setor duit, tapi namanya obligasi rekap atau surat utang, meski ujung-ujungnya juga nanti setor duit," aku *nyeletuk* sebisanya.

"*Lha* iya *eta'*. *Kok* bisa bank baru diisi duit, terus dijual murah, dan pemerintah jadi punya utang ke pemilik baru. *Eta kumaha*?"

"Aku *kagak ngarti*, Mas. Gimana ceritanya BCA itu, *kok* katanya tadi *kayak* ATM habis diisi uang terus ATM-nya dijual?" kejar Samin.

"BCA itu *kan* diambil alih pemerintah karena keluarga Salim punya utang. Pemerintah menyuntikkan obligasi atau surat utang senilai Rp 58 triliun, ditukar saham BCA. Jadi itu bukan duit *cash*, tapi surat utang. Karena punya utang, maka pemerintah harus bayar cicilan dan bunga obligasi ke BCA."

"Dari utang obligasi Rp 58 triliun itu, setiap tahun pemerintah

harus bayar bunga ke BCA Rp 7 triliun atau rata-rata Rp 500 miliar per bulan. Itu baru bunganya, belum pokoknya. Karena pembukuan BCA sudah sehat setelah disuntik obligasi pemerintah Rp 58 triliun, maka BCA dijual."

"Siapa yang *nyuruh*, Mas?"

"Secara tak langsung ya IMF".

"*Kok* IMF bisa *nyuruh-nyuruh*?"

"Karena kita sudah menandatangani perjanjian namanya LoI, *Letter of Intent*. Waktu krisis, IMF mau *ngasih* utang asal Indonesia melakukan A-B-C-D. *Nah*, salah satunya adalah menutup defisit anggaran. Dan untuk menutup anggaran yang tekor dengan jualan aset. BCA ini termasuk aset, karena sudah jadi milik pemerintah."

"Terus, Mas..."

"Dengan obligasi Rp 58 triliun yang melekat di BCA itulah, bank yang punya 15 juta nasabah dan 1.800 ATM itu dilego. Ibarat gadis cantik dikalungi permata, siapa *sih* yang tak mau?"

"*Wah*, pasti mahal banget *dong* ya harganya. Ada Rp 58 triliun di dalamnya. *Bener* kata *sampean*, *Teh*. Seperti ATM habis diisi lalu ditawarkan ke pembeli. Jadi semahal apa harga BCA, Mas?"

"*Tah, eta'*. Benar kan kata saya?" ibu asongan itu girang. "Berapa harga jual BCA yang sudah ada isi Rp 58 triliun itu, Mas?"

"*Hahaha*... Itulah masalahnya. Harganya murah meriah. Cuma Rp 5,3 triliun sudah dapat 51 persen saham"

"*Hah*? Rp 5,3 triliun?!" sahut mereka nyaris kompak.

"...Korupsi dan malpraktik manajemen itu bukan monopoli pemerintah saja. Kalau dengan alasan itu semua dijual-jual, mestinya ya DPR itu dijual saja. Karena di sana juga banyak korupsi. Apalagi skandal-skandal di swasta juga banyak..."

"*Bentar-bentar*, Mas. Pelan-pelan. BCA dimiliki pemerintah setelah pemerintah menyuntikkan obligasi Rp 58 triliun..." kata Dul berusaha mengurai.

"Betul"

"Karena ada obligasi itu, maka setiap tahun pemerintah membayar bunganya saja Rp 7 triliun ke BCA."

"Pinter"

"Lalu sekarang dijual Rp 5,3 triliun?"

"Seratus untuk *sampean*"

"*Ojo guyon tho*, Mas.." kata Dul.

"Aku *nggak* bercanda. Aku yang waktu itu meliput berita-berita ekonomi saja bingung. Tanya kanan tanya kiri, apa benar seperti ini logikanya. Aku pikir aku yang goblok. Ternyata transaksinya yang memang begitu."

"Jadi dengan duit Rp 5,3 triliun, pembeli BCA itu dapat 51 persen saham sebuah bank yang di dalamnya ada duit pemerintah Rp 58 triliun?" kejar Samin.

"Persis!"

"Dan setiap tahun pemilik baru itu dapat pembayaran bunga Rp 7 triliun. Bunganya *thok*! Belum pokoknya?"

"Cerdas!"

"Astaga! Aku yang goblok ini *aja* heran. Apalagi mereka-mereka yang pinter itu, Mas. Siapa yang beli dapat durian jatuh itu, Mas?"

"Konsorsium Farallon dari Amerika yang bergandengan dengan Djarum, perusahaan rokok itu. Yang juga mengelola Hotel Indonesia dan menyulapnya menjadi Hotel Indonesia Kempinski."

"Kenapa pemerintah *nggak* memiliki sendiri saja BCA, Mas?"

"Ya, itu tadi. Pertama, karena APBN defisit dan defisit harus ditutup. Maka yang diambil jalan pintas: jual aset. Padahal menutup *tekor* APBN kan *gak* harus jual aset. Bisa juga dari minta penangguhan pembayaran utang ke "negara donor" (*O, iya,* istilah "negara donor" itu agak menyesatkan, karena donor itu identik dengan memberi sukarela, sementara faktanya mereka meminjamkan uang berikut bunganya). Karena ini semua berkaitan dengan utang. Kita harus *mbayar* utang. Sekarang ini, bahkan sepertiga dari APBN kita untuk *mbayar* utang."

"Terus yang kedua?"

"Yang kedua, menurut ajaran neoliberalisme, pemerintah *nggak* boleh lama-lama pegang aset. Pemerintah *nggak* usah *ngurusi* bank seperti BCA. *Wong ngurus* bank sendiri saja *nggak* becus dan banyak kredit macet seperti di Mandiri, apalagi *ngurusi* bank bekas swasta. Jadi harus dikembalikan lagi kepada swasta. Biarkan swasta yang *ngurus* bank. Akan lebih profesional, lebih cepat maju."

"*Lha, gimana sih*? Bukankah BCA yang swasta itu diambil alih gara-gara juga tidak beres kerjanya? Bukankah banyak juga bank swasta yang ditutup karena korupsi? Aku tadinya jaga parkir di depan banknya Sjamsul Nursalim BDNI di Jalan Gajah

Mada situ, *eeeh*, banknya katanya ditutup. Karena kasus BLBI katanya."

"Aku juga bingung, Pak. Korupsi dan malpraktik manajemen itu bukan monopoli pemerintah saja. Kalau dengan alasan itu semua dijual-jual, mestinya ya DPR itu dijual saja. Karena di sana juga banyak korupsi. Apalagi skandal-skandal di swasta juga banyak. Di Amerika ada kasus Enron yang menghebohkan. Jadi kalau masalahnya korupsi, ya korupsinya saja yang diberantas. *Ngapain* aset-asetnya diswastanisasi tanpa perhitungan seperti itu," aku jadi ikut-ikutan emosi.

"Dan kasus jualan BCA itu di zamannya Megawati, kan?" sambar perempuan penjual kopi.

"Betul, Bu. Di zamannya Megawati. Juga penjualan Indosat dan Telkom."

"*Eleu-eleu, gitu kok ngakunya* pro-rakyat."

"Ibu ini bukannya milih PDI Perjuangan ya? *Kayaknya* tidak suka sama Mbak Mega? Padahal *kan* sama-sama perempuan?"

"Dulu *teh* aku memang *nyoblos* banteng, Mas. Tapi setelah Mbak Mega jadi presiden, aku kapok. Sama saja dengan zaman Pak Harto. Lihat saja sekarang, orang-orang banteng pada masuk bui atau diperiksa KPK. Sama dengan orang-orang Golkar. Temanku yang jualan di trotoar depan KPK katanya sering melihat wajah koruptor-koruptor itu dulu di televisi. Waktu masih jadi pejabat. Sekarang masuk bui."

"Tersangka, Bu. Belum tentu koruptor. Kalau soal sama-sama perempuan?"

"Biarpun sama-sama perempuan, *nggak* jaminan mengerti perempuan, Mas. Apalagi dari kecil jadi anak raja. *Lha* aku ini

anak siapa. Katanya, istrinya presiden Filipina kan juga biang korupsi, yang koleksi sepatunya ribuan itu. Jadi soal perempuan itu *ndak* jaminan. Makanya saya *nyontreng* Pak SBY."

"Jadi pemerintahan Megawati itu neoliberal ya, Mas?" tanya Dul.

"Kalau kebijakannya seperti itu, memang itu resep-resep IMF. Resep neoliberalisme agar katanya bisa keluar dari krisis."

"*Lha*, waktu itu kan Menteri Keuangannya Boediono dan Menko Kesra-nya Jusuf Kalla?"

"Betul."

"Jadi mereka itu semuanya neoliberal, termasuk Pak SBY?"

"Bisa neoliberal, bisa jadi korban neoliberal."

"*Ah*, orang pinter *kok* jadi korban. Sampean jangan *mbela-mbelain* mereka. Yang korban ini ya orang-orang *kayak* aku. Wartawan itu memang suka begitu. Kalu bikin berita *bela-belain* elit, takut digugat. Tapi kalau memberitakan bakso tikus yang merugikan pedagang bakso, *enteng-enteng aja*."

***

KAPAN YA PAK BIAYA SEKOLAH BENER-BENER GRATIS, BUKU-BUKU MURAH...
NANTI BAPAK TANYAKAN KE PEMERINTAH

Anak Miskin Dilarang Kuliah

"Kalau pemerintahan yang sekarang ini *udah bener*?" aku memancing perempuan penjual kopi, sekadar menghindar dari kejaran Samin dan Dul yang masih *merepet* soal keberpihakan wartawan.

"Menurut aku lumayan. Ya itu tadi, SD-SMP bebas SPP, ada BLT, BBM harganya turun. Orang-orang di kampung bilang, sekarang cari kredit gampang dari bank pasar. Bank *gede* juga ada yang kasih kredit ke pedagang kecil."

Aku jadi teringat sebuah artikel yang ditulis mantan menterinya Gus Dur, Rizal Ramli. Menurut dia, kondisi saat ini mirip-mirip dengan zaman penerapan politik etis di masa penjajahan Belanda. *Gubernmen* yang berkuasa di Hindia Belanda (sekarang namanya Indonesia), seolah berbaik hati dengan membangun sekolah rakyat atau SR (setingkat SD), atau menyediakan dokter-dokter pribumi jebolan Stovia untuk memerangi penyakit menular.

Sekolah dokter Stovia sendiri konon sebenarnya dibangun untuk mendidik pribumi jadi dokter, agar para dokter Eropa tidak perlu berurusan dengan penyakit menular rakyat jelata. Agar tidak ketularan.

"...itu semua dibiayai dengan ampas-ampas hasil penjajahan. Tapi sari-sari dari penjajahan dalam bentuk ekspor gula, kopi, rempah-rempah, pertambangan, disedot ke negeri Belanda dipakai untuk membiayai industrialisasi negara Belanda," tulisnya.

Kok ya kebetulan, ketika membaca artikel Rizal Ramli itu, aku juga sedang membaca *Max Havelaar*-nya Multatuli alias Douwes Dekker yang legendaris. Sebagai seorang Belanda, dia menggugat praktik tanam paksa yang dianggapnya menghisap

ekonomi rakyat jelata. Orang dipaksa menanam komoditas yang laku di Eropa, hingga tak ada lagi lahan dan waktu untuk menaman padi, singkong, ketela, dan tanaman pangan lainnya.

Rakyat wajib menyediakan seperlima tanahnya yang tak seberapa itu untuk *gubernmen*. Di atas tanah itulah kopi, tebu, dan teh dibiakkan. Mereka memang mendapat upah tanam, tapi uangnya tak pernah sampai. Rakyat kelaparan karena bahan pangan mahal. Firma-firma Belanda untung besar. Dekker menyindir orang-orang Belanda melalui sosok makelar kopi yang kaya raya dalam buku itu: Batavus Droogstoppel.

Dalam bahasa Belanda, Droogstoppel artinya kira-kira "mata duitan".

Aku mengira-ngira saja, bila Batavus itu sama dengan Batavia, jadi kira-kira terjemahannya begini: *Batavia yang Mata Duitan!* Karena Batavia sudah jadi Jakarta, maka Jakartalah yang sekarang mata duitan. Dalam konteks ini, jangan samakan Batavia jadi Betawi.

Gara-gara buku Dekker yang ditulis tahun 1859 itu, pemerintah Belanda sedikit mengubah watak kolonialnya. Dibuatlah program-program populis pro-rakyat yang oleh sebagian pihak justru dituding sebagai gula-gula praktik kolonialisme yang makin kuat. Sebab, semua bahan tambang dan sumber-sumber alam yang nilainya jauh lebih besar, tetap tak bisa dinikmati pribumi. Pribumi hanya diberi remahan.

Tapi apa gambaran ini bisa diterima perempuan penjual kopi asongan itu? Jangan-jangan pikiran awam semacam itu justru benar belaka. Murni. Bahwa sekolah gratis, BLT, atau BBM yang turun harga, memang kebutuhan mereka. Sementara aku mulai kena sindrom pikiran komplek. Pikiran rumit.

Karena itu, aku nalar-nalar lagi sembari menyeruput kopi.

Sambil melihat Samin, Dul, dan penjual kopi asongan yang aku belum tahu namanya itu, melanjutkan obrolan mereka sendiri. Dunia mereka. Dunia yang jaraknya semakin jauh saja dengan dunia wartawan.

Harga minyak tanah naik, wartawan tak sensitif karena di rumahnya pakai gas elpiji. Ongkos angkot naik, wartawan tak bisa merasakannya karena mereka rata-rata sudah memiliki kendaraan pribadi. Entah motor, entah mobil.

Tapi begitu tarif jalan tol naik, wartawan ribut, meski rakyat jelata tidak. Keluarga wartawan dingin saja dengan SPP sekolah dasar gratis, karena mereka masih sanggup menyekolahkan anak-anaknya di SD swasta. Tapi di mata rakyat kecil, pemerintah barangkali memang patut dipuji.

Sebaliknya, wartawan dan keluarga kelas menengah lain meributkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), karena kampus dikomersialkan. Mereka khawatir tak bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke universitas akibat liberalisasi dan komersialisasi.

Tapi bagi rakyat kecil, itu bukan persoalan besar.

Mengapa?

Jawabannya mudah. Sebab mereka tahu, memang tak bakal mampu menjangkau perguruan tinggi. Baik berstatus badan hukum atau tetap kampus negeri seperti dulu. Data menunjukkan, di antara penduduk miskin yang berpendapatan kira-kira Rp 20.000 per hari, hanya 3,3 persen yang bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi (*Kompas*, 10 Juli 2009).

Jadi mau kampus komersial atau tidak, orang-orang miskin yang jumlahnya 42 persen dari penduduk Indonesia itu tak terlalu ambil pusing.

Bukankah itu berarti ada persoalan serius? Keluarga miskin yang tak pernah jadi sarjana, selamanya juga tak akan punya keturunan sarjana? Tak punya cucu dan cicit sarjana. Karena di setiap kampus seolah ada tulisan: anak miskin dilarang kuliah.

Pendidikan dasar memang gratis, tapi pada saat yang sama ada undang-undang yang mengkomersialkan sektor pendidikan. Aturan *brekele* yang membuat jutaan orang terancam tak memiliki akses pendidikan di masa depan. Padahal jalan lempang untuk menaikkan derajat hidup keluarga miskin adalah bila anaknya lulus universitas sehingga dapat kesempatan kerja atau usaha yang lebih baik. Aku khawatir UU BHP ini memang dirancang untuk menciptakan kemiskinan struktural.

Tentu saja argumen ini dibantah oleh perumusnya. UU BHP ini justru untuk memperbaiki UU lama yang namanya Badan Hukum Milik Negara tahun 1999. Dalam sebuah artikel yang ditulis seorang konsultan pendidikan bernama Dewi Susanti di *Kompas* (20/7/2009), antara tahun 1995 hingga 2002, ongkos kuliah di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya naik empat kali lipat. Pada tahun 2004, subsidi pemerintah untuk Institut Teknologi Bandung (ITB) hanya menutup 29 persen dari kebutuhan biaya operasional mereka.

Nah, karena itulah, lahir UU baru. Semua berawal dari 17 Desember 2008. Saat pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Dalam Undang-Undang ini, semua institusi pendidikan harus berbentuk badan hukum Mulai SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Meski demikian, menurut UU ini, prinsip badan hukum pendidikan tidak boleh mencari laba (pasal 4). Semua keuntungan harus diinvestasikan kembali dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pembangunan. Itu prinsip yang tertulis di atas kertas.

Di republik ini ada 146.000 Sekolah Dasar. Untuk pendidikan dasar (sampai SMP), pengelolaan institusi pendidikan negeri, masih ditanggung seluruhnya oleh pemerintah pusat dan daerah (pasal 41). Baik itu biaya investasi maupun biaya operasional. Tapi itu sebatas "standar pelayanan minimal".

Pendidikan dasar memang gratis, tapi pada saat yang sama ada undang-undang yang mengkomersialkan sektor pendidikan. Aturan *brekele* yang membuat jutaan orang terancam tak memiliki akses pendidikan di masa depan.

Namun, untuk jenjang pendidikan menengah (SMA), pemerintah hanya menanggung minimal sepertiganya saja dari biaya operasional. Dan untuk pendidikan tinggi negeri, yang ditanggung pemerintah hanya 50 persennya.

Namun pula, untuk menghindari komersialisasi pendidikan, UU ini juga mengatur bahwa biaya pendidikan yang ditanggung oleh peserta didik, tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) biaya operasional. Artinya, bila sebuah kampus butuh biaya operasional Rp 100 juta per bulan, maka yang ditarik dari mahasiswanya tak boleh lebih dari Rp 35 juta per bulan.

Subsidi yang hanya separo atau sepertiga dari pemerintah ini adalah konsekuensi bentuk badan hukum. Gaji guru yang PNS masih dibayar pemerintah, tapi mereka boleh merekrut guru sendiri sebagai karyawan badan hukum itu.

Lalu dari mana sekolah-sekolah itu mencari duit?

Pertama, mereka bisa membuat perusahaan guna membiayai biaya operasional (pasal 43 ayat 1). Tapi tidak dijelaskan mengenai jenis-jenis usaha apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh institusi pendidikan.

Membuka usaha persewaan *play station* dan *game online* boleh apa tidak? *Toh*, segmennya sama-sama anak-anak. Kalau membeli saham penerbit buku pelajaran sekolah?

Kedua, lembaga pendidikan dapat melakukan investasi dalam bentuk saham (pasal 42 ayat 1). Jadi, institusi pendidikan tinggi boleh ikut melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau kalau perlu New York Stock Exchange (NYSE). Kalau kurang, bisa bergabung di New York Mercantile Exchange (NYMEX), ikut *trading* minyak mentah atau CPO. Atau kedelai dan gandum.

Soal risiko, silakan tanggung sendiri. Kalau dana mereka dimangsa *fund manager* besar, maka bisa-bisa investasi mereka jebol dan rugi.

Lalu bagaimana bila hal tersebut menimpa sebuah institusi pendidikan? Tentu saja dibubarkan, dan akan berlaku UU Kepailitan seperti diatur dalam pasal 58 ayat 4. Logikanya, bila memakai badan hukum, semua memang bisa dipailitkan. Bisa berurusan dengan kurator. Lantas kalau ada sekolah yang dipailitkan, bagaimana dengan murid dan gurunya?

Itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Tak ada pasal yang mengatur pemerintah bisa mem-*bail out* atau men-*take over* lembaga pendidikan seperti halnya kepada bank. Jadi, jangan mimpi ada SMA atau kampus berstatus seperti BTO (*bank take over*). Tak ada itu kucuran BLBI untuk institusi pendidikan. Hanya para bankir dan konglomerat yang bisa menikmatinya.

Wong baru kejadian ada perusahaan mebel menyita bangku-bangku sekolah di Jawa Timur saja se-Indonesia sudah heboh, apalagi kalau sampai ada sekolah disita saat siswanya sedang ulangan.

Tapi itulah UU BHP yang diputuskan pemerintah dan DPR. DPR yang isinya (mayoritas) juga partainya Mbak Mega dan

Pak JK. Jadi bukan hanya SBY yang punya andil. Makanya aku agak heran bila dalam kampanyenya, cawapres Prabowo menandatangani kontrak politik akan mencabut UU BHP ini. Soalnya yang akan dicabut Prabowo adalah produk legislatif yang ikut disetujui oleh partai pasangannya.

Kalau begitu, mengapa memilih pasangan yang partainya ikut mengesahkan UU BHP? *Ah*, aku memang tak pernah paham politik.

Andai partainya SBY dikeroyok Golkar dan PDIP saat voting UU BHP, pasti produk hukum itu kandas. Tapi nyatanya tidak. Padahal, kalau sedang kampanye, sedikit-sedikit menyitir semangat proklamasi dan UUD 1945.

Pendiri negara ini memang sudah berpesan agar salah satu tujuan dibentuknya negara ini adalah untuk, "mencerdaskan kehidupan bangsa" (pembukaan UUD 1945, alinea ke-4). Kalau tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti menyediakan pendidikan itu tugas negara. Bukan tugas pasar. Bukan tugas pemodal swasta.

Apalagi dalam batang tubuh konstitusi pasal 31 dikatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

Anak SD juga tahu, bila salah satu diberi *hak*, maka pihak lain memiliki *kewajiban*. Bila Anda *berhak* menagih utang, berarti ada pihak lain yang *wajib* membayar utang. Lantas kalau kita *berhak* mendapatkan pendidikan, berarti ada yang *wajib* menyediakan pendidikan.

Nggak sesederhana itu, Mas.

Memang harus sederhana. Jangan mau dibikin rumit. Kalimatnya jelas. Itulah tujuan berdirinya Republik Indonesia. Kalau *nggak* setuju, cari saja negara lain yang tujuannya

mengkomersialkan pendidikan.

Memang bakal sekomersial apa?

Bayangkan saja, masuk perguruan tinggi sekarang tidak segampang zamannya UMPTN dulu (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri) atau Sipenmaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru). Dulu, barangsiapa yang lolos tes, ya bisa jadi mahasiswa.

Sekarang tidak. Pintar saja tidak cukup. Otak encer mesti dibarengi orang tua tajir. Kampus membuat gelombang-gelombang tes masuk. Gelombang pertama biasanya untuk anak-anak orang kaya yang bila diterima, bayarannya bisa puluhan hingga seratusan juta rupiah. Memang uang tidak menjamin dia lulus. Tapi di gelombang pertama ini, setidaknya peluang lulus lebih besar karena pesaing terbatas. Dan ada jatah sekian persen dari total bangku.

Lalu ada gelombang-gelombang lain dengan persentase jatah bangku dengan bayaran yang berbeda, meski semua tetap harus lulus tes. Sistem ini dikenal dengan sebutan "jalur khusus untuk menjaring mahasiswa berbakat, bertalenta, dan potensial". Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menyatakan masih menoleransi jalur khusus ini, meski ke depan sistem ini harus dihapuskan. Kampus yang menerapkan jalur ini antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Yang terakhir, barulah gelombang "lelang terbuka nasional" (untuk yang tidak berbakat, tak bertalenta, dan tidak potensial?). Namanya SNMPTN: Sistem Nasional Masuk Pergurunan Tinggi Negeri. Gelombang ini bisa diikuti kelas ekonomi lebih rendah. Bila mereka lulus, bayarannya lebih murah, hanya beberapa juta rupiah saja. Tapi peluang lulusnya

kecil, karena saingannya banyak dan jatah bangkunya sekian persen.

Yang tidak lulus di gelombang pertama, boleh mencoba jalur yang lebih murah atau "lelang terbuka nasional" ala SNMPTN dengan peluang yang lebih kecil. Tapi yang sudah lulus gelombang pertama (yang bayarannya paling mahal), tak boleh lagi mencoba-coba jalur yang lebih murah meriah.

Unhas, misalnya, tahun 2008 lalu hanya menyiapkan 1.229 kursi lewat jalur SNMPTN. Padahal jumlah bangkunya ada 7.620 buah (*Suara Pembaruan*, 18 Juni 2008). Menurut pihak Unhas, biaya masuk yang dikeluarkan mahasiswa lewat jalur SNMPTN total jenderal sekitar Rp 1,3 juta, termasuk biaya pembelian formulir, sumbangan per semester, serta biaya basis dan kesehatan. Sedangkan biaya bagi mahasiswa non-SNMPTN (jalur khusus) berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 100 juta.

Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, agak lebih "bersahabat". Jumlah kursi yang tersedia 6.000 buah, dan separonya untuk calon mahasiswa lewat jalur SNMPTN. Sisanya untuk apa yang disebutnya "jalur reguler-mandiri" dengan bayaran Rp 12 juta.

Itu baru kampus di luar Jawa.

Lain lagi UI, kampusnya Mbak Sri Mulyani dan Bang Faisal Basri. Dari total kursinya yang berjumlah 5.541, hanya 900 yang akan diperebutkan melalui jalur SNMPTN. Sebanyak 4.641 disediakan untuk jalur khusus non-SNMPTN (*Suara Pembaruan*, 18 Juni 2008).

ITB, bekas kampus Bung Karno, menyediakan 1.080 untuk kursi SNMPTN, dan 1.535 untuk jalur khusus. Tapi, pihak ITB buru-buru menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta dana lebih dari Rp 60 juta kepada calon mahasiswa.

Sedangkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UGM Yogyakarta (kampusnya Pak Boediono dan Revrisond Baswir) menyatakan hanya memungut sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA) minimal Rp 5 juta dan kelipatannya, dan khusus Fakultas Kedokteran minimal Rp 10 juta. Itu jumlah minimal (dan kelipatannya). Tentu orang tua murid mafhum belaka: makin besar "sumbangan", makin besar peluang.

Ini adalah sistem subsidi silang untuk memisahkan calon mahasiswa. Anak pintar dan kaya kumpul jadi satu gelombang. Anak pintar tapi miskin bergabung dengan sejenisnya dalam "lelang terbuka nasional". Dengan sistem seperti ini, kampus lebih mengincar mereka yang kaya dan pintar, daripada yang miskin tapi juga pintar.

Padahal, anak orang kaya masih bisa bersekolah di kampus swasta atau menggunakan uang mereka untuk membuka usaha. Tapi anak orang miskin, ke mana lagi pilihan mereka?

Dalam UU BHP memang ada ketentuan kampus harus menyediakan 20 persen jatah bangku untuk anak orang miskin. Depdiknas sedang menyiapkan aturan yang lebih rinci untuk ini. Kita akan lihat penerapannya ke depan. Tapi mengapa 20 persen? Mengapa tidak 22, 44, atau 88,8?

Mengapa jumlah populasi orang miskin yang 80 persen hanya dijatah 20 persen? Dan orang kaya yang jumlahnya 20 persen, justru mendapat jatah sebaliknya?

Itulah konsekuensi dari kampus yang sudah steril dari subsidi dana pendidikan. Ketika aku memancing diskusi soal ini di *facebook*, ada yang menanggapi serius: "Lantas, apa pantas anak-anak orang-orang kaya itu disubsidi negara untuk kuliah? Masa mahasiswa bermobil kuliahnya disubsidi? Jadi subsidi perguruan tinggi negeri memang harus dicabut"

Logika ini persis logika BBM. Karena ada orang bermobil yang ikut menikmati BBM, maka subsidinya dicabut secara pukul rata, dan bukannya menarik kembali subsidi itu dari orang kaya dalam bentuk pajak kendaraan yang tinggi, misalnya. Sebab, kebijakan pajak tinggi akan merugikan para pengambil keputusan yang mobilnya rata-rata memang lebih dari satu. Bagi mereka, jauh lebih murah membeli bensin yang sudah tidak bersubsidi daripada harus membayar pajak tinggi.

Kampus tetap harus disubsidi agar anak-anak pintar tapi miskin, punya kesempatan kuliah. Bahwa nanti ada anak-anak orang kaya yang ikut kuliah, berarti dia memang lolos tes dan layak. Mungkin setelah itu biaya masuknya baru dibedakan dengan subsidi silang. Jadi, kesempatan berdasarkan tes, bukan tingkat ekonomi.

Bila dengan sistem ini kampus masih mengalami defisit membiayai operasional, maka tugas negara menutup kekurangannya dengan subsidi. Ini berlaku bagi kampus-kampus negeri.

UU BHP telah menutup semua skenario ini. Institusi pendidikan harus mencari investor sendiri bila ingin hidup.

Semula, dalam draf RUU BHP ada pasal yang membolehkan lembaga pendidikan asing mendirikan sekolah di Indonesia dengan kepemilikan modal paling banyak 49 persen. Tapi usulan ini ditolak ramai-ramai dan akhirnya pasal itu hilang dari undang-undang.

Tapi, meski pasal modal asing itu hilang, namun masih ada Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007 yang menyebut bahwa salah satu badan usaha yang dapat dimasuki modal asing adalah pendidikan, baik formal maupun informal. Persentase besarnya modal asing tersebut adalah 49 persen.

Banyak kalangan beranggapan, mestinya peraturan presiden yang diteken SBY pada 3 Juli 2007 ini batal demi hukum karena isinya bertentangan dengan semangat UU BHP.

Inilah wajah neoliberalisme dalam dunia pendidikan di republik. Pendidikan dipercaya akan maju dan berkembang bila diserahkan pada mekanisme pasar. Inovasi akan tercipta akibat kompetisi di antara institusi pendidikan. Dan karena inovatif, maka mutu pendidikan akan meningkat. Dan itu semua digerakkan bukan oleh nilai-nilai imajiner tentang falsafah bahwa pendidikan adalah hak segala orang, melainkan digerakkan oleh motif ekonomi dan mekanisme harga.

Di sinilah "*invisble hand*"-nya Adam Smith bekerja. Tanpa terlihat, persaingan harga akan membuat konsumen pendidikan diuntungkan karena yang tidak bermutu akan ditinggalkan dan mati muda.

Hanya, Adam Smith sendiri mungkin terkaget-kaget bila tahu ajarannya juga diberlakukan di sektor pendidikan atau rumah sakit. Di abad ke-18, Smith cuma membayangkan hal ini diberlakukan di sektor-sektor perdagangan, bukan sektor jasa yang vital seperti ini. Kelompok liberal klasik barangkali akan bangkit dari kubur manakala mengetahui ajarannya di-neo-kan sedemikian rupa.

Bagi kaum neoliberalis, mekanisme pasar sudah menjadi dogma. Karena itu wajar bila mereka dijuluki "kaum fundamentalis pasar". Sama konotasinya dengan kaum fundamentalis agama. Sama-sama punya konsep "*dien*". *Dien*

> Ini adalah sistem subsidi silang untuk memisahkan calon mahasiswa. Anak pintar dan kaya kumpul jadi satu gelombang. Anak pintar tapi miskin bergabung dengan sejenisnya dalam "lelang terbuka nasional". Dengan sistem seperti ini, kampus lebih mengincar mereka yang kaya dan pintar, daripada yang miskin tapi juga pintar.

itu bukan agama, tapi sistem. *Dien* itu sama dengan ideologi. Jadi *dienul Islam* artinya Islam sebagai ideologi, bukan hanya ritual. Ada sistem keyakinan dan preskripsi-preskripsi hubungan sosial.

Ada sindiran soal fundamentalisme agama dan pasar ini. Yang satu kalau marah *ngebom*, yang lain mematikan orang miskin secara perlahan-lahan. Yang satu kontan, yang lain secara kredit—berikut bunganya. Khusus di Irak atau Afghanistan, fundamentalis pasar seperti Amerika juga *ngebom*. Bahkan lebih hebat.

Kembali ke soal liberalisasi pendidikan. Subsidi pendidikan dianggap distorsi ekonomi, sehingga dana APBN yang wajib dialokasikan 20 persen seperti amanat konstitusi, menjadi pertanyaan bila sistem besarnya masih seperti ini.

Untuk meringankan beban orang tua dalam hal buku pelajaran, misalnya, pemerintah telah memborong hak cipta sejumlah buku dari penerbit. Buku itu lalu dipublikasikan di internet dan siapa pun bisa mengunduhnya secara gratis, sehingga tak perlu beli buku. Namanya buku sekolah elektronik atau BES.

Tapi di lapangan, praktiknya tak seindah teori. Di sejumlah sekolah swasta, biaya pembelian buku pelajaran bahkan jadi satu paket dengan biaya pendaftaran siswa baru, sehingga orang tua tak punya pilihan. Sementara untuk siswa yang naik kelas, pembelian buku pelajaran tidak termasuk biaya daftar ulang (*Kompas*, 6 Juli 2009).

Besarnya biaya pembelian buku yang ditemukan *Kompas* bervariasi, antara Rp 450.000 hingga Rp 1,2 juta untuk 14-18 judul buku dan lembar kerja siswa (LKS). Hebatnya lagi, buku-buku itu tak bisa dibeli di toko buku, dan hanya ada di sekolah itu. Fakta lain, buku-buku tersebut ternyata tidak termasuk

dalam daftar buku sekolah elektronik yang hak patennya sudah dibeli pemerintah.

Padahal judul buku yang sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah sejak tahun 2007-2009 mencapai 1.000 buah. Pertanyaan kita yang orang awam: apa iya, dari 1.000 judul buku itu masih ada buku pelajaran lain yang belum termasuk? Tidakkah ini akal-akalan industri pendidikan belaka?

Sedahsyat apa *sih*, perubahan teori-teori dasar fisika dan kimia dalam lima atau 10 tahun terakhir, sehingga bukunya harus selalu di-*update*? Sehebat apa pula sejarah kita ditulis ulang oleh para penyusun kurikulum? Paling dari buku ke buku, tetap saja PKI digambarkan jahat, kejam, dan sadis.

Padahal, negara sudah mengalokasikan anggaran Rp 46 miliar untuk pembelian hak cipta buku itu untuk tahun 2009 saja. Tujuannya agar rakyat bisa mendapat buku dengan gratis. Tapi nyatanya?

Itu baru urusan buku.

Belum urusan bisnis lembaga pendidikan yang lebih besar. Menurut UU BHP, lembaga pendidikan global dibolehkan membuka bisnis pendidikan di Indonesia. Logikanya, tak akan ada investor pendidikan yang mau masuk, bila pesaingnya masih disubsidi. Ini persis cerita tentang SPBU Pertamina. Karena itu, dengan peraturan presiden yang memungkinkan investor asing pendidikan masuk, maka itu adalah sinyal bahwa subsidilah yang akan mengalah, bukan investornya.

Liberalnya Penanaman Modal

Tak hanya di dunia pendidikan dan SPBU, ketentuan penanam modal di berbagai sektor penting "dan yang menguasai hajat hidup orang banyak" makin hari memang semakin liberal saja.

Tahun 1967 pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 1 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam UU ini, sektor yang tak boleh dikuasai asing sembilan macam: (1) pelabuhan, (2) kelistrikan, (3) telekomunikasi, (4) pelayaran, (5) penerbangan, (6) air minum, (7) kereta api umum, (8) pembangkit tenaga atom, (9) media massa.

Draf undang-undang ini disebut-sebut disusun oleh USAID, sebuah lembaga milik pemerintah Amerika yang dibentuk di masa perang Vietnam untuk kepentingan "memenangkan hati" rakyat Vietnam Utara yang pro-komunis. Draf ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sejumah teknokrat kita sehingga seolah-olah "*made in*" dalam negeri.

Di tahun itu pula, konsesi pertambangan emas di Papua untuk Freeport McMoran sudah diberikan. Padahal secara formal, Papua belum menjadi bagian dari Indonesia. Plebisit atau penentuan kehendak rakyat Papua baru dilakukan pada tahun 1969. Jadi dari kacamata tertentu, pemerintah Indonesia sudah menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya.

Setahun kemudian, pada 1968, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No. 6 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang membolehkan modal asing masuk ke sektor-sektor tersebut, asal tidak lebih dari 49 persen. Artinya, pemerintah atau swasta nasional masih memiliki 51 persen dan harus meningkat menjadi 75 persen pada tahun 1974.

Apa yang terjadi?

Alih-alih melakukan *buy-back* pengusaan saham atas "cabang-cabang poduksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak", pemerintah Orde Baru malah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20/1994 yang makin memperbesar porsi asing atas cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Peraturan yang dibuat rezim Soeharto itu mengatur bahwa semua cabang usaha yang penting itu bisa dimiliki asing, asal ada perusahaan swasta nasional yang sahamnya minimal 5 persen (pasal 5).

Satu-satunya yang masih dilindungi dari modal asing adalah usaha media massa (pers). Kantornya wartawan. Melalui UU No. 4/1982.

Wah, uenak tenan jadi wartawan....

Siapa bilang?

Inilah watak neoliberal yang sesungguhnya. Disterilkannya bisnis media dari modal asing karena rezim Orde Baru yang otoriter ingin selalu mengontrol isi pemberitaan agar kebijakan-kebijakannya tidak direcoki. Kombinasi yang sama dengan yang dilakukan Chile di bawah diktator Pinochet. Ekonominya liberal, politiknya totaliterian. Politik yang totaliterian digunakan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan ekonomi liberal. Itulah neoliberalisme.

Modal asing dikhawatirkan akan membuat pemilik media tidak hanya orang-orang yang tunduk pada Harmoko, sang Menteri Penerangan atau Soeharto. Jadi otoriterianisme dengan pengekangan informasi tetap bisa dilanjutkan, dan agenda-agenda neoliberal berjalan tanpa gonggongan anjing penjaga (*watchdog*) bernama pers.

Ini kuduga sama dengan mengapa pemerintah Indonesia tak memprivatisasi Garuda Indonesia. Padahal, kalau mau bicara

privatisasi sebagai strategi bisnis, justru perusahaan seperti inilah yang layak diprivatisasi dengan menggandeng mitra asing (*strategic partner*), dan bukan melalui mekanisme jual saham (*Initial Public Offering*/IPO).

Dengan mitra asing, Garuda bisa *go international,* menembus pasar dunia, dan tidak menjadi macan kandang melulu. Supaya Garuda bisa sejajar dengan Singapore Airlines. Bersaing dengan Qantas, Emirates, bahkan Cathay Pacific. Dan bisa menjadi anggota Star Alliance. Supaya Eropa tidak memandang sebelah mata dan memberlakukan larangan terbang bagi Garuda. Dengan mitra asing, maka Garuda bisa mendarat di Shcipoll, Charles de Gaulle, atau Heathrow, tanpa perlu mengemis-ngemis izin terbang seperti waktu itu.

Lantas mengapa Garuda tak diprivatisasi dengan mitra asing? Sebab, seperti halnya perusahaan media, perusahaan seperti Garuda bisa menjadi bagian dari mesin otoriterianisme untuk mengawal neoliberalisme. *Duh*, berat *banget*. Tapi kira-kira begini penjelasannya:

Keberadaan mitra asing bisa jadi bumerang. Manajemennya harus transparan dan tak ada lagi urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan bisnis penerbangan. Padahal, justru ketidaktransparanan inilah yang dikehendaki oleh anasir-anasir politik dalam pemerintahan untuk mencari rente ekonomi. Entah untuk sapi perah politik, sekadar tiket gratis untuk pejabat, atau untuk operasi-operasi intelijen seperti dalam kasus pembunuhan Munir. Orang-orang kritis seperti Munir adalah ancaman bagi praktik-praktik politik totaliterian. Padahal, dari pengalaman Chile, justru praktik politik totaliterian-lah yang sangat subur untuk tumbuh dan berkembangnya neoliberalisme. Sebab, neoliberalisme sendiri sejatinya tak terlalu membutuhkan demokrasi. Makin sentralistis pemerintah, makin subur untuk agenda-agenda neoliberal. Ini berbeda dengan liberalisme klasik di Eropa yang

justru muncul bersamaan dengan demokratisasi.

Tentu saja saya tidak menganjurkan privatisasi Garuda. Ini sekadar sindiran atas politik dua muka yang ditunjukkan pemerintah dalam hal privatisasi dan liberalisasi. Ternyata definisi "strategis" bagi pemerintah adalah strategis dalam pengertian politik kekuasaan seperti pers dan Garuda, bukan strategis dalam pengertian kepentingan rakyat. Jadi pemerintah menerjemahkan "cabang-cabang produksi yang penting" dalam konstitusi itu dalam kacamata politik kekuasaan, bukan kesejahteraan umum.

Kita kembali ke perjalanan liberalisasi kebijakan penanaman modal.

Kebijakan membuka pintu seluas-luasnya pada modal asing ini dilanjutkan presiden-presiden setelah Soeharto, tanpa ada upaya amandemen. Termasuk Gus Dur, Megawati, atau SBY.

Di masa SBY, bahkan lahir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal yang menggantikan semua, ulangi, *semua* perundangan dan peraturan tentang penanaman modal yang ada.

Inilah watak neoliberal yang sesungguhnya. Disterilkannya bisnis media dari modal asing karena rezim Orde Baru yang otoriter ingin selalu mengontrol isi pemberitaan agar kebijakan-kebijakannya tidak direcoki. Kombinasi yang sama dengan yang dilakukan Chile di bawah diktator Pinochet. Ekonominya liberal, politiknya totaliterian. Politik yang totaliterian digunakan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan ekonomi liberal. Itulah neoliberalisme.

Oleh Kwik Kian Gie, isinya disarikan kurang lebih seperti ini:

1. Tidak ada lagi perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri (pasal 1).
2. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun (pasal 6)
3. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang (pasal 7).
4. Investor diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, yang ini sama dengan membolehkan mereka memindahkan keuntungan dari Indonesia ke negara asal (pasal 8)
5. Semua bidang usaha boleh dimasuki kecuali senjata dan usaha-usaha lain yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang (pasal 12)
6. Hak atas tanah menjadi 95 tahun untuk HGU (Hak Guna Usaha), menjadi 80 tahun untuk HGB (Hak Guna Bangunan), dan menjadi 70 tahun untuk Hak Pakai.

Aku membanding-bandingkan ketentuan ini dengan butir-butir Washington Consensus yang melarang pemerintah membatasi investasi dari mana pun, karena investasi akan menciptakan produksi dan lapangan kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Persis teori dalam teks buku neoliberalisme.

Waktu meliput ke Guang Zhou, China pada Januari 2004, aku diundang tukar pengalaman di Universitas Shantou. Kampus ini banyak disokong dana oleh taipan Hong Kong yang terkenal: Li Kha Sing. Bisnisnya menggurita di segala sendi kehidupan. Saking besarnya, sampai-sampai para mahasiswa China punya guyonan: tak ada gerak yang dilakukan orang Hong Kong, yang tidak menyebabkan Li Kha Sing bertambah kaya setiap

detiknya.

Maksudnya?

Dari mulai bangun tidur (menguasai bisnis properti), sarapan (menguasai bisnis ritel), baca koran atau nonton televisi (media), hingga bertelepon (telekomunikasi), semua yang dilakukan orang Hong Kong adalah pendapatan untuk Li Kha Sing.

Di Indonesia?

Eit, tentu tidak dimonopoli satu orang. Lihatlah daftarnya:

Mandi dan sikat gigi (Unilever), minum air (Danone), berbelanja (Carrefour), menabung di bank (UOB, Farallon), bertelepon (Qtel, Singtel, Nokia, Sony-Ericsson), bangun rumah (Cemex, Holchim), naik mobil (Toyota, Honda), isi bensin di SPBU (Shell, Petronas, ExxonMobil), pakai perhiasan (Freeport, Newmont), merokok (Philip Morris), kerja kantoran (Intel, Toshiba, Microsoft), sampai urusan loyo di ranjang (Pfizer).

Tak dimonopoli satu orang, kan?

***

Adu Basket

Kita semua tentu tidak anti-investasi asing. Demikian juga dengan para pendiri republik. Yang hendak *founding fathers* lindungi hanyalah "cabang-cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak". Selebihnya silakan saja. Tak haram menjadi kaya.

Ajarannya memang sosialis, dan bukan liberalis.

Investasi swasta memang menciptakan produksi dan lapangan kerja. Tapi di saat yang sama, investasi swasta juga menuntut laba. Laba akan terbentuk bila tingkat harga membuat pendapatan perusahaan lebih tinggi dari ongkos produksinya. Logika ini tentu tidak cocok dengan usaha-usaha yang berkaitan dengan kepentingan orang ramai seperti air, transportasi, pendidikan, kesehatan, atau minyak bumi.

Pencarian laba akan membuat semua digerakkan dengan logika-logika komersial. Dan lagi pula, laba itu belum tentu kembali berputar di dalam negeri (*host country*), melainkan bisa saja ditransfer pulang ke negara asal (*home country*).

Karena titik *start* yang berbeda (akibat ratusan tahun penjajahan), pengusaha dari negara berkembang harus berhadapan dengan pesaingnya dari negara maju yang lebih kuat secara permodalan dan teknologi. Tapi karena aturan mainnya adalah harga dan pasar, maka proteksi adalah barang haram, dan subsidi adalah distorsi ekonomi.

Apalagi, tidak semua hal di planet bumi ini bisa dikompetisikan secara bebas. Misalnya olah raga basket. Dengan tinggi ring basket yang "berstandar internasional" 3,05 meter, rata-rata ras bangsa kita tak akan pernah bisa menyuguhkan pertandingan yang penuh *slam-dunk*. Paling-paling hanya tembakan pantul atau *three points shot*.

Coba bila Indonesia membuat standar tinggi ring basket sendiri. Pasti kita bisa menikmati tarian-tarian udara ala *slam-dunk* setiap hari di halaman-halaman sekolah. *Emangnya* siapa yang bikin aturan bahwa tinggi ring basket harus tiga meter, sehingga aturan itu mirip kitab suci?

Tentu banyak pemain basket kita yang tingginya lebih dari 180 senti seperti Denny Sumargo dan tarian *slam-dunk* bisa dimainkan di lapangan-lapangan basket di Tanah Air. Tapi bila diadu dengan pemain-pemain NBA, maka aku ingin mengajak taruhan para penganjur neoliberal agar mereka menaruh uangnya untuk tim dari ras *mongoloid*. Dan aku bertaruh untuk ras *caucasian*.

Sungguh butuh keajaiban agar hasilnya berbeda dari yang kita duga di atas kertas.

Itu artinya, tidak semua hal bisa dikompetisikan secara bebas. Ada kondisi-kondisi yang secara inheren atau *given* berbeda, yang membuat kompetisi bagaikan memberi ajang pada yang kuat untuk selalu menang. Dalam dunia ekonomi, di situlah dibutuhkan intervensi untuk melindungi yang lemah. Dan tak perlu silau dengan aturan dan standar internasional yang pasti dibuat oleh mereka yang yakin akan menang dengan aturan itu.

Aku selalu berpikir, bila pemerintah memang percaya bahwa kekuatan pasar dan swasta di segala bidang bisa mendatangkan manfaat besar dan merangsang inovasi sehingga perekomian lebih maju dan lebih efisien, mengapa tidak sekalian pemerintahannya saja yang kita lelang? Kabinet dan posisi-posisi kunci birokrasi kita *outsourcing*. Kita swastanisasi.

Bila republik ini disewakan administrasinya ke pihak swasta dengan sistem kerja sama operasi, bagi hasil, atau *profit sharing*, bukankah akan lebih dahsyat? Surplus APBN bisa dibagi hasil dengan manajemen asing. *Toh*, semua ini untuk rakyat. Untuk kemaslahatan kita bersama.

Bukankah pemerintah percaya bahwa bila perekonomian lebih banyak diurus negara akan mengundang korupsi, dan swasta tidak? Demikian juga dengan pemerintahan bukan?

Korespondensi dengan Prabowo

Bulan Maret 2009, di sebuah *mailing list*, Prabowo Subianto melansir "8 Program Aksi untuk Kemakmuran Rakyat". Salah satu gagasannya adalah "Menyelamatkan Kekayaan Negara untuk Menghilangkan Kemiskinan" dengan cara: "Meninjau kembali semua kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional."

Tertarik dengan penjabaran konsep tersebut, aku mengirimkan email pribadi ke sebuah alamat yang memposting email itu: salam. prabowo@yahoo.com

"Bagaimana kami bisa tahu tanggapan-tanggapan kami atas 8 program memakmurkan rakyat dibaca dan direspon langsung oleh Pak Prabowo, dan bukan oleh think tank *atau* ghost writer-*nya? Saya yang kurang kerjaan saja kewalahan merespon email di milis, apalagi Bapak..."*

Sangat mengejutkan. Di hari yang sama, emailku ini langsung dijawab:

"Saudara Dandhy Dwi Laksono yang saya banggakan, dunia online yang saya pahami memang maya. Karena kemayaan itulah perlu personal touch*. Tidak semua email bisa saya jawab. Tetapi semuanya bisa saya baca. Dokumentasi semua email yang masuk oleh TIM FbPS yang menjalankan tinyurl.com/prabowo, dilakukan dalam file format MS Words, jika sewaktu saya butuhkan."*

"Jawaban untuk Saudara, ini saya tulis langsung. Bukan oleh pihak lain. Yahoo juga sudah memudahkan kita untuk setiap milis

yang kita ikuti dengan meng-add pada folder di bagian kiri, semua email masuk bisa terkelompokkan sesuai dengan milis dan topik. Itu cukup menolong. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam Indonesia Raya, Prabowo Subianto"

Aku senang bukan kepalang. Berarti Prabowo benar-benar siap berdiskusi. Karena itu aku juga langsung menjawab *email* tersebut:

*"Baiklah, dan terima kasih bila ini memang langsung ditanggapi Pak Prabowo. Ada janji me-*review *semua kontrak pemerintah dengan pihak asing yang dianggap merugikan Indonesia, apakah termasuk kontrak dan konsesi pertambangan dan perminyakan?"*

"Untuk mereview kontrak karya Freeport atau kontrak production sharing *dari Seven Sisters Oil Company saja, misalnya, setiap presiden terlihat* in-capable*. Belum lagi reaksi dari Amerika Serikat: negara di mana Bapak pernah mengenyam pendidikan militer di Fort Benning. Negara yang lumayan banyak mengucurkan dollar untuk program IMET TNI."*

"Dalam kalimat singkat: apakah Bapak akan melakukan the way that Chavez and Morales did?*"*

Seharian dan keesokannya, aku bolak-balik membuka internet, menanti jawaban dari capres Prabowo. Lusanya aku buka *email* lagi dan nihil. Besoknya lagi begitu, dan besoknya lagi juga sama.

Hingga buku ini aku tulis, *email* itu tak pernah lagi dibalas. Aku percaya pertanyaan itu bisa dijawab Prabowo. Barangkali dia sekadar terlalu sibuk untuk menulis panjang. Dan mungkin dia memilih menjawabnya di forum-forum kampanye atau *talkshow* di televisi. Tapi dalam beberapa kali *talkshow* yang aku tonton, masalah itu tak pernah dibahas. Mungkin karena tak ada yang menanyakan. Atau Prabowo sudah menjelaskan panjang lebar, dan aku sedang tak nonton televisi atau ketiduran. Entahlah.

> Aku selalu berpikir, bila pemerintah memang percaya bahwa kekuatan pasar dan swasta di segala bidang bisa mendatangkan manfaat besar dan merangsang inovasi sehingga perekomian lebih maju dan lebih efisien, mengapa tidak sekalian pemerintahannya saja yang kita lelang? Kabinet dan posisi-posisi kunci birokrasi kita *outsourcing*. Kita swastanisasi.

Yang jelas, neoliberalisme memang mengharamkan pembatasan investasi. Entah lokal, entah asing. Dalam "etika bisnis modern" kontrak itu suci, termasuk kontrak-kontrak pengelolaan sumber daya alam. Padahal Hugo Chaves di Venezuela dan Evo Morales di Bolivia menegosiasikan ulang kontrak-kontrak mereka karena dianggap tidak adil dan perusahaan multinasional ketika itu bernegosiasi dengan rezim yang korup.

Ada gonjang-ganjing sedikit, tetapi dalam jangka panjang, asal tak ada korupsi, negara seperti ini bisa kuat dengan menguasai sumber daya alamnya sendiri.

Di masa Megawati (ada SBY, JK, dan Boediono di kabinet) pada tahun 2002, gas Tangguh di Papua dilego murah ke China dengan harga di bawah pasar, dan belakangan menjadi bahan kritikan politik Jusuf Kalla. JK meradang hebat karena rezim Megawati menjual gas itu seharga 2,4 dolar per mmbtu (satuan untuk gas). Padahal harga dari kilang lain bisa mencapai 20 dolar per mmbtu. Harga itu pun lalu direvisi menjadi 3,3 dolar per mmbtu.

Tapi dengan tingkat harga revisi itu pun, JK menghitung potensi kerugian negara akibat kontrak penjualan berumur 25 tahun itu mencapai Rp 750 triliun! (*kompas.com*, 29 Agustus 2008).

Pengamat perminyakan Kurtubi punya hitungan yang bikin miris hati. Dengan harga 3,3 dolar itu, pemerintah (Megawati) menjual gas ke rakyatnya sendiri dengan harga lebih mahal. Sebab, bila

elpiji ukuran 3 kilogram saja dijual dengan harga rata-rata Rp 15 ribu per tabung, maka itu sama dengan 9,9 dolar per mmbtu. Jadi, pemerintah mensubsidi rakyat China (*detik.com*, 2 September 2008).

Tak heran bila JK marah-marah.

Tapi itu sebentar saja. Setelah pemilihan umum, dalam rangka penjajakan koalisi, keduanya sudah tertawa bersama dan bersalam-salaman. Tak ada lagi diskursus soal gas Tangguh atau program BLT yang tadinya menjadi sumber ketegangan antara Megawati dan JK.

Di masa Megawati pula, kabinetnya (ada SBY, JK, dan Boediono) memutuskan untuk menjual gas ke Jepang dan Korea Selatan padahal pabrik-pabrik pupuknya sendiri mati suri kehabisan pasokan.

Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan Asean Aceh Fertilizer (AAF) di Aceh Utara selama ini mendapat pasokan gas dari Exxon Mobil melalui PT Arun NGL dengan kontrak 20 tahun. Tapi ketika hendak diperpanjang, cadangan gas di Lhok Sukon sudah tipis, dan mereka terikat kontrak untuk menjual ke luar negeri dengan harga pasar.

Maka, sudah pasti mereka lebih mengutamakan Jepang dan Korea Selatan, sementara dua pabrik tetangganya mati megap-megap. Padahal, gas itu diambil dari perut Aceh sejak tahun 1972. Sekarang lupakan dulu soal kompleksitas kontrak-kontrak internasional yang harus dipenuhi atas nama etika bisnis profesional dan modern itu.

Mari kita berpikir dari sudut pandang orang Aceh: ada gas di bawah rumah mereka. Gas itu dipompa keluar oleh perusahaan internasional yang ditunjuk oleh pemerintah di Jakarta. Di Aceh sendiri ada dua pabrik pupuk yang membutuhkan gas agar bisa

berproduksi dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar. Kini dua pabrik pupuk itu tutup karena tak dapat gas, sementara gas yang ada di halaman rumah mereka sendiri dikirim ke luar negeri.

Tapi ketika orang Aceh ingin merdeka dan mengangkat senjata, mereka dihadapi dengan pengiriman 40 ribu tentara melalui kebijakan darurat militer 2003-2005 di masa Megawati dan Menkopolkam SBY.

Masih berkaitan dengan Exxon-Mobil, di masa SBY, pimpinan pengelolaan blok Cepu diserahkan kepada mereka, kendati Pertamina sudah lelah meyakinkan pemerintah bahwa mereka mampu melakukannya.

Menurut mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, sebagai anggota Dewan Komisaris Pertamina, Boediono termasuk satu dari tiga orang yang setuju masuknya Exxon-Mobil. Padahal Dirut Pertamina ketika itu, Baihaki Hakim, menyatakan bisa mengelola Blok Cepu tanpa Exxon (Amerika). Saat itu, Kwik juga mengaku ditekan Duta Besar Amerika Ralph Boyce dan para eksekutif Exxon Mobil, baik yang dari Amerika maupun yang pribumi.

Keputusan *deadlock* dan diserahkan kepada Megawati sebagai presiden. Menurut Kwik, Mega tidak mengambil keputusan apa pun, tetapi tiba-tiba Dirut Pertamina Baihaki diganti Widya Purnama.

“Dia pun ternyata keras menentang diserahkannya (Blok Cepu) kepada Exxon Mobil sampai tahun 2030, sehingga dia juga dalam waktu singkat dipecat,” tulis Kwik dalam buku tipisnya “Indonesia Menggugat Jilid II?” Buku yang sepertinya khusus dibuat untuk mengomentari pidato deklarasi cawapres Boediono.

Mungkin karena sering merasa tak *nyambung* dengan Mega, Kwik belakangan malah mendukung JK sebagai presiden. Padahal dia

dikenal ekonom PDIP.

Rezim berganti. Di masa SBY-JK, akhir dari kisah Blok Cepu itu sudah sama-sama kita ketahui: kontrak Exxon Mobil diperpanjang, Exxon Mobil menjadi pemimpin eksplorasi, dan Pertamina hanya jadi kernet. Salah satu "negosiator" mewakili pemerintah untuk "menghadapi" Exxon Mobil ketika itu adalah Rizal 'Celli' Mallarangeng.

Di Gedung DPR ceritanya lain lagi. Aku sempat meliput pada hari pertama hak interpelasi untuk memprotes hasil negosiasi itu diedarkan. Sejumlah politisi PAN dan PKS aktif mencari dukungan. Salah satunya adalah Rama Pratama. Aku merekam dengan kamera, bagaimana tokoh mahasiswa di era 1998 yang kini menjadi politisi PKS itu membubuhkan tanda tangannya di dokumen usulan interpelasi. Politisi lain ada Alvin Lie (PAN), Dradjad Wibowo (PAN), dan Maruarar Sirait (PDIP).

Berita itu ditayangkan RCTI pada tahun 2007. Tapi beberapa minggu kemudian, Rama Pratama termasuk politisi yang mencabut kembali usulan interpelasinya, karena partainya akhirnya kompromi dengan kebijakan SBY soal Blok Cepu.

Jadi, ketika PKS *ngata-ngatain* Boediono sebagai neolib, aku jadi *mules*. Jangankan soal Blok Cepu, soal hak angket BLBI saja, partai ini maju-mundur. Tapi sayangnya, hal-hal seperti ini memang tak pernah menjadi ulasan integral dari media massa saat membicarakan Boediono, parpol koalisi, dan isu neoliberalisme. Semua menjadi cepat pikun.

***

RUMAH SAKIT
ORANG MISKIN DILARANG SAKIT!

Paradoks Neoliberal

Liberalisme dan adiknya si neo itu punya sejumlah paradoks yang sangat mengganggu. Di bursa saham misalnya, ada aturan *auto-rejection*. Bila harga saham sudah bergerak naik turun ''tidak wajar" melebihi 10 persen dalam satu hari, maka perdagangan saham itu akan otomatis dihentikan. Padahal ukuran wajar dan tidak itu sendiri absurd karena semuanya murni digerakkan oleh hukum permintaan dan penawaran. Bahwa ada '*invisible hand*' yang mempermainkan harga, bukankah itu konsekuensi dari kebebasan pasar dan mekanisme harga?

Mengapa ketika mekanisme pasar justru menampakkan wujud aslinya, lantas malah dibatasi dengan dalih melindungi investor publik? Melindungi investor kecil.

Mengapa logika yang sama tidak bisa dipakai untuk urusan minyak mentah, barang tambang, air, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum: bahwa di samping ada persaingan, juga perlu ada perlindungan pada yang lemah

Mengapa hanya untuk pasar modal filosofi itu berlaku?

Ada juga mekanisme *suspend* yang ternyata bisa "dipesan" alias "*by request*" seperti kasus saham BUMI-nya kelompok usaha Bakrie. Mengaku percaya pasar, tapi giliran dirugikan oleh mekanisme pasar, berpaling memohon proteksi ke pemerintah. Patronase politik pun menyambut hal ini.

Bail-out atau kebijakan talang-menalangi seperti BLBI dan rekapitalisasi perbankan yang sudah menelan biaya Rp 600 triliun, adalah perkara besar yang tak dapat disanggah, bagaimana ekonomi liberal dan neoliberal menampakkan wajahnya yang paradoks. Saat sehat ingin pemerintah tak

campur tangan, tapi begitu sakit, pemerintah (baca: publik) harus ikut menanggung.

Saat terjadi *market failure*, pemerintah harus bertindak. Tapi bila terjadi *public service failure*, pemerintah tak boleh ikut campur tangan. Aneh bin ajaib bagi otakku. Entah bagi otak para ekonom.

Dalihnya, bila entitas bisnis sudah sangat mempengaruhi sistem ekonomi, maka ketika kolaps, butuh intervensi pemerintah untuk menghindari efek bola salju. *Bail out* perusahan asuransi raksasa AIG dan General Motor di Amerika adalah misal.

Tapi ketika perusahaan itu sudah sehat, seperti kasus BCA, maka atas nama privatisasi dan swastanisasi, perusahaan-perusahaan itu harus dijual. Tak peduli publik belum merasakan keuntungan apa pun, bahkan menanggung dampaknya hingga bertahun-tahun setelah pengambil-alihan.

Secara doktrin teori, kebijakan *bail out* lebih dekat ke Keynesian bahkan sosialis (bila diikuti dengan kepemilikan negara atas aset-aset swasta). Karena itu pendukung neoliberal selalu membantah bahwa *bail out* adalah konsep inheren mereka.

Tapi dalam konteks Indonesia, kebijakan *bail out* seperti BLBI, faktanya tidak berhenti pada kepemilikan pemerintah, tapi selalu diikuti aksi *re-sell* atau menjual kembali. Alasannya bisa macam-macam, paling utama: untuk menutup anggaran yang defisit. Dan ini berarti harus cepat. Suasana tergesa atau dibikin tergesa ini membuat nilai aset yang dijual menjadi murah, tak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan pemerintah (baca: publik) saat menyelamatkan industri tersebut.

Maka, muncullah permisifisme dalam konsep: *recovery rate*, yang kurang dari 30 persen saja dianggap sudah hebat dan menjadi acuan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Recovery rate adalah ongkos krisis. Biasanya juga mengacu pada penjualan aset negara-negara yang memang telah menelan obat-obat IMF. Entengnya, kalau biaya untuk menyehatkan BCA Rp 50 triliun, lalu BCA-nya sendiri hanya laku Rp 5 triliun, itu wajar saja sebagai ongkos krisis.

Jadi, meski bukan konsep turunan neoliberal, tetapi *bail out* di Indonesia harus dibaca seperti ini:

1. Uang rakyat digunakan untuk mem-*bail out* atau mengongkosi perusahaan yang bermasalah (entah akibat malpraktik manajemen atau krisis keuangan).

2. Karena pemerintah tak perlu campur tangan terlalu jauh dalam bisnis, maka setelah sehat, perusahaan itu harus diprivatisasi karena mekanisme pasar jauh lebih sehat daripada ancaman korupsi di tangan pemerintah (asumsi neoliberal).

3. Privatisasi atau swastanisasi perlu karena pemerintah juga butuh uang kontan untuk menutup APBN yang defisit (defisit anggaran tak boleh terjadi karena anggaran yang defisit tak bisa membayar utang kepada negara-negara kreditur).

4. Karena semua orang di pasar tahu bahwa aset tersebut dijual untuk mengejar target setoran (Konsensus Washington), maka harganya akan jatuh. Karena posisi tawar pemerintah menjadi lemah.

5. Maka aset itu pun laku dengan nilai yang kurang dari 30 persen saja dari ongkos awal yang dikeluarkan pemeritah. Artinya pemerintah rugi 70 persen. Inilah yang disebut ongkos krisis (*recovery rate*).

6. Dan karena pemerintah tak boleh membeda-bedakan investor, atau modal harus dibiarkan bebas bergerak (ajaran neoliberal), maka aset-aset murah itu boleh dimiliki asing.

Konsep ongkos krisis (*recovery rate*) sendiri jelas absurd. Karena yang mengongkosi ternyata adalah publik dan bukannya orang-orang yang bermasalah dalam menjalankan bisnis.

Lalu mengapa tak ada yang menghentikan ini?

Sebab inilah aturan main yang menguntungkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan. Pemilik lama yang meminjam tangan perusahaan lain bisa memborong kembali aset mereka secara obral. Pengusaha asing punya kesempatan yang sama untuk membeli aset-aset murah yang sudah sehat, sekaligus mematikan potensi pesaing di dalam negeri.

Apalagi yang dijual bukan BUMN-BUMN atau aset BPPN yang sakit, tapi justru yang segar bugar seperti BCA, Telkom, Semen Gresik, atau Indosat.

Sementara anasir-anasir di jajaran birokrasi atau politisi di Senayan menikmati musim obral aset ini. Karena mereka punya kesempatan menjadi calo atau pelobi yang mengejar rente ekonomi atau komisi.

Obat Gagal yang Terus Diresepkan

Kemerosotan ekonomi yang terjadi selama dua dekade di Amerika Latin (1980-2000) adalah contoh nyata bagaimana resep neoliberal atau Konsensus Washington gagal. Yang muncul justru pemimpin-pemimpin yang berhaluan keras menentang agenda-agenda liberalisme seperti Hugo Chaves (Venezuela) atau Evo Morales (Bolivia). Mereka menjadi

pemimpin politik karena rakyatnya membutuhkan alternatif kebijakan.

Sedangkan Amerika diterjang krisis keuangan yang diawali dengan kasus kredit macet sektor perumahan (*subprime mortgage*). Hak tagih kredit perumahan diperjualbelikan dan menjadi sasaran investasi baru. Begitu macet, tak hanya bank, semua pemegang hak tagih langsung lunglai.

Ini mengulang tragedi Wall Street 1929. Amerika dilanda *bubble economics* alias ekonomi gelembung: besar, tapi mudah pecah. Pasar uang tumbuh subur sementara sektor riil kering kerontang.

Lembaga-lembaga keuangan raksasa kena batunya. Lehman Brothers, Fanny Mae, Freddie Mac, AIG, atau bahkan perusahaan otomotif General Motor, semua *klepek-klepek*. Siapa yang mengira, kantor Lehman Brothers yang megah dan besar di dekat Time Square, New York itu bisa rontok.

Untung aku pernah mengambil fotonya, setahun sebelum raksasa finansial itu kolaps. Kawan-kawan seperjalanan heran ada turis *kok* malah sibuk *ngambil* foto gedung kantoran. Habis, siapa yang tak kenal Lehman Brothers. Begitu ketemu gedungnya, langsung saja jepret-jepret.

Justru negara-negara yang tidak ikut-ikutan Konsensus Washington seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan China, berhasil meningkatkan kesejahteran dan memperbesar kekuatan ekonominya (aku mengambil risiko menyebut Taiwan sebagai "negara"). Negara-negara tersebut memberikan peranan yang seimbang antara pemerintah dan swasta, serta ketergantungan utang yang minimal.

BUMN-BUMN China dan Singapura kuat dan maju pesat. Singapura memiliki Temasek (yang pernah membeli Indosat),

Singtel, atau Singapore Airlines yang kondang dengan pelayanannya (anggota Star Alliance).

Di sisi lain, Indonesia dan Filipina yang patuh pada Konsensus Washington (IMF/Bank Dunia), mengalami kemerosotan ekonomi terus-menerus. Utang hari ini menjadi persoalan di masa berikutnya, sehingga menimbulkan siklus krisis yang tak berkesudahan.

***

Utang Luar Negeri itu

Sejak zaman Soekarno, Indonesia yang kaya raya ini tak kunjung bebas dari utang luar negeri. Memang, tak ada negara yang tak berutang. Negara maju seperti Amerika dan Jepang utang luar negerinya juga besar. Perusahaan yang tak punya utang konon bukan perusahaan yang sehat, sebab dia bisa jadi tak dipercaya kreditur, atau tak mau berkembang dan berekspansi.

Utang itu sehat, asal digunakan untuk kegiatan produktif. (Meski belakangan, Ketua BPK Anwar Nasution menuding pemerintah membagi-bagikan dana BLT yang notabene kegiatan konsumsi, dari dana utangan yang berbunga). Doktrin soal utang itulah yang dipercaya banyak pemimpin politik kita.

Soeharto yang lengser meninggalkan beban utang luar negeri mencapai Rp 1.500 triliun. Warisan utang luar negeri ini terus menghantui APBN Indonesia, hingga pemerintahan Gus Dur, Megawati, dan SBY harus ikut menanggungnya.

Di masa SBY akumulasi utang pemerintah makin menggunung hingga Rp 1.695 triliun. Rezim SBY sendiri "menyumbang" utang baru sekitar Rp 400 triliun. Dari utang segede itu, 60 persennya adalah utang dalam negeri, termasuk untuk menalangi BLBI dan obligasi rekap perbankan. Ini semua lantaran tak pernah ada kebijakan yang revolusioner soal utang luar negeri.

Agar mudah membayangkan uang Rp 1.695 triliun itu, ada cara yang barangkali kurang pas, tapi lumayan:

APBN 2009 jumlahnya kira-kira Rp 1.000 triliun. Itulah biaya agar mesin yang namanya Republik Indonesia ini tetap bergerak. *Nah*, bila kita hendak melunasi utang sebesar itu, maka selama satu setengah tahun, Indonesia ini diam saja.

PNS-nya tidak gajian, tak ada kegiatan pembangunan apa pun, sekolah libur, puskesmas dan rumah sakit pemerintah tutup, tidak ada pembelian BBM, semua polisi dan tentara cuti, jatah makanan semua narapidana di-*stop*, paspampres dibekukan, presiden dan semua menterinya tidak gajian dan mobilnya dikandangkan.

Pendeknya, semua yang pakai uang negara harus berhenti selama satu setengah tahun. Barulah utang itu lunas.

Dengan jumlah utang sebesar itu, tak heran bila cicilan setiap tahunnya mencekik APBN. Tahun 2005 cicilan utang kita Rp 126,5 triliun (termasuk bunga dan pokok). Tahun 2006 meningkat menjadi Rp 143,1 triliun. Jumlah ini terus membengkak menjadi Rp 197,5 triliun pada APBN tahun 2007.

Tahun 2008, republik kita mencicil utang luar negeri dan dalam negeri sebesar Rp 210 triliun. Dan tahun 2009 jumlahnya sudah Rp 220 triliun.

Yang menarik (entah tepat atau tidak memakai kata "menarik") sejak tahun 2002 hingga 2006, cicilan bunga lebih besar dari cicilan pokoknya. Dan sebagian faktor membengkaknya utang luar negeri adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Hanya gara-gara urusan "sepele" seperti sentimen di pasar uang dunia (sistem yang lahir dari liberalisme dan kapitalisme), yang namanya Republik Indonesia tiba-tiba bisa jatuh miskin gara-gara utang yang dipatok dengan mata uang asing.

Perhatikan ilustrasi berikut:
Aku berutang 1 dolar Amerika dengan bunga 10 persen. Karena kurs saat itu Rp 10.000, berarti bila dirupiahkan utangku Rp 10.000. Saat jatuh tempo, aku mestinya mengembalikan 1,1 dolar atau bila dirupiahkan Rp 11.000 saja. Tapi karena kurs dolar terhadap rupiah saat jatuh tempo itu naik, maka utangku tiba-tiba ikut membengkak.

Menurut sistem di mana kita sekarang hidup, itu adalah normal. Sebab, utang dolar harus dibayar dolar. Tak peduli berapa harga dolar saat itu. Kalau mau aman, ada yang namanya *hedging*. Kurs-nya harus dipatok agar jumlah utang tak tiba-tiba membengkak. *Nah*, mematok kurs itu ada harganya. Tidak gratis. Itu sama dengan membeli risiko.

Lalu mengapa kurs bisa tiba-tiba berubah sehingga utangku juga tiba-tiba membengkak?

Itu adalah konsekuensi dari menganut rezim devisa bebas, di mana rupiah dibiarkan mengambang terhadap mata uang asing dan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar dan hukum permintaan-penawaran.

Lo, itu kan uang. *Kok* disamakan dengan barang, pakai ada hukum permintaan dan penawaran segala?

Begitulah sistem kapitalisme global bekerja. Uang dan modal jadi komoditas. Sesuatu yang pernah ditentang Nabi Muhammad s.a.w. Pengikut Nabi Muhammad masih banyak. Jumlahnya kini seperlima penduduk dunia atau sekitar 2 miliar jiwa. Dan ingat, Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar. Tapi entah mengapa, ajaran Nabi Muhammad s.a.w. yang penting seperti ini justru tak diamalkan. Jadi, bila tak suka dengan sistem sekarang yang berlaku, silakan cari planet lain.

Uang dipatok dengan uang lain, dan bukan oleh basis produksi

Di masa SBY akumulasi utang pemerintah makin menggunung hingga Rp 1.695 triliun. Rezim SBY sendiri "menyumbang" utang baru sekitar Rp 400 triliun. Dari utang segede itu, 60 persennya adalah utang dalam negeri, termasuk untuk menalangi BLBI dan obligasi rekap perbankan. Ini semua lantaran tak pernah ada kebijakan yang revolusioner soal utang luar negeri.

yang fundamental atau oleh mineral unggul seperti emas. Sehingga dunia ibarat rumah kartu. Satu kartu ditarik, yang lain ikut rontok. Orang-orang yang tak tahu menahu, ikut-ikutan jadi korban. Sementara pelaku aktif ekonomi bisa saja tetap kaya karena menguasai seluk-beluk sistem keuangan global.

Bayangkan, jumlah cicilan utang di APBN 2009 sudah sama dengan jumlah alokasi dana untuk pendidikan. Padahal itulah satu-satunya pos alokasi anggaran yang besar. Konon lagi kalau hendak dibandingkan dengan dana Jamkesmas yang hanya Rp 4 triliun, atau anggaran untuk infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang hanya Rp 70 triliun.

Tidakkah ini mengganggu akal sehat kita? Cicilan utang lebih besar daripada belanja-belanja yang nyata untuk rakyat.

Apalagi, utang itu sendiri diberikan dengan sejumlah prasyarat atau ketentuan. Mana ada rentenir memberi utang secara gratis. Semua ada syaratnya. Kita saja kalau mau utang cuma Rp 10 juta ke bank pasti ditanya punya agunan apa saja. Kalau tak punya aset, SK pengangkatan pegawai pun jadi.

Asal tahu saja, menurut catatan Rizal Ramli, pinjaman sebesar 300 juta dolar dari Asian Development Bank (ADB) ternyata pakai "imbalan" UU Privatisasi BUMN. Kemudian UU Migas "ditukar" dengan pinjaman 400 juta dolar dari Bank Dunia.

Bank Dunia memberi pinjaman 400 juta dolar dan memesan Undang-undang Migas yang memungkinkan penguasaan sektor migas, dari hulu ke hilir oleh investor asing. Termasuk urusan SPBU tadi. Di luar itu, selama kurun waktu 2004-2009 utang kita naik sekitar Rp 80 triliun per tahun, kata Koalisi Anti Utang.

***

Besar Pasak daripada Tiang

Bisakah kita berhenti berhutang?

Utang muncul karena anggaran kita boros. Jadi sumber dana dari mana pun: baik itu utang, dari pajak, devisa ekspor, atau deviden BUMN, tak akan pernah cukup bila APBN kita boros! Kata orang tua zaman dulu, besar pasak daripada tiang.

Di mana pemborosannya?

Pemborosan tak pernah terasa karena kita selalu menganggap nilainya kecil. Padahal hal-hal kecil itu terjadi merata dan dianggap bukan persoalan besar. Honor pejabat adalah contoh dari logika-logika anggaran negara yang membingungkan. Bayangkan, meski sudah digaji, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa atau lurah, masih mengantongi honor dari kegiatan-kegiatan pembangunan. Setiap proyek yang mereka tandatangani, ada honornya. Padahal, bukankah itu bagian dari pekerjaan? Tapi semua itu legal.

Jumlah honor ini bila diakumulasikan jauh lebih besar dari gaji. Itu belum termasuk pemborosan lain seperti pembelian kendaraan dinas, perjalanan dinas untuk studi banding, sampai barang yang kurang penting semisal cincin kenang-kenangan.

Anggota DPR atau DPRD juga mengenal istilah uang rapat, di luar gaji pokok. *Lha*, ini kan aneh. Masa rapat saja ada honornya. Bila pekerjaan anggota DPR bukan rapat, lantas apa? Bukankah mereka digaji memang untuk rapat? Bukan *nyangkul* atau memanggul beras tiga kuintal.

Komponen gaji anggota KPK pun tak lepas dari logika anggaran republik ini yang memang aneh-aneh. Menurut Peraturan Pemerintah No 29/2006 seorang Ketua KPK seperti Antasari Azhar, misalnya, memiliki dua jenis pendapatan: penghasilan

bulanan dan tunjangan fasilitas, yang juga dibayar setiap bulan.

Penghasilan bulanan ini meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan. Gaji pokoknya Rp 5.040.000, Tunjangan jabatan: Rp 15.120.000, dan Tunjangan kehormatan: Rp 1.460.000.

Bila kemudian Antasari menjadi tersangka kasus pembunuhan, apakah itu berarti kehormatannya terenggut? Bila kehormatannya terenggut, apakah tunjangan kehormatannya juga dicabut? Kapan seorang pejabat dinyatakan tak lagi punya kehormatan?

Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tunjangan kehormatan? Bukankah setiap pejabat publik pasti terhormat? Bila tidak terhormat, masa *iya* dipilih menjadi pejabat?

Rekening Liar, Aset Telantar

Ibu-ibu rumah tangga saja tahu, kalau pendapatan suaminya cekak, maka alternatif lain selain mencari pendapatan tambahan adalah melakukan penghematan dan efisiensi. Sekali-kali mereka akan berhutang, bila kondisi benar-benar genting seperti untuk biaya berobat atau bayar sekolah. Tapi untuk mengongkosi hidup sehari-hari (baca: mengongkosi birokrasi), utang adalah pilihan bodoh.

Jadi karena gagal bertindak efisien, maka utang selalu didewa-dewakan sebagai solusi. Sementara di belakang duit utangan, antre sejumlah persyaratan yang sarat kepentingan kapitalisme global dan agenda-agenda neoliberal. Utanglah pintu masuk kebijakan neoliberal.

Rezim demi rezim selalu "kreatif" dalam mencari sumber-sumber pendapatan. Entah itu mengotak-atik basis pajak, tarif

pajak, menjual aset, menggenjot produksi minyak, atau mencari utangan. Tapi yang belum optimal adalah menertibkan dan mengelola harta yang sudah diperoleh.

Aset negara tak terurus dan lama-lama dikuasai perorangan. Rekening liar menjamur di setiap departemen, entah untuk tujuan fleksibilitas atau maksud-maksud busuk.

Pemerintah memang telah membentuk satuan kerja untuk mengurus aset. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 22.307 satuan kerja. Tugas mereka adalah menginventarisasi dan melaporkan keuangan negara. Satuan kerja sebanyak itu mencerminkan bahwa ada persoalan serius dengan pengelolaan harta republik ini. Hasil kerja mereka menyebutkan, ada aset negara sebesar Rp 77,32 triliun yang belum dibukukan (*Kompas*, 7 Juli 2009).

"Bangunan di sepanjang jalan (Juanda) Dago, Bandung itu dulu semua milik negara. Entah sekarang bagaimana, *kok* sepertinya sudah jadi milik perorangan," kata Rizal Ramli dalam sebuah jumpa pers.

Itu belum termasuk rekening liar di tiap-tiap departemen. Pada akhir tahun 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan tentang 260 rekening liar di lembaga-lembaga pemerintah dengan jumlah dana di dalamnya sekitar Rp 314,2 miliar dan 11 juta dolar Amerika.

Rekening-rekening liar itu bertebaran mulai dari Mahkamah Agung (102 rekening!), Departemen Hukum dan HAM (66 rekening), Departemen Dalam Negeri (36 rekening), Departemen Pertanian (32 rekening), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (21 rekening), BP Migas (2 rekening tapi isinya 10 juta dolar), hingga Departemen Sosial (1 rekening tapi berisi Rp 29,3 miliar).

Departemen Keuangan masih terus bekerja menginventarisasi 32.570 rekening yang total jenderal nilainya mencapai Rp 36,76 triliun dan 685 juta dolar (kalau dirupiahkan kira-kira Rp 6,8 triliun). Jadi totalnya mencapai Rp 43 triliun lebih.

Semua rekening itu berpotensi tak masuk anggaran negara dan mudah ditilep kanan kiri, seperti kasus dana non-budgeter Bulog atau Departemen Kelautan dan Perikanan yang membuat bekas menterinya, Rokhmin Dahuri kini menghuni bui.

Anggaran publik (APBN dan ABPD) memang selalu ironis. Lebih banyak uang untuk belanja kebutuhan birokrasi daripada riil untuk pembangunan dan rakyat. Jangankan itu, anggaran untuk tim sepak bola kadang lebih besar dari bantuan untuk puskesmas atau sekolah rusak.

Dari 76 klub sepak bola di Indoesia, tercatat hanya empat klub saja yang benar-benar profesional karena memiliki sumber pendanaan yang mandiri, yakni Arema Malang, PKT Bontang, Pelita Jaya Purwakarta, dan Semen Padang.

Sementara 72 klub yang lain, masih membenani APBD. Jika dirata-rata, setiap tahun klub Divisi Utama menerima kucuran dana Rp 11-25 miliar, sedangkan klub Divisi I rata-rata mengambil Rp 4-12 miliar.

Dalam satu tahun, anggaran publik yang digunakan untuk mensubsidi sepak bola saja mencapai Rp 792 sampai Rp1,8 triliun. Justru inilah subsidi yang tidak tepat sasaran.

Tapi mengapa tak pernah ditertibkan?

Karena sepak bola adalah gengsi bagi para elit politik daerah. Kepala-kepala daerah tak terlalu terganggu bila diberitakan ada sekolah roboh di daerahnya, atau penderita gizi buruk meningkat. Tapi bila klub sepak bolanya tak pernah masuk final,

maka itu adalah aib bagi mereka.

Di Jawa Timur, dari tujuh klub peserta Ligina 2007, hanya Arema Malang yang tidak didanai APBD. Persebaya mengambil Rp 17,5 miliar APBD. Deltras Sidoarjo dan Persik Kediri mendapatkan Rp 15 miliar.

Itu baru dari sepak bola.

Di birokrasi kita juga ada struktur yang bernama Direktorat Jenderal Kesatuan Kebangsaan. Struktur ini ada di setiap daerah dalam bentuk Badan Kesbang/Linmas. Dulu namanya Direktorat Jenderal Sospol atau Dinas Sospol, yang di masa Orde Baru menjadi mesin politik Golkar untuk menggalang dukungan melalui intimidasi atau *money politics*.

Sampai kini, kebiasaan ini belum hilang. Anggaran Kesbang ini sering digunakan untuk memelihara dukungan politik bagi para elit, baik di tingkat pusat maupun daerah. Baik untuk eksekutif maupun para politisi di legislatif dalam bentuk berbagai titipan proposal. Yang dikucuri uang adalah ormas-ormas kepemudaan, keagamaan, adat, yang tak lain adalah basis-basis dukungan politik masing-masing elit.

Soal rekening liar, di Departemen Dalam Negeri ada 36 rekening yang mengandung duit sebesar Rp 88,5 miliar dan 51.000 dolar Amerika.

Saat Gus Dur jadi presiden, Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pernah dibubarkan. Dua departemen ini, menurut Gus Dur, ongkosnya tak sepadan dengan fungsinya. Tanpa bermaksud mengkaji lebih jauh substansi dan pertimbangan di balik keputusan ini, namun terobosan-terobosan seperti ini dinanti publik. Di Departemen Sosial memang hanya ditemukan satu rekening liar pada tahun 2008. Tapi nilainya Rp 29,3 miliar.

Pola pengeluaran pemerintah harus diubah, terutama yang selama ini digunakan untuk pembelian barang-barang modal yang berjumlah sekitar Rp 400 triliun per tahun. Barang modal ini seperti untuk membangun kantor instansi baru, pemeliharaan gedung, pengadaan mobil pejabat, dan lain-lain.

Semua ini membutuhkan dana pemeliharaan yang besar. Untuk menghemat ongkos tersebut, pemerintah cukup melakukan *leasing* (sewa-guna) untuk instansi-instansi tertentu. Menurut hitungan Rizal Ramli, keperluan untuk itu hanya butuh biaya sekitar Rp 70 triliun.

Jadi, menurutnya, APBN bisa hemat Rp 330 triliun per tahun. Ini bukan duit receh! Dana sebesar itu seperempatnya saja bisa digunakan untuk membangun jaringan kereta api trans Sumatera. Dulu, di zaman penjajahan Belanda, jalur kereta api Sumatera itu tembus sampai ke Banda Aceh dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Sungguh ironis, setelah 63 tahun merdeka, jalur kereta api itu justru mati. Alih-alih bertambah, infrastruktur malah berkurang.

Jalan trans Kalimantan, trans Sulawesi, trans Papua, juga bisa dibiayai dari sisa dana penghematan ini. Bila infrastruktur memadai, kegiatan ekonomi lebih hidup, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan cara begini, pembangunan akan merata di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia bagian barat hingga timur punya kesempatan yang sama untuk berkembang.

Biar lebih mujarab, cara ini dibarengi pembenahan birokrasi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Koruptor mesti dihukum sejera mungkin. Karena selama ini sebagian utang luar negeri itu habis dikorup oleh pejabat dan kroninya, dan pihak kreditur tutup mata. Ahli ekonomi menyebutnya *odius debt*, utang najis. Para ustadz bilang, sudah duit utang dikorup pula.

Celakanya, kita selama ini selalu diajak berpikir bagaimana

meningkatkan penerimaan untuk menutup defisit. Karena selalu diajak berpikir di sisi penerimaan, maka argumen-argumen utang atau menjual aset melalui privatisasi, selalu menjadi alasan yang bisa diterima dan seolah-olah logis belaka. Padahal, defisit terjadi karena pengeluaran yang boros.

Anak SD saja tahu, bahwa dalam akuntansi selalu ada pos pengeluaran dan pos penerimaan. *Nah*, kita tak pernah diajak berpikir tentang merevolusi pos pengeluaran. Satu-satunya pos pengeluaran yang gencar didengung-dengungkan melalui media adalah: pengurangan subsidi.

Sebab subsidi adalah distorsi ekonomi. Karena itu adalah beban dan pemborosan, maka harus dicabut dari anggaran. Begitulah sihir neoliberalisme bekerja, disadari atau tidak.

Penjual kopi asongan yang tak lagi suka Megawati itu sudah pergi. Berkat agitasiku, di kepalanya kini sudah ada nama-nama tokoh lain yang gelagatnya *sarwa bae*—sama saja. Sambil jalan ia terdengar menggerutu, sudah lima kali pemilu ia lewati, tapi nasibnya tak pernah berubah. Kandas di Lapangan Monas bersama para trantib atau tibum yang ganas.

Hwrakadah!

Samin dan Dul kali ini tidak tertidur. Mereka melek, bahkan cenderung melotot. Mungkin karena kopi.

❊❊❊

PAK, UTANG KITA BANYAK, KEBUTUHAN JUGA BANYAK. SAWAH dAN WARUNG KiTA JUAL AJA YA?

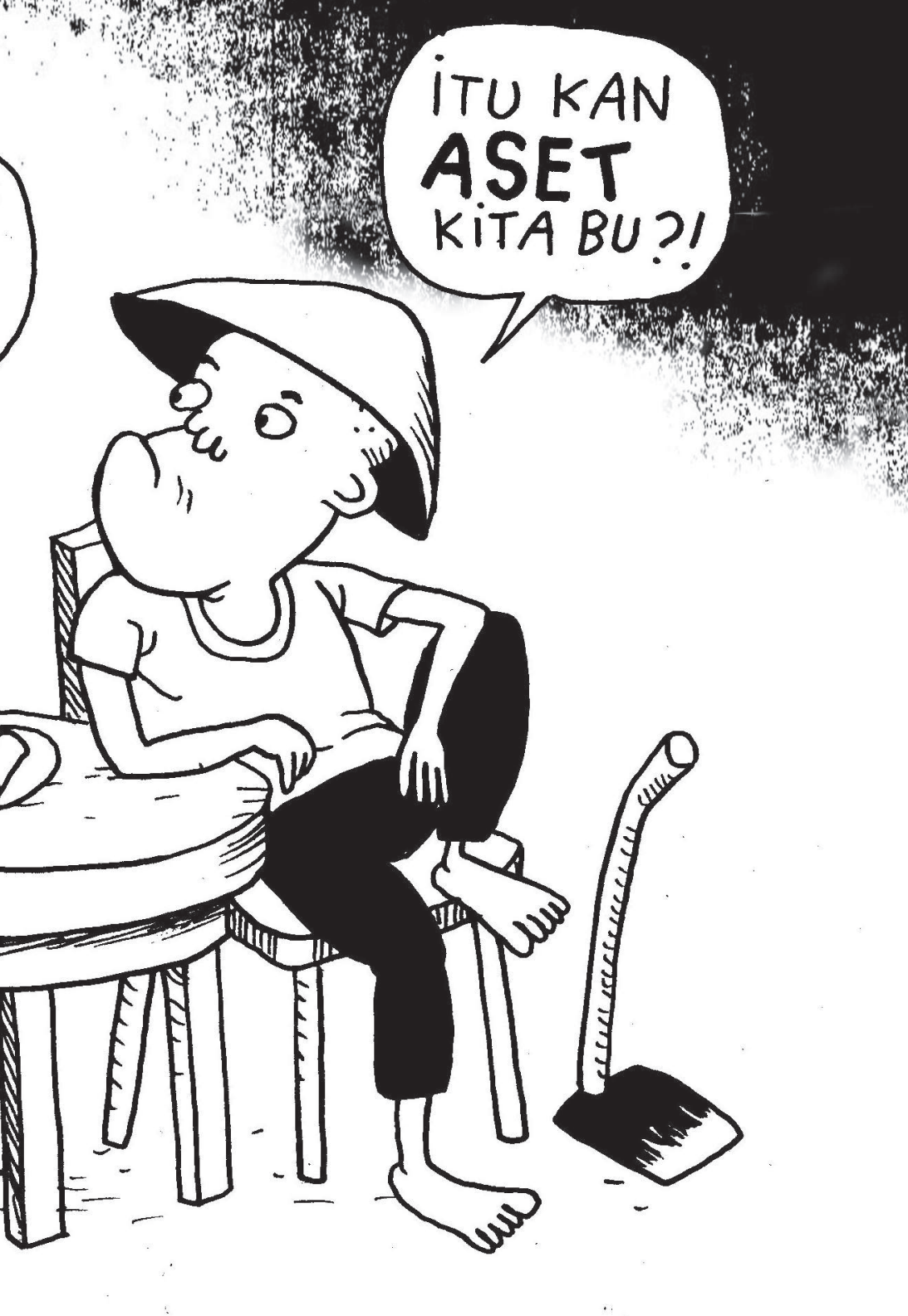
ITU KAN
ASET
KITA BU?!

BAGIAN KELIMA

Neoliberalisme di Media

Pengamen cum Pemain Valas

Kami bertiga berpisah di Taman Monas. Samin kembali ke pangkalan parkir. Dul menjaga toilet lagi.

Sebelumnya Samin berujar, "Mas, jangan nulis-nulis soal parkir gratis, ya. Urusan yang besar-besar masih banyak, seperti yang sudah *sampean* ceritakan itu. Kawan-kawanku tukang parkir ini apalah. Apalagi kami ini juga harus *nyetor*."

"Sama, Mas. Jangan diungkit-ungkit soal toilet gratis. Aku *nggak* bisa kerja lain, selain *mbersihin* toilet. Walaupun orang seperti aku ini mestinya dihonor sama pemerintah daerah, karena ini toilet fasilitas umum. Aku juga disuruh *nyetor*. Jadi, aku ini sebenarnya bos mereka. Kita ini sebenarnya bos mereka, Min. Bukan buruh. Karena kita yang *mbayar* mereka."

"*Sampean* berdua jangan *ge-er*. Tenang *aja*. Mana ada media yang mau memuat urusan parkir dan toilet. Terlalu sepele. Apalagi dikaitkan dengan hakikat dan filsafat perparkiran atau pertoiletan. *Nggak* laku! *Wong* di kantor-kantor media yang gedungnya *gede-gede* itu, parkirnya juga *mbayar*. Toilet saja yang gratis. Jadi *nggak* usah khawatir. Aku pamit dulu," pungkasku.

"*Wah*, lega aku, Mas. *Oke* kalau begitu. Sampai ketemu lagi. Lain kali boleh parkir gratis sama aku. *Hahaha*..."

"Kalau mau kencing sampai banjir juga gratis sama aku. Tapi jangan ajak-ajak teman. *Hahaha*... " timpal Dul.

"Hidup neolib!" pekikku sembari mengacungkan kepalan kiri. Lalu buru-buru aku ralat dengan kepalan tangan kanan. *Eeeh*... mereka berdua malah mengangkat kedua tangannya.

Aku buru-buru memacu mobil tua ke sebuah kedai kopi. Lebih tepatnya kafe. Orang Jakarta hilang gengsi kalau kafe disebut

kedai kopi. Sebab mereka sudah kadung menstempel orang-orang Aceh sebagai pemalas yang kerjanya dari pagi sampai sore nongkrong di kedai kopi.

Padahal kafe-kafe yang menjual kopi di Jakarta juga tak pernah sepi. Tapi tak ada yang menstempeli orang Jakata pemalas, hanya karena di depan mereka ada laptop. Laptop itu sendiri terhubung dengan koneksi internet yang kadang gratis. Entah mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kampus, main *facebook*, atau pemain saham yang bisa cepat kaya atau cepat miskin hanya dari pekerjaan seperti itu.

Pelaku bursa menghasilkan uang besar dari *trading* saham rokok atau saham batu bara, tanpa pernah melinting rokok atau mengambil risko seperti pekerja tambang yang mati di Sawahlunto. Mereka untung dari berdagang valuta asing di depan laptop. Juga memborong kedelai di bursa komoditas. Padahal terakhir kali makan tempe kira-kira 20 tahun lalu, waktu masih tinggal numpang di rumah mertua. Pendek kata, dengan modal Rp 35 ribu untuk segelas Cappuccino, orang-orang ini duduk berjam-jam di kafe dan melakukan transaksi.

Aku sering bergumam, kalau begitu siapa sebenarnya yang malas? Siapa yang *pengen* kaya dengan jalan pintas? Pedagang dan petani yang membicarakan hasil bumi di kedai-kedai kopi, atau pria metroseksual pedagang barang-barang virtual dengan laptop, *blackberry*, dan koneksi internet *wireless* ini?

Aku sebenarnya tak ingin menghakimi siapa pun. Tapi *mbok* sebelum menuding orang pemalas, ada baiknya mengaudit diri sendiri.

Sore itu, sejumlah pria dan wanita tenggelam di depan laptopnya masing-masing. Pakaiannya ada yang *necis*, ada yang kasual *nyantai*. Sebenarnya kegiatan investasi yang berbau spekulasi tak hanya monopoli orang-orang di kafe ber-AC ini.

Dari tempat yang imajiner ini, aku teringat pengalaman nyata, yang bukan fiksi.

Aku sering bergumam, kalau begitu siapa sebenarnya yang malas? Siapa yang *pengen* kaya dengan jalan pintas? Pedagang dan petani yang membicarakan hasil bumi di kedai-kedai kopi, atau pria metroseksual pedagang barang-barang virtual dengan laptop, *blackberry,* dan koneksi internet *wireless* ini?

Suatu hari di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, ada seorang penyair mengamen. Di taman itu memang banyak seniman. Entah yang sedang berlatih, atau sedang mencari duit. Atau mungkin keduanya. Ada juga klub pemain biola atau kelompok teater yang kerap berlatih ditemani rindangnya taman kota itu.

Bagi kaum hawa, bila tiba-tiba ada seorang pria membaca syair atau puisi di depan Anda, jangan buru-buru mengira dia sedang merayu. Tak perlu sedu sedan itu. Berikan saja uang seribu...

Seperti petang waktu itu, seorang pria tiba-tiba mendatangiku dan membacakan beberapa puisi. Aku dan kawan-kawan yang sedang menikmati nasi gila (nasi dicampur *oseng-oseng* sosis, ayam, dan telur), lumayan terhibur. Kawanku memberi uang ekstra agar pria separo baya itu membacakan puisi ekstra. Kami memesan dua buah: satu soal percintaan dan satu lagi tema sosial.

Aku tak ingat lagi apa yang dibacanya. Tapi setelah itu, dia memilih duduk bersama kami dan meletakkan tas ranselnya. Dia jadi pendengar pasif. Kami yang tak sedang membicarakan hal khusus, juga tak merasa terganggu. Kami bicara saja *ngalor-ngidul*, termasuk membicarakan kawan yang sekarang berprofesi sebagai broker di pasar uang alias pemain valas.

Tak ada yang negatif. Selain bahwa itu profesi yang legal, tak ada hak kami menghakimi setiap profesi. Bila ada audit profesi,

barangkali profesi-profesi yang katanya terhormat, jangan-jangan dalam praktiknya malah membahayakan kehidupan masyarakat.

Tak disangka tak dinyana, penyair itu lalu mengeluarkan selembar kertas dan pena. Sejurus kemudian dia berkata, "Mas, kalau mau main valas, aku bisa bantu. Aku minta alamat emailnya. Aku biasa *trading* juga. Lumayanlah, klien-klienku *gak* pernah mengeluh selama ini. Main Rp 50 juta bisa, 20 juga bisa. Tergantung Anda saja adanya berapa. Minta emailnya, nanti aku kirim catatan-catatan transaksiku."

Kontan aku dan kawan-kawan saling adu pandang. Tapi segera aku sahuti.

"Biasa main di pasar mana, Pak?"

"Aku mainnya di luar, Mas. Makanya nanti jam 10 malam mulai kerja."

"Di mana *dealing room*-nya?"

"Di Jalan Gajah Mada. Terusan Harmoni itu."

"..... ..., ya?" (aku menyebut dua kata, nama sebuah perusahaan).

"Iya. Sering juga, ya? Atau ada kawan?"

"Ada *sih* dulu. Tapi *gak* tahu sekarang masih aktif atau tidak."

"Aku tidak pernah kalah, Mas. Nanti lihat saja catatan transaksiku. Nanti aku kirim juga *itung-itungannya*. Kalau ada *sih* Rp 50 juta. *Cepet dapetnya*. Kalau Rp 20 juta juga *cepet*, tapi dolar saja, *gak* bisa euro."

Begitulah kira-kira isi obrolan singkat kami. Tentu tidak detil persis kata per kata seperti itu. Soalnya aku *nggak* enak sendiri. Masa urusan bait puisi lupa, begitu urusan transaksi valas ingatannya jadi pulih. Tapi fragmen di Taman Suropati petang itu bukan fiksi.

Singkat cerita aku berikan alamat email. Dan benar, beberapa hari kemudian dia mengirim semua yang dijanjikan: riwayat transaksi, analisis, dan skema bagi hasil investasi.

Aku ceritakan ini ke kawan-kawan Taman Suropati, dan kami gagap menjelaskan fenomena ini. Apakah dia seorang seniman merangkap *trader*? Atau mungkin *trader* merangkap seniman?

Transaksinya dalam dolar dan euro, tapi *ngamen* uang receh di tempat-tempat terbuka dengan membaca puisi. Luar biasa. Planet bumi berputar dari barat ke timur, tapi karenanya matahari jadi terlihat bergerak dari timur ke barat.

Apakah mata pencarian utamanya berdagang valas, lalu puisi adalah ekspresi dan hobi semata? Maklum, betapa banyak orang yang memiliki hobi yang tak ada sangkut-paut dengan profesi.

Atau jangan-jangan ini yang terjadi: agar tetap bisa menghasilkan karya-karya puisi idealis yang tak tunduk pada kepentingan pasar, dia harus mencari nafkah dengan menjadi pemain valas? Jadi di saat yang bersamaan, dia anti sekaligus pro-pasar.

Anti-pasar karena altruismenya pada karya seni yang tak menyerah dengan selera komersial. Namun demi menyambung hidup untuk bisa tetap berkarya, dia bekerja pada sistem yang *altruistik* terhadap pasar sebagai dewa.

Atau dugaanku berlebihan. Jangan-jangan yang terjadi bukan

dua-duanya. Dia adalah pedagang valas tulen, yang dengan puisi, malah punya kesempatan *ngobrol* dan presentasi pada calon-calon nasabahnya dengan segmen tertentu. Puisi untuk memprospek dan kemudian: *closing*!

Jadi, *it's all about the market*.

***

Main Politik di Layar TV

Di kafe imajiner sore itu. Aku sedang janjian dengan bekas mahasiswaku yang sekarang sudah bekerja menjadi wartawan di sebuah stasiun televisi. Aku memang sempat *nyambi* jadi dosen *freelance* dan dosen tamu di sejumlah kampus. Mengajar jurnalisme televisi atau jurnalisme investigasi. Atau jurnalisme investigasi di televisi. Ini sekadar hobi. Hobi melihat dan dilihat mahasiswi. *Hihihi*...

Bekas mahasiswaku ini *ngajak* ketemu membicarakan beberapa kasus seperti perkara Antasari Azhar atau vonis Djoko Tjandra dan Sjahril Sabirin dalam kasus skandal Bank Bali. Kasus lama tapi heboh lagi gara-gara vonis Mahkamah Agung konon bocor. Direktur Utama PT Era Giat Prima itu keburu terbang ke Papua Nugini sebelum dieksekusi. Hingga buku ini kutulis, Joker, panggilan akrabnya di kalangan politisi DPR, masih berstatus buron dan tinggal di Singapura.

Aku dan bekas mahasiswaku bertukar informasi. Kabar vonis itu memang bocor. Aku punya kawan wartawan yang sudah mendengar perihal vonis itu, seminggu sebelum diumumkan Mahkamah Agung. MA baru mengumumkan secara resmi pada 11 Juni 2009. *Nah*, Joker ini sudah terbang ke Papua Nugini lewat bandara Halim Perdanakusumah, 10 Juni.

Aku sendiri heran, kenapa kalau kasus seperti ini, bocornya vonis mudah sekali. Tapi begitu vonis bebas terhadap Muchdi Pr, *nyimpennya* rapi *jali*. MA diam-diam menolak kasasi jaksa kasus pembunuhan Munir pada 15 Juni 2009. Dengan ditolaknya kasasi, berarti mantan Deputi V Badan Intelijen Negara itu, dinyatakan tak terlibat, seperti vonis pengadilan tingkat pertama, 31 Desember 2008.

Hebatnya, tak ada wartawan yang tahu putusan MA itu, sampai kira-kira 25 hari kemudian, setelah hari pencontrengan pilpres,

8 Juli 2009. Dengan begitu, maka untuk sementara, satu-satunya orang yang secara hukum dinyatakan terlibat langsung dalam pembunuhan Munir adalah pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus yang dalam bahasa latin artinya "banyak badan" itu divonis 20 tahun penjara, tanpa pernah bisa dibuktikan secara hukum siapa yang menyuruh dan mengongkosi operasinya.

Sementara kasus Antasari sudah berkembang ke sana ke mari. Ada soal Rhani Juliani, ada soal penyadapan ilegal, hingga konspirasi politik tingkat tinggi. Ada juga rivalitas sengit antara KPK dengan polisi, sampai-sampai KPK *dikatain* cicak oleh seorang jenderal polri.

Inilah enaknya dunia wartawan. Tak ada senior-yunior. Informasi adalah panglima. Barangsiapa yang menguasai informasi, dia layak didengar. Mau tua atau muda, *gak* ada urusan. Rasa hormatku pada wartawan lain bukan karena umur atau jabatannya, tapi kesaktiannya dalam profesi.

Wartawan dan media bukan struktur sosial feodal seperti zaman William Wallace. Apalagi sampai ada yang punya hak *prima noctes* segala. Di ruang redaksi, kedaulatan tertinggi ada di rapat redaksi. Bukan pemimpin redaksi atau pemilik media. Rapat redaksi memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan jurnalistik. Lain tidak.

"*Ah*, Mas selalu *ngomong* begitu di kelas dulu. Nyatanya, setelah aku kerja jadi wartawan *beneran*, itu *omong kosong* semua," tukas wartawan muda bekas mahasiswaku itu.

"*Hehehe*... berarti aku dihonor kampus untuk *ngajari* omong kosong, ya?

"*Hehehe*... *nggak* juga *sih*. Tapi yang diajarkan di kampus-kampus itu memang *suka* beda dengan kenyataan."

"Jadi kamu merasa rugi bandar, ya? *Udah* kuliah mahal-mahal, isinya membual? *Udah* sistem pendidikannya neolib, isinya gosip?"

"*Hahaha*..." kami tertawa bersama.

Dosen jurnalistik yang sedang atau pernah bekerja di ruang redaksi—bukan jadi dosen karena menjadi lulusan terbaik Fakultas Komunikasi—selalu mengalami benturan antara realitas dan gagasan-gagasan ideal praktik media.

Sepanjang musim kampanye untuk pemilu legislatif atau pemilu presiden, misalnya, layar televisi dipenuhi bias kepentingan politik. Entah itu agenda politik dari para pemiliknya, faktor mengejar kue iklan, atau manuver para jurnalis yang punya afiliasi politik tertentu. Kondisi internal ini bertemu dengan kepentingan strategi kampanye para kandidat maupun konsultan-konsultan politik. Mengaku profesional, tapi Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers saja tak dipahami.

Monopoli Kampanye 30 Menit

Pada suatu sore di hari Sabtu, 13 Juni 2009 misalnya, setelah program Seputar Indonesia di *RCTI*, calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba muncul di layar, melakukan kampanye. Siaran tunda berdurasi 30 menit itu berlokasi di Malang, Jawa Timur. Besoknya, *RCTI* bekas tempatku bekerja, kembali menyiarkan kampanye SBY di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kedua kampanye ini tertutup dan terbatas, tapi ditonton jutaan pemirsa *RCTI*.

Televisi memang strategis. Kampanye arak-arakan mengerahkan massa setiap hari sudah bukan zamannya. Selain mahal, hasilnya belum tentu efektif. Sebab, bisa saja orang datang hanya karena dibayar. Di sisi lain, 60 persen orang Indonesia memperoleh informasi dari televisi, bukan koran dan radio.

Maka, barangsiapa menguasai layar televisi, dia bisa memenangi kompetisi.

Jadi tak heran, bila kandidat seperti SBY *pede* saja melakukan kampanye di ruang tertutup dengan massa yang terbatas, tapi disiarkan *RCTI* dua hari berturut-turut.

Siaran itu tanpa identitas program dan keterangan apa pun di layar, termasuk penanggung jawab dan susunan tim yang terlibat (*credit title*). Tak ada iklan pihak lain. Bahkan ada segmen sepanjang 15 menit tanpa *commercial break* sama sekali. Di stasiun televisi komersial, "kemewahan" seperti ini hanya akan diberikan kepada mereka yang membeli durasi siaran secara *blocking time*.

Siaran itu berbeda dengan *talkshow* atau mimbar para capres yang dilakukan televisi lain seperti Ring Politik (*ANTV*), Satu Jam Lebih Dekat (*TV One*), Kick Andy (*Metro TV*), atau Barometer (*SCTV*). Dalam program-program tersebut, dimungkinkan ada unsur kampanye, tetapi ada pihak lain yang mengomentari, menggali, mengkritisi, bahkan mendebat. Ada proses dialog. Bukan monolog. Redaksi juga memiliki otoritas mengarahkan isinya.

Tak hanya *RCTI*, minggu malamnya, 14 Juni 2009, *Metro TV* juga menayangkan acara kampanye Jusuf Kalla di Cilincing, Jakarta Utara. Program ini diberi judul (*bumper in*): "JK Pemimpin Bersama Rakyat". Format acaranya sama: sekitar 30 menit, panggung itu hanya untuk JK. Di akhir program, *Metro TV* menyertakan susunan kru, menandakan bahwa program ini dibuat redaksi *Metro TV*.

Sampai sini, sepintas tidak ada masalah, karena kampanye pilpres memang telah dimulai sejak 2 Juni. Ini berbeda dengan kasus *Metro TV* dan *TVRI* yang turut dilaporkan ke polisi karena menyiarkan kegiatan politik SBY-Boediono yang oleh Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) diyakini sebagai kampanye di luar jadwal.

Masalahnya, kampanye SBY dan JK yang ditayangkan sepanjang 30 menit di *RCTI* atau *Metro TV* itu termasuk kategori apa dalam aturan kampanye: (1) pemberitaan kampanye, (2) penyiaran kampanye, atau (3) iklan kampanye.

Kategorisasi itu penting sebab lembaga penyiaran tidak boleh mengelabui penonton dengan mengemas sebuah iklan politik, seolah-olah program yang memiliki nilai berita. Undang-Undang sendiri membuat kategori. Pasal 52 UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan: "media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/ atau *blocking time* untuk Kampanye".

Sebagai *pemberitaan*, kedua program itu tidak memiliki unsur keberimbangan. Substansi kampanye SBY dan JK tentu memiliki nilai berita. Tetapi sepanjang 30 menit? Bagaimana dengan kampanye kandidat lain yang ada di hari yang sama?

Kedua, program *RCTI* tidak mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai program berita, yang biasanya ditandai kemunculkan nama program, keterangan gambar, atau nama-nama kru yang bekerja di balik program itu. Ciri-cirinya mirip iklan atau advertorial. Sementara di *Metro TV*, meski terdapat nama kru, judul programnya, "JK Pemimpin Bersama Rakyat". Judul ini lebih tepat disebut advertorial daripada produk jurnalistik.

Lagi pun, bila kedua kampanye itu ditayangkan utuh dengan dalih bernilai berita, maka *RCTI* harus menyediakan 30 menit selama dua hari untuk dua kandidat lain, di waktu yang sama. *Metro TV* juga wajib untuk SBY dan Mega dan menyiarkannya di *prime time*.

Artikel tentang ini kutulis di sejumlah *mailing list* atau *facebook*. Belakangan dimuat juga di *Koran Tempo* (24 Juni 2009). Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI) lalu memanggil para perwakilan dari masing-masing televisi.

Di depan KPI, mereka mengaku bahwa tayangan kampanye itu bukan iklan *blocking time* alias gratis, karena dianggap memiliki nilai berita, dan itu merupakan besutan bagian pemberitaan (*news*). Padahal, kawan-kawan di redaksi bercerita, mereka tak tahu menahu dengan program kampanye yang wajib tayang itu.

Jadi tak heran, bila kandidat seperti SBY *pede* saja melakukan kampanye di ruang tertutup dengan massa yang terbatas, tapi disiarkan *RCTI* dua hari berturut-turut.

Di depan KPI pula, perwakilan *RCTI* dan *Metro TV* juga berjanji akan memberi durasi yang sama pada kandidat capres yang lain. Tapi hingga hari pemilihan usai, aku tak pernah menemukan program seperti itu lagi. Setidaknya di *RCTI*. Tak ada jatah kampanye 30 menit bagi Megawati atau Jusuf Kalla sebelum atau sesudah program Seputar Indonesia. Jadi kesempatan itu hanya diberikan pada SBY seorang.

KPI sepertinya dingin saja. Dikhawatirkan KPI hanya bertaji untuk program-program seperti Empat Mata-nya Tukul Arwana (*Trans 7*) atau Smack Down di (almarhum) *Lativi*. Tapi gagap menghadapi hal-hal yang berbau pemberitaan dan relasinya dengan kekuasaan.

TV Pool made in SCTV

Apalagi itu bukan kejadian pertama. Sebelumnya, Kamis, 16 April 2009, nyaris semua stasiun televisi menyiarkan mentah-mentah pidato SBY berdurasi 20-an menit, tanpa memperhatikan unsur keberimbangan dari pihak lain. Isi pidatonya sendiri sebenarnya memiliki nilai berita, yakni klarifikasi SBY sebagai presiden atas tudingan berbagai pihak

bahwa rezimnya telah bertindak curang dalam pemilihan umum legislatif, 9 April lalu.

Dalam pidato itu SBY membabat habis argumen lawan-lawan politiknya yang menuding pemerintah berada di balik kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Juga mematahkan tudingan bahwa Pemilu 2009 adalah pemilu terburuk setelah reformasi.

RCTI yang biasanya "pelit durasi", mengalokasikan waktu khusus dalam program bertajuk "Presiden Bicara". Di saat yang nyaris bersamaan, ternyata hampir semua stasiun televisi seperti *TPI, Trans TV, ANTV, Indosiar*, dan *TV One* juga menayangkan pidato yang direkam di Istana Negara siang harinya itu. *TPI*—satu grup dengan *RCTI* dan *Global TV* di bawah bendera MNC—bahkan mengemasnya dalam "*Breaking News*".

Breaking news atau di media cetak dikenal dengan *stop press* biasanya dipakai untuk jenis berita yang benar-benar mendesak untuk disiarkan. Karenanya sulit membayangkan mengapa sebuah stasiun televisi masih nekat menggunakan label *breaking news* untuk sebuah pidato yang sudah disiarkan televisi lain sekitar lima jam sebelumnya.

Stasiun televisi lain yang kumaksud adalah *SCTV*, yang sudah menayangkan pidato SBY sejak sore di program Liputan 6 Petang, jam 17.30 – 18.00 WIB. Program berita yang durasinya hanya 30 menit itu didominasi pidato SBY.

SCTV menyiarkan lebih dulu pidato itu karena tim *SCTV*-lah yang merekam pidato itu di Istana Negara dan hasilnya dibagi-

> Karenanya, sulit untuk tidak menduga bahwa *'teve pool'* pidato SBY adalah gambaran dari patronase politik yang sedang dijalankan bos-bos televisi, baik untuk memuluskan bisnisnya yang lain, atau sekadar mencari perlindungan politik dari kasus hukum yang sedang dihadapinya.

bagikan ke redaksi televisi lain. Ini namanya *TV pool* di mana semua saluran televisi telestrial menyiarkan program yang sama di hari yang sama, dengan materi yang berasal dari satu sumber: kamera *SCTV*.

Saat Tien Soeharto meninggal pada April 1996, misalnya, semua televisi terkena "wajib *relay*". Pusat kontrol siaran saat itu berada di studio *RCTI*, langsung di bawah pengawasan pemegang sahamnya: Peter F Gontha.

TV pool memang memerlukan koordinasi terpusat yang di masa Orde Baru hal itu tidak sulit karena pemiliknya relatif sama: keluarga dan kroni Cendana. Tapi kini tingkat kesulitan politisnya tentu berbeda. Pemilik televisi sudah lebih beragam dan memiliki afiliasi politik masing-masing. Sehingga dibutuhkan "gerilya politik" kepada para pengambil kebijakan di redaksi agar menyediakan durasi yang mahal itu, untuk memutar 20 menit pidato SBY.

Lantas apa yang salah dengan siaran serentak pidato presiden?

Ini adalah masalah kaidah-kaidah jurnalistik yang ditabrak beramai-ramai oleh para pengelola stasiun televisi. Dalam konteks kisruh hasil DPT atau tudingan kecurangan pemilu, pemerintah (dalam hal ini presiden) hanyalah salah satu pihak saja dari sekian banyak pihak seperti KPU, Bawaslu, parpol peserta pemilu, LSM pemantau pemilu, dan (terutama) para pemilih.

Bila dalam posisinya sebagai presiden saja, SBY secara jurnalistik hanyalah salah satu pihak, konon lagi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Dalam jurnalistik, semua pihak harus dipandang sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi kastanya antara satu dengan yang lain. Opini Prabowo atau Megawati tentang kekacauan DPT, secara substansi memiliki bobot yang sama dengan keluh kesah (maaf)

tukang becak yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar. Juga sama bobotnya dengan pembelaan KPU, kritisisme Bawaslu, atau penjelasan Depdagri dan pemerintah.

Maka, bila SBY diberi durasi 20 menit di sebuah program berita reguler atau program khusus, bagaimana bila para *stake holder* yang lain juga menuntut hal yang sama? Katakanlah elit parpol lain ingin membalas argumen-argumen SBY, apakah stasiun televisi akan melakukan kebijakan yang sama? Memberinya 20 menit? Atau akan memilih-milih yang dianggap penting saja, dan membungkusnya di program berita biasa?

Bagaimana pula bila Ketua KPU yang akan memberikan penjelasan rinci dan panjang lebar seputar kekacauan pemilu? Apakah akan diberi 20 menit? Tidakkah kompentensinya lebih tinggi dibandingkan SBY?

Lagi pula, bila ada stasiun televisi seperti *SCTV* yang memberi 20 dari 30 menit program beritanya untuk satu versi (pidato SBY) saja, berarti dengan sadar telah mengabaikan lusinan berita lain di hari itu, yang mungkin lebih penting bagi publik, seperti flu Singapura, perkembangan ketegangan di Papua, atau gempa di Mentawai. Publik tentu membutuhkan informasi lain selain urusan pemilu dan konflik para elit politik.

Karenanya, sulit untuk tidak menduga bahwa '*teve pool*' pidato SBY adalah gambaran dari patronase politik yang sedang dijalankan bos-bos televisi, baik untuk memuluskan bisnisnya yang lain, atau sekadar mencari perlindungan politik dari kasus hukum yang sedang dihadapinya.

Tekanan atau intervensi dari Istana atau lobi dari konsultan politik, bila ada, tidak akan banyak berpengaruh andai para pemilik media dan para elit redaksi memiliki *dignity* dan independensi.

Hubungan politik dan ruang redaksi televisi sebenarnya bukan

barang baru. Pergantian direksi TVRI selalu diwarnai kericuhan karena terjadi tarik-menarik kepentingan hingga di DPR.

Istana atau mungkin konsultan-konsultan politik di sekitarnya, barangkali bisa berargumen bahwa pidato SBY sebagai presiden penting untuk mendinginkan suasana agar tidak terjadi perpecahan politik yang mengarah pada instabilitas. Dan nilai itu tentu jauh lebih penting dibandingkan "obyektivitas dan imparsialitas dalam jurnalisme".

Tugas jurnalisme bukan mengakomodasi tafsir-tafsir politik sepihak semacam ini dengan menyediakan durasi berapa pun yang diminta oleh negara atau yang merasa mewakilinya. Tugas jurnalisme adalah memastikan apakah semua perspekif sudah terwakili sehingga penilaian salah benar akan ditentukan oleh publik.

Premis bahwa pidato SBY penting untuk mendinginkan suasana dan karenanya semua televisi harus menyiarkan adalah tafsir politik sepihak. Bukankah nyatanya setelah pidato SBY, pihak lawan tak tinggal diam dan berbalas pantun?

Tugas jurnalisme bukan mengakomodasi tafsir-tafsir politik sepihak semacam ini dengan menyediakan durasi berapa pun yang diminta oleh negara atau yang merasa mewakilinya. Tugas jurnalisme adalah memastikan apakah semua perspekif sudah terwakili sehingga penilaian salah benar akan ditentukan oleh publik.

Jurnalisme, misalnya, tidak terikat dengan patriotisme kewilayahan NKRI melebihi nilai-nilai kemanusiaan universal dan fakta-fata lapangan tentang pelanggaran HAM.

Pasal 9 Pedoman Perilaku Penyiaran menyebut, "Lembaga penyiaran harus menyajikan informasi dalam program faktual dengan senantiasa mengindahkan prinsip akurasi, keadilan, dan ketidakberpihakan (imparsialitas)".

Oleh pasal 11 ditandaskan bahwa “Lembaga penyiaran harus menghindari penyajian informasi yang tidak lengkap dan tidak adil”.

Sementara di Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers pasal 1 menyebut, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Ah, kata bekas mahasisku, semua norma itu hanya dibicarakan di kelas. Bukan di dunia nyata. Artikelku tentang teve *pool* pidato SBY ini dimuat di harian sore *Suara Pembaruan* (22 April 2009), meski tanpa permisi.

Iklan Dicekal

"*Eh*, Mas. *Kayaknya* kubu neolib dituding terlibat sensor-menyensor iklan, *tuh*. Iklan Mega-Prabowo *gak* ditayangkan karena takut ribut. Tapi gosipnya ada '*the invisible hand*-nya' Adam Smith yang bermain menjegal. *Hahaha*..." paparnya membuka sesi bergunjing.

"*Teve*-mu termasuk yang *gak* menayangkan?" aku ingin tahu.

"*Ya, iya lah*... Sudah gaharu, cendana pula."

"Kubu neolib itu siapa, sok tahu kamu?"

"*Halah*, kan Mas sendiri yang ceramah di kelas bahwa di era 1980-an, semua undang-undang liberal terhadap investasi asing, kecuali undang-undang kepemilikan perusahaan media."

"*Lo*, apa hubungannya?"

"Ya ada *dong*. Kalau mazhab ekonominya liberal dan serba komersial, tetapi menjegal iklan komersial, berarti dia tidak konsisten pada mazhabnya sendiri. Dan selalu begitu *kan* wajah neoliberalisme? Pers dipermainkan untuk memastikan bahwa ideologi itu berkembang tanpa kritisisme."

"*Busyet! Hahaha*... *Slow* anak muda. Lalu kubu neoliberal yang kamu maksud itu siapa? Dan apa benar mereka yang menjegal? Bukankah itu otoritas pengelola media televisi? Mereka otonom. Independen," kataku sembari melonggarkan tekanan di kalimat terakhir, karena memang kurang yakin.

Saat itu, sekitar bulan Juni 2009, atau tiga minggu menjelang pemilu presiden, di media memang sedang ramai. Katanya, empat dari tujuh seri iklan politik pasangan Megawati-Prabowo, ditolak sejumlah televisi. Keempat iklan itu masing-masing

berjudul "Bangkrut", "Mencintai", "Harga", dan "Pekerjaan".

Alasannya, iklan-iklan tersebut dianggap menyerang kandidat lain dan berpotensi menimbulkan konflik. Isi iklannya konon menyebut-nyebut pemerintahan *incumbent* bangkrut karena tercekik utang luar negeri yang besar. Lalu ada juga iklan yang memakai data statistik untuk menunjukkan kegagalan kinerja ekonomi lawan politik Mega-Pro. Juga ada yang berisi kasus korupsi yang mengarah pada partai tertentu.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Hasto Kristianto, menyatakan ada kejanggalan atas penolakan tersebut. "Ada yang mengakui bahwa ada telepon kepada media elektronik tersebut sehingga iklan kami yang sudah lulus sensor ditolak. Padahal sudah diorder, dan tinggal pembayaran," katanya suatu ketika kepada media.

Tapi intervensi ini dibantah baik oleh masing-masing stasiun televisi maupun oleh kubu *incumbent*. Ketua Tim Nasional Kampanye SBY-Boediono, Hatta Rajasa menyatakan pihaknya tak mungkin mengintervensi stasiun-stasiun televisi.

"*Masak* pada zaman seperti ini ada stasiun televisi yang mau diintervensi," kata Hatta dalam jumpa pers khusus. "Silakan tanya ke stasiun televisi," tantangnya.

Dan benar saja, semua pengelola televisi menyanyikan *koor* yang sama: menyatakan tak ada tekanan atau intervensi.

"Sebenarnya *TV One nggak* ada masalah materi iklan baik dari tim sukses SBY, JK dan Mega. Kebetulan untuk materi iklan Mega, itu agak beda, lebih berani," ujar Corporate Communication *TV One* Dino Giovani di *detikcom*, Kamis (18/6/2009).

"Jadi waktu itu karena kami dapat dua materi iklan yang rohnya sama, maka kami tidak memilih yang 'Bangkrut' karena

kami melihat ada potensi-potensi provokasi, potensi rame. Kami memilih alternatif iklan yang satunya lagi," sambung Budi Dharmawan, jurubicara *SCTV*.

"Yang ditolak hanya iklan terbaru versi 'Harga'. Kalau iklan versi lainnya tetap tayang seperti biasa," kata Marketing Public Relations Department Head *Trans TV*, Hadiansyah Lubis.

"*Nah*, jadi kubu neolib mana yang kamu maksud menekan-nekan itu? Lagi pula masa neolib *gak* konsisten? Iklan *kan* tinggal dibalas dengan iklan. Itu semua mekanisme pasar. Biar pasar nanti yang menentukan, iklan siapa yang layak dipercaya," tanyaku lagi. Masih kurang yakin dengan kalimat sendiri. Tapi diskusi harus berjalan. Forum gosip atau *ngerumpi* kurang seru, kalau tak ada tukang pancingnya.

"Mas ini mengorek aku atau karena sudah tumpul sebagai wartawan dimakan usia. *Hahaha*... Bercanda, Mas. Wajah neolib bukannya kata Mas sendiri memang serba ambigu. Paradoks. Anti-peran pemerintah tapi ketika bangkrut teriak-teriak minta tolong negara, seperti *bail out*. Lalu di masa Pinochet, gaya-gaya otoriter dipakai untuk melempangkan agenda-agenda mereka. Soeharto juga. Mas *kan* yang ceramah di kelas soal ini semua?"

Aku pasang muka mendengarkan. Tanganku meraih gelas kopi. Dia pun melanjutkan.

"Makanya aku *mesem* saja sewaktu nonton iklan kampanye SBY yang bicara soal prestasinya menurunkan harga BBM tiga kali selama pemerintahannya. Iklannya mengambil lokasi di SPBU. Ironis banget! Kalau mau *naikin* BBM, orang lain disuruh pasang iklan. Rizal Mallarangeng dan 36 tokoh termasuk panutan kita, Goenawan Mohamad, pasang badan. *Eh*, giliran *nurunin*, dia yang tampil sendirian."

Aku tersedak mendengar dia menetak. Gelas kopi kuletakkan di tatakannya. Dia menyebut-nyebut nama Goenawan Mohamad. Di dunia wartawan, nama itu seperti nabi. Seperti dewa. Butuh

kesaktian untuk bisa mengkritiknya. Ini ada anak kemarin sore sudah berani membobol kesakralan nama besar di dunia persilatan.

Untung dia bilang "panutan kita". Coba kalau dia bilang "panutan Anda".

"Cuma," aku menyela dan mengalihkan topik, "media publik seperti televisi harus menjaga adat ketimuran juga. Tak boleh ikut-ikutan memfasilitas kampanye negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai kita."

"*Hahaha*... Sejak kapan televisi terikat dengan nilai-nilai seperti itu. *Rating-rating-rating*. Ingat itu, Mas. Kalau mereka konsisten, mestinya tayangan-tayangannya *nggak* seperti sekarang ini. Sejak kapan neoliberal yang menganggap nilai-nilai sosial non-komersial adalah distorsi ekonomi, tiba-tiba menggunakan argumen perlindungan publik seperti itu?"

"*Hush!* Hati-hati kamu kalau menuduh stasiun televisi neoliberal. Nanti kamu di-Prita-kan...."

"*Ah*, masa media yang gencar membela Prita justru akan mem-Prita-kan orang?"

Aku senang, dia tak lagi mengungkit-ungkit Mas Goen.

"*Lo*, kamu yang harus konsisten. Isu Prita itu komoditas. Seperti Manohara. Bukan advokasi. Buktinya David, mahasiswa Indonesia yang mati di Singapura, beritanya cepat hilang begitu saja. Jadi mereka tidak terikat dengan konsistensi nilai. Kalau kamu dianggap mencemarkan nama baik televisi, ya kamu akan digugat seperti seorang pengamat ekonomi. Bahkan dilaporkan ke polisi."

"*Hah*?! *Emang* pernah, Mas?"

Mudah sekali mengacaukan fokus diskusi dengan wartawan kemarin sore ini. “Pernah. Zaman kamu masih di kampus.”

“Teve mana dan siapa yang diadukan ke polisi, Mas?”

“Revrisond Baswir. Diadukan *SCTV* ke Polda Yogya. Kejadiannya tahun 2005. Saat musim kenaikan harga BBM juga.”

“Kasusnya *gimana*, Mas?”

“*Ah*, sudah. Nanti saja. *Lanjutin* dulu soal pencekalan iklan-iklan itu. Ada info dari dalam, *tidak*?”

“*Ah*, aku masih *kroco*, Mas. Tapi aku *nggak* percaya, kalau *nggak* ada hubungan antara afiliasi politik para pemilik televisi dengan patronase politik di tingkat elit. Dan semua tulisan-tulisan Mas yang aku baca, juga mengafirmasi itu. Jadi *Mas gak* usah pura-pura lugu di depan aku. Lagi pula apa Mas *nggak* belajar dari kasus iklan cabut subsidi di *Kompas* tahun 2005 lalu?”

Aduh, dia kembali membawa diskusi soal iklan Mas Goen.

“*Ya-ya*. Aku bicara sendiri dengan salah seorang dari 36 tokoh itu. Katanya namanya dicatut begitu saja,” jawabku akhirnya.

“*Nah*, kan. Jadi memang sudah modus, Mas. Cara mainnya *ya* begitu itu. *Ah*, Mas pasti bilang ini letupan-letupan *khas* wartawan muda yang serba menggebu-nggebu. Ini sindrom pecinta teori konspirasi. Macam Mas sendiri sudah tua dan tak suka isu konspirasi *aja*. *Hehehe*...”

Aku *nyengir*. Senang juga disebut masih muda, tapi sekaligus khawatir. Masih muda tapi sudah diledek tumpul, lebih memalukan daripada *dikata-katain* tumpul saat usia memang sudah sepuh. Walaupun tumpul dan tajam tak ada sangkut pautnya dengan usia. Banyak wartawan tua jauh lebih trengginas dibandingkan yang muda-muda. Begitu juga

> "Makanya aku *mesem* saja sewaktu nonton iklan kampanye SBY yang bicara soal prestasinya menurunkan harga BBM tiga kali selama pemerintahannya. Iklannya mengambil lokasi di SPBU. Ironis banget! Kalau mau *naikin* BBM, orang lain disuruh pasang iklan. Rizal Mallarangeng dan 36 tokoh termasuk panutan kita, Goenawan Mohamad, pasang badan. Eh, giliran *nurunin*, dia yang tampil sendirian."

sebaliknya, banyak wartawan muda tapi sudah kena penyakit amplop. Walaupun kadang, "amplop" untuk yang tua dengan yang muda, isi dan jenisnya bisa beda.

Iklan mendukung pencabutan subsidi (baca: kenaikan harga BBM) itu memang menimbulkan kontroversi. Iklan itu dimuat di *Kompas*, Februari 2005, yang isinya 36 tokoh mendukung argumentasi mengapa bensin harus dinaikkan dari Rp 1.800 ke Rp 2.400 per liter.

Aku *copy-paste* saja dari paragraf di bab pertama buku ini. Bukannya aku yang malas menulis ulang. Tapi Anda juga harus jujur, bahwa Anda juga menikmatinya, daripada membuka-buka ulang halaman awal:

Sejumlah ekonom, wartawan, atau bekas penyiar televisi, ramai-ramai mendukung kenaikan BBM di bawah judul iklan: "Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi". Karena aku wartawan, yang kuperhatikan adalah nama-nama wartawan seperti: Goenawan Mohamad atau Fikri Jufri. Keduanya adalah bos *Tempo* yang legendaris.

Ada juga bekas orang-orang media atau yang bergiat di seputar media seperti Ichsan Loulembah (mantan Radio *Trijaya* yang menjadi anggota DPD), Bimo Nugroho (aktivis Institut Studi Arus Informasi/ISAI yang menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia/KPI, dua periode), Agus Sudibyo (pemerhati media),

atau Dana Iswara (mantan penyiar *RCTI*, istri ekonom Chatib Basri yang namanya juga tercantum dalam iklan itu).

Nama-nama lain seperti Dino Patti Djalal, Andi Mallarengeng (keduanya jurubicara presiden) atau Todung Mulya Lubis dan Celli sendiri, tidak terlalu aku perhatikan. Barangkali karena mahfum belaka.

Tapi, beberapa hari setelah iklan, Bimo Nugroho yang sekarang menjadi anggota KPI, menulis surat pembaca di *Kompas*. Harinya Sabtu, 5 Maret 2005, atau empat hari setelah harga BBM baru diumumkan pemerintahan SBY-JK.

Bimo menulis:

Saya juga tidak terlibat diskusi tentang BBM di Freedom Institute. Secara substantif, saya setuju subsidi BBM dicabut. Yang namanya subsidi hanya layak dan punya legitimasi saat diberikan kepada orang yang kekurangan, miskin, dan marjinal. "Subsidi" BBM lebih tepat dibaca sebagai sogokan ekonomi, ia bagai selimut kesadaran palsu yang meninabobokan masyarakat Indonesia.

Atas dasar saling percaya saya menyatakan persetujuan secara lisan kepada Nong Darol Mahmada, sahabat saya di Komunitas Utan Kayu. Khusus kepada rekan-rekan di Freedom Institute, saya tidak akan meminta nama saya dicabut (saya sudah bilang oke dan sejarah sudah tercetak), hanya evaluasi saya-sebagaimana saya sampaikan secara lisan kepada Nong sebelum iklan dimuat- saya perlu diberitahu dan melihat lebih dulu materi iklan itu seperti apa dan isinya apa.

Karena, belum tentu kesimpulan yang sama berangkat dari paradigma berpikir dan argumen yang sama, sebaliknya belum tentu paradigma berpikir yang sama akan menghasilkan kesimpulan yang sama.

Bila Bimo keberatan dengan pemuatan iklan tanpa konfirmasi dirinya (tapi sepakat dengan kebijakan mencabut subsidi BBM), lain lagi kawanku Agus Sudibyo, yang namanya juga dicatut dalam iklan politik traktiran Rizal 'Celli' Mallarangeng itu.

Menurut Agus, dia tidak ikut mengonsep, dan tidak ikut menandatangani dukungan pencabutan subsidi. Dia tahu akan ada iklan itu tetapi sama sekali tidak membayangkan format, isi, dan bahkan namanya ada di situ.

"Aku tidak ikut mendukung dalam iklan, karena aku merasa tidak punya kompetensi untuk memberikan pendapat," katanya kepadaku melalui telepon suatu ketika.

"Lalu bagaimana pandangan *sampean* sendiri tentang kebijakan subsidi?"

"Pencabutan subsidi itu tidak cukup. Pencabutan subsidi ternyata tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan utama yang membuat pencabutan itu benar-benar efektif. Pencabutan subsidi tidak dibarengi dengan pembenahan manajemen di Pertamina. Tidak dibarengi dengan transparansi pengelolaan sektor-sektor ekstraktif. *Nah*, karena faktor-faktor lain tidak mendukung, maka pencabutan subsidi bukan solusi yang baik," papar Agus kepadaku.

Aku memang lebih tertarik mendiskusikan substansi kebijakan pro dan anti-subsidi-nya daripada iklannya. Soal iklan, semua orang juga tahu: *it's all about the money*. Sepanjang punya uang, dia bisa pasang iklan. Prabowo dengan kekayaan (yang diumumkan) Rp 1,7 triliun, bisa membombardir opini orang melalui iklan televisi. Begitu juga dengan Wiranto.

Apakah televisi terikat dengan urusan menenggang perasaan keluarga orang-orang hilang atau korban penculikan yang masih menganggap Prabowo bertanggung jawab dalam peristiwa antara tahun 1997 hingga menjelang reformasi, Mei 1998 itu?

Atau perasaan korban di Timor Leste, Darurat Militer di Aceh, atau Trisakti dan Semanggi, yang menganggap Wiranto berada dalam struktur komando ketika semua itu terjadi?

Tentu saja tidak.

It's all about the money. Jadi mestinya saat ada tudingan cekal mencekal iklan, biro iklan kubu Prabowo tak usah cengeng. Mungkin belanja iklan kubu lain saat itu jauh lebih besar daripada *placement* iklan Mega-Pro. Jadi ini semua urusan "mekanisme pasar" belaka. Media tunduk pada logika itu. Tidak yang lain.

Jadi tak perlu melankolis dengan menuding ada intervensi. Seperti kata Hatta Rajasa, ini bukan zamannya Orde Baru. Bukan zamannya (bekas) mertua Prabowo. Ini sudah reformasi. Tak ada intervensi. Titik. Semua pengelola televisi juga sudah membantah. Kompak.

"*Wah*, jadi saat kenaikan BBM Maret 2005 itu, ada dua peristiwa ya, Mas. Satu iklan *Kompas*, kedua kasusnya Revrisond Baswir atau Soni dengan *SCTV*. Sekarang ceritakan yang kedua, Mas"

"Daripada aku cerita panjang lebar, mending kamu buka laptop, *connect* internet, lalu masuk ke *google*, dan ketik: Revrisond Baswir *SCTV*. Jangan ketik Soni. Itu nama panggilan dia."

Dan berbagai kliping digital bermunculan. Kami pun sama-sama membaca artikel yang dimuat *detik.com*, 23 Maret 2005 ini:

Masih ingat perseteruan pengamat ekonomi UGM Revrisond Baswir dengan presenter kondang SCTV Bayu Sutiono?

Keributan bermula dari tudingan Revrisond yang tersebar di berbagai mailing list (milis) yang berbuntut laporan polisi. Keributan berawal dari talk show SCTV "Topik Minggu Ini" edisi 2 Maret 2005 yang dipandu oleh Bayu. Acara yang bertema seputar kenaikan harga

BBM menghadirkan pengamat ekonomi Revrisond Baswir sebagai pembicara dan Kepala Bappenas Sri Mulyani.

Dalam milisnya, Soni, panggilan akrab ekonom itu merasa tidak mendapat porsi yang cukup sebagai pembicara. Soni pun menuding acara itu merupakan acara pesanan (blocking time) dan SCTV menerima pembayaran Rp 350 juta.

Tak terima dengan aneka tuduhan itu, Bayu dkk pun melaporkan Soni ke Mapolda DIY. "Aku sama sekali tidak bermaksud melontarkan tuduhan apa pun. Apalagi untuk mendeskreditkan PT SCTV. Oleh karenanya adanya ungkapan/kalimat/berita yang dapat mendiskreditkan PT SCTV aku koreksi dan dianggap tidak ada. Pada kesempatan ini aku secara terbuka menyatakan permintaan maaf aku kepada SCTV," kata Soni kepada wartawan dalam konferensi pers di Rumah Makan Duta Minang, Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta, Senin, (23/5/2005).

Turut hadir dalam konferensi pers kuasa hukum SCTV Iskandar Sonhaji. Dalam konferensi pers, Soni hanya membacakan surat pernyataan yang ditandatangani olehnya dan 2 kuasa hukum SCTV, Bambang Widjojanto dan Iskandar Sonhaji. Soni sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengajukan pertanyaan.

Setelah menyampaikan surat di atas, Soni dan Iskandar meluncur ke Mapolda DIY, Jalan Lingkar Utara, Condong Catur, Yogyakarta. Mereka akan bertemu dengan Kapolda DIY Brigjen Bambang Arif Sampurna Jati untuk mencabut laporan polisi itu. Keduanya akan bertemu sambil membawa surat pencabutan laporan yang ditujukan kepada Kapolda DIY berisi pemberitahuan untuk pencabutan laporan atas nama Bayu Sutiono sebagai pelapor.

"*Wah*, jadi ada juga wartawan yang melaporkan orang ke polisi ya, Mas? Bukankah wartawan mengkampanyekan anti-

kriminalisasi pers. *Lha*, ini malah wartawan mengkriminalkan narasumbernya sendiri."

"Aku sudah *ingetin* kawan-kawan itu. Tapi *gak* mau dengar. Kalau terpaksa harus lapor, biarkan saja urusan divisi legal di perusahaan, *gak* perlu jurnalisnya sendiri yang datang ke Polda. Tapi bukan itu isunya. Melainkan, jangankan masyarakat awam, narasumber pun juga punya kecurigaan bahwa media bermain mata dengan kekuasaan. Dan *kok* ya kebetulan, kekuasaannya berkaitan dengan kebijakan subsidi, kenaikan BBM."

"*Wah*, menarik ini, Mas. Jadi apa menurut Mas, media juga ikut digarap kubu neolib?"

"Kamu ini kayaknya perlu kuliah lagi. Ambil mata kuliah *fil-il*: Filsafat Ilmu, dan Metodologi Ilmu Sosial. Kesimpulanmu melompat-lompat. Logikamu *nggak* berurutan. Kalau kamu *gak* ambil kuliah *fil-il*, cewek-cewek bisa *il-fil* sama kamu. *Kok* tiba-tiba ada premis kubu neolib menggarap media massa. Silogismenya itu *gimana*?"

"*Lha*, kejadian iklan *Kompas* dan *SCTV* tadi. Ada Celli, ada Soni, dan ada Mbak Ani. Peta-petanya *kan* jelas, Mas. Ayolah, Mas. Hentikan sandiwara *acting* lugu ini."

"Tapi *kan* dalam kasus SCTV tudingan Soni tidak terbukti, dan dia minta maaf? Dan *Kompas*, sebagai media, dia hanya menerima iklan. Orang kalau memasang iklan, ya harus diterima. Iklan kan tidak mencerminkan sikap editorial medianya. Iklan adalah iklan. Ingat *dong*, kuliahku tentang *firewall* atau pagar api di ruang redaksi. Bagian iklan terpisah kepentingannya dari bagian pemberitaan."

"Lalu dengan premis-premis itu, bagaimana Mas menjelaskan fenomena penolakan iklan Mega-Pro yang dianggap menyerang SBY itu? Bukankah iklan adalah iklan, dan tidak mencerminkan sikap editorial medianya? Apalagi iklan itu sudah lulus lembaga

sensor. Biar mereka *dong* yang bertanggung jawab kalau memang isinya dianggap *black-campaign*. Lagi pula ada Bawaslu. Mereka yang punya otoritas untuk itu. Urusan apa televisi tiba-tiba jadi sensitif begitu? Sejak kapan mereka *nolak* duit?"

Aku agak lama menata argumen. Tapi bekas mahasiswaku itu terus merangsek.

"Sekarang Mas harus letakkan ini semua dalam konteks besar. Gambar besar. Mas sendiri yang pernah tulis. Ada kejadian pergantian pemimpin redaksi *RCTI* tahun 2003. Pimred yang lama diganti dengan Derek Manangka. Wakil pimred *RCTI* ketika itu, Ivan Haris protes dan mengancam keluar bila Derek Manangka masuk. Menurut Ivan, ini agenda PDI Perjuangan menjelang Pemilu 2004. Tapi pemilik *RCTI* Harry Tanoesoedibjo bergeming. Derek tetap diangkat jadi pemimpin redaksi, dan Ivan benar-benar membuktikan ancamannya. Dia keluar. Pindah ke *SCTV*, dan ketemu Mas di sana, kan?"

"Tapi layar *RCTI* tidak lantas menjadi PDIP menurutku."

"Nanti dulu. Lalu Mas sendiri juga menulis artikel waktu Rosianna Silalahi diganti, dan posisinya langsung dipegang pemilik *SCTV*, Fofo Sariaatmadja. Waktu itu *SCTV* ribut karena ada anggota KPI aktif, Don Bosco Salamun, yang periode jabatannya masih setahun lagi, tiba-tiba sudah balik ke industri. Padahal waktu dipilih DPR, orang-orang ini berkomitmen untuk menjadi *watchdog* bagi industri. *Eeeeh*, sekarang malah balik ke industri dan meninggalkan begitu saja komitmennya pada publik. Mas memang tidak menyimpulkan bahwa pergantian ini terkait Pemilu 2009, tapi..."

"Ya, *nggak* boleh ada 'tapi'," aku memotong, "kalau tak bisa disimpulkan begitu, ya berarti tidak begitu. Lagi pula soal patronase politik, kubu yang lain di *SCTV* juga dituding membangun patronase dengan elit politik yang lain lagi."

"Memang itu semua *black box*, Mas. Mana ada orang mengaku terang-terangan menciptakan patronase politik. Barangkali alasannya memang bisnis semata. Mekanisme pasar belaka. Tak ada pertimbangan politis. Mas perhatikan koran *Rakyat Merdeka* sekarang?"

"Yang tidak segalak dulu zaman Habibie atau Mega?"

"Betul. Waktu aku masih kuliah, *Rakyat Merdeka* pernah digugat pencemaran nama baik karena *headline*: '*Mulut Mega Bau Solar'*. Ingat, Mas?"

"Tentu. Juga ada judul '*Mega Sekelas Bupati.*"

"*Nah*, sekarang? Padahal SBY tiga kali menaikkan BBM. Bahkan yang terbesar dari Rp 2.400 ke Rp 4.500 per liter untuk bensin. *Kok* sepi-sepi *aja tuh* koran?"

"Ya mungkin karena itu. Belajar dari pengalaman bahwa..."

"*Alaaa*... sudahlah, Mas. Macam *gak* tahu saja. Zaman Habibie jadi presiden, koran itu kan koran oposisi. Terlihat *banget* di pasar *vis a vis* dengan *Republika*. Tapi ketika Mega yang jadi presiden, *galak* juga dia. Tadinya aku kira SBY juga bakal dikritisi, tapi lihat saja sekarang."

"Hati-hati kamu, nanti bisa di-Prita-kan. Itu korporasi besar. *Jawa Pos Group* punya."

"Ini suara konsumen media, Mas. Boleh *dong* kita *ngomongin delivery* sebuah produk jasa seperti koran, majalah, atau televisi. Apalagi televisi. *Public domain*. Mengkritisi isi televisi itu sama sahnya dengan kita mengkritisi pejabat publik. Karena mereka pakai frekuensi publik. Mas sendiri sering banget *ngomongin* soal televisi. Apa *nggak* takut di-Prita-kan juga? *Eh*, kalau televisi bukan di-Prita-kan, tapi di-Soni-kan. *Hahaha*..."

"Kamu itu dengan *Rakyat Merdeka* galak. Bagaimana dengan koran *Jurnal Nasional*?"

"*Oh*, kalau itu *sih so* pasti biru, Mas. Pewawancara SBY-nya saja caleg dari Partai Demokrat."

"Tapi pertanyaan-pertanyaannya tetap independen."

"*Ooo*, mungkin karena dianggap independen itu, Mas. *Kompas* bersedia ikut mendistribusikannya. *Hehehe*..."

"Iya, aku *inget banget tuh*. Bangun tidur pagi-pagi ambil *Kompas*, tiba-tiba ada suplemen wawancara panjang lebar dengan SBY. Suplemen dari koran *Jurnal Nasional*. Itu di-*charge*-nya tarif iklan, advertorial, atau apa ya?"

"Mestinya kita komplain, Mas. Masa langganan *Kompas* dapat *Jurnas*."

"Tapi *kan* isi wawancara penting juga kita baca. Ada nilai beritanya, kata orang. Barangkali ada kebijakan-kebijakan SBY yang penting untuk didiskusikan. Misalnya tentang kebijakan-kebijakan ekonomi, yang selama ini *gak* dia sampaikan, dan hanya disampaikan pada koran yang dia percaya."

"Yang 'dia percaya' atau 'dia miliki', Mas?"

"Dia percaya."

***

Outsourcing bin Calo Buruh

Wartawan muda itu *nyengir* kuda. Sejurus kemudian dia menyorongkan layar laptop-nya ke arahku.

"Apa ini?"

"Artikel Mas, yang pernah Mas tulis waktu masih kerja di televisi dulu."

Artikel itu sebenarnya sebuah surat protes terbuka atas kebijakan manajemen melakukan *outsourcing* terhadap para sopir dan kurir (*messenger*). Sopir yang sudah berstatus karyawan tetap selama belasan tahun, harus menerima kenyataan pahit kembali lagi menjadi pekerja kontrak di sebuah perusahaan penyedia jasa transportasi, untuk melayani kebutuhan stasiun televisi, tempat di mana selama ini mereka mengabdi. Beberapa kurir yang juga sudah bekerja setua stasiun televisi itu, juga di-*outsourcing*.

Outsourcing adalah status bagi buruh atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan tertentu, tapi dia bekerja dan ditempatkan di perusahaan lain yang menyewa jasa perusahaan tersebut.

Banyak perusahaan yang meng-*outsourcing*-kan beberapa pekerjaan tertentu seperti petugas kebersihan (*cleaning service*), petugas keamanan (*security*), atau penerima tamu (resepsionis). Termasuk sopir dan kurir. Juga pelayan kantor atau *office boy* (OB).

Dalam *management*, sebenarnya ini bagian dari *transfer of risk*. Memindahkan risiko atas ekses-ekses bisnis mempekerjakan karyawan, kepada pihak lain. Sehingga perusahaan menjadi institusi bisnis yang lebih ramping, dan hanya terdiri dari para karyawan yang benar-benar dianggap sebagai tim inti. Sopir,

petugas kebersihan, satpam, atau OB, jelas bukan tim inti. Posisi mereka mudah dicari penggantinya.

Sementara bagi perusahaan *outsourcing* sendiri, ini adalah peluang bisnis baru. Mereka adalah perusahaan yang memegang kontrak atas pekerjaan tertentu di sebuah perusahaan. Karena dia penyedia jasa, maka dia pasti menerima imbalan atau *fee*.

Di kepalaku hanya ada satu kata: calo! Ini mata rantai yang sebenarnya tidak perlu. Bila *fee* untuk perusahaan itu langsung dibayarkan saja kepada para karyawan yang dipekerjakan, mungkin mereka akan memiliki pendapatan yang lebih baik.

Outsourcing membuat karyawan kehilangan jenjang karir, tak bisa berserikat, tak punya nilai tawar, dan selalu berstatus kontrak. Tak punya jaminan sosial yang memadai seperti tunjangan kesehatan dan dana pensiun, yang lazim dimiliki oleh karyawan tetap.

Jadi bila aku nonton komedi situasi semacam OB (*office boy*), sesungguhnya tak ada yang perlu ditertawakan, selain menertawakan diri sendiri yang sempat-sempatnya tertawa atas fenomena *outsourcing*, demi sebuah hiburan untuk mendapatkan iklan.

"Gila! Masih *nyimpen aja*. *What's the point*?" tanyaku menyelidik, tentang surat protes terbuka mengenai *outsourcing* itu.

"Praktik neoliberalisme ada di halaman rumah kita sendiri. Di dalam bisnis media. *You know better than me*. Jadi *gak* usah jauh-jauh."

"Jangan sok tahu. Coba kaitkan antara kebijakan *outsourcing* dan neoliberalisme."

"Neoliberal menolak intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi, termasuk penentuan upah minimal. Inggris di

masa Margaret Tatcher dan Chile di bawah Augusto Pinche, melakukan itu. Mereka banyak mengadopsi resep-resep neoliberalisme."

"*Oke*. Lalu?"

"Menurut neoliberalisme, ketentuan upah minimum (UMR) itu adalah distorsi dalam ekonomi, karena mestinya upah ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja, dan bukan oleh SK Gubernur atau Menteri Tenaga Kerja. Itu falsafah dasarnya."

"Terus, kaitannya dengan *outsourcing*?"

"Begitu juga dengan *outsourcing*. Karena segala kebijakan perburuan harus didasarkan pada hitungan rasional bisnis, maka pengusaha berhak memodifikasi hubungan-hubungan kerja berdasarkan desain bisnis. Kalau organisasi perusahaannya terlalu banyak karyawan tetap, mungkin dianggap tidak efisien. Karena itu perlu di-*outsourcing*. Tentu saja itu artinya menyulap karyawan yang sudah berstatus karyawan tetap menjadi karyawan *outsourcing*."

"*Ngawur*!"

"*Kok, ngawur*?"

"Premis-premismu benar, tapi itu tidak menjelaskan relasi antara agenda neoliberal dan kebijakan perburuhan bernama *outsourcing*."

"Mas yang senior dan dosen. *Show me*."

"*Ah*, aku kan dosen jurnalistik. Bukan dosen ekonomi. Kebijakan *outsourcing* di Indonesia tak berkaitan langsung dengan internal perusahaan atau pabrik. Mereka hanya ketiban untung dengan

kebijakan ini. Yang mendesain adalah negara. Pemerintah ingin agar investasi berkembang cepat, tanpa hambatan."

"*Oke*, lalu?"

"*Hahaha*... *kok* kita jadi gantian gini. Lalu Indonesia, bagaimanapun juga, punya daya tarik untuk relokasi industri dari negara-negara maju. Dulu, upah buruh murah jadi andalan Orde Baru. Tentara dikerahkan untuk menjaga agar pabrik tidak bergolak, seperti yang dialami buruh Marsinah tahun 1993. Perwira seperti Wiranto, SBY, atau Prabowo menjadi bagian dari politik perburuhan di masa itu."

"Iya, aku ingat. Almarhumah kerja di pabrik arloji PT CPS Porong di Sidoarjo yang pabriknya sekarang terendam lumpur Lapindo. *Sak* kantor-kantor koramilnya. *Hehehe*... Kualat mereka. *Sori*, lanjutkan!"

"*Nah*, setelah reformasi, ada kebebasan berserikat. Organisasi buruh di mana-mana dan menguat. Jangankan swasta, karyawan BUMN pun sudah kuat serikat pekerjanya. Karena itu, ketentuan perburuhan seperti UMR tak mungkin diotak-atik lagi. Serikat buruh akan bergerak dan politik bisa bergolak. Apalagi para elit butuh dukungan mereka juga untuk menggalang suara."

"Terus, terus?"

"*Nah*, karena itu, salah satu cara agar Indonesia tetap menarik bagi investor adalah dengan membuat aturan yang memungkinkan pengusaha bisa melakukan *outsourcing*. Itu juga penjabaran dari Konsensus Washington dan ajaran neoliberalisme bahwa investasi asing harus dirangsang tumbuh tanpa hambatan-hambatan."

"*I get the point*."

"Nah, kalau ketentuan perburuhan di Indonesia dianggap memberatkan, maka tak ada investor, terutama asing, yang mau membuka usaha di sini. Padahal, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara yang penduduknya juga banyak dan tenaga buruhnya lebih murah seperti China, India, Bangladesh, atau Vietnam."

"*I see*..."

"Karena itulah, ada pasal *outsourcing* di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua bermuara pada iklim usaha dan iklim investasi yang lebih baik bagi para pengusaha. Begitu doktrinnya. *Nah*, pengusaha-pengusaha media itu termasuk ketiban berkah. Buruhnya di-*outsourcing*, lalu bikin tayangan seperti OB. Yang satu hemat duit, yang lain mendatangkan duit."

"*Hahaha*... sinis banget. *Oo*... pantes Prabowo bikin kontrak politik berjanji mau menghapus *outsourcing* kalau terpilih jadi presiden."

"*Ah*, zaman Orde Baru, yang jaga pabrik dan *gebukin* buruh emang siapa? Seniman *cum* aktivis perburuhan seperti Widji Tukul yang banyak nulis puisi soal kehidupan buruh dan petani, sampai sekarang hilang. Masa orang pada *gak* ingat dengan yang namanya Tim Mawar. Tersihir iklan semuanya..."

"*Cieee*... mulai keluar angkatan 98-nya. Jangan galak-galak, Mas. Ingat angkatan 66, 74, 78. Mereka banyak yang jadi elit dan

Outsourcing membuat karyawan kehilangan jenjang karir, tak bisa berserikat, tak punya nilai tawar, dan selalu berstatus kontrak. Tak punya jaminan sosial yang memadai seperti tunjangan kesehatan dan dana pensiun, yang lazim dimiliki oleh karyawan tetap.

penindas baru."

"*Amit-amit*. Lagi pula yang *enggak-enggak aja*. *Wong* UU itu disahkan tahun 2003 melalui DPR. Jelas-jelas ada partainya JK dan Mega yang dominan di sana. Lolos juga *tuh* barang. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan juga. Semua produk hukum yang katanya pro-neolib, seperti UU Migas, Penanaman Modal Asing, atau Sumber Daya Air, adalah produk legislatif di periode di mana Golkar, PDIP, dan belakangan Demokrat, duduk di parlemen. *Kongkow* bersama. Berdendang *tralala*..."

"*Hahaha*... neolib teriak neolib ya, Mas?"

"Bener. Seperti penyihir teriak penyihir. *Hihihi*..."

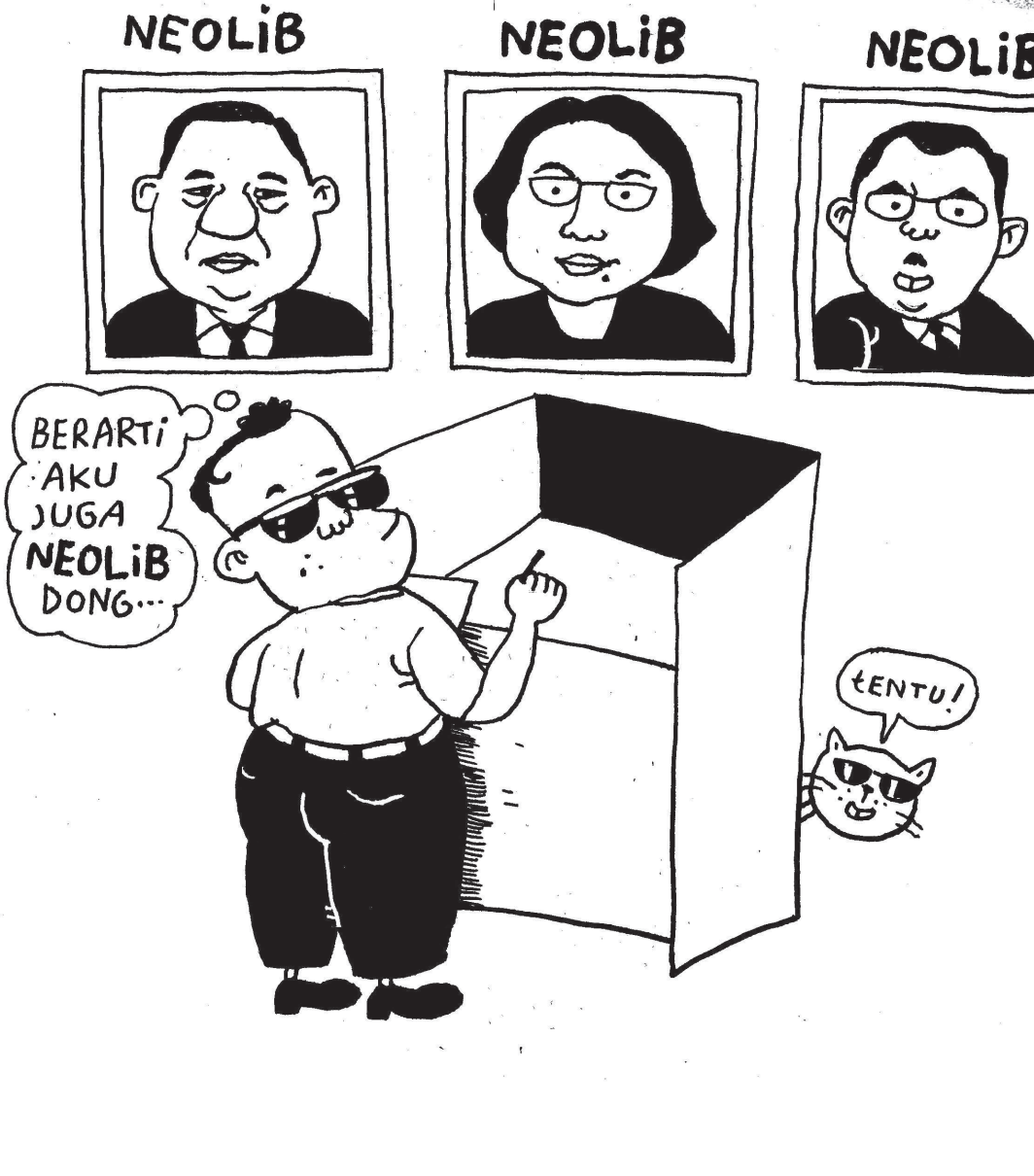
NEOLIB
NEOLIB
NEOLIB
BERARTI AKU JUGA NEOLIB DONG...
TENTU!

EPILOG

Aku Wartawan, Karena itu Neolib

Sudah jam tujuh malam. Kafe imajiner itu makin ramai dengan orang-orang yang baru pulang kerja, tapi mengulur waktu menghindari kemacetan. Bekas mahasiswa saya adalah tokoh fiksi. Saya tak mau memberinya nama karena khawatir ada wartawan betulan yang namanya sama.

"Sekarang bagaimana pandangan Mas tentang *Tempo*?" tanyanya tiba-tiba.

"*Tempo*? Kenapa?"

"Soal kebijakan ekonomi SBY?"

"Kritis, *ah*!"

"Kalau mendukung Boediono?"

“Yang mendukung Boediono itu Goenawan Mohamad. Bukan *Tempo*. Mas Goen menulis artikel tentang Boediono dari Landraad, waktu melepas Boediono deklarasi ke Sabuga, Bandung. Orang *kan* sah-sah saja punya pilihan politik. Termasuk saat Mas Goen mendukung pencabutan subsidi lewat iklan di *Kompas* atas traktiran dari Freedom Institute itu.”

“Traktiran, Mas? Bukankah wartawan *gak* boleh menerima apa pun dari pihak lain, yang akan mempengaruhi independensinya?”

“Traktiran itu kan kosa kata untuk menunjukkan bahwa iklan itu dibayari pihak lain. Bukan oleh orang-orang yang namanya ada di situ.”

“Jadi Mas Goen ditraktir Freedom untuk pasang iklan. *Lho*, bedanya apa dengan terima amplop. Yang satu *cash*, yang lain bukan? Gitu?”

“*Ah*, kamu terlalu agresif. Masa Mas Goen disamakan dengan wartawan amplop. *Kualat, Lu*! Bisa juga sudut pandangnya begini: ada sekelompok orang bersepakat dengan sesuatu. Lalu ide itu akan disampaikan ke masyarakat. Agar jelas, butuh ruang yang luas, yang tak mungkin disediakan oleh ruang berita sebagai produk jurnalistik. Lagipula, produk jurnalistik harus berimbang. Perlu ada opini-opini dan perspektif lain. Jadi lebih baik melalui iklan. Lebih efekif. *Gak* ada yang menginterupsi. *Gak* ada yang menyaingi argumentasinya.”

Dia serius mendengarkan. Aku pun serius melanjutkan.

“Lalu agar orang percaya bahwa argumentasi itu baik, maka dipasanglah nama-nama orang baik-baik. Intelektual terkenal. Sudah teruji pintar. Itu namanya *public endorser*. Meski ada satu-dua nama yang ternyata namanya dicatut. Letkol Untung juga main catut waktu memasukkan nama-nama orang dalam Dewan

Revolusi yang dibacakan di RRI tahun 1965."

"*Ah*, masa wartawan-wartawan senior itu justru tidak percaya dengan kekuatan jurnalisme sebagai jembatan komunikasi pada publik. Bukankah lebih kaya perspektif soal subsidi lebih bagus? Publik diajak berembug apakah BBM perlu disubsidi atau tidak, dengan berbagai argumennya. Apakah BBM sebaiknya diserahkan pada mekanisme pasar atau kita kembalikan pada amanat konstitusi. Apakah preskripsi-preskripsi neoliberalisme itu cocok atau tidak untuk konteks Indonesia hari ini...."

Dia tak menarik napas untuk melanjutkan ke kalimat berikutnya:

"....Untuk apa mereka punya produk jurnalistik, kalau justru lebih percaya dengan medium iklan yang *one way communication*? Medium yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang. Jadi iklan itu didukung kekuasaan uang, bukan supremasi ide. Bagaimana dengan intelektual lain yang punya pandangan berbeda tapi *nggak* punya uang untuk bayar iklan? Atau tidak ada yang mentraktir pasang iklan. Apakah *Kompas* secara moral akan mengakomodir-nya di kolom-kolom berita?"

"Sana, kamu tanya sendiri sama Mas Goen dan Pak Jakob? Aku bukan humasnya," jawabku agak kewalahan.

"Jadi menurut Mas, *Tempo* cukup independen?"

"Sebagai konsumen, aku cukup cerdas memisahkan kalau misalnya ada produk yang *delivery*-nya tidak independen. Lagipula kebijakan editorial *Tempo* menurutku bukan mendukung orang, tapi mungkin ide."

"Maksudnya?"

"Ide bahwa pilihan kebijakan ekonomi sebuah rezim belum

tentu seburuk yang disangka orang."

"Maksudnya neoliberalisme?"

"Jangan dulu masuk ke penamaan. Nanti kita terjebak di label-label-an. Stempel-stempelan. Yang pasti, *Tempo* memang menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu buruk. Ada juga sisi baiknya."

"Misalnya, Mas?"

Aku lalu mengambil majalah *Tempo* edisi 15-21 Juni 2009, dari tas. Majalah yang kubeli seharga Rp 24.700 di kios koran itu lalu kubuka di halaman 102-103, dan aku angsurkan pada bekas mahasiswa yang sekarang jadi wartawan penuh energi itu.

"*Nih*, coba kamu baca."

"*Kecil-kecil Jadi Primadona*..."

"Ya, artikel itu menarik. *Tempo* meliput bahwa perbankan sekarang mendukung usaha kecil menengah (UKM) dengan menyalurkan kredit. Bank-bank ini sekarang alokasi kredit mikro-nya untuk UKM semakin meningkat. *Outstanding*-nya semakin besar. Bukan hanya bank pasar atau BRI yang memang dari dulu segmennya pedesaan. Tapi juga Bank Mandiri dan Bank Danamon. Niatnya bukan karena jargon-jargon membantu *wong cilik*, tapi semata-mata—karena secara bisnis—kue penyaluran kredit di segmen ini segurih kredit korporasi besar. Kamu ngerti *nggak* aku ngomong apa?"

"*Ngerti dikit-dikit*, Mas. Makanya aku kurang bakat liputan ekonomi. Mending suruh nyari *taruna deh*. *Hehehe*..."

"*Ya*, sudah. Baca sana dulu. Baru kita diskusi."

Artikel itu juga memaparkan cerita yang sebenarnya sudah

lama, bahwa tingkat pengembalian kredit mikro ke perbankan sangat baik. Artinya, rasio kredit macetnya cuma 1-3 persen. Ini berarti, pengusaha kecil lebih taat dan disiplin membayar utang daripada konglomerat.

Lagipula, keuntungan bunga yang bisa diraup dari segmen ini lumayan tinggi, melebihi margin bunga dari kredit korporat. Dengan suku bunga efektif 20-24 persen per tahun, bank-bank komersial seperti BRI, Mandiri, Danamon, Bukopin, atau BTPN bisa memperoleh pendapatan bunga bersih 9-11 persen. Sementara kredit korporasi paling banter 3-4 persen.

Sudah banyak pengusaha kecil dan menengah yang diuntungkan dengan strategi bisnis perbankan seperti ini.

"Sudah, Mas."

"Jadi *gimana*? Mekanisme pasar tidak selalu buruk, kan? Bank-bank itu tidak mendasarkan motif menolong UKM. Mereka tak butuh pahala. Yang mereka lakukan adalah percaya bahwa saat ini segmen UKM adalah pasar yang empuk untuk disaluri kredit. Jadi itu motifnya harga dan pasar belaka. Motif bisnis murni. Tidak yang lain, apalagi akhirat. Tapi apa akibatnya? UKM-UKM tertolong. Pedagang pasar bisa pinjam uang bank dan mengembangkan bisnisnya, tanpa sarat-sarat yang berat seperti kolateral atau jaminan."

"Jadi Mas bilang, bahwa lewat liputan ini, *Tempo* mau bilang, bahwa mekanisme pasar itu tidak buruk, dan karenanya neoliberal bukan hantu yang perlu ditakuti. Dan itu berarti tak ada alasan menuding SBY-Boediono sebagai neoliberal? Begitu?"

"*Hahaha*... jangan terlalu jauh. Jangan-jangan tak ada niat dari wartawan *Tempo* menurunkan artikel itu, yang bisa ditafsirkan untuk menyampaikan pesan soal efektifnya mekanisme pasar ala Adam Smith atau Friedrich von Hayek. Itu hanya karena

otak kita yang tak bisa membedakan garis politik Goenawan Mohamad dan majalah yang dimilikinya itu. Sehingga ketika ada artikel biasa saja, lalu kita kaitkan secara negatif atau positif, sebagai sesuatu yang mendukung atau menolak neoliberalisme."

Bekas mahasiswaku itu membolak-balik halaman *Tempo*.

"Tapi sebentar, Mas. Ini ada wawancara Sri Mulyani dua halaman. Judulnya 'Pemerintah Tak Pernah Bisa Menjadi Neolib'."

"Ya, itu mungkin memiliki nilai berita. Jangan ditafsirkan yang macam-macam. *Angle* wawancaranya soal kenaikan harga minyak dunia. Apakah pemerintah akan menaikkan BBM, setelah menurunkannya tiga kali kemarin. Siapa yang *nggak* ingin dengar Menkeu ngomong soal itu. Aku *aja* ingin tahu, bensin akan naik atau tidak? Apakah aku harus membeli bensin untuk mobil tuaku dengan harga yang sama dengan sedannya Bu Menteri atau tidak."

"*Lha*, kalau begitu. Biar judulnya menjual, sekalian *aja* misalnya, menkeu titik dua, pemerintah tak akan naikkan harga BBM. Untuk apa sebut-sebut neolib dalam judul. Jadi yang dianggap *Tempo* punya nilai jual soal isu BBM-nya atau neolibnya. Jadi *nggak* salah *dong*, kalau kita tadi berpikir dalam *frame* neolib dan bukan neolib setiap kali membaca artikel *Tempo*. *Lha wong* mereka sendiri mengajak kita berpikir dengan *frame* itu. Mereka yang menyodor-nyodorkannya."

"*Hehehe*... bener juga kamu. *Tumben*. Atau di situlah kita justru bisa melakukan *content analysis* bahwa *Tempo* memang percaya bahwa isu subsidi, punya kaitan erat dengan *mindset* pemerintah soal kebijakan ekonomi. Dan *mindset* itu berkorelasi dengan mazhab-mazhab seperti neoliberalisme. Makanya ketika Mbak Ani bilang pemerintah tak mungkin pernah menjadi neolib, itulah yang di-*highlight* oleh *Tempo*."

"Mas sudah baca kolom opini yang ini?" Dia menunjukkan halaman 84-85 yang berjudul "Neoliberalisme dan Globalisasi". Penulisnya adalah Melli Darsa, yang predikatnya ditulis singkat: Ahli Hukum.

"Sudah."

"Apa isinya, Mas?"

"Kira-kira dia bilang bahwa neoliberalisme tidak buruk-buruk amat. Di bidang hukum, neoliberalisme membawa gagasan transparansi, termasuk produk-produk hukum yang mengatur ekonomi dan bisnis. *Good corporate governance*, misalnya, adalah salah satu dampak positif dari ide-ide neoliberalisme yang dibawa oleh Konsensus Washington."

"*Tuh, kan*..."

"Apanya yang *tuh*, kan? *Dengerin* dulu. Jadi menurut dia, ini adalah fenomena Globalisasi Ketiga. Di mana ide-ide seperti kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan (prudensial), penata-kelolaan perusahaan dan birokrasi yang bebas KKN, demokratisasi, dan reformasi hukum bidang keuangan negara, adalah aspek-aspek positif dari neoliberalisme."

"Penting *banget* ya, bagi *Tempo* untuk meng-*higlight* banyak hal di satu edisi ini saja, yang semuanya bermuara pada wacana neoliberalisme?"

"Barangkali karena mereka sadar bahwa semua orang sekarang sedang menyorot mereka. Sudah kadung. Jadi dibuka sekalian wacananya. Bagus *dong*!"

"Tapi di sini kan tidak ada wacana. Yang ada satu versi saja."

"Kita *kan* tidak tahu edisi sebelum dan setelahnya. Jangan-jangan setelah itu kolomnya ditulis oleh orang-orang yang

menunjukkan sisi negatif neoliberalisme di bidang hukum atau penata-kelolaan birokrasi dan korporasi."

"Mestinya kan semua itu ada dalam satu edisi, Mas. Mana bisa media mingguan mencicil keberimbangan seperti itu. *Emang* media *online* atau teve, main *running story*. Kalau minggu depannya atau minggu sebelumnya orang *gak* beli *Tempo*? Gimana *hayo*? Jangan salahkan kalau ada orang beli *Tempo* edisi ini saja, terus sebagai konsumen dia bilang: 'wah, *Tempo* pro-neolib *banget, nih*. SBY-Boediono *abis*!"

"Ya, itu risiko yang harus diterima *Tempo*. Konsumen adalah raja, *toh*?"

"Coba, kita lihat caping Mas Goen nulis apa..."

"Kurang lebih sama," sahutku sambil tersenyum.

"*Hah*?! Soal neoliberal juga?" sambarnya sambil buru-buru membuka majalah langsung dari belakang. Persis cara orang membuka kitab suci: membaliknya begitu saja

Di Indonesia, kitab suci Al-Quran masih ditaruh dengan posisi horizontal yang terbalik: depan di belakang, belakang di depan. Ini karena kebiasaan orang dengan buku-buku lain. Sehingga begitu ingin membuka dari depan, banyak orang justru membuka dari belakang. Maka mereka biasanya langsung membalik begitu saja, dan mulai membuka halaman pertama.

"*Berbagi,*" katanya membaca judul rubrik Catatan Pinggir alias caping.

"Ya, isinya. Di dunia yang katanya kapitalistik ini, menurut Mas Goen, orang ternyata tak selamanya saling menjahati. Dia mencontohkan, melalui internet orang bisa saling berbagai cerita, materi foto, atau pengetahuan seperti di *Wikipedia*."

"Iya, di bagian akhir dia menulis begini, Mas: 'Maka para pemikir murung (dan mereka yang mimpi jadi Che Guevara di ruang-ruang akademik) tak boleh mengatakan dengan geraham gemeretak bahwa kapitalisme adalah sistem yang menelan 'ruang kehidupan'. *Wah*, menyindir siapa nih, Mas? Menyindir orang-orang *kayak* Revrisond Baswir atau Herry Priyono?"

"Ya, mungkin saja. Dan pertarungan intelektual tetap selalu menarik, *kan*?"

"*Nih*, tulisannya ditutup dengan: 'Manusia sebenarnya tak terlampau buruk'."

"Apa yang salah?"

"*Wah*, apa kabar *tuh*, capingnya Mas Goen yang seperti "*The Death of Sukardal*" yang pernah Mas tunjuk-tunjukkan di kelas dulu sebagai salah satu contoh tulisan yang kuat dan memukau?"

"Penalaran itu berkembang. Ada proses dialektika. Karl Marx muda dan Karl Marx tua mengalaminya. Kata kawanku Samsul, anak *SCTV*, Adam Smith juga menerbitkan dua buku: yang pertama manusia adalah makhluk bermoral, meski juga mengejar kepentingan ekonomi. Sementara buku kedua menyatakan manusia adalah makhluk pasar."

"Penalaran boleh berkembang. Tapi fakta mana bisa ditafsirkan secara berbeda oleh subyek yang sama, Mas. Aku masih menyimpan kliping digitalnya di laptop. Perhatikan kutipan berikut:..."

"Itu membuktikan bahwa Goenawan Mohamad benar."

"Maksudnya?"

"Kamu bisa menyimpan sebuah tulisan bertarikh masehi 1986

tanpa membayar. Tinggal mengunduh dari blog-nya caping, lewat *google*. Manusia tak terlalu buruk, *toh*? *Hahaha*..."

"*Ah*, dasar penggemar GM. Ini aku bacakan, Mas.."

"Sukardal, 53, tukang becak mati gantung diri, karena becaknya tgl 2 Juli 1986 disita petugas tibum. Seorang dari sekian ratus ribu yang kehilangan mata pencarian di Indonesia. ia mati tapi tidak membisu. SUKARDAL menggantung diri pada umurnya yang ke-53."

"Beberapa saat sebelum mati, Sukardal menulis sepucuk surat wasiat. Ia bicara kepada anaknya yang sulung: "Yani, adikmu kirimkan ke Jawa, Bapak sudah tidak sanggup hidup. Mayatku supaya dikuburkan di sisi emakmu."

"Orang kecil adalah orang yang, pada akhirnya, terlalu sering kalah. Sukardal telah lewat setengah abad: sudah teramat tua untuk memilih kehidupan lain, terlampau tua untuk berontak. Tapi ia, yang tamat sekolah menengah, yang datang dari sebuah kampung di Yogya dan berdagang kecil di Jakarta, toh masih merasa perlu menuliskan pesannya. Ia mati, dan ia tidak membisu. Dan hidup kita, kata seorang arif bijaksana, terbuat dari kematian orang-orang lain yang tidak membisu."

"Lalu sekarang dia menulis bahwa manusia tak terlampau buruk?" dia masih menetak.

"Bukankah itu artinya memang tidak ada yang hitam putih?" tantangku, mulai panas.

"Letakkan di konteks besar, Mas. Letakkan di keseluruhan cerita bahwa pernah ada iklan dukungan mencabut subsidi yang di-*endorse* oleh GM. Bagaimana bila Sukardal tidak gantung diri karena becaknya disita Tibum. Bagaimana kalau dia gantung diri karena tak sanggup menghidupi keluarganya lagi akibat

pencabutan subsidi?"

Dia melanjutkan:

"Bagaimana kaum intelektual itu, mempertanggungjawabkan *public endorsement*-nya atas kenaikan BBM dan kemudian terjadi kejadian seperti Sukardal. Apakah manusia tidak terlalu buruk?"

Aku diam saja.

"Banyak kasus-kasus yang memang tak terkonfirmasi, Mas. Yang menunjukkan beberapa kasus bunuh diri, di mana menurut kesaksian-kesaksian orang terdekat, bahwa itu berkaitan dengan impitan beban hidup seputar kenaikan BBM. Akibat cabut subsidi.

Aku masih diam, dan mulai merengkuh gelas kopi.

"Ini ada laptop. Mas bisa ketik di *google* entri 'bunuh diri' dan 'BBM'. Ada kasus Jamaksari di Banten. Betul GM. Dunia kapitalis ini tak terlalu buruk. Buktinya di internet, kita bisa dengan mudah menemukan fakta-fakta itu. Termasuk GM."

Aku meletakkan gelas kopi di meja. Menyeka sudut bibir dengan tisu.

"Mas juga bisa ketik 'bunuh diri' dan 'uang sekolah'. Keluar semua kasus-kasus yang menghubungkan keduanya. Televisi pernah ramai menyiarkan ini, lalu kami putuskan tidak menayangkannya lagi karena khawatir menjadi inspirasi bagi anak-anak lain, yang juga punya masalah yang sama."

Aku tatap tajam-tajam mata bekas mahasiswaku itu.

"Bagaimana media menjelaskan ini semua? Dia memberitakan dampak dari sebuah kebijakan besar, yang gagal dia kawal secara kritis sejak di awal?"

"Jangan terlalu berat membebani media. *Don't blame the messenger*" aku akhirnya menemukan kata-kata.

"*Ah*, selalu begitu. Enak sekali jadi wartawan ini. Ketika sebuah kebijakan digulirkan, dia jadikan bahan berita. Begitu timbul dampak di masyarakat, dia tetap dapat pasokan berita. Kalau dampak buruknya sudah menimbulkan efek berantai, dia hentikan dengan alasan tak ingin menginspirasi orang lain berbuat negatif. Lalu tak lama kemudian, semuanya dilupakan karena ada kebijakan-kebijakan yang lebih baru."

"Media tak seburuk itu. Penderitaan rakyat kecil selalu dipotret dan malpraktik tata praja juga dikritisi. Metta Dharmasaputra dari *Tempo* gigih menginvestigasi kasus penggelapan pajak Asian Agri. Aku bantu menjaga isunya dari pinggiran, sebisanya."

"*Oke*. Tapi itu kan kritisisme pada malpraktik sistem. Bukan pada sistem itu sendiri. Banyak berita-berita humanis yang sebenarnya komoditas belaka. Nasi aking, gizi buruk, antre BLT, demo BBM, semua adalah cerita seru di layar televisi. Gambarnya dramatis. Jadi pasti ditayangkan. Gak usah khawatir soal itu."

"Lalu apa maksudmu? Berita BLT dikritisi dengan keras. Orang-orang tua antre, pingsan, termasuk ketika BPK menyatakan bahwa BLT itu dibiayai dari utang luar negeri. *SCTV* cukup kreatif ketika menjahit berita antrean BLT dengan ironi orang-orang kaya antre memborong sepatu yang sedang diobral di sebuah pusat perbelanjaan." aku mulai meninggi."

"Itu hanya *show*! Lagi pula obral atau *sale* sepatu itu ada di Senayan City yang kebetulan satu gedung dengan *SCTV*. *Nothing special, Bro*!"

"Ya, tapi *show* yang menarik dan mengajak orang berpikir. Berkontemplasi. Berefleksi, bahwa kesenjangan sosial adalah

persoalan serius, dan apakah BLT bisa menyelesaikan itu. Televisi adalah media kemasan. Bagaimana bisa mengajak orang mengerti, kalau menonton saja tidak. Nah, agar menonton, harus ada yang menarik. Kamu lulus tidak mata kuliah itu?"

"*Aha*, itu cuma pikiran Mas saja sebagai kelas menengah terdidik. Orang ramai, pasti hanya menangkap pesan soal kesenjangan dari gambar yang ditayangkan. Itu sudah paling *mentok*. Soal apakah BLT bisa menjembatani kesenjangan itu; apakah uang Rp 300 ribu itu bisa mengejar efek inflasi yang dihasilkan akibat pencabutan subsidi; dan apakah BLT itu hanya gula-gula menjelang pemilu, seperti halnya gaji ke-13 pegawai negeri, itu tak akan dipikirkan orang awam."

"Kamu jangan meremehkan kecerdasan masyarakat."

"Tidak, aku justru meremehkan kecerdasan kita-kita yang bekerja di media ini, yang gagal menjadi katalis yang baik, untuk menjelaskan ruh dari sebuah kebijakan ekonomi. Kita kurang menjelaskan bahwa BLT adalah solusi jangka pendek yang tahun depan belum tentu ada dananya. Kita juga kurang kritis ketika BLT dijadikan komoditas politik *incumbent* untuk meraih dukungan di kalangan *grass root* misalnya. Atau gaji ke-13 dipakai menyihir PNS yang kemudian *termehek-mehek* memilih *incumbent*."

"*Ah*, tak usah bias dengan figur *incumbent*-nya. Siapa pun yang jadi *incumbent*, pasti akan menggunakan cara-cara yang sama. Ini masih Indonesia yang sama, Anak muda..."

"*Nah*, justru itu tugas media. Bukan karena lazim, lantas dianggap bukan persoalan. Media membesar-besarkan realitas BLT sebagai dewa penolong. Media kurang menyuguhkan gambar besar bahwa ada yang lebih bermanfaat untuk rakyat, bila pemerintah melakukan A, B, C, D, tanpa perlu membagi-bagikan uang kontan."

“Tapi itu benar-benar berguna. Kamu yang bias. Karena punya gaji di atas UMR, merasa tak butuh BLT. Orang di kampung-kampung?”

“Candu selalu bermanfaat, Mas! Tapi kan semu. Jangka pendek. Kalau BBM dinaikkan, lalu ada uang kontan dibagikan, semua juga setuju itu ada manfaatnya. Tapi kan berpikirnya tak boleh situasional begitu saja. Jangan-jangan kalau kebijaikan ekonominya *bener*, subsidinya tak perlu dikurangai. BBM-nya tak perlu naik. Sehingga meski tak ada acara bagi-bagi uang kontan, rakyat tak terbebani hidupnya dengan kenaikan harga.”

“Lalu apa menurutmu media tidak memberikan itu semua?”

“Yang diberitakan media adalah ekses-ekses dari sebuah pilihan kebijakan. Efek samping sebuah pilihan sistem. Itu yang dikritisi media dengan heroik. Media gagal mengkritisi sistem itu sendiri. Substansinya. Gambar besarnya. Jadi media adalah pemadam kebakaran.”

“Konkretnya *gimana*?”

“Lihat saja, betapa banyak wartawan yang tak puas dengan medianya dan menulis buku. Karena memang ruang untuk penalaran di media makin hari makin sempit saja. Semuanya berorientasi peristiwa, peristiwa, dan peristiwa. Padahal semua tahu, bahwa peristiwa dengan mudah bisa diciptakan oleh siapa saja yang berkepentingan. Semua menuhankan *news peg*. Kalau tak ada sangkutan peristiwa, sebuah wacana tak akan sampai ke publik!”

“Itu ajaran jurnalistik. Pintu masuk sebuah wacana didahului sebuah peristiwa. Peristiwa membantu orang mengasosiasi dan mencerna sebuah wacana dengan lebih mudah. Wacana hak-hak konsumen akan majal disuguhkan tiba-tiba bila tanpa dipicu kasus Prita!”

"Tapi tak usah jadi dogma, *dong*. Itu namanya fundamentalis. Kalau peristiwa itu digeser begitu saja dengan *agenda setting* para elit atau konsultan politik? Apa kita lantas menerapkan jurnalisme laron, ramai-ramai berpindah isu. Apa kita tunduk begitu saja atas nama *news peg*? Apa kita perlu menunggu orang pingsan di depan kantor pos, atau rakyat marah-marah di kantor kepala desa karena BLT-nya dipotong, untuk mengkritisi kebijakan politik gula-gula seperti itu?"

"Jadi harus bagaimana menurut konsep pemberitaanmu?"

"Media, harus bisa mengaitkan cerita antara penyelundupan BBM, isu Blok Cepu, atau korupsi minyak Zatapi, misalnya, dengan urusan BLT. Jadi rakyat sampai pada kesimpulan cerdas, bahwa BLT muncul akibat politik perminyakan yang *ngawur*."

"Berat amat!"

"Memang berat. Yang ringan ya Manohara. Cerita BLT bisa juga dirangkai dalam gambar besar tentang politik subsidi yang timpang. Subsidi tim sepak bola atau bankir BLBI. Jadi jangan hanya peneliti, periset, atau penulis buku saja yang bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Dalam sebuah berita, rakyat biasa harus bisa menangkap itu semua. Kalau tidak dalam satu berita, setidaknya dalam satu edisi, satu halaman, satu segmen, atau satu program berita yang sama."

"*Ah*, seperti utopia. Bisa habis durasi untuk berita ekonomi. Padahal pembaca atau penontonnya belum tentu banyak. Aku belum bisa membayangkan format berita seperti itu. Apa yang kau bayangkan media tambil sebagai jurnal yang membedah kebijakan pembangunan? Atau menurutmu kita harus jadi filsuf kebijakan ekonomi? Siapa yang mau baca atau nonton? Realistis *dong*..."

"Oh, Tuhan. *Sampean* sudah terhegemoni, Mas. Justru di situlah jebakannya. *Sampean* tanpa sadar sudah percaya dengan

fundamentalisme pasar. *Sampean* yang katanya anti-neoliberal, percaya bahwa pasar pasti menolak suguhan media yang seperti itu. Bahwa pasar suka yang dangkal-dangkal seperti Manohara atau Ryan. Bahwa pasar lebih suka tontonan demo BBM yang ribut atau nenek-nenek pingsan dalam antrean BLT."

"Itu diyakini semua orang, dari wartawan di lapangan sampai pemilik televisinya. Pemasang iklan, biro iklan, dan semua saja. Itu adalah pintu masuk agar berita dibaca atau ditonton."

"Pintu masuk? *Oke*. *Fine*! Lalu setelah masuk? Ya itulah. Kita mengecam fundamentalisme agama, tapi di saat yang sama kita menjadi fundamentalis pasar. Kita afirmasi ideologi itu tanpa terasa. Gramsci sudah mengingatkan ini. Hegemoni."

Hmm... Antonio Gramsci, batinku.

"Mas sendiri yang bilang, bahwa frekuensi televisi itu milik publik. Tapi yang terjadi apa, frekuensi itu dikomodifikasi sedemikian rupa, sehingga semua harus layak jual. Berita harus punya *rating* tinggi. Padahal *news* itu adalah *social service*. Semua televisi waktu diberi frekuensi punya *social obligation* harus menyediakan *public content*, dan tidak boleh semua durasinya dikomersialkan. Tapi apa yang terjadi?"

Aku terdiam, lagi.

"Mas sudah ungkap semuanya bagaimana pidato SBY digelontorkan begitu saja di program berita reguler seperti Liputan 6 *SCTV* dan lalu disusul televisi-televisi lain. Mas juga yang menulis artikel ketika *RCTI* dan *Metro TV* patut diduga melanggar aturan kampanye dengan menyiarkan kampanye SBY dan JK sepanjang 30 menit. Aku baca itu semua."

Aku masih diam.

"Bagaimana Mas meletakkan itu semua dalam gambar

besar. Sistem besar relasi media dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat kita sekarang. Nilai-nilai bahwa yang tidak komersial pasti buruk untuk publik. Bahwa yang tidak komersial adalah distorsi ekonomi. Ekonomi yang semu. Bahwa biarlah semua berjalan secara komersial karena pada akhirnya akan tercipta tatanan yang harmonis."

Aku menarik napas panjang.

"Neoliberalisme percaya, bahwa media akan menghasilkan berita-berita bagus karena mereka bersaing antar-sesama. Bersaing secara bisnis. Mekanisme pasar. Investigasi yang cemerlang akan dihasilkan wartawan dan didukung media yang tak selamanya karena ingin masuk surga. Tapi untuk mendongkrak oplah, menaikkan *rating*, dan pada akhirnya memukul pesaing. Membiayai investigasi dianggap investasi bisnis. Bukan keberpihakan pada publik."

"Semuanya bermuara pada pencarian uang. Motif ekonomi. Bahwa publik akan terbantu dengan pemberitaan itu, bahwa ada koruptor yang dibui, atau uang negara yang terselamatkan, itu adalah ekses. Bukan tujuan. Itukah yang ada di pikiranmu sekarang, Mas?"

Aku menghindari tatapan matanya.

"Mestinya kan harus dibalik. Keuntungan bisnis adalah ekses dari kerja-kerja tulus yang bagus untuk publik. Bila liputan-liputan kita cemerlang, publik merasa mendapat manfaat, maka koran pun akan dibeli. Televisi akan ditonton. Dengan begitu *rating* naik, oplah bertambah. Pemasang iklan berdatangan. Duit pun mengalir."

Dia menyambung, "Mas, watak neoliberal itu ada dalam tubuh media. Dalam institusi bisnis kita, dalam pemberitaan kita, dalam kepala kita. Kalau ada yang mengaitkan media dengan neoliberalisme, tak perlu jauh-jauh menggeledahnya dengan

premis apakah media itu mendukung Boediono atau tidak. Apakah media mendukung kebijakan ekonomi *incumbent* atau tidak. Tapi geledah saja bagaimana praktik jurnalisme dan cara pandang orang-orangnya. Dari wartawan sampai pemilik."

"Media adalah industri yang harus hidup juga, *toh*?" akhirnya aku bicara lagi,"yang terjadi adalah kombinasi antara motif ekonomi-bisnis dan motif kerja-kerja untuk kepentingan publik. Tak ada sekat yang tajam. Tak ada yang hitam putih. Jadi tak perlu dibenturkan diametral seperti itu."

Aku melanjutkan, "Banyak juga media yang tetap menurunkan berita tertentu, meski dia yakin tak laku atau diminati orang ramai. Tapi berita itu penting bagi pengambil kebijakan. Jadi ada kalanya, ruang redaksi melakukan intervensi pada arus utama pasar. Menentang keinginan pasar. Seperti negara juga. Tarik ulur. Kadang swasta, kadang negara. Agar ekonomi tidak terdistorsi dan semu."

"*Nah*, jadi pasar tak boleh mutlak kan? Dalam hal-hal tertentu di mana soal hajat hidup orang banyak perlu dilindungi, negara harus ambil peranan. Jadi subsidi BBM, pendidikan, atau kesehatan, air, listrik, bukan distorsi ekonomi. Bukan ekonomi semu, hanya gara-gara masyarakat tak membayar dengan harga pasar. Harga murah tak selamanya karena subsidi. Harga murah bisa saja karena manajemennya melakukan efisiensi dan sektor itu tidak jadi sarang korupsi. Jadi simpan saja dulu ceramah tentang mendidik rakyat dengan mengurangi subsidi. Didik saja dulu para pejabat publik dan kaum profesional agar tidak korupsi dan mencari rente dari kegiatan ekonomi."

Kali ini lidahku terkunci.

"Lagi pula, *ngomong-ngomong* soal ekonomi semu dan terdistorsi, justru sebaliknya. Merekalah, kaum *neolibers* itu, yang menciptakan ekonomi semu. Pertumbuhan ekonomi semu, karena aktifitas finansial dan modal tak mencerminkan

kehidupan ekonomi riil masyarakat."

Lanjutnya, "Hubungan antar-manusia juga semu semuanya. Bawahan dengan atasan berbaik hati karena motifnya takut dipecat. Hubungan perusahaan dengan konsumennya juga tidak tulus karena semuanya berbasis komersial. Senyum manis di awal kepada konsumen, begitu menulis surat pembaca, nasibnya seperti Prita Mulyasari. Itulah yang semu. Itulah yang distorsi."

Aku menarik napas lebih panjang. Lebih dalam.

"Aku lebih senang disebut mendistorsi ekonomi dengan subsidi, daripada mendistorsi kemanusiaan atas nama ekonomi dan komersialisasi. Selamat sore, Mas! Aku mau balik ke kantor. *Deadline*!"

Dia mengemasi laptop. Langsung beranjak setelah menyalamiku. Aku tak mencegah. Aku kenal betul anak ini. Di waktu yang tepat, aku akan menghubungi dia kembali.

Bagaimana mungkin aku menemukan sesuatu yang ada pada diriku, justru melalui orang lain. Dan temuan itu adalah: aku wartawan, karena itu neolib.

***

Penulis

DANDHY DWI LAKSONO

Pria kelahiran Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976. Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung. Pendidikan non formal ia peroleh dari *Ohio University Internship Program on Broadcast Journalist Covering Conflict*, Amerika Serikat (2007) dan *British Council Broadcasting Program*, London (2008). Ia juga ikut berbagai workshop dan seminar tentang jurnalistik/media di Filipina, Thailand, China, Malaysia, dan Korea Selatan.

Dandhy, sapaan akrabnya, memulai karir jurnalistik pada 1998 di tabloid *Kapital* dan majalah *Warta Ekonomi*. Ia lalu beralih ke media radio, *Pas FM*, *Smart FM, Ramako*, atau menjadi *stringer* di radio *ABC* Australia. Lalu pindah lagi ke televisi menjadi produser berita di Liputan 6 *SCTV* dan Kepala Seksi Peliputan di *RCTI*. Ia juga pernah memimpin majalah dan situs *acehkita.com*—sebuah media alternatif di masa pemberlakuan darurat militer di Aceh (2003-2005).

Selama menjadi wartawan ia banyak melakukan liputan investigasi. Di antaranya, Aset-aset Bodong PT Sagared: Skandal BNI (2004), Perdagangan Ginjal Indonesia-Singapura (2007), Kasus Pajak

Asian Agri (2007-2008) dan lain-lain. Hasil liputan investigasinya tentang Pembunuhan Munir dinobatkan sebagai karya terbaik dalam Apresiasi Jurnalis Jakarta 2008 yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.

Selain itu, ia pernah meraih penghargaan dalam beberapa lomba jurnalistik. Tahun 1998 meraih Juara 1 lomba penulisan tentang Pendidikan di Universitas Padjajaran. Tahun 2002 memenangi kompetisi penulisan di Bursa Efek Jakarta (*Anjing Penjaga di Lantai Bursa*). Kemudian karya dokumenternya berjudul *Illegal Logging in Leuser Edge* dinobatkan sebagai pemenang dalam British Council Broadcast Competition 2008.

Sebagian waktunya ia curahkan untuk berbagi ilmu dengan mengajar mata kuliah jurnalisme dan televisi di London School of Public Relations (LSPR) dan STIE IBI (Institut Bisnis Indonesia). Ia juga dosen tamu di Universitas Indonesia untuk mata kuliah Jurnalisme Investigasi.

Buku ini adalah karya pertamanya yang bertema ekonomi. Sebelumnya ia lebih terbiasa menulis buku-buku tentang jurnalisme, di samping berbagai tulisan untuk media cetak seperti *Koran Tempo*, *The Jakarta Post, Surya,* atau *Suara Pembaruan*. Kini ia memilih berkegiatan sebagai penulis lepas dan membuat film dokumenter. Ia bisa dihubungi di: *deenda1@yahoo.com*

Editor

HADI RAHMAN

Lahir di Gresik, Jawa Timur, 2 Juli 1979. Alumni Pesantren Ilmu Al-Quran (PIQ) Singosari Malang. Sejak di bangku sekolah sudah menggeluti dunia jurnalistik dengan bergabung di majalah *Insan* dan turut mendirikan majalah *Al-Fikr*. Tahun 1998 kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta sembari bekerja di beberapa media. Pernah menulis suplemen ekbis di majalah *Pilarbisnis* dan majalah berbahasa Arab *Alo Indonesia*. Tahun 2004 ia tampil sebagai penulis terbaik dalam Lomba Penulisan Jurnalistik PLN.

Selepas berkarir di tabloid *Peluang*, ia memimpin tim redaksi majalah dan situs online dwibahasa (Indonesia-Inggris) *Primetax Review*. Ia lalu menjadi redaktur kompartemen majalah berita mingguan *Forum Keadilan*. Setelah itu bermukim di Aceh sebagai produser ekskutif radio *Peunegah Aceh*—yang disiarkan se-Asia Pasifik—sekaligus pelaksana program pengembangan media *Internews*. Kembali ke Jakarta, ia menggarap jurnal investigasi *Reportase*. Belakangan, tenaganya banyak digunakan sebagai analis dan konsultan media.

Ia juga merupakan konsultan komunikasi publik untuk beberapa korporat, instansi pemerintah, serta lembaga internasional. Chemonics Inc., Swisscontact, GTZ, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain-lain pernah memakai jasanya. Bendahara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta ini sekarang mengelola *KOJI Communications*—mitra strategi komunikasi dan *media management services*. Di luar itu, ia mengasuh majlis ta'lim di Jakarta dan Tangerang.

Di bidang perbukuan, ia telah menangani lebih dari 20 judul buku. Misalnya, buku biografi Menteri/Pangau Sri Mulyono Herlambang, biografi KH Basori Alwi: Sang Guru Quran, biografi KH Muhamad Iljas: Dari Pesantren untuk Bangsa, Panduan Hukum untuk Jurnalis, *Handbook for News Manager in Disaster Area*, Meliput Usaha Kecil, Aparat Hukum Melek Pers, dan lain-lain. Ia bisa dikontak di: *hadirahman@yahoo.com*.

WATCH
DOC

INDONESIA FOR SALE

Nasionalisme dan kesejahteraan, atau tegaknya ekonomi, adalah senyawa dalam membangun sebuah bangsa sejati. Orang tak mungkin dipaksa mengerek bendera dengan perut lapar. Sebaliknya, sungguh nista menjual bendera bangsanya demi urusan perut belaka. Nasionalisme tak boleh dijadikan dalil sahih untuk menanggalkan semangat kebangsaan, apalagi sampai mengkomersialkannya. Amatlah tidak elok, jika demi perut kenyang, tanpa sadar kita melilitkan tali gantungan kepada anak cucu sendiri.

Sejarah telah mencatat bahwa kesejahteraan yang diciptakan Orde Baru sejatinya adalah semu. Kesejahteraan yang kita rasakan kala itu ternyata menjadi semacam opium yang membius kesadaran kita: saat tertidur kekenyangan, tanah ladang kita tiba-tiba telah tergadaikan. Saat terbuai mimpi indah, tak dinyana sumber-sumber penghidupan kita menjelma jadi surat utang. Saat kita terlelap mesra, tanah air yang dulu direbut kakek-nenek kita dengan darah tiba-tiba ditumbuhi tanaman belukar berwujud dolar.

Penerbit Jalan Baru
ISBN: 9786025149801